

KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DALAM PROGRAM *SMART FISHERIES VILLAGE* (STUDI KOMPARASI DESA KAWALI DAN DESA BANGSRING)

ASY KHOFSAH



**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Komunikasi Partisipatif dan Aksi Kolektif dalam Program *Smart Fisheries Village* (Studi Komparasi Desa Kawali dan Desa Bangsring)” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2026

Asy Khofsah
I3502241015

@Hak cipta milik IPB University

IPB University

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

ASY KHOFSAH. Komunikasi Partisipatif dan Aksi Kolektif dalam Program *Smart Fisheries Village* (Studi Komparasi Desa Kawali dan Desa Bangsring). Dibimbing oleh SARWITITI SARWOPRASODJO dan SITI AMANAH.

Sektor kelautan dan perikanan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Di saat yang sama, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih menghadapi kemiskinan struktural dan kultural. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan pemerintah, namun hasilnya belum optimal karena pendekatan yang diterapkan cenderung bersifat *topdown* dan belum selaras dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan partisipatif berbasis kebutuhan lokal.

Desa Kawali di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dan Desa Bangsring di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pendekatan partisipatif. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan lokal mampu mendorong keberlanjutan program. Melalui praktik di kedua desa, penelitian ini bertujuan menganalisis katalis yang memengaruhi komunikasi partisipatif, proses terbentuknya komunikasi partisipatif, pembentukan aksi kolektif, pelaksanaan aksi kolektif, serta pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif. Penelitian ini juga membandingkan seluruh variabel tersebut di kedua desa. Kedua desa tersebut memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya, serta sistem perikanan dan kelautan yang berbeda.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan analisis kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap 85 sampel di masing-masing desa, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan kunci, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan *partial least squares-structural equation modeling* (PLS-SEM), *multi-group analysis* (MGA), dan *importance-performance map analysis* (IPMA). Analisis kualitatif dilakukan menggunakan NVivo 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah merupakan katalis yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap komunikasi partisipatif di Desa Kawali, sedangkan komunikasi kepemimpinan menjadi katalis utama di Desa Bangsring. Perbedaan tersebut dikonfirmasi melalui uji MGA yang menunjukkan adanya perbedaan katalis dialog komunitas pada kedua desa. Perbedaan dipengaruhi oleh sejarah pembangunan, karakteristik sosial budaya, serta struktur kelembagaan masyarakat. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peran penyuluh berpengaruh negatif terhadap dialog komunitas di Desa Kawali, sedangkan di Desa Bangsring tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Keputusan inovasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas pada kedua desa.

Menariknya, perbedaan katalis tidak melahirkan pola komunikasi partisipatif maupun aksi kolektif yang berbeda. Desa Kawali yang berkembang melalui pendekatan *government driven* diperkirakan menghasilkan dialog yang lebih bersifat konsultatif karena dipengaruhi oleh arah kebijakan dan fasilitasi

pemerintah. Sebaliknya, Desa Bangsring yang berkembang melalui pendekatan *community driven* diperkirakan membentuk dialog yang lebih deliberatif karena bertumpu pada inisiatif masyarakat dan kepemimpinan lokal. Menariknya, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua desa sama-sama mengembangkan dialog yang mengarah pada proses deliberatif melalui musyawarah, pembelajaran sosial, dan pencarian kesepahaman bersama. Perbedaannya terletak pada sumber katalis yang memicu dialog, bukan pada mekanisme dialog maupun bentuk aksi kolektif yang dihasilkan. Anggota kelompok berpartisipasi aktif pada kegiatan operasional, sedangkan keterlibatan dalam aspek strategis masih perlu diperkuat, terutama pada pelibatan pemangku kepentingan di luar kelompok, mobilisasi sumber daya, dan evaluasi partisipatif. Kepemimpinan kelompok masih mendominasi pengambilan keputusan strategis sehingga keterlibatan anggota dalam membangun jejaring eksternal dan evaluasi partisipatif relatif terbatas. Di Desa Kawali, pembangunan partisipatif menghasilkan inovasi varietas ikan Nila Rangu yang meningkatkan produktivitas budidaya, pendapatan kelompok perempuan melalui pengolahan hasil perikanan, serta mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah di luar kelompok penerima manfaat. Di Desa Bangsring, pembangunan partisipatif menghasilkan keberhasilan konservasi, usaha budidaya lobster, wisata bahari, serta berbagai usaha ekonomi lokal yang mampu menyerap sekitar 1500 tenaga kerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi partisipatif dalam Program SFV dapat dibangun melalui dua jalur katalis yang berbeda, yaitu pendekatan *government driven* di Desa Kawali dan pendekatan *community driven* di Desa Bangsring. Terlepas dari perbedaan katalis yang mendasarinya, kedua pendekatan tersebut sama-sama mampu membentuk dialog komunitas yang mendorong lahirnya aksi kolektif dan menghasilkan perubahan sosial di masyarakat. Sebagai upaya mengoptimalkan dialog komunitas dan aksi kolektif, penelitian ini menyajikan strategi penguatan berdasarkan hasil *Importance-Performance Map Analysis* (IPMA). Penguatan komunikasi partisipatif diarahkan pada peningkatan kualitas dialog deliberatif dalam proses adopsi inovasi, disertai dengan penguatan peran pemerintah pada konteks *government driven* dan komunikasi kepemimpinan pada konteks *community driven*. Penguatan aksi kolektif dilakukan melalui optimalisasi forum dialog formal, informal, kelompok, maupun interpersonal serta penguatan modal sosial yang mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. Model dialog komunitas dan aksi kolektif yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pembangunan partisipatif pada komunitas kelautan dan perikanan yang memiliki karakteristik serupa dengan Desa Kawali dan Desa Bangsring. Temuan penelitian ini juga membuka peluang untuk menguji model yang dikembangkan pada komunitas kelautan dan perikanan dengan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda sehingga validitas dan cakupan penerapannya dapat semakin diperluas.

Kata kunci: aksi kolektif, komunikasi partisipatif, pembangunan desa, *smart fisheries village*

SUMMARY

ASY KHOFSAH. Participatory Communication and Collective Action in Sustainable Fisheries Village Development. Supervised by SARWITITI SARWOPRASODJO and SITI AMANAH.

The marine and fisheries sector makes a substantial contribution to Indonesia's gross domestic product (GDP). However, this contribution has not been accompanied by proportional improvements in the welfare of coastal communities, which continue to experience structural and cultural poverty. Although the government has implemented various development programs, their outcomes have remained suboptimal because these initiatives have largely relied on topdown approaches that are insufficiently aligned with local needs. Consequently, there is a need to promote participatory development grounded in local priorities and community needs.

Kawali Village in Ciamis Regency, West Java Province, and Bangsring Village in Banyuwangi Regency, East Java Province, represent successful examples of participatory development. Their achievements demonstrate that development initiatives oriented toward local needs can enhance program sustainability. Drawing on the experiences of these two villages, this study aims to examine the catalysts that influence participatory communication; the process by which it is established; the formation and implementation of collective action; and the influence of social capital on collective action. The study also compares these variables across the two villages, which differ considerably in their geographical, socio-cultural, and marine and fisheries systems.

This study employed a quantitative approach strengthened by qualitative analysis. Quantitative data were collected through surveys involving 85 respondents in each village, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with 28 key informants, field observations, and document analysis. Quantitative data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Multi-Group Analysis (MGA), and Importance–Performance Map Analysis (IPMA). Qualitative data were analyzed using NVivo 12.

The findings indicate that government support is the primary catalyst, positively and significantly influencing participatory communication in Kawali Village, whereas leadership communication is the principal catalyst in Bangsring Village. These differences were confirmed through MGA, which revealed statistically significant differences in the catalysts of community dialogue between the two villages. Such variations are shaped by differences in development trajectories, socio-cultural characteristics, and institutional structures. The results further show that the fisheries extension workers' role has a significant negative effect on community dialogue in Kawali Village, whereas no significant effect was observed in Bangsring Village. Innovation decision-making was not found to have a significant influence on community dialogue in either village.

Interestingly, differences in developmental catalysts did not result in distinct patterns of participatory communication or collective action. Kawali Village, which evolved through a government driven approach, might be expected to exhibit a more consultative form of dialogue due to the influence of government policies and

facilitation. In contrast, Bangsring Village, which developed through a community driven approach, might be expected to foster a more deliberative dialogue rooted in community initiative and local leadership. However, the findings reveal that both villages have developed deliberative forms of dialogue characterized by collective deliberation (*musyawarah*), social learning, and consensus-building. The principal distinction lies in the catalysts that initiate community dialogue rather than in the dialogue mechanisms or the forms of collective action produced. Group members actively participate in operational activities, whereas participation in strategic decision-making remains relatively limited, particularly regarding engagement with external *stakeholders*, resource mobilization, and participatory evaluation. Strategic decisions continue to be dominated by group leaders, thereby limiting members' involvement in developing external networks and participatory evaluation processes. In Kawali Village, participatory development generated innovations such as the *Nila Rangu* tilapia variety, which enhanced aquaculture productivity, increased the income of women's groups through fisheries product processing, and stimulated the growth of micro, small, and medium enterprises beyond the direct beneficiary groups. In Bangsring Village, participatory development contributed to successful marine conservation, lobster aquaculture, marine ecotourism, and various local economic enterprises, collectively generating employment for approximately 1500 people.

This study demonstrates that participatory communication within the Smart Fisheries Village (SFV) Program can be established through two distinct catalytic pathways: a government driven approach in Kawali Village and a community driven approach in Bangsring Village. Despite relying on different catalysts, both pathways successfully foster community dialogue that stimulates collective action and generates social change. To optimize community dialogue and collective action, this study proposes strengthening strategies based on the findings of the Importance-Performance Map Analysis (IPMA). Enhancing participatory communication should focus on improving the quality of deliberative dialogue throughout the innovation adoption process, while reinforcing the role of government within government driven contexts and strengthening leadership communication within community driven contexts. Collective action can be further enhanced by optimizing formal, informal, group-based, and interpersonal dialogue platforms, alongside strengthening social capital to broaden community participation in strategic decision-making. The community dialogue and collective action model developed in this study provides a practical reference for participatory development initiatives in marine and fisheries communities with characteristics comparable to those of Kawali and Bangsring Villages. Furthermore, the findings offer opportunities for future research to validate and refine the proposed model across marine and fisheries communities with diverse socio-cultural and institutional characteristics, thereby extending its applicability and generalizability.

Keywords: collective action, participatory communication, rural development, Smart Fisheries Village



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2026
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DALAM PROGRAM SMART FISHERIES VILLAGE (STUDI KOMPARASI DESA KAWALI DAN DESA BANGSRING)

ASY KHOFSAH

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains pada
Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tim Penguji pada Ujian Tesis:

1. Prof. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si.
2. Dr. Dwi Retno Hapsari, S.P., M.Si.



Judul Tesis : Komunikasi Partisipatif dan Aksi Kolektif dalam Program
Smart Fisheries Village (Studi Komparasi Desa Kawali dan
Desa Bangsring)

Nama : Asy Khofsah

NIM : I3502241015

Disetujui oleh

Pembimbing 1:

Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, MS.



Pembimbing 2:

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan:

Dr. Dwi Retno Hapsari, SP. M.Si.

NIP. 1985100 9201404 2 001



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekologi Manusia

Prof. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt. M.Si.

NIP. 1978100 3200912 1 003



Tanggal Sidang: 3 Juli 2026

Tanggal Pengesahan: 05 AUG 2026



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada *Allah subhānahu wa ta'ālā* atas segala karunia-Nya sehingga tesis berjudul “Komunikasi Partisipatif dan Aksi Kolektif dalam Program *Smart Fisheries Village* (Studi Komparasi Desa Kawali dan Desa Bangsring)” dapat diselesaikan dengan baik. Keberhasilan menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan komisi pembimbing selama merencanakan penelitian, pengambilan data lapang, pengolahan data hasil lapang, interpretasi hasil lapang, hingga menjadi karya tulis ilmiah yang layak dipublikasi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ketua komisi pembimbing yakni Dr. Ir. Sarwititi Sarwoprasodjo, M.S. dan anggota komisi pembimbing yakni Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen moderator kolokium Dr. Annisa Utami Seminar, S.IP., M.Si., dosen moderator seminar hasil Prof. Dr. Ir. Lilik Noor Yulianti, M.F.S.A., dosen penguji luar komisi pembimbing yakni Prof. Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si., atas masukan yang membangun yang diberikan untuk tesis saya. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada ketua program studi Dr. Dwi Retno Hapsari, SP., M.Si. yang telah berkenan memimpin jalannya persidangan tesis. Tanpa mengurangi sedikitpun rasa hormat peneliti, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen Program Studi Magister Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan atas ilmu yang diberikan.

Ucapan terima kasih tanpa batas juga disampaikan kepada Ibunda Kusmiatun, atas segala pengorbanan, doa yang tidak pernah putus, dan kasih sayang yang tulus. Tesis ini adalah salah satu persembahan terbaik dan wujud bakti penulis sebagai balasan atas keringat dan kesabaran yang senantiasa Ibu berikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Whais Al Qorni dan adik Ummi Murthosima yang atas dukungan moral dan doa-doa terbaik tanpa henti.

Studi ini terlaksanakan berkat dukungan penuh dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tesis ini juga terwujud berkat kebesaran hati anggota kelompok dan informan untuk membagikan pengalaman dan pandangannya dengan sabar sehingga penulis dapat memahami secara utuh pembangunan yang dilakukan di pedesaan. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar Bogor, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Desa Kawali, dan Desa Bangsring karena telah memberikan akses penuh kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada teman-teman Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan angkatan 61, yang telah menjadi bagian dari proses belajar. Mulai dari diskusi di kelas dan perpustakaan hingga begadang bersama. Tesis ini tidak akan selesai tanpa tawa dan dukungan kalian.

Bogor, Agustus 2026

Asy Khofsah



@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Komunikasi Partisipatif <i>Communication for Social Change</i>	5
2.1.1 Katalis Sebagai Pendorong Dialog komunitas	6
2.1.2 Dialog Kelompok dalam Mendorong Aksi Kolektif	11
2.1.3 Aksi Kolektif Menuju Perubahan Sosial	12
2.2 <i>Smart Fisheries Village Program</i>	15
2.3 <i>State of the Art</i>	15
2.4 Kerangka Pemikiran	18
2.5 Hipotesis Penelitian	20
III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Paradigma Penelitian	21
3.2 Desain Penelitian	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.4 Populasi dan Sampel Responden	21
3.5 Informan Penelitian	22
3.6 Metode Pengumpulan Data	23
3.7 Hasil Uji Validitas	23
3.8 Hasil Uji Reliabilitas	24
3.9 Uji <i>Trustworthiness</i>	25
3.10 Definisi Operasional Variabel	25
3.11 Teknik Analisis Data	35
IV PROFIL MASYARAKAT DESA KAWALI DAN BANGSRING	37
4.1 Gambaran Umum <i>Smart Fisheries Village</i> di Desa Kawali	37
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden Desa Kawali	39
4.3 Deskripsi Modal Sosial di Desa Kawali	41
4.4 Gambaran Umum <i>Smart Fisheries Village</i> di Desa Bangsring	43
4.5 Deskripsi Karakteristik Anggota SFV Desa Bangsring	44
4.6 Deskripsi Modal Sosial di Desa Bangsring	47
V KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DI DESA KAWALI	49
5.1 Katalis Dialog Pembangunan SFV Desa Kawali	49

5.1.1	Peran penyuluh perikanan Kawali dalam membangun dialog	49
5.1.2	Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan SFV Kawali	52
5.1.3	Pola komunikasi keputusan adopsi inovasi masyarakat Kawali	54
5.1.4	Tipe komunikasi kepemimpinan dalam SFV Desa Kawali	56
5.1.5	Gejala <i>groupthink</i> kelompok anggota SFV desa Kawali	58
5.2	Dialog Partisipatif Realisasi SFV Desa Kawali	60
5.2.1	Penyadaran dan identifikasi masalah kolektif	60
5.2.2	Pelibatan <i>stakeholders</i> potensial	61
5.2.3	Penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV Desa Kawali	62
5.2.4	Klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu	63
5.2.5	Penilaian kondisi aktual, penentuan opsi dan rencana kegiatan	65
5.3	Aksi Kolektif Pembangunan SFV Desa Kawali	66
5.3.1	Penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan	67
5.3.2	Mobilisasi organisasi dan sumber daya	68
5.3.3	Aksi pembangunan kolektif	69
5.3.4	Pemanfaatan hasil pembangunan desa	70
5.3.5	Partisipasi anggota SFV dalam evaluasi partisipatif	71
5.4	Model Struktural Komunikasi Partisipatoris SFV di Desa Kawali	72
5.4.1	Evaluasi <i>outer model</i> komunikasi partisipatoris SFV Desa Kawali	73
5.4.2	Evaluasi <i>inner model</i> komunikasi partisipatoris SFV Desa Kawali	76
5.4.3	Pengujian hipotesis penelitian	78

VI	KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DI DESA BANGSRING	87
6.1	Katalis Dialog Pembangunan SFV Desa Bangsring	87
6.1.1	Peran penyuluh perikanan Bangsring dalam membangun dialog	87
6.1.2	Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan SFV Bangsring	90
6.1.3	Pola komunikasi keputusan adopsi inovasi masyarakat Bangsring	92
6.1.4	Tipe komunikasi kepemimpinan dalam SFV Desa Bangsring	94
6.1.5	Gejala <i>groupthink</i> kelompok anggota SFV Desa Bangsring	97
6.2	Dialog Partisipatif Realisasi SFV Desa Bangsring	99
6.2.1	Penyadaran dan identifikasi masalah kolektif	99
6.2.2	Pelibatan <i>stakeholders</i> potensial	101
6.2.3	Penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV Desa Bangsring	103
6.2.4	Klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu	105
6.2.5	Penilaian kondisi aktual, penentuan opsi dan rencana kegiatan	107
6.3	Aksi Kolektif Pembangunan SFV Desa Bangsring	109
6.3.1	Penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan	109
6.3.2	Mobilisasi organisasi dan sumber daya	111
6.3.3	Aksi pembangunan kolektif	113
6.3.4	Pemanfaatan hasil pembangunan desa	115
6.3.5	Partisipasi anggota SFV dalam evaluasi partisipatif	117
6.4	Model Struktural Komunikasi Partisipatoris di Desa Bangsring.	119
6.4.1	Evaluasi <i>outer model</i> komunikasi SFV di Desa Bangsring	119
6.4.2	Evaluasi <i>inner model</i> komunikasi partisipatoris di Desa Bangsring	124
6.4.3	Pengujian hipotesis penelitian	126

VII PERBANDINGAN KOMUNIKASI PARTISIPATORIS DUA DESA BERDASARKAN <i>MULTI-GROUP ANALYSIS</i>	133
7.1 Uji <i>Measurement Invariance of Composite Models</i> (MICOM)	133
7.2 Hasil <i>Permutation Multi-Group Analysis</i> Dua Desa	136
7.3 Implikasi Substantif Perbedaan Hasil MGA pada Dua Desa	138
VIII STRATEGI PENINGKATAN DIALOG DAN AKSI KOLEKTIF	139
8.1 Strategi Peningkatan Dialog Komunitas Desa Kawali	139
8.2 Strategi Peningkatan Aksi Kolektif Komunitas Desa Kawali	142
8.3 Strategi Peningkatan Dialog Komunitas Desa Bangsring	145
8.4 Strategi Peningkatan Aksi Kolektif Komunitas Desa Bangsring	148
8.5 Sintesis Hasil IPMA pada Desa Kawali dan Desa Bangsring	150
IX PENUTUP	151
9.1 Simpulan	151
9.2 Saran	151
9.3 Keterbatasan Penelitian	153
DAFTAR PUSTAKA	154
LAMPIRAN	163
RIWAYAT HIDUP	172



DAFTAR TABEL

1	Penelitian terdahulu yang relevan dengan CFSC, dialog komunitas, aksi kolektif, kepemimpinan, <i>groupthink</i> dan modal sosial	15
2	Jumlah responden berdasarkan desa, jenis kelompok, dan jenis kelami	22
3	Nilai uji korelasi item-total dan validitas konvergen	23
4	Nilai uji <i>Cronbach's alpha</i> instrumen penelitian	24
5	Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha di Desa Kawali	40
6	Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial (dalam persen)	42
7	Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha Desa Bangsring	45
8	Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial di Desa Bangsring (dalam persen)	47
9	Penilaian anggota kelompok terhadap peran penyuluh perikanan di Desa Kawali (dalam persen)	50
10	Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Kawali (dalam persen)	52
11	Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Kawali (dalam persen)	54
12	Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali (dalam persen)	56
13	Penilaian anggota kelompok terhadap gejala <i>groupthink</i> dalam pelaksanaan SFV di Desa Kawali (dalam persen)	59
14	Nilai AVE dan <i>outer loading</i> pelaksanaan SFV di Desa Kawali	74
15	Nilai <i>Fornell-Larcker criterion</i> pelaksanaan SFV di Desa Kawali	75
16	Nilai <i>Cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i> di Desa Kawali	75
17	Nilai <i>R square</i> (R^2) model CFSC di Desa Kawali	76
18	Nilai <i>f square</i> (f^2) model CFSC SFV di Desa Kawali	76
19	Koefisien jalur dan hasil <i>bootstrapping</i> SFV di Desa Kawali	79
20	Persentase jumlah anggota kelompok berdasarkan peran penyuluh perikanan di Desa Bangsring	88
21	Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Bangsring (dalam persen)	90
22	Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Bangsring (dalam persen)	92
23	Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring (dalam persen)	95
24	Penilaian anggota kelompok terhadap gejala <i>groupthink</i> dalam pelaksanaan SFV di Desa Bangsring (dalam persen)	98
25	Nilai AVE dan <i>outer loading</i> pelaksanaan SFV di Desa Bangsring	120
26	Nilai <i>Fornell-Larcker criterion</i> pelaksanaan SFV di Desa Bangsring	123
27	Nilai <i>Cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i> di Desa Bangsring	123
28	Nilai <i>R Square</i> (R^2) SFV di Desa Bangsring	124
29	Nilai <i>f square</i> (f^2) SFV di Desa Bangsring	125
30	Koefisien jalur dan hasil <i>bootstrapping</i> SFV di Desa Bangsring	126
31	<i>Compositional invariance</i> (step 2) Desa Kawali dan Desa Bangsring	134

32	<i>Equality of composite means</i> (step 3a) Desa Kawali dan Desa Bangsring	135
33	<i>Equality of composite variances</i> (step 3b) Desa Kawali dan Desa Bangsring	136
34	Hasil <i>permutation multi-group analysis</i> (MGA) koefisien jalur program SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring	137
35	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog	142
36	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif	144
37	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog di Desa Bangsring	147
38	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif di Desa Bangsring	149

DAFTAR GAMBAR

1	Model <i>communication for social change</i> (Figuroa <i>et al.</i> 2002)	6
2	Kerangka pemikiran penelitian	20
3	Matriks kuadran analisis peta kepentingan kinerja	36
4	Peta Desa Kawali	37
5	Peta Desa Bangsring	43
6	Diskusi informal penyuluh dengan masyarakat Desa Kawali	50
7	Sebaran anggota kelompok pada tahap penyadaran dan identifikasi masalah di Desa Kawali	61
8	Sebaran anggota kelompok pada tahap identifikasi dan pelibatan stakeholders di Desa Kawali	62
9	Sebaran anggota kelompok pada tahap penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV di Desa Kawali	63
10	Sebaran anggota kelompok pada tahap klarifikasi homogenitas persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Kawali	64
11	Sebaran anggota kelompok pada tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan di Desa Kawali	65
12	Sebaran anggota kelompok pada tahap penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan di Desa Kawali	67
13	Sebaran anggota kelompok pada tahap mobilisasi organisasi dan sumber daya di Desa Kawali	68
14	Sebaran anggota kelompok pada tahap aksi pembangunan kolektif di Desa Kawali	69
15	Sebaran anggota kelompok pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Kawali	70
16	Sebaran anggota kelompok pada tahap evaluasi partisipatif di Desa Kawali	72
17	Model komunikasi pelaksanaan SFV di Desa Kawali	77
18	‘Nongkrong’ penyuluh bersama anggota	89
19	Kegiatan pelatihan kelompok SFV di Desa Bangsring	91
20	Pertemuan rutin kelompok perikanan di Desa Bangsring	93
21	Sebaran anggota kelompok pada tahap penyadaran dan identifikasi masalah kolektif di Desa Bangsring	100

22	Sebaran anggota kelompok pada tahap pelibatan <i>stakeholders</i> potensial di Desa Bangsring	102
23	Sebaran anggota kelompok pada tahap penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV di Desa Bangsring	103
24	Sebaran anggota kelompok pada tahap klarifikasi homogenitas persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Bangsring	105
25	Sebaran anggota kelompok pada tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan di Desa Bangsring	108
26	Sebaran anggota kelompok pada tahap penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan di Desa Bangsring	110
27	Sebaran anggota kelompok pada tahap mobilisasi organisasi dan sumber daya di Desa Bangsring	112
28	Sebaran anggota kelompok pada tahap aksi pembangunan kolektif di Desa Bangsring	113
29	Sebaran anggota kelompok pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Bangsring	116
30	Sebaran anggota kelompok pada tahap evaluasi partisipatif di Desa Bangsring	117
31	Model struktural komunikasi partisipatif Desa Kawali	122
32	Kuadran IPMA dialog komunitas di Desa Kawali	140
33	Kuadran IPMA aksi kolektif di Desa Bangsring	143
34	Kuadran IPMA dialog komunitas di Desa Bangsring	145
35	Kuadran IPMA aksi kolektif di Desa Bangsring	148
36	Perbandingan faktor strategis penguatan dialog komunitas dan aksi kolektif berdasarkan IPMA di Desa Kawali dan Desa Bangsring	150

DAFTAR LAMPIRAN

1	Penelitian terdahulu yang relevan dengan CFSC, dialog komunitas, aksi kolektif, kepemimpinan, groupthink dan modal sosial	15
2	Jumlah responden berdasarkan desa, jenis kelompok, dan jenis kelamin	22
3	Nilai uji korelasi item-total dan validitas konvergen	23
4	Nilai uji <i>Cronbach's alpha</i> instrumen penelitian	24
5	Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha di Desa Kawali	40
6	Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial (dalam persen)	42
7	Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha Desa Bangsring	45
8	Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial di Desa Bangsring (dalam persen)	47
9	Penilaian anggota kelompok terhadap peran penyuluh perikanan di Desa Kawali (dalam persen)	50
10	Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Kawali (dalam persen)	52

11	Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Kawali (dalam persen)	54
12	Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali (dalam persen)	56
13	Penilaian anggota kelompok terhadap gejala groupthink dalam pelaksanaan SFV di Desa Kawali (dalam persen)	59
14	Nilai AVE dan <i>outer loading</i> pelaksanaan SFV di Desa Kawali	74
15	Nilai <i>Fornell–Larcker criterion</i> pelaksanaan SFV di Desa Kawali	75
16	Nilai <i>Cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i> di Desa Kawali	75
17	Nilai <i>R square</i> (R^2) model CFSC di Desa Kawali	76
18	Nilai <i>f square</i> (f^2) model CFSC SFV di Desa Kawali	76
19	Koefisien jalur dan hasil <i>bootstrapping</i> SFV di Desa Kawali	79
20	Persentase jumlah anggota kelompok berdasarkan peran penyuluh perikanan di Desa Bangsring	88
21	Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Bangsring (dalam persen)	90
22	Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Bangsring (dalam persen)	92
23	Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring (dalam persen)	95
24	Penilaian anggota kelompok terhadap gejala groupthink dalam pelaksanaan SFV di Desa Bangsring (dalam persen)	98
25	Nilai AVE dan <i>outer loading</i> pelaksanaan SFV di Desa Bangsring	120
26	Nilai <i>Fornell–Larcker criterion</i> pelaksanaan SFV di Desa Bangsring	123
27	Nilai <i>Cronbach's alpha</i> dan <i>composite reliability</i> di Desa Bangsring	123
28	Nilai <i>R Square</i> (R^2) SFV di Desa Bangsring	124
29	Nilai <i>f square</i> (f^2) SFV di Desa Bangsring	125
30	Koefisien jalur dan hasil <i>bootstrapping</i> SFV di Desa Bangsring	126
31	<i>Compositional invariance (step 2)</i> Desa Kawali dan Desa Bangsring	134
32	<i>Equality of composite means (step 3a)</i> Desa Kawali dan Desa Bangsring	135
33	<i>Equality of composite variances (step 3b)</i> Desa Kawali dan Desa Bangsring	136
34	Hasil <i>permutation multi-group analysis</i> (MGA) koefisien jalur program SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring	137
35	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog	142
36	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif	144
37	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog di Desa Bangsring	147
38	Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif di Desa Bangsring	149





@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IPB University
— Bogor Indonesia —

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Perpustakaan IPB University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia Emas 2045. Kemiskinan dalam arti sempit merupakan kondisi kekurangan uang dan barang yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup (Khomsan *et al.* 2015). Badan Pusat Statistik (BPS 2025) menetapkan seseorang sebagai penduduk miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.242,00. Berdasarkan standar tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa, termasuk 17,74 juta jiwa yang bekerja pada sektor kelautan dan perikanan. Padahal, sektor kelautan dan perikanan secara konsisten menyumbang rata-rata 7,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional selama periode 2017-2021 (BPS 2024). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa tingginya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional berlangsung bersamaan dengan tingginya jumlah penduduk miskin yang bekerja pada sektor tersebut.

Pendekatan pembangunan yang bersifat *topdown* menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesenjangan tersebut. Damayanti dan Syarifudin (2020), Lewis *et al.* (2022), serta Poerwanto (2025) menjelaskan bahwa pendekatan *topdown* menempatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksanaan program. Pola tersebut membatasi ruang dialog dan partisipasi masyarakat sehingga kebijakan pembangunan kurang mencerminkan kebutuhan lokal. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menempatkan ekonomi biru sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan. Implementasi prinsip tersebut berkembang melalui pendekatan *government driven* dan *community driven* yang membentuk karakter dialog, partisipasi, dan pengambilan keputusan masyarakat secara berbeda.

Menurut Hrivnák *et al.* (2021) pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi melalui dialog serta pengambilan keputusan bersama. Figueroa *et al.* (2002) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berperan dalam meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan lokal sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan. Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui komunikasi partisipatif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya secara inklusif dan egaliter¹. Menurut Yuniarti (2024), Nugroho (2025), dan Poerwanto (2025) komunikasi partisipatif mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam merumuskan kebutuhan, membangun komitmen bersama, serta menggerakkan partisipasi pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Figueroa *et al.* (2002) yang menempatkan komunikasi partisipatif sebagai penggerak perubahan sosial melalui dialog dan aksi kolektif. Oleh karena itu, penerapan komunikasi partisipatif dalam

¹ Bordenave (2004); Servaes (2008); Alakwe dan Okpara (2022).

implementasi kebijakan pembangunan menjadi krusial untuk memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat².

Model komunikasi partisipatif yang umum digunakan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat adalah *communication for social change model* (CFSC) oleh Figueroa *et al.* (2002). Model ini menekankan dua aspek utama. Pertama proses komunikasi partisipatif berbasis dialog komunitas sebagai proses berbagi informasi, saling memahami, dan mencapai kesepakatan. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa proses dialog komunitas diawali oleh berbagai katalis yang mendorong masyarakat untuk mendiskusikan persoalan bersama. Aspek kedua adalah aksi kolektif dalam kelompok yang menghasilkan perubahan terukur secara sosial maupun individual. Olson (1965) mendefinisikan aksi kolektif sebagai tindakan sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif juga dipengaruhi oleh modal sosial yang berkembang di masyarakat. Pembentukan aksi kolektif didukung oleh modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memperkuat kerja sama antarmasyarakat. Hubungan antara dialog komunitas dan aksi kolektif menjadi inti analisis CFSC dalam menjelaskan proses perubahan sosial. Asia *et al.* (2018) menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif yang semakin kuat mendorong terbentuknya aksi kolektif sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Beberapa kajian terdahulu telah menunjukkan peran penting komunikasi partisipatif dan aksi kolektif dalam pembangunan masyarakat (Asia *et al.* 2018; Hariance *et al.* 2021; Abdullah *et al.* 2023; Auliah *et al.* 2024; Iba *et al.* 2024). Kajian tersebut menjelaskan tingkat partisipasi, efektivitas program, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menjelaskan mekanisme komunikasi yang menghubungkan dialog komunitas dan pembentukan aksi kolektif pada pendekatan pembangunan *government driven* dan *community driven*. Temuan penelitian juga diharapkan memperkaya penerapan *communication for social change model* (CFSC) dalam konteks pembangunan desa kelautan dan perikanan serta menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi pembangunan yang sesuai dengan karakter masyarakat. Urgensi penelitian ini diperkuat oleh rekomendasi Kunarti *et al.* (2024) yang menekankan pentingnya kajian dialog komunitas dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat.

Implementasi pembangunan desa kelautan dan perikanan berlangsung melalui pendekatan *government driven* dan *community driven* yang mencerminkan variasi praktik partisipasi masyarakat. Desa Kawali, Jawa Barat, merupakan desa perikanan budidaya yang menerapkan komunikasi partisipatif dan aksi kolektif melalui pendekatan *government driven*. Pembangunan desa didukung oleh pemerintah melalui fasilitasi, pendampingan, pengembangan kapasitas, dan penyediaan sumber daya. Desa Bangsring, Jawa Timur, merupakan desa perikanan tangkap yang menerapkan komunikasi partisipatif dan aksi kolektif melalui pendekatan *community driven*. Pembangunan desa bertumpu pada kepemimpinan lokal dalam menggerakkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan karakter pembangunan pada kedua desa memberikan dasar empiris untuk mengkaji bagaimana komunikasi partisipatif, modal sosial sebagai sumber daya relasional masyarakat, serta katalis dialog berperan dalam membentuk aksi kolektif pada

² Nugroho (2025); Poerwanto (2025); Nugraheni dan Pargito (2025); Syah *et al.* (2025); Yuniarti (2024); Damayanti dan Syarifudin (2020).

lingkungan sosial yang berbeda. Analisis komparatif tersebut diharapkan menghasilkan model empiris mengenai mekanisme komunikasi partisipatif dalam pembentukan aksi kolektif pada pembangunan desa kelautan dan perikanan.

1.2 Rumusan Masalah

Model CFSC (Figueroa *et al.* 2002) menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat berlangsung melalui proses komunikasi partisipatif yang melibatkan katalis, dialog komunitas, dan aksi kolektif. Berbagai studi telah menunjukkan pentingnya komunikasi partisipatif dan aksi kolektif dalam mendukung pembangunan, namun mekanisme yang menjelaskan hubungan antar unsur tersebut dalam konteks masyarakat kelautan dan perikanan dengan pendekatan pembangunan *government driven* dan *community driven* sebagaimana di Desa Kawali dan Desa Bangsring masih belum banyak dikaji secara mendalam, sehingga analisis komparatif diperlukan.

Karakteristik masyarakat dan modal sosial merupakan faktor yang memengaruhi berkembangnya komunikasi partisipatif dalam pembangunan masyarakat. Karakteristik seperti usia, pendidikan, pengalaman, dan keterlibatan kelompok menentukan kemampuan individu dalam berpartisipasi pada dialog dan pengambilan keputusan. Modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial memperkuat kerja sama dan mendorong aksi kolektif (Putnam 1993). Jalil *et al.* (2021) dan Auliah *et al.* (2024) menegaskan bahwa modal sosial meningkatkan partisipasi dan efektivitas pembangunan berbasis komunitas. Perbedaan karakteristik masyarakat dan modal sosial di Desa Kawali dan Desa Bangsring diduga menghasilkan dinamika komunikasi yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan penelitian pertama adalah bagaimana karakteristik masyarakat dan modal sosial di Desa Kawali dan Desa Bangsring?

Model CFSC menjelaskan bahwa perubahan sosial diawali oleh katalis yang mendorong dialog komunitas hingga menjadi aksi kolektif (Figueroa *et al.* 2002). Katalis membantu masyarakat mengidentifikasi masalah, membangun kesepahaman, dan mengambil keputusan bersama. Asia *et al.* (2018) menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif berkaitan dengan aksi kolektif, sedangkan Abdullah *et al.* (2023) menegaskan bahwa dialog komunitas menjadi dasar perubahan sosial. Desa Kawali yang *government driven* menjadi konteks untuk mengkaji mekanisme tersebut. Pertanyaan penelitian kedua adalah bagaimana karakteristik katalis dialog, praktik dialog komunitas, dan aksi kolektif di Desa Kawali, serta pengaruh katalis terhadap dialog komunitas dan pengaruh dialog komunitas bersama modal sosial terhadap aksi kolektif?

Komunikasi partisipatif dipengaruhi oleh konteks sosial, kelembagaan, dan sistem kehidupan masyarakat. Perbedaan konteks pembangunan membentuk dinamika dialog dan aksi kolektif yang berbeda. Desa Bangsring yang *community driven* ditopang kepemimpinan lokal, konservasi berbasis masyarakat, dan usaha kolektif. Kondisi ini berbeda dengan Desa Kawali dalam menjelaskan mekanisme komunikasi pembangunan. Pertanyaan penelitian ketiga adalah bagaimana karakteristik katalis dialog, praktik dialog komunitas, dan aksi kolektif di Desa Bangsring, serta pengaruh katalis terhadap dialog komunitas dan pengaruh dialog komunitas bersama modal sosial terhadap aksi kolektif?

Perbedaan karakteristik masyarakat, modal sosial, kepemimpinan, dan dukungan pembangunan membentuk hubungan yang berbeda antara katalis, dialog

komunitas, dan aksi kolektif. Analisis komparatif kedua desa diperlukan untuk menjelaskan pengaruh konteks lokal terhadap komunikasi partisipatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Pertanyaan penelitian keempat adalah bagaimana perbedaan pola hubungan antara katalis dialog, dialog komunitas, modal sosial, dan aksi kolektif pada Desa Kawali dan Desa Bangsring?

Pemahaman mekanisme komunikasi pembangunan menjadi dasar perumusan strategi untuk memperkuat dialog komunitas dan aksi kolektif sesuai karakteristik masing-masing desa. Pertanyaan penelitian kelima adalah bagaimana strategi memperkuat dialog komunitas dan aksi kolektif dalam pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan berdasarkan hasil analisis di Desa Kawali dan Desa Bangsring?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme komunikasi partisipatif dalam pembentukan aksi kolektif pada pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan melalui studi komparatif di Desa Kawali dan Desa Bangsring sebagai desa yang merepresentasikan pendekatan *government driven* dan *community driven*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis karakteristik masyarakat dan modal sosial di Desa Kawali dan Desa Bangsring.
- Mendeskripsikan karakteristik katalis dialog, praktik komunikasi partisipatif, dan aksi kolektif serta menganalisis pengaruh katalis dialog terhadap komunikasi partisipatif dan pengaruh komunikasi partisipatif bersama modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Kawali.
- Mendeskripsikan karakteristik katalis dialog, praktik komunikasi partisipatif, dan aksi kolektif serta menganalisis pengaruh katalis dialog terhadap komunikasi partisipatif dan pengaruh komunikasi partisipatif bersama modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring.
- Menganalisis perbandingan pola hubungan antara katalis dialog, komunikasi partisipatif, modal sosial, dan aksi kolektif pada masyarakat Desa Kawali dan Desa Bangsring.
- Merumuskan strategi komunikasi untuk memperkuat komunikasi partisipatif dan aksi kolektif dalam pembangunan masyarakat kelautan dan perikanan berdasarkan hasil analisis di Desa Kawali dan Desa Bangsring.

1.4 Manfaat

Penelitian ini memperkaya kajian komunikasi pembangunan melalui pengembangan teori CFSC serta penyediaan bukti empiris tentang komunikasi partisipatif, dialog komunitas, dan aksi kolektif. Hasilnya menjadi rujukan strategis bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memperkuat literasi komunikasi pembangunan di tingkat lokal dan nasional, serta mendorong kolaborasi multipihak dalam implementasi program berbasis masyarakat yang inklusif, adaptif, dan kontekstual di Indonesia, dengan orientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

II TINJAUAN PUSTAKA

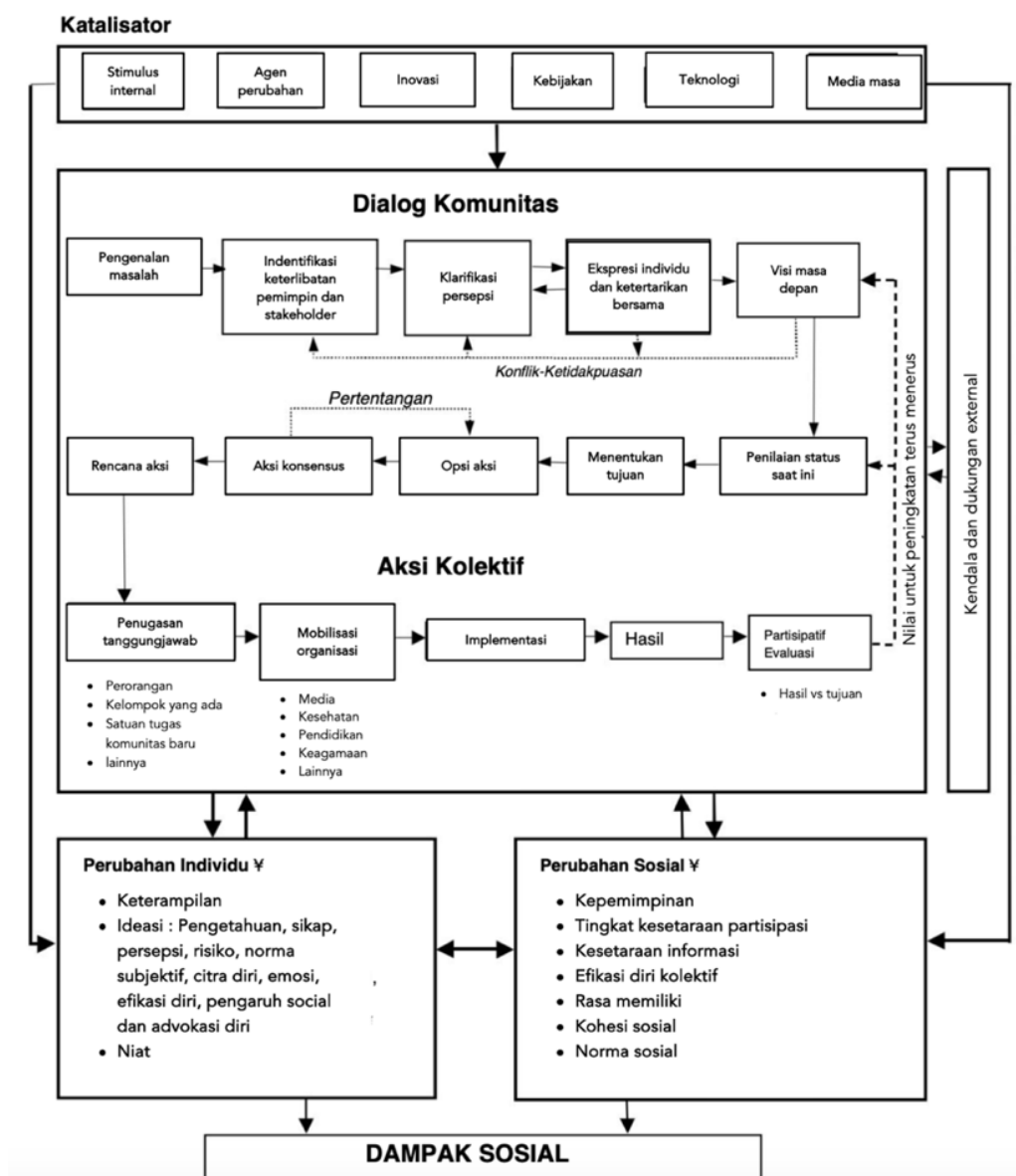
Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai konsep komunikasi pembangunan melalui teori komunikasi partisipatif dan model CFSC (Figueroa *et al.* 2002). Terdapat beberapa teori yang tergabung dalam satu model CFSC yakni teori komunikasi partisipatif, aksi kolektif, kepemimpinan, adopsi inovasi, dan *groupthink*. Penjelasan kemudian diikuti oleh *state of the art* yang menjadi basis argumentasi pentingnya penelitian dilakukan dan landasan penyusunan kerangka penelitian.

2.1 Komunikasi Partisipatif *Communication for Social Change*

Komunikasi pembangunan merupakan proses membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan, serta menciptakan ruang belajar yang mendorong perubahan sosial melalui komunikasi partisipatif (Servaes 2020). Pada proses ini, komunikasi partisipatif berperan menyampaikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Kustiawan *et al.* 2023). Keterlibatan masyarakat direalisasikan melalui dialog, pengambilan keputusan, dan aksi kolektif (Servaes 2008). Masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya sehingga tercipta komunikasi yang inklusif dan egaliter (Bordenave 2004; Alakwe dan Okpara 2022). Pendekatan ini menghubungkan refleksi dan aksi kolektif sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Melalui dialog, masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi bersama, serta mengorganisasi aksi kolektif berdasarkan kebutuhan dan kepentingan kelompok.

Model CFSC yang dikembangkan oleh Figueroa *et al.* (2002) merupakan salah satu teori komunikasi partisipatif yang banyak digunakan dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan. Model ini mengintegrasikan berbagai konsep komunikasi partisipatif dan dinamika sosial dalam satu siklus komunikasi yang dinamis. CFSC memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana komunikasi partisipatif dapat mendorong transformasi sosial di tingkat kelompok. Kerangka ini sangat sesuai digunakan sebagai pisau bedah pelaksanaan program pengembangan masyarakat di tingkat kelompok. Sehingga peneliti menggunakan model CFSC sebagai dasar teoritik utama penelitian ini.

Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa filosofi utama CFSC lahir dari pemikiran Freire (1970) serta Rogers dan Kincaid (1981). Model CFSC memandang komunikasi sebagai proses triadik yang bersifat berulang (iteratif), siklikal, dan relasional. Informasi dibagikan secara terus-menerus hingga tercapai pemahaman bersama. Model CFSC menjelaskan proses dialog mulai dari pengaruh katalis yang mendorong dialog komunitas, praktik dialog itu sendiri, hingga realisasi aksi kolektif dalam mewujudkan perubahan sosial (Gambar 1). Apabila setiap tahapan proses berjalan dengan baik, perubahan sosial akan lebih mungkin dicapai, sebaliknya jika terjadi hambatan, kelompok bisa jadi kembali ke tahap sebelumnya untuk meninjau ulang keputusan.



Gambar 1 Model *communication for social change* (Figueroa et al. 2002)

2.1.1 Katalis Sebagai Pendorong Dialog komunitas

Katalis adalah stimulus dialog komunitas yang berasal dari dalam dan/atau luar kelompok. Menurut Saveski *et al.* (2021) katalis dapat menciptakan peluang terjadinya interaksi dan memfasilitasi dialog dalam jejaring. Katalis mendorong dialog masyarakat dengan menciptakan pemahaman dan kolaborasi antar *stakeholders*, sehingga memunculkan keterlibatan masyarakat yang lebih efektif (Coogan 2022). Apabila berjalan dengan baik, dialog tersebut akan melahirkan aksi kolektif dan penyelesaian masalah kelompok.

Figueroa *et al.* (2002) menyebutkan enam katalis yang berpotensi memengaruhi dialog komunitas, Di antaranya stimulus internal, penyuluh, inovasi, teknologi, kebijakan publik dan media massa. Stimulus internal adalah permasalahan atau faktor lainnya yang berasal dari dalam kelompok

dan memicu terjadinya dialog, misalkan kerusakan lingkungan atau masalah ekonomi. Agen perubahan adalah pihak eksternal seperti tenaga penyuluh atau LSM yang datang membuka kesadaran kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan aksi kolektif. Inovasi adalah penemuan baru yang memicu adopsi inovasi dalam kelompok. Kebijakan publik adalah peraturan atau keputusan pemerintah yang memengaruhi tindakan kelompok. Teknologi adalah alat, metode atau model yang memicu dialog perencanaan kedepan. Terakhir adalah media massa yang memicu perubahan perilaku dan upaya pencapaian tujuan.

Dialog kelompok tidak hanya dipengaruhi oleh peran katalis. Figueroa *et al.* (2002) juga menjelaskan bahwa peran pemimpin berpengaruh dalam mengarahkan komunikasi kelompok, mengelola perbedaan pandangan, memfasilitasi dialog komunitas, serta menentukan mekanisme pencapaian konsensus yang mendorong terbentuknya aksi kolektif dalam penyelesaian masalah bersama. Soraya *et al.* (2024), juga berpendapat kepemimpinan memengaruhi proses dialog partisipatif dalam kelompok. Ketua kelompok dalam upaya pembangunan harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh anggotanya.

Namun, dialog komunitas tidak hanya dipengaruhi oleh peran katalis, tetapi juga oleh faktor lain seperti hambatan struktural dan psikologis. Hambatan tersebut dijelaskan melalui konsep *groupthink*, yang menunjukkan bagaimana kelompok tampak solid tetapi justru menghasilkan keputusan keliru. Penelitian Rhayua *et al.* (2024), DiPierro *et al.* (2022), dan Baptist (2015) menegaskan bahwa *groupthink* dapat menggagalkan dialog komunitas jika tidak diantisipasi, serta menekankan pentingnya kepemimpinan yang mendorong komunikasi partisipatif. Sehingga peneliti meninjau dua jenis katalis, yakni katalis yang seharusnya signifikan positif dengan dialog dan katalis yang berpotensi signifikan negatif terhadap dialog. Katalis yang memicu dialog komunitas meliputi peran penyuluh, keputusan adopsi inovasi teknologi, dukungan pemerintah, komunikasi kepemimpinan dan *groupthink*.

a) Peran penyuluh

Menurut Figueroa *et al.* (2002), Sofia *et al.* (2022) dan Khairunnisa *et al.* (2021) penyuluh adalah salah satu katalis penting bagi pembangunan masyarakat. Agen perubahan merupakan katalis eksternal yang memfasilitasi terjadinya dialog dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan internal kelompok. Keberadaan penyuluh akan memicu dialog komunitas terkait rencana dan pelaksanaan aksi kolektif. Nasution (2009), Aniche *et al.* (2024) dan Kustiawan *et al.* (2023) menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyuluh untuk memantik perubahan adalah dengan memelopori, menggerakkan, mengarahkan dan menyebarluaskan informasi melalui kesadaran dan partisipasi aktif. Artinya, penyuluh seharusnya tidak hanya datang membawa informasi atau menjalankan program, tapi hadir untuk mengenali tantangan, membangun kerja sama serta membawa perubahan yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.

Pihak eksternal yang mengintervensi pelaksanaan SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring adalah penyuluh. Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 4, penyuluh berperan bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung dalam pengembangan organisasinya. Prestiana *et al.* (2023) menjelaskan bahwa penyuluh berperan sebagai penyuluh eksternal yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan teknologi baru untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peran penyuluh dalam program SFV ditinjau dari fungsi komunikator, motivator, fasilitator, dan edukator (Nurida *et al.* (2024); Safira *et al.* (2022); Latif *et al.* (2022); Abdullah *et al.* (2023); Sundari *et al.* (2021) dan Khairunnisa *et al.* (2021)).

Sebagai komunikator, penyuluh berperan menyampaikan informasi dan kebijakan secara jelas dan efektif kepada masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat guna memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami serta relevan dengan kebutuhan lokal. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, serta penyampaian umpan balik dari masyarakat kepada pengambil kebijakan. Selain itu, penyuluh juga berfungsi sebagai motivator yang menumbuhkan semangat, kepercayaan diri, dan kemauan untuk berubah melalui pendekatan persuasif dan keteladanan, sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan berani mengadopsi inovasi. Sedangkan peran penyuluh sebagai fasilitator terlihat dalam kemampuannya membantu masyarakat mengakses sumber daya, teknologi, pasar, serta jaringan kelembagaan dengan menjembatani hubungan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Di sisi lain, penyuluh sebagai edukator berperan sebagai sumber pembelajaran melalui pelatihan, demonstrasi, dan pendampingan lapangan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun kewirausahaan, sehingga mampu mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan. Keempat peran penyuluh tersebut berkaitan erat dengan fasilitasi dialog komunitas, sehingga peneliti menggunakan keempat peran tersebut sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana penyuluh dapat memengaruhi dialog komunitas.

b) Keputusan penerimaan inovasi dan teknologi

Inovasi adalah ide, praktik, atau produk yang dianggap baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya (Lionberger dan Gwin 1982). Wujud inovasi dapat berupa ide, gagasan, cara ataupun metode, dan teknik baru yang berbeda dengan sebelumnya atau berbeda dengan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat (Sumardjo *et al.* 2019). Kebaruan inovasi bersifat subjektif dan bergantung pada waktu. Apabila ide lama dianggap baru disuatu kelompok, maka dapat dikatakan inovasi.

Di era digital, kemajuan teknologi menjadi salah satu bentuk inovasi yang signifikan mendukung upaya pembangunan. Perkembangan teknologi memungkinkan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas, tercapainya efisiensi operasional, dan peningkatan efektivitas program. Namun, perlu dipahami bahwa teknologi dalam proses perubahan sosial merupakan sarana perubahan, bukan tujuan akhir pembangunan.

Adopsi inovasi pada kelompok masyarakat dipengaruhi oleh struktur dan sistem sosial yang membentuk dinamika interaksi antaranggota (Rogers 2003). Struktur dan sistem tersebut dapat berperan sebagai faktor yang mendukung maupun menghambat proses adopsi inovasi. Pola komunikasi yang berkembang dalam sistem sosial turut menentukan bagaimana informasi mengenai inovasi disebarkan, dipahami, dan akhirnya direspons oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, suatu inovasi dapat diterima atau ditolak, baik oleh sebagian maupun seluruh anggota sistem sosial. Rogers (2003) mengklasifikasikan keputusan adopsi inovasi ke dalam empat dimensi, yaitu keputusan opsional, kolektif, otoritas, dan kontingen.

Keputusan opsional terjadi ketika setiap individu dalam kelompok bebas memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Pada situasi ini, adopsi sangat dipengaruhi oleh motivasi pribadi dan membuat organisasi tidak konsisten. Keputusan kolektif ditentukan melalui kesepakatan kelompok, anggota lebih berkomitmen karena merasa menjadi bagian dari keputusan, namun, prosesnya cenderung lebih lama dan rentan konflik. Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang ditentukan oleh pimpinan atau ahli, dapat mempercepat adopsi namun menimbulkan resistensi. Terakhir adalah keputusan kontingen, yaitu keputusan yang bergantung pada adopsi inovasi sebelumnya, sehingga keberhasilan atau kegagalan inovasi sebelumnya sangat berpengaruh. Keempat dimensi tersebut digunakan peneliti untuk melihat tipe keputusan adopsi inovasi dalam kelompok dan bagaimana pengambilan keputusan adopsi memengaruhi dialog partisipatif kelompok.

c) Kebijakan dukungan pemerintah

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan (UU No. 6 Tahun 2014). Prioritas pembangunan desa meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa perlu dilakukan bersama secara partisipatif baik oleh masyarakat, pemerintah maupun mitra desa.

Pada upaya ini, pemerintah berkewajiban memberikan dukungan, fasilitasi dan pembinaan. Adapun dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa mencakup empat dimensi, yakni pendanaan ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Dimensi penguatan kapasitas SDM, meliputi pemberian bimbingan teknis, pelatihan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan desa dan masyarakat desa. Dimensi fasilitasi inovasi misalkan pelaksanaan kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga yang mencakup pemanfaatan teknologi untuk pembangunan. Terakhir dimensi sistem informasi desa, bertujuan untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa secara transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau dukungan pemerintah pada program pembangunan desa melalui empat

dimensi tersebut, serta bagaimana dukungan pemerintah dapat memengaruhi dialog komunitas.

d) Komunikasi kepemimpinan

Stogdill (1950) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi yang bertujuan untuk mencapai sasaran, dengan menekankan tujuan tertentu. Begitu pula Kouzes dan Posner (2002) yang memiliki pandangan serupa, bahwa kepemimpinan adalah seni menggerakkan orang lain agar mau berjuang untuk mencapai aspirasi bersama. Maxwell (1930) bahkan menyederhanakannya kepemimpinan sebagai pengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan yang efektif bukan hanya soal tindakan, tetapi bagaimana pemimpin berkomunikasi membentuk realitas sosial melalui bahasa yang memotivasi, memperkuat identitas, dan mendorong kinerja. Komunikasi kepemimpinan adalah proses penyampaian makna yang disengaja dan terkontrol oleh seorang pemimpin untuk memengaruhi individu, kelompok, organisasi maupun kelompok melalui keterampilan komunikasinya. Tujuan komunikasi kepemimpinan adalah menyampaikan pesan secara efektif untuk memberikan arahan, motivasi dan inspirasi bertindak.

Mayfield dan Mayfield (2017) mengkategorikan komunikasi kepemimpinan menjadi tiga. Pertama adalah *direction-giving language*, yakni komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa instruksi untuk memberikan arahan tugas, prosedur, dan ekspektasi yang jelas sehingga penerima tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya terdapat *empathetic language*, yakni komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa penuh perhatian emosional, dukungan, pengakuan terhadap pengalaman individu, dan responsif terhadap kebutuhan personal atau kelompok. Selain itu juga terdapat kemampuan komunikasi *meaning-making language*, yakni komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang mengaitkan tugas/aktivitas dengan nilai, visi, dan tujuan yang lebih besar sehingga pekerjaan terasa bermakna bagi individu. Oleh karena itu, peneliti akan meninjau bagaimana seorang pemimpin menumbuhkan realitas sosial melalui gaya komunikasinya dalam kelompok, sehingga memengaruhi proses dialog komunitas.

e) *Groupthink*

Groupthink adalah cara berpikir individu yang sedang terikat oleh kelompok kohesif (Janis 1972). *Groupthink* adalah proses pengambilan keputusan konsensus dalam kelompok yang mementingkan kekompakan kelompok, mengesampingkan pandangan yang tidak sejalan dengan kelompok dan pemikiran kritis sehingga meniadakan perbedaan pendapat. Menurut Lubis (2011) *groupthink* memiliki situasi penuh tekanan, sehingga memaksa individu untuk mematuhi kesepakatan kelompok dan mencegah anggotanya bertindak secara individu dalam mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer atau tidak sejalan dengan kelompok. sehingga

tujuan utamanya bukan menghasilkan keputusan terbaik melalui pemikiran kritis, namun harmoni kelompok.

Terdapat delapan gejala utama yang menunjukkan bahwa suatu kelompok tengah mengalami *groupthink*. Gejala ini dibagi dalam tiga kategori besar. Pertama adalah *overestimation of the group*, terjadi pada kelompok yang mengalami *illusion of invulnerability* dan *belief in inherent morality of the group*. Kelompok ini memiliki keyakinan berlebihan bahwa kelompok tidak akan gagal, yang melahirkan optimisme tidak realistis dan meremehkan risiko kegagalan. Di samping itu mereka juga beranggapan bahwa keputusan kelompok pasti benar secara moral, sehingga mengesampingkan kritik etis dan logis.

Kedua adalah *closed-mindedness*, terjadi pada kelompok yang mengalami *collective rationalization* dan *stereotyping of out-groups*. Artinya terdapat pembenaran kolektif terhadap informasi yang bertentangan, sehingga bukti kontra dipersempit atau diputar balik. Keadaan tersebut diperparah dengan pandangan simplistik bahwa pihak luar lemah, salah, atau berbahaya, sehingga argumen eksternal tidak dipertimbangkan serius bahkan diabaikan.

Ketiga adalah *pressures toward uniformity*, terjadi pada kelompok yang mengalami gejala *self-censorship*, *illusion of unanimity*, *direct pressure on dissenters*. Kelompok ini menganggap diamnya anggota sebagai tanda persetujuan, padahal bisa jadi diam adalah bentuk dari ketakutan atau keraguan. Terdapat praktik tekanan verbal maupun non-verbal terhadap anggota yang menyatakan perbedaan pendapat. Sehingga anggota menahan diri untuk tidak menyampaikan keraguan atau kritik demi menjaga harmoni kelompok. Di samping itu, kelompok dengan gejala ini biasanya memiliki *mindguards*, yaitu individu atau kelompok kecil yang berperan sebagai penyaring informasi, tujuannya adalah mencegah data yang berlawanan dengan kelompok untuk masuk ke diskusi.

Kehadiran gejala-gejala ini menunjukkan bahwa proses komunikasi dalam kelompok tidak sehat, menyimpang dari dialog kritis menuju konsensus semu. *Groupthink* mengakibatkan proses pengambilan keputusan atau *defective decision-making* menjadi cacat dan lemah. Oleh karena itu, guna mengurangi risiko *groupthink*, Janis (1972) menyarankan beberapa prosedur, di antaranya pemimpin harus bersikap netral, kelompok besar dipecah menjadi subkelompok kecil untuk mengeksplorasi alternatif, adanya *devil's advocate* yang berperan menguji keputusan, melibatkan pendapat eksternal, serta mengadakan *second-chance meeting* sebelum keputusan final diambil. Inti dari strategi ini adalah membuka ruang bagi perbedaan pendapat, memperkaya informasi, dan mencegah dominasi konsensus semu.

2.1.2 Dialog Kelompok dalam Mendorong Aksi Kolektif

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai sistem komunikasi dua arah yang menekankan dialog dan memberikan ruang aspirasi untuk merencanakan pembangunan (Wilkins *et al.* 2014). Dialog menurut Figueroa *et al.* (2002) adalah percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih, bertujuan untuk

saling memahami dan mengklarifikasi apa yang dipikirkan serta diyakini masing-masing pihak. Dialog yang dilakukan dalam kelompok mengharuskan para anggotanya saling berbagi suara, talenta, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mendapatkan pengertian yang sama. Namun perlu diingat bahwa tidak semua dialog berujung pada kesepakatan, ada kalanya dialog justru memperjelas perbedaan nilai dan kepentingan sehingga membuat kesepakatan menjadi sulit dicapai.

Figuroa *et al.* (2002) merumuskan proses dialog dalam kelompok melalui sepuluh langkah. Pertama adalah pengakuan adanya masalah bersama, yakni saat anggota kelompok menyadari dan sepakat bahwa suatu masalah diakibatkan oleh pemicu tertentu. Langkah kedua adalah identifikasi dan pelibatan pemangku kepentingan untuk menangani masalah kelompok melalui diskusi, keanggotaan atau kerja sama. Pada tahap ini, perlu dipastikan untuk turut melibatkan pihak yang paling berdampak sehingga representasi mereka terjamin dalam proses penyelesaian masalah. Langkah ketiga adalah klarifikasi persepsi anggota, karena besar kemungkinan setiap individu memiliki pemahaman berbeda terhadap akar penyebab masalah. Penyamaan persepsi akan berpengaruh pada perumusan solusi. Langkah keempat adalah penegasan kebutuhan untuk menyelaraskan kebutuhan individu dan kelompok. Pada tahap ini konflik rentan terjadi, sehingga seluruh representasi penting untuk menyampaikan pandangannya.

Langkah kelima adalah penyusunan visi masa depan, menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai kelompok dalam jangka waktu tertentu. Langkah keenam adalah penilaian situasi saat ini, yakni penilaian objektif terhadap kemampuan kelompok saat ini untuk merumuskan rencana tindakan aksi kolektif. Langkah ketujuh adalah penetapan tujuan, setelah memiliki gambaran situasi, kelompok kemudian menetapkan tujuan dan target yang realistis dan terukur. Tujuan yang tidak realistis berpotensi menurunkan semangat dan komitmen kelompok untuk berpartisipasi dan sebaliknya.

Langkah kedelapan adalah mengidentifikasi berbagai opsi tindakan sesuai sumber daya yang tersedia dan menentukan prioritas program. Pada tahap ini, potensi terjadi konflik Kembali meningkat sehingga mekanisme dialog perlu dipastikan mengakomodir semua kepentingan. Langkah kesembilan adalah kesepakatan atas tindakan yang akan diambil dengan menjamin partisipasi dan rasa memiliki. Terakhir langkah kesepuluh adalah penyusunan rencana, mencakup siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana cara mengorganisasikan sumber daya.

Kesepuluh langkah ini mungkin saja tidak terjadi secara linier namun secara sirkuler, berbarengan atau tidak sesuai dengan urutan yang sudah dirumuskan. Langkah tersebut mencerminkan bahwa dialog komunitas bukan hanya proses komunikasi, tetapi strategi transformatif menuju perubahan sosial yang berbasis partisipasi. Oleh karena itu, selain melihat bagaimana proses dialog di kelompok menggunakan sepuluh langkah tersebut, peneliti juga melihat bagaimana dinamika sosial selama dialog terjadi.

2.1.3 Aksi Kolektif Menuju Perubahan Sosial

Aksi kolektif merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara sukarela

maupun melalui paksaan (Jordan 2023). Olson (1965) menjelaskan bahwa aksi kolektif adalah tindakan yang diambil oleh individu sebagai suatu kelompok untuk mengejar kepentingan bersama atau kelompok. Fenomena ini kerap muncul sebagai respons terhadap situasi krisis atau kelangkaan, sehingga masyarakat terdorong untuk mengambil tindakan bersama. Namun, dorongan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dimediasi oleh faktor-faktor historis dan ekologis yang membentuk respons sosial (Khan 2021).

Figueroa *et al.* (2002) menguraikan lima tahapan utama yang dapat dijadikan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi kolektif. Pertama adalah pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan tenggang waktu yang telah ditentukan sebelumnya, untuk melaksanakan rencana aksi secara terstruktur. Pembagian tugas ini dapat dilakukan secara sukarela ataupun melalui penunjukan langsung oleh ketua kelompok. Bila tugas bersifat kompleks, maka pembentukan tim khusus oleh pemimpin sangat disarankan.

Kedua adalah mobilisasi sumber daya organisasi, yakni pelibatan organisasi eksternal maupun internal untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi. Pada tahapan ini kelompok juga menghimpun dukungan untuk membantu pelaksanaan kegiatan mereka. Tahap ketiga adalah implementasi rencana yang telah disusun oleh individu maupun kelompok sesuai pembagian tugas. Seluruh anggota harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta turut mengawasi kesesuaian pelaksanaan tugas. Kesidiplinan menjadi kunci keberhasilan karena ketertiban akan menjamin terlaksananya sebagian besar rencana kegiatan yang sudah disusun.

Tahap keempat adalah hasil atau *outcomes*, yaitu dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok setelah implementasi. Hasil ini mencerminkan sejauh mana tujuan awal tercapai dan dapat diukur secara objektif melalui pemantauan langsung serta pencatatan yang sistematis. Sebagai contoh, jika tujuan awal kelompok adalah mengembangkan UMKM di Desa, maka luarannya berupa jumlah UMKM yang lahir dan bertahan.

Tahap kelima adalah evaluasi partisipatif, yakni proses refleksi kolektif yang melibatkan seluruh anggota kelompok untuk menilai kesesuaian hasil dengan visi awal. Evaluasi ini bersifat inklusif dan menjadi ruang pembelajaran bersama. Melalui refleksi ini, kelompok dapat memahami faktor keberhasilan dan kegagalan, serta menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan langkah selanjutnya. Evaluasi partisipatif juga memperkuat kesadaran kolektif atas kapasitas kelompok dan mendorong keberlanjutan perubahan sosial.

Partisipasi menjadi kunci keberhasilan aksi kolektif. Olson (1965) menjelaskan bahwa aksi kolektif cenderung beresiko terhadap kemunculan *free riders*, yaitu individu yang menikmati hasil usaha kolektif tanpa memberikan kontribusi. Fenomena ini muncul karena manfaat dari barang publik dapat dinikmati oleh seluruh anggota, termasuk mereka yang tidak turut berpartisipasi. Dilema ini membuat partisipasi menjadi tantangan tersendiri, terutama pada kelompok besar yang berpotensi *free riders* semakin tinggi. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi menjadi sangat krusial. Apabila terdapat anggota yang lebih fokus pada kepentingan pribadi, maka pendekatan berbasis paksaan atau pemberian

insentif secara individual perlu dipertimbangkan. Meski demikian, jika insentif diberikan terus-menerus tanpa adanya mekanisme paksaan atau tanggung jawab bersama, organisasi dapat mengalami kesulitan mempertahankan kelangsungan aksinya. Keadaan ini sering kali disebut dengan “keadaan nol”.

Berbeda dengan Olson, Ostrom (2000) mengkritik “keadaan nol” tersebut melalui serangkaian uji coba dan penelitian terdahulu. Ostrom menilai “keadaan nol” terlalu pesimis dan menyederhanakan perilaku manusia. Beliau menemukan bahwa individu-individu dalam berbagai kelompok di seluruh dunia justru lebih sering berorganisasi dan melahirkan modal sosial untuk mengatasi masalah bersama. Pendapat ini selaras dengan Figueroa *et al.* (2002) yang menjelaskan modal sosial merupakan faktor pengaruh aksi kolektif di masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini, selain dialog komunitas, modal sosial juga dipandang sebagai faktor yang memengaruhi aksi kolektif.

a) Modal sosial dalam aksi kolektif

Modal sosial adalah norma dan hubungan sosial yang telah dipahami bersama oleh kelompok masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial, terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan, menumbuhkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi dan dapat mendorong tingkat kepercayaan antara sesama masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang sama (Jones dan Woolcock 2007). Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi masalah kolektif seperti “tragedi bersama”. Sehingga interpretasi modal sosial dalam aksi kolektif berguna untuk menjelaskan berbagi pengetahuan, pemahaman, aturan atau norma kolektif, serta bagaimana interaksi dijalankan oleh individu dalam kelompok.

Ostrom (2000) menjelaskan bahwa modal sosial berperan penting dalam mewujudkan aksi kolektif karena menyediakan landasan kepercayaan dan kerangka interaksi yang memungkinkan individu bekerja sama secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Nasihuddin *et al.* (2020), Nugraha *et al.* (2021), dan Puspita *et al.* (2023) bahwa modal sosial sangat penting untuk mendukung pembangunan pedesaan dengan memfasilitasi aksi kolektif dan kerja sama di antara masyarakat desa, mempromosikan kerja sama di antara warga negara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Putnam (1993) juga menyebutkan tiga komponen utama modal sosial yang saling berhubungan dan dapat mendukung aksi kolektif di masyarakat desa yakni:

- (1) Norma, menetapkan batasan terhadap perilaku yang tidak jujur atau oportunistik, yang dapat merusak upaya kolektif.
- (2) Jaringan, berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran informasi dan sumber daya antar anggota masyarakat, yang mendorong kerja sama.
- (3) Kepercayaan, memperlancar interaksi antar individu, memudahkan kolaborasi, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan atau eksploitasi dalam hubungan sosial.

2.2 Smart Fisheries Village Program

SMART Fisheries Village (SFV) adalah program pengembangan desa perikanan cerdas yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di tingkat desa, dengan melibatkan berbagai pihak dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta masyarakat perikanan. Program ini mengkombinasikan partisipasi masyarakat perikanan dengan aspek teknis dan manajerial bagi pelaku usaha dan pelaku pendukung yang memiliki daya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola yang baik, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan usahanya (Keputusan KBPPSDM, KKP Nomor 186 Tahun 2024). SFV mengusung konsep pembangunan desa perikanan dari hulu ke hilir, berbasis penerapan teknologi dan manajemen tepat guna, serta bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Secara khusus program ini menargetkan peningkatan perekonomian masyarakat serta kegiatan produksi berkelanjutan ramah lingkungan. Pembangunan yang dilakukan pada program SFV berfokus pada tatanan sosial, kelembagaan di masyarakat, dan pembangunan fisik. Pembangunan pada tiga aspek tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing, kapasitas SDM, perekonomian desa, dan produksi ramah lingkungan.

2.3 State of the Art

State of the art ini disusun berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, terkait CFSC, dialog komunitas, aksi kolektif, kepemimpinan, *groupthink* dan modal sosial. Metode penelitian yang ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah *systematic literature review* (SLR), FGD, wawancara semi terstruktur dan penyebaran kuesioner. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan di Indonesia, Afrika Selatan, Ekuador, China, Australia dan Thailand.

Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan menggunakan mesin pencari dengan beberapa kata kunci, yakni CFSC, dialog komunitas, aksi kolektif, modal sosial dan *groupthink*. Mesin pencari yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Scopus*, *Google Scholar*, *Science Direct*, *SAGE Journal* dan *ResearchGate*. Penelusuran dilakukan terhadap artikel *open access* terakreditasi (SINTA dan *Scopus*) yang terbit dalam rentang waktu 10 tahun (2015-2025).

Tabel 1 Penelitian terdahulu yang relevan dengan CFSC, dialog komunitas, aksi kolektif, kepemimpinan, *groupthink* dan modal sosial

Peneliti (tahun)	Metode penelitian	Variabel yang ditinjau
Lauren Kogen (2022)	<i>Scoping review / literature review</i>	Partisipasi, komunikasi, pemberdayaan, perubahan sosial
Ricardo Ramírez & Wendy Quarry (2019)	<i>Meta-evaluation</i> berbasis studi kasus (DECI Project)	Strategi komunikasi, evaluasi (UFE), dampak program, pengambilan keputusan
Abdullah <i>et al.</i> (2023)	Kualitatif partisipatif	Dialog komunitas, katalis perubahan, aksi kolektif, perubahan sosial
Turner <i>et al.</i> (2022)	Studi media / kualitatif	Media, representasi sosial, perubahan sosial

Peneliti (tahun)	Metode penelitian	Variabel yang ditinjau
Bao <i>et al.</i> (2018)	Studi kasus	Jaringan (LIN), kepemimpinan, kapasitas, norma sosial, perubahan sosial
Asia <i>et al.</i> (2018)	Kuantitatif	Komunikasi partisipatif, partisipasi, fasilitator, aksi kolektif
Iba <i>et al.</i> (2024)	Kualitatif (analisis komunikasi & studi literatur/media)	Komunikasi partisipatif, dialog komunitas, inklusivitas, media sosial, partisipasi, perubahan sosial
Soraya <i>et al.</i> (2024)	Kuantitatif (analisis berbasis model TAM & <i>Motivational Language Theory</i>)	Komunikasi kepemimpinan (<i>directive, empathetic, meaning-making</i>), penerimaan inovasi, persepsi manfaat, persepsi kemudahan
Hariance <i>et al.</i> (2021)	Kualitatif (studi kasus koperasi & analisis kelembagaan)	Aksi kolektif, kelembagaan koperasi, efisiensi ekonomi, akses pasar, biaya transaksi, akses kredit, faktor produksi, partisipasi anggota, <i>free rider</i>
Yuanjaya (2020)	Kualitatif (studi kasus kelompok perkotaan)	Aksi kolektif, mitigasi bencana, pembentukan kelompok, jaringan sosial, dukungan <i>stakeholders</i> , kemandirian kelompok
Auliah <i>et al.</i> (2024)	Kuantitatif (analisis hubungan variabel / SEM atau regresi)	Modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma), aksi kolektif, partisipasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan
Jalil <i>et al.</i> (2021)	Kualitatif (studi lapangan & partisipatif)	Modal sosial (nilai, kepercayaan, resiprositas, norma, jaringan), aksi kolektif, partisipasi, gotong royong, efektivitas program, manfaat sosial-ekonomi
Rhayua <i>et al.</i> (2024)	Kuantitatif	<i>Groupthink</i> dan kualitas dialog komunitas pada keseragaman semu (<i>illusion of unanimity</i>), keberagaman pendapat, dialog terbuka, dialog kritis, dialog inklusif, struktur organisasi, tekanan sosial, norma keseragaman, dan kepemimpinan. <i>Groupthink</i> dalam pengambilan keputusan tim klinis, pada hierarki klinis, homogenitas tim, struktur organisasi, tekanan waktu, stres kerja, kualitas keputusan medis, heterogenitas tim, dan kolaborasi (<i>teamwork</i>).
DiPierro <i>et al.</i> (2022)	Kajian konseptual (<i>conceptual review/perspective paper</i>)	<i>Groupthink</i> dalam komunikasi kelompok, pada struktur organisasi, kepemimpinan, perilaku komunikasi kelompok, norma komunikasi, faktor psikologis, <i>dissent</i> , dan kualitas pengambilan keputusan.
Baptist (2015)	Kajian konseptual (<i>conceptual/theoretical study</i>)	

Sejumlah penelitian terdahulu mengkaji CFSC melalui pendekatan konseptual, evaluatif, dan empiris dengan fokus pada komunikasi partisipatif, dialog komunitas, aksi kolektif, dan perubahan sosial (Tabel 1). Abdullah *et al.* (2023) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif melalui dialog mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan mendorong aksi kolektif masyarakat. Temuan tersebut diperkuat oleh Asia *et al.* (2018) yang membuktikan adanya hubungan positif antara dialog komunitas dan aksi kolektif. Pada tahap katalis, Turner *et al.* (2022) menjelaskan bahwa media berperan membentuk makna sosial, namun belum cukup menghasilkan perubahan sosial tanpa partisipasi aktif masyarakat. Bao *et al.* (2018) menambahkan bahwa jaringan dan kepemimpinan berfungsi sebagai katalis yang memperkuat kapasitas, relasi, dan norma sosial. Sejalan dengan itu, Soraya *et al.* (2024) menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan, terutama melalui *meaning-making language*, meningkatkan penerimaan inovasi dan partisipasi anggota. Iba *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa komunikasi partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mampu memperkuat kesadaran kritis, legitimasi sosial, dan *sense of ownership* terhadap program perubahan sosial.

Sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada satu komunitas atau satu kasus pembangunan sehingga belum menjelaskan bagaimana mekanisme CFSC berlangsung pada komunitas dengan karakteristik kepemimpinan, kelembagaan, dan tingkat perkembangan yang berbeda. Penelitian terdahulu juga cenderung mengkaji faktor-faktor katalis secara terpisah sehingga kontribusi relatif penyuluh, karakteristik inovasi, dukungan pemerintah, dan komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas belum banyak diuji secara simultan dalam satu model analitis. Selain itu, Kogen (2022) mengemukakan bahwa pengembangan teori CFSC masih memiliki kelemahan dalam menjelaskan keterkaitan antara komunikasi, partisipasi, pemberdayaan, dan perubahan sosial.

Selain faktor pendukung, kualitas dialog komunitas juga dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa *groupthink*. Rhayua *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *groupthink* melemahkan dialog melalui keseragaman semu, penekanan terhadap keberagaman pendapat, dan kecenderungan mencapai konsensus tanpa evaluasi kritis. Kondisi tersebut dipicu oleh struktur organisasi yang tertutup, tekanan sosial, serta kepemimpinan yang tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. DiPierro *et al.* (2022) menambahkan bahwa hierarki organisasi, homogenitas anggota, dan tekanan waktu meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan, sedangkan keberagaman anggota dan kolaborasi mampu mengurangi kecenderungan tersebut. Baptist (2015) menjelaskan bahwa *groupthink* merupakan konsekuensi interaksi antara struktur organisasi, kepemimpinan, norma komunikasi, dan faktor psikologis yang menekan *dissent* serta membatasi munculnya alternatif solusi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa *groupthink* menghambat terciptanya dialog yang terbuka, kritis, dan deliberatif. Namun demikian, kajian mengenai *groupthink* masih didominasi bidang psikologi organisasi dan pengambilan keputusan sehingga belum banyak diintegrasikan sebagai faktor penghambat dalam model CFSC. Berdasarkan temuan tersebut, dialog komunitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mendukung, seperti jaringan inovasi, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap konteks

lokal, sekaligus dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa *groupthink*. Faktor-faktor tersebut menentukan kemampuan masyarakat dalam membangun persepsi bersama, merumuskan tujuan, dan menyepakati aksi kolektif.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif merupakan unsur penting dalam pembangunan berbasis kelompok. Hariance *et al.* (2021) menjelaskan bahwa aksi kolektif meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, mengurangi biaya transaksi, mempermudah akses terhadap kredit dan faktor produksi, serta dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan, kebutuhan ekonomi bersama, dan budaya gotong royong. Namun demikian, keberlanjutan aksi kolektif sering menghadapi persoalan *free rider*. Dalam konteks tersebut, modal sosial menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan aksi kolektif. Auliah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa modal sosial yang terdiri atas kepercayaan, jaringan, dan norma meningkatkan koordinasi, partisipasi, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta mengurangi perilaku *free rider*. Jalil *et al.* (2021) juga menegaskan bahwa nilai gotong royong, resiprositas, dan kedekatan sosial memperkuat solidaritas serta menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Penelitian terdahulu umumnya memosisikan modal sosial sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi aksi kolektif. Perannya dalam memperkuat hubungan antara dialog komunitas dan aksi kolektif dalam kerangka CFSC, namun, masih belum banyak dijelaskan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat empat kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian CFSC masih didominasi studi pada satu komunitas sehingga belum menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi partisipatif berlangsung pada komunitas dengan karakteristik pembangunan yang berbeda. Kedua, berbagai faktor katalis, yaitu penyuluh, karakteristik inovasi, dukungan pemerintah, dan komunikasi kepemimpinan, belum banyak diuji secara simultan dalam satu model CFSC. Ketiga, komunikasi kepemimpinan masih lebih banyak dikaji dalam konteks organisasi dan penerimaan inovasi daripada sebagai katalis dialog komunitas. Keempat, *groupthink* belum diintegrasikan sebagai faktor penghambat dialog komunitas, sedangkan modal sosial belum banyak dianalisis sebagai mekanisme yang memperkuat pembentukan aksi kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model CFSC yang lebih integratif melalui pengujian komparatif pada Desa Kawali dan Desa Bangsring yang memiliki karakteristik kepemimpinan, kelembagaan, dan dinamika pembangunan yang berbeda. Model tersebut mengintegrasikan komunikasi kepemimpinan sebagai katalis dialog komunitas, *groupthink* sebagai faktor penghambat dialog, dan modal sosial sebagai mekanisme yang memperkuat pembentukan aksi kolektif. Pengembangan model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penyempurnaan CFSC sekaligus menjelaskan bagaimana mekanisme komunikasi partisipatif menghasilkan perubahan sosial pada komunitas dengan karakteristik pembangunan yang berbeda.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang bersifat partisipatif untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Salah satu pendekatan komunikasi partisipatif yang menjelaskan proses tersebut adalah *Communication for Social Change* (CFSC) yang dikembangkan oleh

Figueroa *et al.* (2002). Model ini memandang komunikasi sebagai proses dialog yang bersifat siklikal dan relasional, serta menempatkan perbedaan pandangan dan konflik sebagai bagian dari pembentukan kesepahaman menuju perubahan sosial.

CFSC menjelaskan bahwa perubahan sosial berlangsung melalui rangkaian proses komunikasi yang diawali oleh hadirnya katalis, berkembang menjadi dialog komunitas, kemudian diwujudkan dalam aksi kolektif. Efektivitas perubahan sosial bergantung pada kemampuan katalis dalam mendorong masyarakat memasuki proses dialog yang menghasilkan keputusan bersama dan aksi kolektif (Figueroa *et al.* 2002). Berdasarkan proposisi CFSC tersebut, penelitian ini memandang bahwa faktor-faktor yang berfungsi sebagai katalis akan memengaruhi kualitas dialog komunitas.

Katalis dioperasionalkan ke dalam empat variabel, yaitu peran penyuluh, karakteristik inovasi, dukungan pemerintah, dan komunikasi kepemimpinan. Keempat variabel tersebut dipilih karena berfungsi menyediakan informasi, sumber daya, arahan, dan motivasi bagi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan masyarakat dalam dialog komunitas sebagai mekanisme utama pembentukan aksi kolektif.

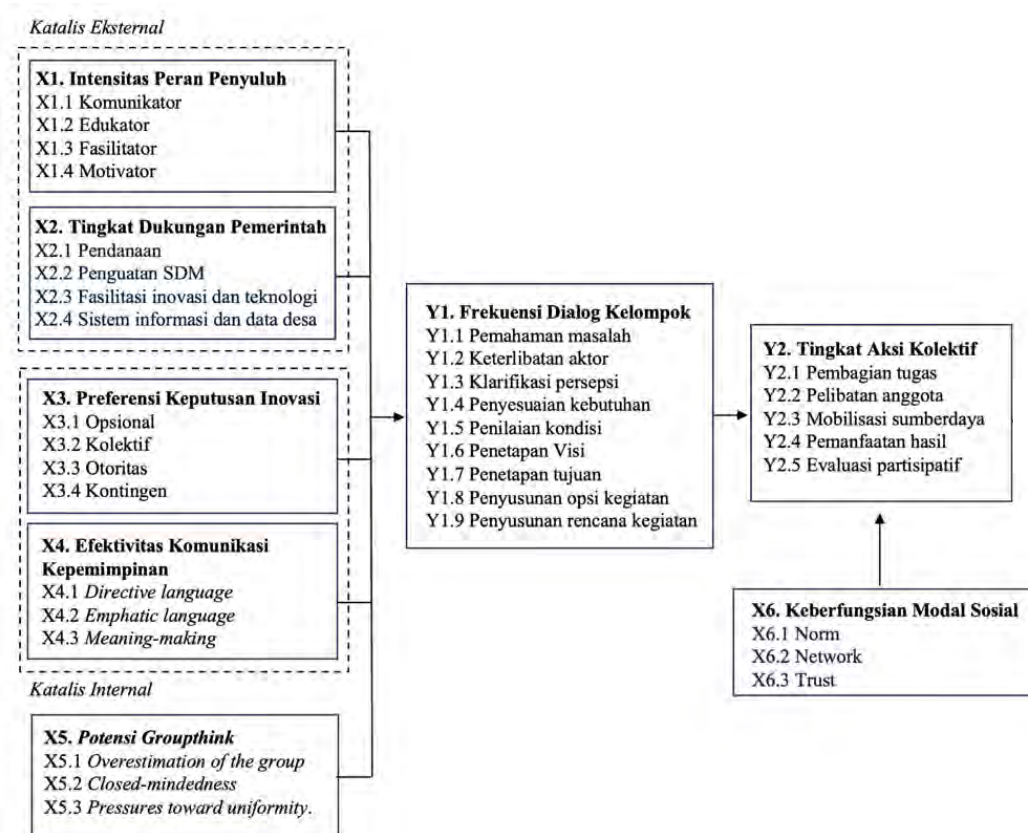
Selain faktor yang bersifat mendorong, proses dialog komunitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa *groupthink*. Janis (1972) menjelaskan bahwa *groupthink* mendorong anggota kelompok mengutamakan konsensus dibandingkan evaluasi kritis sehingga mengurangi keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Lubis (2011), DiPierro *et al.* (2022), Baptist (2015), dan Rhayua *et al.* (2024) menunjukkan bahwa tekanan kelompok, struktur organisasi, dan kepemimpinan yang tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat menyebabkan penurunan kualitas dialog.

Dialog komunitas dalam CFSC mencakup proses identifikasi masalah, pelibatan pemangku kepentingan, klarifikasi kebutuhan, penyusunan visi, penetapan tujuan, penyusunan alternatif, hingga penyepakatan rencana tindakan. Proses tersebut membangun pemahaman bersama, menyelaraskan tujuan, dan memperkuat komitmen anggota sehingga mendorong terbentuknya aksi kolektif (Figueroa *et al.* 2002). Abdullah *et al.* (2023) dan Asia *et al.* (2018) menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif melalui dialog meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam aksi kolektif, sehingga dialog komunitas berpengaruh positif terhadap pembentukan aksi kolektif.

Keberhasilan aksi kolektif turut dipengaruhi oleh modal sosial yang mencakup *trust*, *norm*, dan *network*. Ostrom (2000), Jalil *et al.* (2021), Utami dan Pandjiatan (2023), serta Auliah *et al.* (2024) menjelaskan bahwa modal sosial memperkuat koordinasi, komitmen, kerja sama, serta mengurangi perilaku *free rider* dalam pengelolaan sumber daya bersama. Artinya modal sosial berpengaruh positif terhadap pembentukan aksi kolektif melalui penguatan koordinasi dan komitmen antaranggota kelompok. Berdasarkan keseluruhan telaah teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan model CFSC dengan mengintegrasikan komunikasi kepemimpinan sebagai katalis utama yang mendorong dialog komunitas, *groupthink* sebagai faktor



penghambat dialog, serta modal sosial sebagai faktor yang memperkuat pembentukan aksi kolektif sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2 Kerangka pemikiran penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, maka penelitian ini melakukan pengujian hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis utama:

- H1: Peran penyuluh berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas
- H2: Dukungan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas
- H3: Keputusan inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas
- H4: Komunikasi kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas
- H5: Dialog kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi kolektif
- H6: Modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi kolektif

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatis, yang menempatkan masalah penelitian sebagai pusat proses ilmiah serta berorientasi pada manfaat praktis dari hasil penelitian (Creswell dan Creswell 2023). Kebenaran tidak bersifat absolut dan ditentukan oleh sejauh mana suatu teori atau pendekatan mampu memberikan hasil yang efektif bagi pemecahan masalah sosial. Paradigma ini menekankan prinsip *what works*, yaitu penggunaan metode yang paling efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyusun strategi komunikasi partisipatif.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam melakukan studi atau penelitian (Creswell dan Creswell 2023). Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* sekuensial eksploratori dengan dominasi kuantitatif, yang terdiri atas fase eksplorasi kualitatif, pengembangan instrumen, dan pengujian kuantitatif. Penelitian dilakukan melalui *survei research* untuk mendeskripsikan karakteristik populasi dan menguji hubungan antarvariabel.

Desain penelitian terdiri dari tiga fase. Pertama adalah *exploratory phase*, yakni pengumpulan informasi dasar tentang struktur sosial masyarakat, peran penyuluh di masing-masing desa, dukungan pemerintah, dan pola kepemimpinan dan modal sosial yang berkembang di masyarakat. Fase pertama dilakukan melalui cara wawancara mendalam. Menurut Muljono (2012) wawancara mendalam berguna untuk mengumpulkan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Fase kedua adalah *development/building phase*, yakni menyusun kuesioner, melakukan uji validitas dan reliabilitas, memperbaiki instrumen (kuesioner). Fase ketiga adalah *explanatory phase*, yakni pengumpulan data kuantitatif melalui survei untuk mengidentifikasi kecenderungan serta pola hubungan antarindikator.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua lokasi ini dipilih karena memenuhi kriteria inklusi penelitian yakni terdapat kelompok penerima program SFV dan dinilai berhasil menjalankan program tersebut dengan baik. Penelitian dilakukan pada bulan November hingga Desember 2025 di Desa Kawali dan Januari hingga Februari 2026 di Desa Bangsring.

3.4 Populasi dan Sampel Responden

Populasi adalah kumpulan unit objek studi yang dipelajari, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dijadikan objek penelitian dengan tujuan memperoleh gambaran, kesimpulan, atau generalisasi mengenai populasi secara keseluruhan (Sugiyono 2022). Populasi penelitian ini terdiri dari

117 orang anggota SFV di Desa Kawali dan 173 orang anggota SFV di Desa Bangsring. Penarikan sampel pada populasi tersebut ditentukan melalui pendekatan *probability sampling* khususnya *random sampling*. Metode ini memastikan setiap anggota populasi memiliki kesempatan sama untuk dipilih tanpa adanya intervensi subjektif peneliti. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan berbagai macam pendekatan PLS-SEM. Pertama aturan *ad-hoc* PLS untuk penelitian eksploratori menurut Rahadi (2023) yakni 30-50 responden. Kedua *10 times rule* oleh Hair *et al.* (2017) yakni $10 \times 4 = 40$. Ketiga adalah *power analysis* oleh Hair *et al.* (2017), menggunakan tingkat keyakinan (*confidence level*) 95 persen ($\alpha = 0,05$), efek sedang ($f^2 \approx 0,15$) dan tingkat kekuatan uji (*power*) sebesar 0,8 (peluang untuk menemukan pengaruh yang benar-benar ada sebesar 80 persen) pada persamaan regresi dengan 4 prediktor diperlukan 85 sampel. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, responden pada penelitian ini berjumlah 85 di masing-masing desa (Tabel 2).

Tabel 2 Jumlah responden berdasarkan desa, jenis kelompok, dan jenis kelamin

Kelompok	Laki-laki	Perempuan
<i>Desa Kawali</i>		
Pulaka cikerta	7	
Sukamatuh	7	1
Paseh	6	2
Widuri	7	
Situhapa	7	
Wira sejahtera	5	
Bojongsari		15
Ertiga		15
Kubis		13
Total	39	46
<i>Desa Bangsring</i>		
Pesona bahari	10	1
Mutiara tabuhan	9	3
Anugerah bahari		6
Bhakti abadi laut	7	4
Tanjungan beach	4	6
Bangsring under water	4	9
Bunda bangsring		11
Pesona bahari	10	1
Total	44	41

3.5 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive* berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu, sehingga informan yang dipilih relevan dan mampu memberikan informasi mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono 2022). Peneliti memilih informan dengan pertimbangan posisi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program SFV baik sebagai pengambil keputusan, pelaksana program, maupun penerima manfaat. Adapun informan yang dipilih berjumlah 28 orang, meliputi kepala desa, sekretaris desa, penyuluh, ketua gapokkan, ketua pokdakan/poklahsar/pokmaswas, perwakilan anggota

pokdakan/poklahsar/pokmaswas, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan yang beragam bertujuan untuk mengumpulkan gambaran yang komprehensif mengenai proses, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *quantitative method* oleh Creswell dan Creswell (2023). Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan (Gambar 3). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil menggunakan metode (1) survei menggunakan kuesioner kepada sebagian besar anggota pokdakan, poklahsar, dan pokmaswas (2) wawancara mendalam kepada para *stakeholders* kunci untuk menggali informasi kualitatif dan (3) observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan lebih jelas mengenai aktivitas dan dinamika serta fakta-fakta di lapangan yang relevan dengan tujuan studi. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur dokumen, laporan, publikasi artikel ilmiah dan populer yang relevan.

3.7 Hasil Uji Validitas

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, telah melalui uji validitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sah, akurat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang diukur (Effendi dan Tukiran 2012). Langkah ini bertujuan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi objek yang diteliti. Uji validitas dilakukan kepada 21 anggota SFV di Kota Bogor pada 20-24 Oktober 2025. Alasan melakukan uji validitas di lokasi tersebut karena adanya kemiripan karakteristik responden, yakni sama-sama penerima program SFV.

Tabel 3 Nilai uji korelasi item-total dan validitas konvergen

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1 - X1.12	0,737; 0,763; 0,721; 0,940; 0,754; 0,864; 0,675; 0,840; 0,666; 0,711; 0,876; 0,811	0,422	Valid
X2.1-X2.8	0,625; 0,704; 0,772; 0,693; 0,459; 0,100; 0,555; 0,566	0,422	Valid dan Tidak valid (X2.6)
X3.1-X3.10	0,911; 0,845; 0,885; 0,946; 0,784; 0,860; 0,882; 0,787; 0,956; 0,895	0,422	Valid
X4.1-X4.9	0,917; 0,835; 0,945; 0,757; 0,828; 0,902; 0,890; 0,884; 0,766	0,422	Valid
X5.1-X5.11	0,219; -0,01; 0,408; 0,198; 0,699; 0,627; 0,592; 0,443; 0,645; 0,423; 0,534	0,422	Valid Tidak valid (X5.1-X5.4)
X6.1-X6.6	0,818; 0,914; 0,855; 0,498; 0,915; 0,804	0,422	Valid
Y1.1-Y1.10	0,740; 0,883; 0,424; 0,744; 0,861; 0,880; 0,903; 0,760; 0,759; 0,774	0,422	Valid
Y2.1-Y2.10	0,767; 0,851; 0,823; 0,746; 0,806; 0,904; 0,808; 0,771; 0,879; 0,887	0,422	Valid

Data yang diperoleh diolah melalui dua tahapan. Pertama dibersihkan (*cleaning*), dilakukan pengodean, dan ditabulasikan menggunakan *software Microsoft Excel* berdasarkan variabel yang terdapat dalam pertanyaan penelitian. Hal ini untuk mempermudah untuk menganalisis data lebih lanjut. Tahap kedua adalah uji korelasi item-total (r_{hitung} dibandingkan r_{tabel}) menggunakan *R Studio* dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5$ persen)) yang disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel 3, sebagian besar indikator pada variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, dan Y2 menunjukkan nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} . Menurut Sugiyono (2022), suatu item (pertanyaan) dinyatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} pada tingkat signifikansi tertentu, karena kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara butir pertanyaan dan variabel yang diukurnya. Meski begitu variabel X2.6, X5.1, X5.2, X5.3, dan X5.4 memiliki nilai r_{hitung} di bawah r_{tabel} , artinya butir tersebut tidak merepresentasikan variabel yang dimaksud (tidak valid). Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan perbaikan pertanyaan butir tersebut.

3.8 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran relatif dan konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih (Effendi dan Tukiran 2012). Uji reliabilitas dilakukan menggunakan *Cronbach's alpha* untuk menilai tingkat konsistensi internal atau homogenitas antar item dalam suatu variabel (Tabel 4). Semakin tinggi nilai *Cronbach's alpha* semakin semakin besar keyakinan bahwa instrumen mampu mengukur variabel laten secara konsisten. Kriteria reliabilitas yang digunakan sebagai berikut:

- Nilai *Cronbach's alpha* 0,00 sampai dengan 0,20 berarti sangat tidak reliabel,
- Nilai *Cronbach's alpha* 0,21 sampai dengan 0,40 berarti tidak reliabel,
- Nilai *Cronbach's alpha* 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel,
- Nilai *Cronbach's alpha* 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel,
- Nilai *Cronbach's alpha* $> 0,81$ berarti sangat reliabel.

Tabel 4 Nilai uji *Cronbach's alpha* instrumen penelitian

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>
X1. Peran penyuluh	0,942
X2. Keputusan inovasi	0,688
X3. Dukungan pemerintah	0,966
X4. Komunikasi kepemimpinan	0,956
X5. <i>Groupthink</i>	0,581
X6. Modal sosial	0,890
Y1. Dialog komunitas	0,926
Y2. Aksi kolektif	0,948

Berdasarkan hasil uji *Cronbach's alpha*, variabel X1, X3, X4, X6, Y1 dan Y2 menunjukkan sangat reliabel, sedangkan X2 (0,688) menunjukkan reliabel dan X5 (0,581) menunjukkan cukup reliabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel mengukur konsep yang dimaksud.

3.9 Uji *Trustworthiness*

Trustworthiness adalah ukuran tingkat kepercayaan dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan sejauh mana temuan kualitatif dapat dipercaya, konsisten, dan bebas dari bias peneliti. Pada penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi sumber untuk membandingkan informasi dan triangulasi metode untuk melihat keselarasan informasi wawancara dengan praktik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda namun berkaitan dengan isu yang sama. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

3.10 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjabaran konsep atau variabel yang bersifat abstrak ke dalam bentuk yang dapat diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Definisi operasional memudahkan peneliti dalam menentukan indikator, instrumen, serta teknik pengumpulan data yang tepat. Adanya definisi operasional menjaga kejelasan dan konsistensi pengukuran variabel, serta meminimalkan subjektivitas atau bias interpretasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk pengukuran variabel yang terkait dengan proses dialog komunitas dan aksi kolektif dalam pengembangan masyarakat di komunitas pedesaan perikanan dan kelautan. Pengukuran menggunakan skala nominal, ordinal dan rasio. Skala nominal merupakan skala yang hanya digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau label tertentu tanpa memperhatikan urutan atau tingkatan, seperti jenis kelamin. Sedangkan skala ordinal menunjukkan peringkat atau tingkatan antar data, tetapi jarak antar tingkatannya tidak dapat diukur secara pasti. Skala rasio memiliki nilai yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki jarak terukur dan titik nol absolut, sehingga memungkinkan operasi matematika penuh, seperti umur, pendapatan, atau jumlah anggota keluarga. Berikut indikator, definisi operasional skala dan pengukuran setiap peubah:

- a) Karakteristik individu menurut Triguna *et al.* (2020) dapat diukur melalui umur, pendidikan, kepemilikan dan pengalaman. Data ini diukur menggunakan skala nominal dan rasio, sebagaimana penjelasan berikut:
 - (1) Umur adalah usia anggota kelompok saat diwawancarai dalam satuan tahun. Umur anggota kelompok diukur berdasarkan jumlah tahun hidup yang dihitung dari tahun kelahiran hingga tahun penelitian berlangsung. Responden dianggap bertambah usia dalam tahun berjalan jika wawancara dilakukan tepat pada tanggal lahir atau sudah melebihi hari tersebut. Penilaian dilakukan dengan menuliskan angka usia dalam tahun sehingga jenis data/skalanya termasuk rasio.
 - (2) Pendidikan adalah tingkat pendidikan formal terakhir anggota kelompok atau yang disetarakan. Pendidikan diukur berdasarkan tingkat pendidikan formal tertinggi yang telah diselesaikan oleh anggota kelompok. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu jawaban yang terdiri dari (1) SD (2) SMP (3) SMA (4) D3 (5) D4/S1 (6) S2/S3, sehingga jenis data/skala termasuk ordinal.

- (3) Status kepemilikan usaha perikanan adalah bentuk penguasaan atau hak kepemilikan individu atau kelompok terhadap unit usaha perikanan yang dijalankan. Status kepemilikan usaha diukur berdasarkan kepemilikan aset dalam pengelolaan usaha perikanan, baik secara pribadi maupun bersama kelompok. Penilaian dilakukan dengan memilih salah satu jawaban yang terdiri dari (1) Milik sendiri (2) Sewa (3) Tidak memiliki, sehingga jenis data/skalanya termasuk nominal.
- (4) Pengalaman adalah lamanya anggota kelompok mengelola usaha perikanan dan/atau usaha turunannya dalam hitungan bulan. Penilaian dilakukan dengan menuliskan angka lama mengelola dalam bulan sehingga jenis data/skalanya termasuk rasio.
- b) Intensitas peran penyuluh (X_1), penyuluh adalah individu yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi, mengarahkan dan mewujudkan perubahan sosial dalam kelompok atau organisasi (Aniche *et al.* 2024). Nurida *et al.* (2024), Safira *et al.* (2022), Latif *et al.* (2022), Abdullah *et al.* (2021), Sundari *et al.* (2021) dan Khairunnisa *et al.* (2021) mengklasifikasikan peran penyuluh menjadi fungsi komunikator, motivator, fasilitator, dan edukator sebagaimana yakni:
 - (1) $X_{1.1}$ Peran komunikator adalah tugas penyuluh untuk menyampaikan informasi, inovasi, dan kebijakan secara jelas dan efektif kepada masyarakat, serta memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan. Efektivitas peran komunikator diukur dari persepsi anggota kelompok tentang tingkat kejelasan informasi yang disampaikan penyuluh, tingkat pemahaman terhadap informasi tersebut, dan tingkat kepuasan saat menyampaikan informasi kepada penyuluh. Pengukuran dilakukan melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (2) $X_{1.2}$ Peran edukator adalah tugas penyuluh menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan, demonstrasi, dan pendampingan lapangan. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan agar mereka mampu mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan. Peran edukator diukur dari tingkat persepsi anggota kelompok terhadap intensitas penyuluh dalam memberikan pelatihan, demonstrasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi anggota kelompok melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (3) $X_{1.3}$ Peran fasilitator adalah tugas penyuluh membantu masyarakat mengakses sumber daya, teknologi, pasar, serta jaringan kelembagaan yang mendukung. Penyuluh menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pihak pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

untuk memperlancar proses produksi dan pemasaran. Peran fasilitator diukur dari tingkat persepsi anggota kelompok terhadap upaya penyuluh dalam menjembatani masyarakat untuk memperoleh sumber daya, inovasi teknologi, dan jaringan luar kelompok dalam program SFV. Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi anggota kelompok, melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (4) X_{1.4} Peran motivator adalah tugas penyuluh berperan untuk menumbuhkan semangat, kepercayaan diri, dan kemauan masyarakat untuk berubah dan berinovasi. Melalui pendekatan persuasif dan keteladanan, penyuluh mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan berani mengambil keputusan untuk mengadopsi teknologi baru. Peran ini diukur dari tingkat kemampuan penyuluh melakukan pendekatan persuasif dan tingkat keteladanan agar masyarakat mau menerima program SFV. Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat, menggunakan tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- c) Tingkat dukungan pemerintah (X₂) menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) terdapat empat bentuk dukungan pemerintah dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan desa yakni:
 - (1) X_{2.1} Pendanaan adalah bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan SFV dari pemerintah baik dana *in cash* maupun *in kind*. Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi anggota kelompok pada dampak bantuan pendanaan terhadap intensitas dialog. Pengukuran dilakukan melalui dua pertanyaan terbuka dan dua pernyataan kuesioner tertutup berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor pertanyaan tertutup adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (2) X_{2.2} Penguatan SDM adalah pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyelenggaraan SFV dari pemerintah. Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi anggota kelompok pada dampak penguatan SDM terhadap intensitas dialog. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.



- (3) X_{2.3} Fasilitasi inovasi dan teknologi adalah pengadaan inovasi dan inisiasi kerja sama dengan pihak luar desa dalam rangka program SFV dari pemerintah. Fasilitasi inovasi dan teknologi diukur dari pengaruh bantuan teknologi (alat, aplikasi, atau metode baru) serta kesempatan kerja sama dengan pihak lain selama pelaksanaan program SFV terhadap intensitas dialog. Pengukuran dilakukan melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (4) X_{2.4} Sistem informasi dan data desa adalah penyediaan dan distribusi informasi pendukung program SFV dari pemerintah desa. Efektivitas sistem informasi dan data desa diukur dari pengaruh penyediaan informasi program terhadap intensitas dialog. Pengukuran dilakukan melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- d) Preferensi keputusan adopsi inovasi (X₃), inovasi mendorong kemajuan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global. Menurut Rogers (1983) adopsi oleh individu sering kali terjadi setelah organisasi atau kelompok memutuskan untuk menerima dan menerapkan inovasi tersebut, yang terdiri dari:
- (1) X_{3.1} Opsional, adalah keputusan adopsi yang ditentukan individu secara bebas. Adopsi dipengaruhi oleh motivasi pribadi, pengalaman, serta persepsi individu terhadap manfaat inovasi untuk dirinya. Pengaruh keputusan opsional terhadap dialog diukur dari persepsi kemandirian anggota kelompok dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi. Pengukuran dilakukan melalui satu pertanyaan terbuka dan dua pernyataan kuesioner tertutup berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor pertanyaan tertutup adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (2) X_{3.2} Kolektif, adalah keputusan adopsi yang ditentukan melalui diskusi dan kesepakatan kelompok. Pengaruh keputusan kolektif terhadap dialog diukur dari persepsi keterlibatan anggota kelompok dalam mengambil keputusan adopsi inovasi dalam musyawarah atau kesepakatan bersama. Pengukuran dilakukan melalui pertanyaan satu terbuka dan dua pernyataan kuesioner tertutup berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor pertanyaan tertutup adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (3) X_{3.3} Otoritas, adalah keputusan adopsi yang ditentukan oleh pimpinan atau ahli. Tipe keputusan ini dapat mempercepat adopsi dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

organisasi hierarkis karena adanya legitimasi kekuasaan. Pengaruh keputusan adopsi otoritas terhadap dialog diukur dari persepsi dominasi pimpinan kelompok atau ahli dalam menentukan keputusan adopsi inovasi. Pengukuran dilakukan melalui satu pertanyaan terbuka dan dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor pertanyaan tertutup adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (4) X_{3.4} Kontingen, yaitu keputusan yang bergantung pada keberhasilan inovasi sebelumnya. Pengaruh keputusan kontingen terhadap dialog diukur dari persepsi anggota kelompok dalam mempertimbangkan keberhasilan atau kegagalan sebelumnya untuk keputusan adopsi inovasi selanjutnya. Pengukuran dilakukan melalui satu pertanyaan terbuka dan dua pernyataan kuesioner tertutup berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor pertanyaan tertutup adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- e) Efektivitas komunikasi kepemimpinan (X₄) adalah proses penyampaian makna yang disengaja dan terkontrol oleh seorang ketua kelompok untuk memengaruhi anggota kelompoknya melalui keterampilan komunikasi dan sumber daya yang beliau miliki. Mayfield dan Mayfield (2017) menyebutkan komunikasi kepemimpinan mencakup tiga kategori utama, yakni:
 - (1) X_{4.1} *Directive language*, adalah komunikasi menggunakan bahasa instruksi untuk memberikan arahan tugas, prosedur, dan ekspektasi yang jelas sehingga penerima tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Kecenderungan pemimpin menggunakan komunikasi *direction-giving language* diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang intensitas pemimpin memberikan arahan tugas, prosedur, dan ekspektasi yang jelas. Pengukuran dilakukan melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (2) X_{4.2} *Empathetic language*, yakni komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa penuh perhatian emosional, dukungan, pengakuan terhadap pengalaman individu, dan responsif terhadap kebutuhan personal atau kelompok. Kecenderungan pemimpin menggunakan komunikasi *empathetic language* diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang intensitas pemimpin memberikan atau menunjukkan kepedulian emosional, pemberian dukungan, dan pengakuan atas kontribusi anggota secara verbal dan non-verbal. Pengukuran dilakukan melalui tiga pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan



menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, dan tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (3) $X_{4.3}$ *Meaning-making language*, yakni komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang mengaitkan tugas/aktivitas dengan nilai, visi, dan tujuan yang lebih besar sehingga pekerjaan terasa bermakna bagi individu. Kecenderungan pemimpin menggunakan komunikasi *meaning-making language* diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang intensitas pemimpin menyampaikan pesan yang dihubungkan pada tugas atau aktivitas anggota dengan nilai, visi, dan tujuan kelompok sehingga pekerjaan terasa lebih bermakna. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 15, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 3-6, sedang: 7-10, dan tinggi: 11-15, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- f) Potensi *groupthink* (X_5) adalah tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa suatu kelompok mengalami pola berpikir kolektif yang tidak sehat akibat dorongan berlebihan untuk mencapai kesepakatan. Menurut Janis (1982), kondisi ini muncul ketika harmoni dan konsensus kelompok lebih diprioritaskan dibandingkan evaluasi kritis terhadap alternatif keputusan. Terdapat tiga kategori gejala yang menunjukkan suatu kelompok mengalami *groupthink*, yakni:

- (1) $X_{5.1}$ *Overestimation of the group* adalah keadaan kelompok yang menilai dirinya terlalu tinggi dan merasa kebal terhadap kesalahan. Kelompok memiliki keyakinan berlebihan bahwa keputusan atau tindakan kelompok tidak akan gagal, tercermin dari sikap terlalu optimis dan cenderung mengabaikan risiko. Di samping itu, kelompok juga memiliki keyakinan bahwa setiap keputusan kelompok selalu benar secara moral, sehingga kritik etis maupun logis dapat diabaikan. Gejala *overestimation of the group* diukur melalui persepsi anggota kelompok terhadap potensi kegagalan dan kebenaran keputusan kelompok. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat tidak yakin; (2) tidak yakin; (3) cukup yakin; (4) yakin; (5) sangat yakin. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian: rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (2) $X_{5.2}$ *Closed-mindedness*, adalah keadaan di mana kelompok menutup diri dari masukan eksternal atau informasi yang berlawanan dengan nilai kelompok. Kelompok cenderung mencari pembenaran atas informasi yang bertentangan dengan keputusan mereka, termasuk dengan memutarbalikkan atau mengabaikan bukti kontra, serta mencari alasan untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat. Selain itu, kelompok juga cenderung menyederhanakan pihak luar sebagai lemah, salah, atau berbahaya, sehingga argumen dari luar kelompok tidak dipertimbangkan serius. Pengukuran *closed-mindedness* dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan,

dengan rincian: rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (3) $X_{5.3}$ *Pressures toward uniformity* adalah tekanan internal yang kuat agar semua anggota terlihat setuju, yang mengorbankan kebebasan berpendapat. Sebagian besar anggota kelompok menahan diri untuk mengemukakan keraguan atau kritik demi menjaga harmoni kelompok. Mereka memiliki rasa takut untuk menyampaikan kritik atau pendapat yang berbeda dengan kelompok karena khawatir tidak diterima atau menimbulkan masalah. Mereka akan mendapatkan hukuman jika melakukan kesalahan. Di sisi lain, para ketua kelompok menganggap bahwa diamnya anggota diyakini sebagai tanda persetujuan, meskipun bisa jadi merupakan bentuk ketakutan atau keraguan. Pada gejala ini, terdapat individu atau subkelompok yang bertugas menyaring informasi agar tidak masuk ke dalam diskusi, Pengukuran dilakukan melalui empat pernyataan kuesioner berbasis skala *likert*, (1) sangat rendah; (2) rendah; (3) sedang; (4) tinggi; (5) sangat tinggi. Total skor adalah 20, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian: rendah: 4-10, sedang: 11-15, dan tinggi: 15-20, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- g) Keberfungsian modal sosial (X_6) adalah faktor penting dalam memfasilitasi aksi kolektif (Puspita *et al.* 2023). Menurut Putnam (1993) komponen modal sosial terdiri dari:

- (1) $X_{6.1}$ *Norm* adalah aturan untuk membatasi perilaku yang dapat merusak upaya kolektif. Tingkat pengaruh norma pada aksi kolektif diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang pengaruh aturan yang telah disepakati terhadap pelaksanaan program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (2) $X_{6.2}$ *Network* adalah sarana untuk pertukaran informasi dan sumber daya antar anggota masyarakat, yang mendorong kerja sama. Tingkat pengaruh jaringan diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang pengaruh pertukaran informasi antar anggota kelompok terhadap efektivitas kerja sama dalam melaksanakan program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (3) $X_{6.3}$ *Trust*, bermanfaat untuk memperlancar interaksi antar individu, memudahkan kolaborasi, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan atau eksploitasi dalam hubungan sosial. Tingkat kepercayaan diukur melalui pendapat anggota kelompok tentang kepercayaan antar anggota kelompok dalam memudahkan interaksi dan kolaborasi pelaksanaan program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju;



(3) cukup setuju; (4) setuju; (5) sangat setuju. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

h) Frekuensi dialog komunitas (Y_1) Figueroa *et al.* (2002) adalah percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih, bertujuan untuk saling memahami dan mengklarifikasi apa yang dipikirkan serta diyakini masing-masing pihak. Terdapat 10 langkah untuk melakukan dialog komunitas, yakni:

- (1) $Y_{1.1}$ Pemahaman masalah adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Tingkat identifikasi masalah pada program SFV diukur dari partisipasi anggota kelompok dalam mengenali, mendiskusikan, dan menyepakati penyebab suatu masalah kemiskinan yang muncul di lingkungan mereka. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, , sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (2) $Y_{1.2}$ Keterlibatan aktor merupakan kegiatan identifikasi dan pelibatan pemimpin dan *stakeholders*, yakni aktivitas komunikasi untuk mengenali dan melibatkan individu yang dianggap dapat berperan sebagai pemimpin atau pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SFV. Tingkat identifikasi dan pelibatan *stakeholders* dalam program SFV diukur melalui keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan komunikasi untuk mengidentifikasi dan melibatkan individu yang berpotensi mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (3) $Y_{1.3}$ Klarifikasi persepsi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk mengkonfirmasi persepsi atau pendapat setiap anggota masyarakat terhadap rencana program SFV dalam pembangunan kewirausahaan sosial. Tingkat klarifikasi persepsi program SFV diukur melalui keterlibatan anggota kelompok dalam kegiatan komunikasi untuk menyampaikan dan mengonfirmasi pendapat, masukan, atau persepsi mereka terkait rencana program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak paham sama sekali; (2) tidak paham; (3) kurang paham; (4) paham; (5) sangat paham. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (4) $Y_{1.4}$ Penyesuaian kebutuhan individu dan kebutuhan bersama adalah aktivitas komunikasi penyampaian kebutuhan masing-masing anggota dalam proses perencanaan program SFV. Tingkat penegasan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

bersama program SFV diukur melalui kesesuaian program dengan kebutuhan anggota kelompok dan kelompok penerima program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (5) Y_{1.5} Penilaian kondisi eksisting adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk menilai kesenjangan antara kondisi pengelolaan bisnis perikanan dan turunannya sebelum dan sesudah pelaksanaan program SFV. Frekuensi penilaian kondisi eksisting diukur melalui partisipasi anggota kelompok pada pertemuan identifikasi situasi dan permasalahan kelompok. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (6) Y_{1.6} Penetapan visi adalah aktivitas komunikasi yang membahas perumusan dan penetapan visi bersama yang ingin dicapai melalui program SFV. Frekuensi penetapan visi program SFV diukur melalui partisipasi anggota kelompok pada pertemuan yang membahas, merumuskan, dan menyepakati visi atau tujuan bersama yang ingin dicapai melalui program SFV. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (7) Y_{1.7} Penetapan tujuan adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk merumuskan dan menyepakati tujuan yang hendak dicapai dalam program SFV. Tingkat penetapan tujuan program SFV diukur melalui partisipasi anggota kelompok pada pertemuan yang membahas tujuan dan target kelompok. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (8) Y_{1.8} Penyusunan opsi dan konsensus atas pilihan kegiatan adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk membangun kesepakatan terhadap berbagai pilihan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam program SFV. Frekuensi konsensus dan penyusunan opsi program SFV diukur melalui partisipasi anggota kelompok pada pertemuan yang mengidentifikasi sumber daya pendukung dan merumuskan daftar kegiatan untuk mencapai tujuan. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah



10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (9) Y_{1.9} Penyusunan rencana adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan untuk menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam program SFV. Frekuensi penyusunan rencana program SFV diukur melalui keterlibatan anggota kelompok dalam pelaksanaan program melalui jadwal rutin dan pelaksanaan SOP. Pengukuran dilakukan melalui satu pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 5, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 1, sedang: 2-3, tinggi: 4-5, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- i) Tingkat aksi kolektif (Y₂) adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara sukarela maupun melalui paksaan (Jordan 2023). Figueroa *et al.* (2002) menyebutkan terdapat lima tahapan utama aksi kolektif, yakni:
 - (1) Y_{2.1} Pembagian tugas adalah keterlibatan masyarakat dalam pemilihan penanggung jawab program-program SFV. Tingkat penugasan tanggung jawab diukur melalui keterlibatan anggota kelompok dalam pelaksanaan tugas dan menepati tenggat waktu pelaksanaan kegiatan program. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (2) Y_{2.3} Pelibatan anggota adalah keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam program SFV. Tingkat pelaksanaan kegiatan diukur melalui partisipasi anggota kelompok pada pelaksanaan tugas secara disiplin dan pengawasan pimpinan kelompok. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
 - (3) Y_{2.2} Mobilisasi sumber daya kelompok adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, serta menunjuk pihak yang bertanggung jawab sebagai penghubung untuk memenuhi kebutuhan program-program SFV. Tingkat mobilisasi sumber daya kelompok diukur melalui partisipasi anggota kelompok dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara aktif dan mengambil peran sebagai penghubung untuk memastikan kebutuhan program SFV terpenuhi. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

- (4) Y_{2.4} Pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan adalah keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan atau penggunaan hasil dari pelaksanaan program-program SFV. Tingkat pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan diukur melalui dampak yang dirasakan anggota kelompok dan pencapaian tujuan awal, diukur secara objektif. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.
- (5) Y_{2.5} Evaluasi partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menilai keberhasilan dan perbaikan program-program SFV. Tingkat evaluasi partisipatif diukur melalui keterlibatan anggota kelompok dalam mengikuti kegiatan evaluasi untuk menilai kesesuaian antara tujuan program dan hasil yang dicapai, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan atau penanganannya. Pengukuran dilakukan melalui dua pernyataan kuesioner berbasis skala *likert* (1) tidak pernah sama sekali; (2) sangat jarang; (3) jarang; (4) pernah; (5) sering. Total skor adalah 10, kemudian skor dikategorikan menjadi 3 tingkatan, dengan rincian rendah: 2-4, sedang: 5-7, tinggi: 8-10, sehingga jenis data/skalanya termasuk interval.

3.11 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Pertama analisis deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang berbagai karakteristik dari fenomena atau populasi atau masalah yang dipunyai (Asra *et al.* 2016). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama data dibersihkan (*cleaning data*) dan dilakukan pengodean, kemudian ditabulasikan menggunakan *software Microsoft Excel* berdasarkan variabel. Hasil tabulasi kemudian diinterpretasikan dan dilengkapi dengan data kualitatif

Tahap kedua menggunakan uji multivariat berbasis *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS), *Multi-Group Analysis* (MGA), dan *Importance-Performance Map Analysis* (IPMA) yang diolah melalui perangkat lunak SmartPLS. Menurut Rahadi (2023), SEM-PLS merupakan metode statistik kompleks yang mampu menguji hubungan antarvariabel secara simultan dengan tingkat signifikansi tinggi. Pengujian SEM-PLS mencakup dua bagian utama: model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Evaluasi *outer model* bertujuan memastikan validitas dan reliabilitas indikator pengukur variabel, meliputi validitas konvergen (*loading factor* dan *Average Variance Extracted* /), reliabilitas variabel (*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*), serta validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell-Larcker. Uji *inner model*, dilakukan pengujian terhadap hubungan antar variabel laten untuk mengetahui arah, kekuatan, dan signifikansi pengaruh antar variabel, dengan persamaan

Keterangan:

η = variabel endogen B = koefisien hubungan antar variabel endogen
 ξ = variabel eksogen Γ = koefisien hubungan variabel eksogen terhadap endogen
 ζ = residual

Pengujian signifikansi menggunakan prosedur *bootstrapping* 5000 subsamples dengan kriteria nilai $t > 1,96$ atau $p < 0,05$. Evaluasi model struktural dilengkapi dengan nilai R^2 untuk mengukur daya jelaskan variabel independen, nilai f^2 untuk mengukur besar pengaruh (*effect size*), serta nilai Q^2 (*predictive relevance*) untuk menilai kemampuan prediksi model terhadap data observasi.

Setelah pengujian model struktural, dilakukan uji lanjutan berupa *Multi-Group Analysis* (MGA) dan *Importance-Performance Map Analysis* (IPMA). Uji MGA digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pengaruh antarvariabel pada model komunikasi pembangunan di Desa Kawali dan Desa Bangsring ($H_0: \beta_{Kawali} = \beta_{Bangsring}$ vs $H_1: \beta_{Kawali} \neq \beta_{Bangsring}$) berdasarkan kriteria Henseler MGA ($p < 0,05$ atau $p > 0,95$). Sementara itu, analisis IPMA membandingkan efek total (*importance*) dan skor rata-rata variabel laten (*performance*) untuk menentukan prioritas intervensi strategis (Ringle dan Sarstedt 2016; Hair *et al.* 2017). Hasil IPMA dipetakan ke dalam empat kuadran sebagaimana Gambar 3.

Performance/ Kinerja	PENUNJANG Kuadran II Kepentingan Rendah – Kinerja Tinggi	PERTAHANKAN Kuadran I Kepentingan Tinggi – Kinerja Tinggi
	BUKAN PRIORITAS Kuadran III Kepentingan Rendah – Kinerja Rendah	PRIORITAS PRIMER Kuadran IV Kepentingan Tinggi – Kinerja Rendah
Importance/Kepentingan		

Gambar 3 Matriks kuadran analisis peta kepentingan kinerja

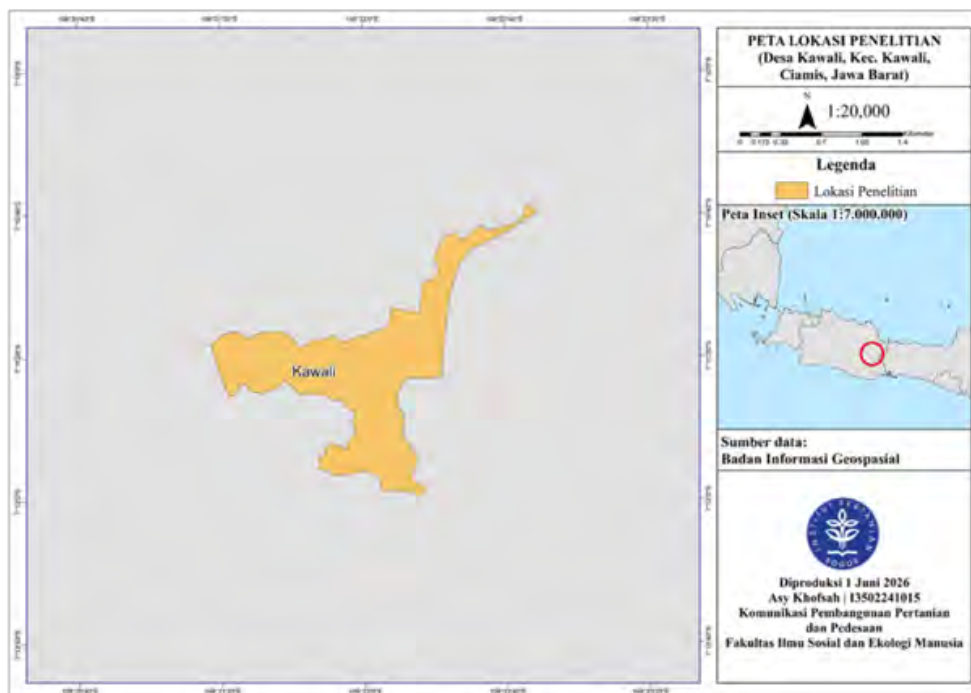
Tahap ketiga, analisis kualitatif, menerapkan *theory-driven thematic analysis* dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Pendekatan berbasis teori ini selaras dengan paradigma pragmatis (*what works*) yang menekankan efektivitas metode dalam menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan masalah nyata (Creswell dan Creswell 2023). Pengolahan data kualitatif mengikuti lima tahapan Creswell: (1) *familiarization* melalui pembacaan data dan transkripsi wawancara secara verbatim; (2) *coding* menggunakan *software* NVivo yang mencakup *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*; (3) kategorisasi dan penyaringan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (4) penyajian data dalam bentuk tabel atau diagram berpenjelasan naratif; serta (5) interpretasi makna temuan dengan mengacu pada teori dan literatur relevan.

IV PROFIL MASYARAKAT DESA KAWALI DAN BANGSRING

Profil masyarakat Desa Kawali dan Desa Bangsring memberikan dasar untuk memahami kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang membentuk dinamika dialog komunitas dan aksi kolektif. Pembahasan mencakup gambaran umum desa, perkembangan program SFV, karakteristik masyarakat, dan modal sosial. Perbedaan karakteristik kedua desa digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial tempat proses komunikasi partisipatif berkembang sesuai dengan dinamika lokal masing-masing komunitas.

4.1 Gambaran Umum *Smart Fisheries Village* di Desa Kawali

Desa Kawali berada di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada koordinat $7^{\circ}18'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}36'$ Bujur Timur (Gambar 4). Secara administratif, Desa Kawali terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Kawali, Dusun Cibiru, Dusun Indrayasa, dan Dusun Banjarwaru. Keempat dusun tersebut terbagi ke dalam 12 RW dan 25 RT, yang dihuni oleh 4114 jiwa (BPS 2018). Dusun Banjarwaru dan Indrayasa menjadi lokasi utama penelitian karena menjadi kawasan berkembangnya Kampung Nila sebagai pusat budidaya ikan air tawar dan implementasi SFV.



Gambar 4 Peta Desa Kawali

Desa Kawali memiliki luas $1,85 \text{ km}^2$ dengan 25 hektar di antaranya berupa kolam budi daya ikan. Berada pada ketinggian 500 mdpl serta memiliki ketersediaan air melimpah dari Gunung Sawal dan Sungai, mendukung pengembangan perikanan air tawar. Sebagian besar rumah tangga khususnya di Dusun Banjarwaru dan Indrayasa memiliki kolam ikan sendiri. Dampaknya, aktivitas ekonomi masyarakat meliputi budi daya,

pengolahan, pemasaran, wisata edukasi dan kuliner, pelatihan, serta UMKM berbasis perikanan.

Kampung Nila berkembang bertahap sejak 2019, dimulai dari inisiatif mandiri masyarakat dalam membentuk kelompok budidaya, uji coba produksi, dan pembukaan pasar lokal. Pemerintah Kabupaten Ciamis resmi mengukuhkan Kampung Nila pada 2021, yang dilanjutkan dengan penguatan kapasitas warga bersama penyuluh perikanan pada 2022. Melalui Keputusan Nomor 156 Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan kawasan ini sebagai lokasi SFV atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan BPPSDMP. Program SFV kemudian berfokus pada digitalisasi layanan, pariwisata, dan kelembagaan (2024), sebelum diakhiri dengan pemantapan produksi serta budidaya pada 2025.

Pengembangan SFV didukung oleh kelembagaan masyarakat yang terdiri atas enam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), tiga kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), serta satu gabungan kelompok pembudidaya ikan (Gapokkan) yang berperan dalam pengelolaan budidaya, pembenihan, pengolahan, pemasaran, pariwisata, hingga pelatihan. Selain itu, melalui pendampingan dan inovasi teknologi, Desa Kawali berkembang menjadi sentra produksi ikan nila beserta produk turunannya, serta mampu menjalin kerja sama antar-pembudi daya lintas wilayah dan kemitraan instansi untuk penataan kawasan. Keberhasilan ini diakui oleh Kepala Desa Kawali yang menyatakan bahwa

“Program SFV sangat membantu. Kegiatan di sini bisa berkembang lebih baik karena ada bantuan dari program tersebut. Datangnya SFV membawa bimbingan dan dukungan, termasuk di bidang perikanan. Sekarang sudah ada dua kelompok wirausaha di Dusun Indrayasa, pengembangan dari kegiatan yang awalnya di sini. Jadi baru dua dusun yang mulai berjalan baik di bidang KWT dan perikanan.”

Program SFV juga digerakkan oleh ruang dialog komunitas sebagai bentuk komunikasi partisipatif untuk pembelajaran bersama, penguatan kelembagaan, inovasi, serta kerja sama lintas sektor. Ruang dialog tersebut diwujudkan melalui pertemuan rutin Rumasa (Kotak 1) dan pojok informasi SFV. Faktanya kedua sarana tersebut saat ini sedang tidak aktif.

Kotak 1. Rumasa (*Rumpaka* Malam Sabtu)

Rumasa (*rumpaka* malam Sabtu) merupakan forum komunikasi rutin yang dikembangkan oleh penyuluh perikanan di Desa Kawali dalam pelaksanaan program SFV. Rumasa diinisiasi pada tahun 2021 untuk memperkuat komunikasi antaranggota SFV. Forum ini menjadi wadah bagi anggota pokdakan, poklahsar, gapokkan serta penyuluh untuk berbagi persoalan dan kebutuhan terkait pengembangan usaha perikanan dan kewirausahaan komunitas. Rumasa menjadi media koordinasi, sarana pertukaran informasi, pembelajaran kolektif dan pengambilan keputusan melalui musyawarah.

Sesuai tujuannya, rumasa berkembang menjadi forum bersama untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Karakteristik dialog dalam rumasa cenderung santai, sehingga memungkinkan anggota kelompok untuk menyampaikan pemahaman, pengalaman, permasalahan hingga usulan secara lebih terbuka. Berbagai persoalan didiskusikan bersama di antaranya terkait penyakit ikan, kualitas dan ketersediaan air, kebutuhan benih dan pakan, sistem rotasi panen, pemasaran hasil produksi, pelatihan, inovasi hingga manajemen kelompok. Menurut penyuluh, rumasa sangat bermanfaat untuk implementasi dan pengembangan program SFV di Desa Kawali.

Keberadaan Rumasa turut berkontribusi dalam membangun budaya musyawarah dan gotong royong di Desa Kawali. Berbagai keputusan penting, mulai dari pembagian bantuan, penentuan kebutuhan pelatihan, hingga penyelesaian konflik internal kelompok, diupayakan melalui musyawarah bersama. Forum ini juga menjadi sarana untuk menjaga transparansi, mengurangi kecemburuan sosial, dan memperkuat komitmen anggota terhadap tujuan bersama. Oleh karena itu, Rumasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga kohesi kelompok dan memastikan keberlanjutan program SFV.

Lebih jauh, Rumasa menjadi arena pembelajaran sosial yang memperkuat rasa memiliki terhadap program. Dialog yang dibangun dalam Rumasa sering kali berlanjut ke berbagai ruang informal seperti percakapan di pematang kolam, dapur, saung atau saat menikmati kopi bersama. Ruang informal memberikan ruang bagi anggota yang lebih banyak diam dalam Rumasa untuk menyampaikan kebutuhan, kritik, maupun gagasan mereka. Melalui komunikasi informal, penyuluh juga menjaring persoalan yang belum terungkap serta memperkuat kepercayaan antar aktor.

Namun demikian, perjalanan Rumasa tidak selalu berjalan mulus. Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas Rumasa sangat dipengaruhi oleh penyuluh. Ketika intensitas pertemuan menurun atau koordinasi melemah, semangat kolaborasi masyarakat ikut berkurang. Oleh sebab itu, keberlanjutan Rumasa tidak cukup bergantung pada figur tertentu, tetapi perlu dilembagakan sebagai budaya dialog komunitas yang mampu berjalan secara mandiri. Tantangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Rumasa bukan hanya sebuah forum pertemuan, melainkan aset sosial yang menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan aksi kolektif dan pengembangan kewirausahaan masyarakat di Kampung Nila Desa Kawali.

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden Desa Kawali

Responden adalah masyarakat Desa Kawali yang tercatat dalam surat keputusan (SK) kelompok SFV dan aktif berpartisipasi melaksanakan program hingga penelitian dilaksanakan. Responden tersebar pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar). Karakteristik masyarakat Desa Kawali dianalisis

berdasarkan jenis kelompok, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status kepemilikan sarana produksi sebagaimana Tabel 5.

Anggota SFV di Desa Kawali didominasi oleh perempuan sebanyak 46 orang (55 persen), sedangkan laki-laki berjumlah 39 orang (45 persen). Keterlibatan ini menegaskan peran strategis perempuan dalam pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Puteri *et al.* 2023). Namun, pembagian kerja berbasis gender masih ditemukan, yaitu laki-laki mendominasi pokdakan untuk kegiatan budi daya berbasis fisik, sedangkan perempuan terkonsentrasi pada poklamsar untuk pengolahan, pengemasan, dan pemasaran. Praktik tersebut membuka peluang partisipasi perempuan pada ekonomi rumah tangga dan kelompok, keterlibatan tersebut memperpanjang peran domestik perempuan. Menurut Suyoto dan Anggraini (2016) praktik ini dapat membatasi akses perempuan terhadap pengambilan keputusan strategis.

Tabel 5 Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha di Desa Kawali

Kategori	Laki-laki		Perempuan	
	n	Persen	n	Persen
Jenis kelompok				
Pokmaswas	0	0	0	0
Pokdakan	32	38	13	15
Poklamsar	7	8	33	39
Total	39	46	46	54
Usia				
≤ 25	4	5	5	6
26-35	5	6	7	8
36-45	10	12	11	13
46-55	12	14	15	18
> 55	8	9	8	9
Total	39	46	46	54
Tingkat pendidikan				
SD	8	9	10	12
SMP	6	7	10	12
SMA	21	25	19	22
D3	0	0	4	5
D4/S1	4	5	3	4
Total	39	46	46	54
Status kepemilikan				
Milik Sendiri	19	22	14	16
Sewa	11	13	0	0
Kelompok	0	0	27	32
Tidak memiliki	9	11	5	6
Total	39	46	46	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Sebaran umur anggota SFV di Desa Kawali relatif beragam. Kelompok usia 46-55 tahun merupakan kelompok terbesar (32 persen), diikuti kelompok usia 36-45 tahun (25 persen). Sebaliknya, anggota berusia di bawah 35 tahun masih relatif sedikit. Dominasi kelompok dewasa hingga menjelang lansia ini disebabkan oleh enggan generasi muda memilih sektor budidaya perikanan yang membutuhkan waktu panen lebih lama, sebagaimana keterangan pemuda Kawali

“Pemuda di sini jarang yang tertarik dengan perikanan karena hasilnya lama, mereka lebih tertarik ke pekerjaan yang memberikan penghasilan instan misalkan parkir.” (HHS, Laki-laki, 54 Tahun)

Padahal, keterlibatan kelompok usia produktif sangat krusial dalam komunikasi partisipatif karena mereka cenderung lebih adaptif terhadap inovasi dan pembelajaran (Aw *et al.* 2020). Oleh karena itu, lambatnya regenerasi ini menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan program SFV di Desa Kawali.

Mayoritas anggota SFV di Desa Kawali berpendidikan SMA (47 persen), diikuti SD (21 persen) dan SMP (19 persen). Responden yang memiliki pendidikan tinggi relatif sedikit, yaitu D3 sebesar 5 persen dan D4/S1 sebesar 8 persen. Sebagian besar anggota kelompok yang berpendidikan tinggi menempati posisi penting dalam organisasi, seperti ketua, sekretaris, bendahara maupun penasehat kelompok. Sebaran pendidikan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kombinasi pengalaman praktis dan kemampuan administratif yang cukup baik sebagai modal awal pengembangan kelompok.

Status kepemilikan sarana produksi menjadi karakteristik paling menonjol dari anggota SFV di Desa Kawali. Sebanyak 39 persen anggota kelompok memiliki sarana produksi sendiri, 32 persen menggunakan aset kelompok, 17 persen belum memiliki sarana, dan 13 persen menyewa. Dominasi kepemilikan pribadi ini menunjukkan bahwa usaha budidaya perikanan berkembang melalui investasi mandiri rumah tangga, dengan luas kolam pribadi sebagian besar berkisar 100-559 m² (Gumilar *et al.* 2024). Kepemilikan pribadi meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, menentukan pola kontrol sumber daya (Johnson *et al.* 2016), serta memperkuat kemandirian ekonomi anggota. Namun, kondisi ini berpotensi melemahkan gotong-royong pengelolaan usaha bersama.

4.3 Deskripsi Modal Sosial di Desa Kawali

Modal sosial yang mendukung aksi kolektif dalam program SFV di Desa Kawali berada pada kategori tinggi menurut 84,4 persen anggota kelompok (Tabel 6). Struktur ini ditopang oleh norma (91,9 persen) yang mengukur peran aturan sosial, kepercayaan (83,9 persen) yang mencerminkan keyakinan atas komitmen dan kejujuran anggota dalam pembagian tugas, serta jaringan (77,4 persen) yang menggambarkan komunikasi dalam menjalin hubungan. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan Desa Kawali. Sebab, Badaruddin dan Sismudjito (2025) menjelaskan bahwa pembangunan berbasis modal sosial mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi, pemanfaatan, dan pemeliharaan program sehingga keberlanjutannya lebih terjamin. Selain itu, Handayani *et al.* (2023) menegaskan bahwa modal sosial

yang kuat memungkinkan masyarakat berperan sebagai aktor utama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Tabel 6 Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Norma (<i>Norm</i>)	56	34	10	100
Jaringan (<i>Network</i>)	53	36	11	100
Kepercayaan (<i>Trust</i>)	58	32	10	100

Keberfungsian norma sosial di Desa Kawali diwujudkan melalui kesepakatan aturan kerja kelompok. Namun, aturan tersebut sering kali tidak ditegakkan secara tegas akibat tingginya nilai rasa segan, toleransi interpersonal, dan dorongan untuk memaklumi kesalahan demi menjaga keharmonisan hubungan. Nilai-nilai ini tumbuh dari eratnya ikatan kekerabatan antaranggota, sehingga berbagai konflik yang mengemuka, diselesaikan secara informal dan musyawarah. Pada akhirnya, keharmonisan sosial diposisikan sebagai pertimbangan utama untuk menjaga keberlanjutan kerja sama serta memelihara ikatan antaranggota kelompok, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Gapokkan

“disini kalau ada masalah kami diam saja supaya tidak ramai, soalnya semua masih saudara” (MLK, Laki-laki, 44 Tahun)

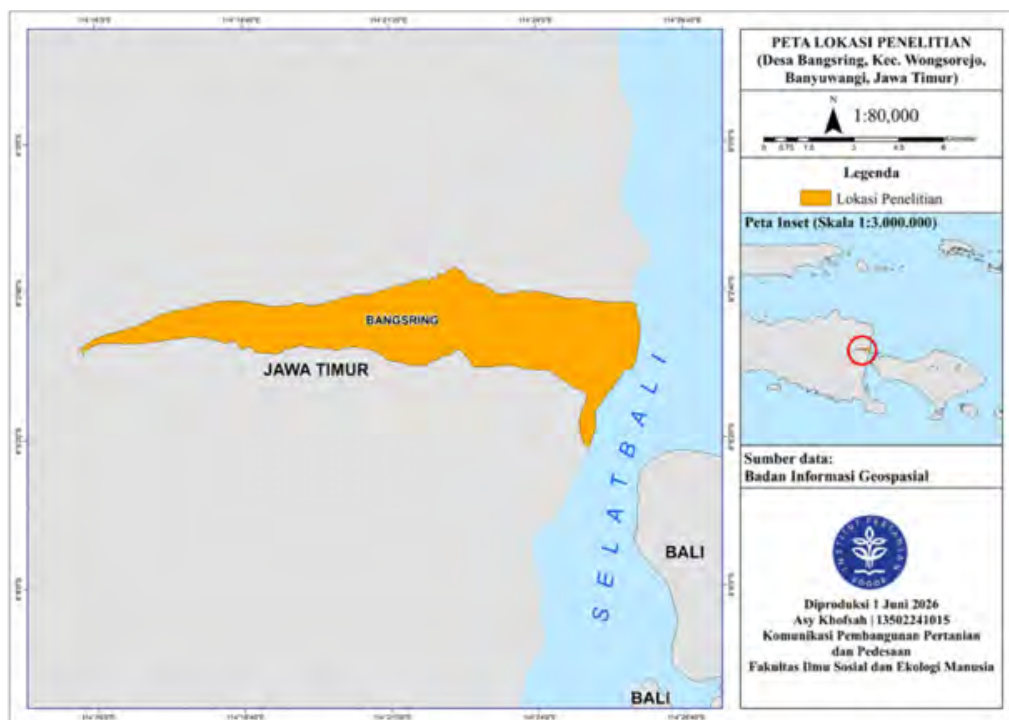
Eratnya ikatan kekerabatan juga mendorong tingginya keberfungsian kepercayaan antaranggota kelompok, sehingga pembagian tugas dapat berjalan tanpa pengawasan ketat. Menurut Nasihuddin *et al.* (2020), kepercayaan menjaga stabilitas pembangunan pedesaan karena memperkuat kerja sama sekaligus menekan biaya koordinasi. Namun, kondisi ini berimplikasi negatif pada tata kelola organisasi di Desa Kawali, utamanya pada melonggarnya pengawasan keuangan dan evaluasi kritis terhadap kinerja pengurus. Akibatnya, berbagi persoalan manajerial sering kali terlambat dikoreksi dan terjadi penyelewengan keuangan.

Selain norma dan kepercayaan, dimensi keberfungsian jaringan juga memperoleh capaian tinggi. Jaringan kemitraan masyarakat Desa Kawali terbentuk melalui hubungan dengan berbagai lembaga eksternal, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPBD, Bank BRI, Dinas Pariwisata, Universitas Siliwangi (UNSIL), dan Politeknik Kelautan dan Perikanan. Kemitraan tersebut mendukung pembangunan desa melalui pendampingan, pelatihan, fasilitasi teknologi, serta penguatan kapasitas masyarakat, dengan KKP sebagai penyedia pendampingan paling konsisten selama tiga tahun program SFV. Keberadaan jaringan eksternal ini terbukti membuka akses terhadap sumber daya, informasi, teknologi, dan peluang pengembangan usaha desa. Namun, sebagian besar hubungan kemitraan di Desa Kawali masih difasilitasi oleh *local champion* dan penyuluh, sehingga akses masyarakat terhadap sumber daya eksternal masih tersentralisasi pada aktor-aktor kunci dan elit kelompok.

4.4 Gambaran Umum *Smart Fisheries Village* di Desa Bangsring

Desa Bangsring berada di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada koordinat 8°3'12,46" LS dan 114°25'51,52" BT, dengan wilayah seluas 55,26 km² dan berada pada ketinggian 37 mdpl (Gambar 6). Desa Bangsring berbatasan dengan Desa Bengkak di utara, Selat Bali di timur, Kecamatan Kalipuro di selatan, serta kawasan hutan Perhutani di barat. Karakteristik geografisnya mencakup kawasan pesisir, laut dangkal, dataran rendah, hingga wilayah hutan. Secara administratif, desa berpenduduk 6.061 jiwa (BPS 2018) ini terbagi atas tiga dusun, yakni Krajan 1, Krajan 2, dan Paras Putih, yang mencakup 11 RW dan 41 RT.

Potensi pesisir dan laut dangkal menjadikan perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, perdagangan hasil laut, serta wisata bahari sebagai pilar ekonomi utama Desa Bangsring. Kerusakan terumbu karang akibat praktik *destructive fishing* (penangkapan ikan menggunakan bom dan potasium) pada masa lalu menjadi titik balik yang mendorong masyarakat menginisiasi upaya konservasi pesisir secara mandiri. Inisiatif konservasi kemudian melahirkan strategi mata pencaharian baru berbasis pariwisata ramah lingkungan, seperti jasa *snorkeling*, penyelaman, transportasi laut, penyewaan alat, kuliner, dan UMKM perikanan yang menopang perekonomian desa secara berkelanjutan. Kini sektor-sektor tersebut telah berhasil menyerap kurang lebih 1500 tenaga kerja lokal Desa Bangsring.



Gambar 5 Peta Desa Bangsring

Keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan konservasi pesisir secara mandiri menjadi pertimbangan utama KKP menetapkan Desa Bangsring sebagai lokasi SFV melalui Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 240 Tahun 2024. Program SFV ini berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan

produktivitas perikanan, pengembangan wisata edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Uniknya, pengembangan SFV di Desa Bangsring berpusat pada masyarakat (*community driven development*), sehingga inisiatif konservasi, rehabilitasi terumbu karang, dan wisata bahari tumbuh dari kesadaran warga untuk memulihkan ekosistem laut dari dampak *destructive fishing*.

Pelaksanaan pembangunan desa melalui program SFV diprioritaskan pada empat sektor utama, yakni konservasi, budidaya, pengolahan hasil, dan wisata bahari. Pada sektor konservasi, rehabilitasi terumbu karang dilakukan menggunakan media *coral dome*, rak besi, bambu, dan pipa PVC yang berhasil memulihkan sekitar 20 jenis terumbu karang. Kawasan ini kemudian berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memberi dampak ekonomi. Pada sektor budidaya, fokus utamanya adalah komoditas lobster laut memanfaatkan teknologi keramba dasar. Sektor pengolahan hasil lebih difokuskan pada diversifikasi inovasi produk UMKM berbahan ikan dan biota laut lainnya. Sementara sektor wisata difokuskan pada pengembangan destinasi wisata baru dan pendampingan pengelolaannya. Di sisi lain juga dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sertifikasi nelayan, penguatan pemasaran, digitalisasi pelayanan, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti *coral centre*, rumah apung, dan kawasan wisata (Bunder, *Grand Watu Dodol*, Mutiara Tabuhan, dan *Tanjungan Beach*).

Program SFV juga digerakkan oleh ruang dialog komunitas sebagai bentuk komunikasi partisipatif untuk pembelajaran bersama, penguatan kelembagaan, inovasi, serta kerja sama lintas sektor. Ruang dialog tersebut diwujudkan melalui wadah informal seperti arisan dan rapat rutin, dengan jadwal yang disesuaikan kebutuhan kelompok. Pertemuan berkala ini berfungsi sebagai ruang pertukaran informasi, pembelajaran kolektif, pemecahan masalah bersama, serta penguat koordinasi demi keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir. Pertemuan tersebut mayoritas digerakkan oleh pemimpin kelompok yang mampu mengubah budaya *destructive fishing* menjadi gerakan konservasi.

4.5 Deskripsi Karakteristik Anggota SFV Desa Bangsring

Responden adalah masyarakat Desa Bangsring yang tercatat dalam surat keputusan (SK) kelompok SFV dan aktif berpartisipasi melaksanakan program hingga penelitian dilaksanakan. Responden tersebar pada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (poklahsar). Karakteristik masyarakat Desa Bangsring dianalisis berdasarkan jenis kelompok, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status kepemilikan sarana produksi sebagaimana Tabel 7.

Anggota SFV di Desa Bangsring didominasi oleh laki-laki sebanyak 51 orang (60 persen), sedangkan perempuan berjumlah 34 orang (40 persen). Dominasi laki-laki tersebar pada pokmaswas dan pokdakan, karena tingginya kegiatan fisik dan risiko pekerjaan di laut, seperti konservasi, pengawasan pesisir, dan budi daya. Sebaliknya, perempuan terpusat pada kelompok poklahsar untuk kegiatan pengolahan hasil serta pemasaran di sektor hilir. Praktik tersebut membuka peluang partisipasi perempuan pada pembangunan

desa dan ekonomi keluarga, namun memperpanjang peran domestik perempuan. Menurut Suyoto dan Anggraini (2016) praktik ini dapat membatasi akses perempuan terhadap pengambilan keputusan strategis.

Tabel 7 Jumlah dan persentase anggota kelompok berdasarkan jenis kelompok, kelamin, pendidikan dan status kepemilikan usaha Desa Bangsring

Kategori	Laki-laki		Perempuan	
	n	persen	n	Persen
Jenis kelompok				
Pokmaswas	42	49	6	7
Pokdakan	6	7	1	1
Poklahsar	3	4	27	32
Total	51	60	34	40
Usia				
≤ 25	4	5	8	9
26-35	9	11	10	12
36-45	18	21	10	12
46-55	12	14	6	7
> 55	8	9	2	2
Total	51	60	34	40
Tingkat pendidikan				
SD	19	22	3	4
SMP	12	14	10	12
SMA	18	21	19	22
D3	0	0	0	0
D4/S1	2	2	2	2
Total	51	60	34	40
Status kepemilikan				
Milik Sendiri	8	9	11	13
Sewa	0	0	1	1
Kelompok	43	51	21	25
Tidak memiliki	0	0	1	1
Total	51	60	34	40

Kelompok usia anggota SFV di Desa Bangsring memperlihatkan tren usia produktif, dengan proporsi terbesar pada rentang 36-45 tahun (33 persen), diikuti 26-35 tahun (22 persen), 46-55 tahun (21 persen), di bawah 25 tahun (14 persen), dan di atas 55 tahun (12 persen). Komposisi ini mencerminkan kapasitas fisik, pengalaman, dan daya adaptasi yang baik dalam menjalankan kegiatan konservasi maupun usaha perikanan. Dominasi generasi muda juga menandai berjalannya regenerasi organisasi sehingga keberlanjutan program tidak bergantung sepenuhnya pada pendiri kelompok. Menurut Aw *et al.* (2020) usia produktif lebih terbuka terhadap inovasi dan perkembangan teknologi, sementara Suh dan Nyiawung (2023) menambahkan bahwa keterlibatan pemuda merupakan kunci keberlanjutan pengelolaan sumber daya pesisir. Oleh karena

itu, dominasi kelompok usia produktif ini menjadi modal penting bagi keberlangsungan dan peningkatan kapasitas pembangunan Desa Bangsring.

Mayoritas anggota SFV di Desa Bangsring berpendidikan SMA sebanyak 43 persen. Selanjutnya, masing-masing 26 persen anggota kelompok berpendidikan SD dan SMP, sedangkan anggota kelompok berpendidikan D4/S1 hanya mencapai 5 persen. Sebaran tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota telah menyelesaikan pendidikan menengah, sehingga memiliki kemampuan dasar yang memadai dalam menerima informasi, mengikuti pelatihan, maupun mengadopsi teknologi yang diperkenalkan melalui program SFV. Responden yang memiliki pendidikan tinggi relatif sedikit, namun umumnya menduduki posisi strategis dalam organisasi kelompok, seperti ketua, sekretaris, bendahara, atau pengurus koperasi.

Tingkat pendidikan anggota SFV di Desa Bangsring mayoritas lulusan SMA (43 persen), diikuti SD (26 persen), SMP (26 persen), dan D4/S1 (5 persen). Dominasi lulusan pendidikan menengah atas ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota memiliki kemampuan dasar yang memadai untuk menyerap informasi, mengikuti pelatihan, dan mengadopsi teknologi baru dari program SFV. Jumlah anggota yang berpendidikan tinggi relatif sedikit, tetapi mereka umumnya memegang posisi strategis dalam organisasi kelompok, seperti ketua, sekretaris, bendahara, atau pengurus koperasi.

Sebagian besar sarana produksi anggota SFV di Desa Bangsring berstatus milik kelompok. Sebanyak 75 persen anggota kelompok menggunakan aset kelompok, sedangkan hanya 22 persen yang memiliki aset sendiri. Responden yang menggunakan aset sewa maupun tidak memiliki aset masing-masing hanya sebesar 1 persen. Dominasi kepemilikan berbasis kelompok menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya di Desa Bangsring lebih banyak dilakukan secara kolektif. Berbagai fasilitas seperti kapal, rumah tukik, kawasan konservasi, keramba, maupun sarana pendukung lainnya dikelola bersama melalui organisasi masyarakat. Pola kepemilikan tersebut memungkinkan anggota berbagi sumber daya, biaya operasional, serta risiko usaha sehingga memperkuat kerja sama antarkelompok.

Menurut Johnson *et al.* (2016), kepemilikan aset merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menentukan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Kepemilikan aset secara kolektif tidak hanya memperkuat efisiensi pengelolaan usaha, tetapi juga mempererat solidaritas organisasi dan mendukung pelaksanaan konservasi berbasis masyarakat.

Sebagian besar sarana produksi anggota SFV di Desa Bangsring berstatus milik kelompok (75 persen), sedangkan kepemilikan aset mandiri hanya 22 persen, serta sisanya 1 persen menyewa dan 1 persen tidak memiliki aset. Dominasi kepemilikan kelompok ini mencerminkan pengelolaan sumber daya secara kolektif, yaitu fasilitas kapal, rumah tukik, kawasan konservasi, keramba, dan sarana pendukung dikelola bersama untuk berbagi biaya operasional maupun risiko usaha. Menurut Johnson *et al.* (2016), kepemilikan aset merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan serta menentukan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan aset secara kolektif di Desa Bangsring tidak hanya memperkuat efisiensi usaha,

tetapi juga mempererat solidaritas organisasi dan menopang keberlanjutan konservasi berbasis masyarakat.

4.6 Deskripsi Modal Sosial di Desa Bangsring

Modal sosial berperan penting dalam memperkuat kebersamaan, membangun rasa saling percaya, dan mendorong aksi kolektif (*collective action*) untuk mencapai tujuan pembangunan (BPS 2022; Putnam 1993). Secara keseluruhan Tabel 8 menunjukkan keberfungsian modal sosial masyarakat Desa Bangsring berada pada kategori tinggi (80,4 persen), terdiri dari norma (90,0 persen), jaringan (82,2 persen), dan kepercayaan (68,9 persen). Capaian ini menjadi sinyal positif karena pembangunan berbasis modal sosial dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga evaluasi program sehingga keberlanjutannya lebih terjamin (Badaruddin dan Sismudjito 2025; Handayani *et al.* 2023).

Tabel 8 Penilaian anggota kelompok terhadap keberfungsian modal sosial di Desa Bangsring (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Norma (<i>Norm</i>)	90,0	6,7	3,3	100
Jaringan (<i>Network</i>)	82,2	15,6	2,2	100
Kepercayaan (<i>Trust</i>)	68,9	30,0	1,1	100

Tingginya keberfungsian dimensi norma diwujudkan melalui aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Responden menilai aturan kelompok ini efektif membantu pelaksanaan program SFV serta memperkuat kerja sama dan semangat gotong royong. Norma tertulis meliputi Peraturan Desa (Perdes) tentang Zona Pemanfaatan Bersama (ZPB) Nomor 2 Tahun 2009, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing kelompok. Sementara itu, norma tidak tertulis berkembang melalui aturan adat “ambil satu ganti sepuluh” yakni kewajiban mengganti sepuluh terumbu karang bagi siapa saja yang merusak atau mengambil satu terumbu karang. Aturan ini lahir dari pengalaman pahit menghadapi *destructive fishing* dan kini menjadi kesepakatan kolektif dalam menjaga kawasan konservasi, sehingga penyelesaian pelanggaran maupun konflik dapat dilakukan secara tertib melalui mekanisme bersama.

Pada dimensi kepercayaan, keberfungsian dalam koordinasi dan pembagian tugas berjalan baik, meskipun distribusinya lebih beragam dibandingkan norma dan jaringan. Kepercayaan masyarakat terpusat pada tokoh-tokoh kunci, seperti ketua kelompok, tokoh senior, dan penyuluh perikanan. Anggota kelompok menyerahkan berbagai keputusan strategis seperti pembagian hasil, pengelolaan kawasan konservasi, hingga arah pengembangan organisasi kepada para pemimpin tersebut. Kondisi ini ditegaskan oleh salah seorang penyuluh perikanan:

“Kalau masyarakat di sini itu, Mbak, tingkat kepercayaan mereka pada ketuanya sangat tinggi, jadi apa-apa akan patuh kepada ketuanya.” (DWT, laki-laki, 43 tahun)

Kepercayaan terhadap figur pemimpin menghasilkan legitimasi kepemimpinan yang memperlancar koordinasi, menjaga stabilitas kegiatan konservasi, dan meningkatkan kepatuhan anggota terhadap aturan yang disepakati. Kondisi tersebut mendukung penegakan aturan konservasi secara konsisten sehingga aktivitas kelompok berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.

Sementara itu, keberfungsian jaringan kemitraan Desa Bangsring berkembang melalui hubungan intensif dengan berbagai aktor eksternal, antara lain KKP, BP3 Banyuwangi, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, PT Pertamina, Persatuan BUMN, Tambang Emas Tujuh Bukit, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Danamon, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Hubungan ini dikelola secara berkelanjutan melalui pendampingan, pelatihan, alih teknologi, konservasi pesisir, penguatan kelembagaan, promosi wisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan pendapat Jones dan Woolcock (2007), jaringan kerja sama yang dikelola secara berkelanjutan mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kemitraan yang bersifat sementara. Pengelolaan jaringan tersebut masih difasilitasi oleh *local champion* dan penyuluh yang berfungsi sebagai penghubung utama dengan pihak luar.

V KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DI DESA KAWALI

Komunikasi pembangunan merupakan pertukaran informasi secara partisipatif untuk membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan ruang belajar yang mendorong aksi bersama (Servaes 2020). Pendekatan ini tercermin dalam model CFSC oleh Figueroa *et al.* (2002), yang menjelaskan bahwa dialog komunitas sebagai bentuk komunikasi partisipatif merupakan jembatan menuju aksi kolektif, kecuali jika terhambat oleh faktor seperti konflik. Di Desa Kawali, proses dialog komunitas terlaksana melalui kedekatan interpersonal, musyawarah, dan keterlibatan warga dalam memecahkan persoalan desa. Namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan peran, yakni partisipasi masyarakat sangat kuat pada pelaksanaan kegiatan operasional, sedangkan keputusan strategis dan akses jaringan luar masih mendominasi pada *local champion*, pengurus, serta penyuluh. Kondisi ini tidak terlepas dari struktur modal sosial lokal yang masih mengandalkan eratnya ikatan kekerabatan, norma kelompok, serta peran tokoh lokal sebagai *opinion leader*. Berdasarkan dinamika tersebut, bab ini meninjau, mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan peran katalis, dinamika dialog komunitas, realisasi aksi kolektif, serta hubungan antarvariabel dalam program SFV di Desa Kawali.

5.1 Katalis Dialog Pembangunan SFV Desa Kawali

Katalis didefinisikan sebagai stimulus yang menginisiasi dialog komunitas dan mendorong masyarakat mengenali masalah, mengklarifikasi persepsi, merencanakan aksi, hingga melaksanakan kerja kolektif (Figueroa *et al.* 2002). Stimulus ini dapat bersumber dari internal kelompok seperti keputusan adopsi inovasi dan kepemimpinan, maupun eksternal kelompok, seperti peran penyuluh dan dukungan pemerintah. Di samping variabel pendorong tersebut, terdapat pula faktor penghambat komunikasi partisipatif berupa *groupthink*, yang menurut Rhayua *et al.* (2024) dapat menghalangi terciptanya dialog komunitas yang efektif.

5.1.1 Peran penyuluh perikanan Kawali dalam membangun dialog

Peran penyuluh diposisikan sebagai katalis eksternal yang menginisiasi dialog komunitas dengan menghubungkan masyarakat pada informasi, pengetahuan, sumber daya, serta pihak luar untuk mendukung proses dialog. Efektivitas peran penyuluh sangat ditentukan oleh kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan karakteristik sosial beragam (Prestiana *et al.* 2023), melalui empat fungsi utama komunikator, motivator, fasilitator, dan edukator (Nurida *et al.* 2024; Safira *et al.* 2022; Latif *et al.* 2022; Abdullah *et al.* 2021; Sundari *et al.* 2021; Khairunnisa *et al.* 2021). Tabel 9 menunjukkan bahwa penyuluh lebih dominan berperan sebagai komunikator (83,9 persen), dibandingkan sebagai motivator dan fasilitator (79 persen), atau sebagai edukator (77,4 persen). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan penyuluh sangat berdampak bagi masyarakat, terutama dalam penyampaian

informasi pembangunan, mendengarkan dan menerima saran, serta pembentukan pemahaman anggota.

Tabel 9 Penilaian anggota kelompok terhadap peran penyuluh perikanan di Desa Kawali (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Komunikator	83,9	16,1	0,0	100
Motivator	79,0	17,7	3,2	100
Fasilitator	79,0	21,0	0,0	100
Edukator	77,4	22,6	0,0	100

Rogers (1983) menjelaskan bahwa perbedaan latar belakang antara penyuluh dan masyarakat (*heterofili*) dapat memicu hambatan dalam pertukaran informasi. Penyuluh di Desa Kawali menjembatani kondisi ini melalui pendekatan komunikasi interpersonal yang disesuaikan dengan karakter lokal masyarakat. Praktik komunikasi dilakukan secara informal melalui dialog santai di pematang kolam, saung, dan ruang produksi (Gambar 6). Pendekatan dialogis ini berhasil menciptakan suasana yang dekat sehingga warga lebih leluasa untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengemukakan kebutuhan mereka. Proses edukasi dan penyampaian informasi program SFV dilakukan secara berulang selama sekitar tiga bulan awal hingga masyarakat benar-benar paham dan bersedia terlibat. Temuan ini menegaskan pentingnya fleksibilitas penyuluh dalam mengadaptasi cara komunikasi agar informasi program dapat diterima dengan baik oleh masyarakat (Abdullah *et al.* 2021; Sofia *et al.* 2022; Padmaningrum dan Sugiharjo 2023; Kustiawan *et al.* 2023).



Gambar 6 Diskusi informal penyuluh dengan masyarakat Desa Kawali

Pendekatan dialogis turut mendukung peran motivator dan fasilitator, sehingga 79 persen anggota kelompok memberikan penilaian tinggi terhadap kedua peran tersebut. Sebagai motivator, konsistensi pendampingan penyuluh dinilai mampu membangun keyakinan anggota untuk menjalankan program SFV. Menurut Abdullah *et al.* (2021) dan Latif *et al.* (2022) menyatakan bahwa kekhawatiran akan kerugian usaha dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap inovasi baru. Namun, kehadiran penyuluh di Desa Kawali mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan

mengatasi kekhawatiran terhadap risiko kegagalan atau perubahan akibat penerapan inovasi.

Selain itu, fungsi motivator juga dijalankan secara persuasif melalui pendekatan konsep “magnet rezeki”. Melalui konsep ini, penyuluh membangun pemahaman warga mengenai rantai hubungan antara perubahan perilaku, penguatan kerja sama, peningkatan kualitas produk dan pelayanan, kepuasan konsumen, hingga keberlanjutan usaha. Pendekatan tersebut efektif menghubungkan aktivitas harian anggota dengan tujuan bersama berupa peningkatan kualitas usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Peran penyuluh sebagai fasilitator diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan dan studi banding yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok, seperti pelatihan pembuatan *cookies* ikan nila bagi poklahsar serta pembuatan pakan ikan organik bagi pokdakan. Selain peningkatan kapasitas teknis, penyuluh memfasilitasi akses pemodal dan pemasaran melalui program pemerintah, keikutsertaan dalam bazar atau pameran, hingga kemitraan dengan pihak swasta. Fasilitasi pada aspek pendidikan, pemodal, dan pemasaran ini merupakan bentuk tanggung jawab penyuluh dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah serta pihak ketiga (Khairunnisa et al. 2021; Sofia et al. 2022).

Kendati demikian, peran fasilitator perlu dijalankan secara terukur agar tidak menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana ditegaskan Rogers (1983), tujuan jangka panjang penyuluhan adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalahnya secara mandiri. Di Desa Kawali, indikasi ketergantungan terlihat dari pengakuan ketua Pokdakan dan Poklahsar yang merasa belum siap jika pendampingan penyuluh dihentikan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Khairunnisa et al. (2021) bahwa penyuluhan kurang efektif apabila tidak mampu memutus rantai ketergantungan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh di Desa Kawali perlu mendorong skema kemandirian baru, salah satunya melalui pengembangan penyuluh swadaya dari kalangan warga lokal.

Penyuluh mulai mendorong kemandirian masyarakat Desa Kawali melalui perannya sebagai edukator menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa (POD). Peranedukator dilakukan melalui pendampingan penerapan teknologi dan arahan teknis misalkan kincir angin dan bioflok. Metode pembelajaran diterapkan melalui kombinasi arahan teknis, simulasi lapangan, praktik langsung, serta diskusi reflektif agar warga dapat melihat, mengalami, dan membandingkan proses usaha hingga mampu mengambil keputusan secara mandiri. Pendekatan POD ini sejalan dengan pandangan Faisal (2020) bahwa edukator tidak hanya mengajarkan aspek teknis, melainkan juga membentuk pola pikir yang rasional dan inovatif untuk menjamin keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, keempat fungsi penyuluh telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat mulai dari menjembatani hubungan dengan pemerintah, memberikan edukasi, menghadirkan rasa aman dan kepastian, hingga membuka akses kemitraan dengan pihak ketiga. Kendati demikian, dominasi peran penyuluh tetap perlu dikendalikan agar tidak menghambat kemandirian. Masyarakat perlu terus diberi kesempatan dan pembekalan untuk mengorganisasi serta memberdayakan dirinya secara berkelanjutan.



5.1.2 Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan SFV Kawali

Dukungan pemerintah diposisikan sebagai katalis eksternal yang mendorong terbentuknya dialog komunitas dalam pelaksanaan program SFV di Desa Kawali, dan direpresentasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut *Aminah* (2016), dukungan pemerintah memengaruhi keberhasilan pembangunan karena mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat, hal ini tak lepas dari kewenangan pemerintah dalam mengontrol sumber daya, memegang legitimasi kebijakan, dan memengaruhi institusi lokal (*Li et al.* 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kawali menilai dukungan pemerintah berada pada kategori tinggi sebesar 71 persen (Tabel 10). Dukungan tersebut paling dominan dirasakan pada aspek penguatan sumber daya manusia (79 persen), disusul pendanaan (75,8 persen), fasilitasi teknologi dan inovasi (71 persen), serta sistem informasi (58,1 persen). Capaian ini mengindikasikan bahwa di Desa Kawali, pemerintah memprioritaskan peningkatan kapasitas masyarakat sebelum memperluas dukungan pada aspek pembangunan lainnya.

Tabel 10 Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Kawali (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Pendanaan	75,8	21,0	3,2	100
Penguatan SDM	79,0	21,0	0,0	100
Fasilitasi teknologi dan inovasi	71,0	21,0	8,1	100
Sistem informasi	58,1	35,5	6,5	100

Sebagian besar masyarakat Desa Kawali menilai bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bentuk dukungan pemerintah yang paling bermanfaat. Peningkatan kapasitas ini diwujudkan melalui pelatihan dan pendampingan terstruktur sesuai kebutuhan kelompok, yakni pokdakan menerima pelatihan teknis dari pemijahan, pembibitan, pembesaran, hingga pembuatan pakan organik, sedangkan poklahsar memperoleh pelatihan olahan ikan nila seperti ikan bakar, kerupuk, keripik, *cheese stick*, dan es krim. Menurut Utami dan Mulyono (2025) pengembangan SDM merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Proses pembelajaran tersebut memperluas bahan diskusi dan meningkatkan kepercayaan diri anggota berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Poklahsar Kubis dan Ertiga, bahwa anggota kelompok secara mandiri berkumpul pasca pelatihan untuk mendiskusikan peluang bisnis produk inovasi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi strategi krusial dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan masyarakat untuk mengoperasikan usaha perikanan secara mandiri.

Selain meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah memberikan dukungan pendanaan untuk menunjang pelaksanaan program SFV yang dialokasikan secara *in-kind* (bantuan sarana dan prasarana), bukan dalam bentuk *in-cash* (tunai). Di Desa Kawali, bantuan tersebut diwujudkan berupa kincir air, Unit Pengolahan Ikan (UPI) pascapanen, serta fasilitas produksi

lain untuk kegiatan budidaya dan pengolahan. Pemberian bantuan berbasis skema *bottom-up* atau responsif kebutuhan kelompok, yakni seluruh anggota terlebih dahulu berdialog, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, dan menyusun usulan, bersama pengurus dan penyuluh sebelum diajukan kepada KKP. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota Pokdakan

“Kalau kelompok butuh apa-apa tinggal buat perencanaan, lalu ajukan ke penyuluh atau ketua.” (DDI, Laki-laki, 57 Tahun)

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pendanaan dapat menjadi stimulus dialog ketika masyarakat memiliki ruang untuk membicarakan kebutuhan dan menentukan pemanfaatan sumber daya secara bersama. Sehingga dukungan pemerintah berfungsi ganda sebagai penyedia sumber daya fisik sekaligus instrumen yang memicu dialog dan penguatan pengambilan keputusan secara kolektif di tingkat lokal.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkenalkan berbagai inovasi untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, salah satunya melalui penerapan teknologi minapadi. Kehadiran inovasi ini memberikan pengalaman baru yang memicu ruang dialog, uji coba, dan evaluasi bersama di tingkat kelompok berdasarkan kondisi ekologis serta pengalaman budidaya lokal. Hasil evaluasi minapadi menunjukkan adanya kendala teknis dan ketidaksesuaian di lapangan, masyarakat sepakat untuk menghentikan penggunaan teknologi tersebut. Kasus minapadi ini membuktikan bahwa fasilitasi teknologi berfungsi efektif sebagai stimulus pembelajaran kelompok, di mana masyarakat bertindak sebagai subjek aktif yang mampu menilai, memilih, dan memutuskan keberlanjutan suatu inovasi sesuai kebutuhan serta karakteristik lokalnya.

Aspek dukungan pemerintah yang masih paling lemah di Desa Kawali adalah penyediaan sistem informasi, yang mencakup kemudahan akses, kesesuaian data dengan kebutuhan warga, serta kemampuannya dalam memicu diskusi antaranggota. Rendahnya penilaian masyarakat terhadap indikator ini menunjukkan bahwa penyediaan data dan keterbukaan informasi pendukung program SFV oleh pemerintah desa belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang staf desa yang mengakui bahwa pengembangan Kampung Nila melalui program SFV selama ini lebih banyak bergerak secara swadaya tanpa intervensi dan bantuan langsung dari pihak desa.

Secara umum, dukungan KKP sebagai representasi pemerintah melalui pendanaan, penguatan SDM, teknologi, dan sistem informasi telah memicu komunikasi partisipatif. Dukungan eksternal ini memperluas kapasitas masyarakat untuk mendiskusikan kebutuhan, mengevaluasi inovasi, dan mengambil keputusan secara mandiri (Muslim 2017; Damayanti dan Syarifudin 2020; Lewis et al. 2022; Poerwanto 2025). Efektivitas dukungan tersebut masih dapat dioptimalkan melalui penguatan sistem informasi desa dan peningkatan kesesuaian inovasi teknologi dengan potensi serta kondisi lokal.

5.1.3 Pola komunikasi keputusan adopsi inovasi masyarakat Kawali

Stimulus internal dan eksternal dari penyuluh serta pemerintah direspons masyarakat Desa Kawali melalui empat pola keputusan adopsi inovasi Rogers (1983), yakni opsional, kolektif, otoritas, dan kontingen. Hasil penelitian pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pola keputusan kolektif memperoleh penilaian tertinggi sebesar 85,5 persen, disusul keputusan opsional (66,1 persen), keputusan kontingen (46,8 persen), dan keputusan otoritas (37,1 persen). Variasi distribusi ini membuktikan bahwa mekanisme pengambilan keputusan adopsi inovasi dalam program SFV disesuaikan dengan ranah kewenangan anggota, yakni keputusan terkait kepentingan bersama didominasi oleh tradisi musyawarah kelompok, sedangkan keputusan pengelolaan usaha mandiri memberikan kebebasan pada tingkat individu. Sementara itu, pengalaman keberhasilan masa lalu serta arahan dari figur yang memiliki kewenangan atau keahlian tetap dijadikan pertimbangan sekunder dalam situasi tertentu.

Tabel 11 Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Kawali (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Opsional	66,1	27,4	6,5	100
Kolektif	85,5	12,9	1,6	100
Otoritas	37,1	41,9	21,0	100
Kontingen	46,8	29,0	24,2	100

Keputusan kolektif menjadi pola paling dominan dalam pelaksanaan program SFV di Desa Kawali. Dominasi ini mencerminkan kuatnya ikatan sosial dan rasa saling percaya (*social trust*) antarwarga, yang memudahkan perumusan mufakat terkait kebutuhan kelompok, kegiatan bersama, alokasi bantuan, hingga pengembangan program melalui musyawarah kelompok dan forum Rumasa. Rogers (2003) menjelaskan bahwa meski keputusan kolektif membutuhkan waktu adopsi yang lebih lambat, pola ini menghasilkan dukungan sosial yang jauh lebih solid. Hal tersebut terbukti pada tahap awal SFV bahwa masyarakat membutuhkan waktu penyesuaian hingga tiga bulan di awal program untuk berdiskusi demi mencapai kesepakatan bulat sebelum menyatakan siap terlibat. Ketua Gapokkan menegaskan pentingnya proses penyamaan persepsi ini untuk mencegah potensi konflik horizontal di kemudian hari, sebagaimana tuturnya

“Nantilah dulu saya mau ngobrol sama masyarakat, karena kalau bikin kelompok itu kadang-kadang bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, kalau tidak paham. Makanya saya ya ngobrol dulu ya sama masyarakat disini gitu kan bagaimana berkelompok” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

Kendati telah melalui proses diskusi yang panjang untuk terlibat, 50 persen peserta pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan keikutsertaan mereka dalam program SFV. Sebaliknya, 50 persen sisanya menunjukkan komitmen yang sangat kuat, konsistensi pelaksanaan, serta

keberlanjutan program yang tinggi. Menurut Kim dan Chung (2017), bahwa keberhasilan implementasi suatu inovasi sangat ditentukan oleh konsistensi anggota dalam mengawal dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Hal ini terbukti di Desa Kawali, bahwa kelompok yang tersisa tersebut berhasil meningkatkan level perekonomian desa secara signifikan meski hanya dijalankan oleh 50 persen anggota tersisa.

Di samping keputusan kolektif, masyarakat Desa Kawali memiliki ruang otonomi yang signifikan untuk mengambil keputusan secara opsional yaitu keputusan mandiri individu untuk menerima atau menolak inovasi tanpa bergantung pada anggota kelompok lain (Rogers 2003). Pola keputusan ini berkembang pesat pada pengelolaan aset dan sumber daya pribadi, seperti manajemen kolam, penerapan teknis budidaya, hingga porsi keputusan produksi, yang didukung oleh kuatnya kepemilikan sarana produksi mandiri pada warga Kawali. Keleluasaan ini memberi ruang bagi setiap anggota untuk mengevaluasi manfaat, risiko, dan kesesuaian inovasi dengan kondisi usaha mereka, sebagaimana tercermin pada keputusan penghentian teknologi minapadi akibat tingginya kerugian dari serangan hama berang-berang. Kasus penghentian minapadi tersebut membuktikan bahwa masyarakat tidak mengadopsi inovasi secara pasif, melainkan melakukan proses *re-invention* berbasis evaluasi kondisi lokal, sehingga mereka memiliki kapasitas serta kendali penuh untuk menyesuaikan atau menyeleksi inovasi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan aktual di lapangan.

Tingginya keputusan kolektif dan opsional di Desa Kawali tidak dibarengi dengan pengalaman kontingen. Keputusan kontingen di Desa Kawali memperoleh penilaian yang relatif lebih rendah, menunjukkan bahwa penerimaan program SFV tidak dipengaruhi oleh pengalaman keberhasilan inovasi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena program SFV merupakan program pengembangan perikanan berskala desa pertama yang diterapkan secara komprehensif di Desa Kawali. Masyarakat belum memiliki pengalaman kolektif mengenai keberhasilan inovasi serupa yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan terhadap inovasi berikutnya. Masyarakat justru membandingkan program SFV dengan program pemerintah lainnya yang sudah lebih dulu fakum, sebagaimana disampaikan oleh ketua Poklhasar Kubis

“Karena saya melihat ini program yang paling berjalan, jika dibandingkan program pemerintah yang lain. Sebenarnya mungkin ada yang lain, tapi informasinya kurang terdengar dan tidak ada pembimbingan seintensif SFV, jadi programnya sudah tidak berjalan lagi” (YMK, Perempuan, 42 Tahun)

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran dan pengetahuan tentang SFV kepada masyarakat Desa Kawali, penyuluh melakukan edukasi dan memfasilitasi studi banding. Sehingga sebagian besar pengetahuan mengenai pengembangan usaha perikanan SFV justru diperoleh melalui studi banding, pelatihan, dan pembelajaran dari kelompok lain yang telah berhasil.

Meskipun penyuluh memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan program SFV di Desa Kawali, penyuluh tidak

memegang kendali atau kontrol penuh dalam penetapan keputusan. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pengambilan keputusan secara otoritas dibandingkan indikator lainnya. Penyuluh lebih menempatkan diri sebagai pendamping, edukator, dan fasilitator yang bertugas menyediakan informasi serta mengawal alur diskusi, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan anggota kelompok melalui musyawarah. Kondisi tersebut membuktikan bahwa ruang deliberasi masyarakat tetap terjaga, sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung secara partisipatif dan demokratis.

Secara umum, pola pengambilan keputusan adopsi inovasi di Desa Kawali bersifat deliberatif dan adaptif sesuai dengan jenis keputusannya. Proses ini berlangsung melalui komunikasi dua arah, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses informasi, membagikan pengalaman, menyampaikan kebutuhan, serta menimbang berbagai alternatif solusi. Kemampuan kelompok dalam menjaga ruang musyawarah sekaligus membagi kewenangan secara proporsional antara anggota, pemimpin, dan tenaga ahli menjadi kunci terciptanya keputusan yang responsif dan tepat sasaran.

5.1.4 Tipe komunikasi kepemimpinan dalam SFV Desa Kawali

Komunikasi kepemimpinan berfungsi sebagai katalis dialog internal yang memperlihatkan bagaimana ketua kelompok menyampaikan informasi, membangun kepercayaan, dan menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan bersama, sejalan dengan definisi Stogdill (1950) tentang kepemimpinan sebagai proses memengaruhi orang lain. Efektivitas kepemimpinan ini ditentukan oleh kemampuan membangun legitimasi, menumbuhkan makna bersama, serta mengoordinasikan aksi kolektif melalui komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial lokal (Herjan dan Muksin 2025). Tabel 12 memperlihatkan bahwa komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali didominasi oleh *meaning-making language* sebesar 74,2 persen, diikuti *emphatic language* (72,6 persen), dan *directive language* (71 persen). Temuan ini membuktikan bahwa keberhasilan dialog komunitas dalam pelaksanaan program SFV di Desa Kawali, salah satunya dibangun melalui kemampuan pemimpin menanamkan makna dan nilai bersama, kemudian diperkuat oleh hubungan interpersonal serta arahan teknis yang koordinatif.

Tabel 12 Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
<i>Directive language</i>	71,0	25,8	3,2	100
<i>Emphatic language</i>	72,6	25,8	1,6	100
<i>Meaning-making language</i>	74,2	24,2	1,6	100

Tipe komunikasi *meaning-making* menjadi komunikasi kepemimpinan yang paling dominan dalam program SFV di Desa Kawali. Gaya ini tercermin dari cara pemimpin menjelaskan manfaat kegiatan, menghubungkan tugas anggota dengan tujuan kelompok, serta memberi makna mendalam pada setiap pekerjaan warga. Melalui analogi lokal “sapu lidi”, pemimpin menanamkan semangat gotong royong bahwa program hanya bisa berhasil

jika semua anggota saling menguatkan. Pendekatan ini membuat masyarakat lebih mudah memahami dan menerima program tanpa penolakan sejalan dengan temuan Rachmani *et al.* (2025), serta merasa memiliki peran penting dalam program. Pemaknaan ini diperkuat dengan anggapan bahwa program SFV merupakan upaya menjaga warisan leluhur untuk membudidayakan ikan nila dan nilem sebagai identitas sosial budaya serta sumber penghidupan desa. Hasilnya, anggota kelompok bekerja bukan sekadar untuk memenuhi target, melainkan karena rasa tanggung jawab moral. Menurut Mayfield dan Mayfield (2017) bentuk komunitas tersebut mengindikasikan keberhasilan ketua kelompok dalam menghubungkan kerja harian warga dengan visi masa depan yang lebih besar.

Selain membangun makna bersama, ketua kelompok SFV di Desa Kawali menerapkan komunikasi empatik yang tercermin dari perhatian terhadap kondisi anggota, pemberian semangat saat menghadapi kesulitan, serta penghargaan atas kontribusi warga. Ketua kelompok aktif melakukan pendekatan personal melalui kunjungan langsung atau komunikasi informal kepada anggota yang kurang aktif untuk memahami kendala mereka sekaligus menjaga keharmonisan kelompok. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian tugas, melainkan juga menempatkan warga sebagai bagian utuh dari kelompok. Menurut Mayfield dan Mayfield (2017), komunikasi empatik membangun rasa aman psikologis yang membuat anggota merasa dihargai, lebih percaya kepada pemimpin, dan lebih nyaman menyampaikan pendapat. Karakter komunikasi ini sangat selaras dengan budaya sosial masyarakat Kawali yang mengutamakan kekeluargaan dan kedekatan emosional.

Meskipun karakter sosial masyarakat Desa Kawali cenderung membentuk gaya komunikasi yang harmonis, tidak berarti pemberian arahan tugas melalui *directive-language* oleh pemimpin tergolong lemah. Temuan menunjukkan sebanyak 71 persen anggota kelompok tetap menilai dimensi *directive language* pada kategori tinggi. Dimensi ini tercermin dari kemampuan pemimpin dalam memberikan arahan tugas yang jelas, menjelaskan prosedur kerja, serta menyampaikan ekspektasi pelaksanaan program kepada anggota, seperti pembagian tugas dan koordinasi kegiatan produksi. Instruksi tersebut umumnya disampaikan secara lisan tanpa pengawasan ketat, melalui perencanaan matang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pokhlasar Eriga (TRS), yang terlebih dahulu menyusun dan menyiapkan strategi kerja agar pelaksanaan program SFV berjalan secara efisien.

Praktik ketiga tipe komunikasi tersebut berlangsung dalam struktur organisasi SFV yang membagi peran kepemimpinan pada beberapa tingkatan. Pada tingkat desa terdapat Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan) yang mengoordinasikan kelompok pelaksana SFV. Gapokkan menaungi beberapa Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Pokhlasar) yang masing-masing dipimpin oleh ketua kelompok sesuai dengan bidang usahanya. Struktur tersebut membentuk alur komunikasi berjenjang antara anggota, ketua Pokdakan atau Pokhlasar, dan Gapokkan. Aspirasi dan kebutuhan anggota

dapat dibicarakan pada tingkat kelompok, sedangkan persoalan yang membutuhkan koordinasi lebih luas dibawa ke tingkat Gapokkan.

Pembagian peran kepemimpinan juga terlihat antara urusan strategis dan operasional. Urusan strategis berkaitan dengan penentuan arah kelompok, seperti penyusunan visi dan misi, penetapan tujuan pembangunan, perencanaan program, pencarian sumber pendanaan dan sponsor, serta pemerintah maupun mitra pembangunan. Urusan operasional berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari pada tingkat Pokdakan dan Poklahsar, seperti budidaya ikan, produksi olahan hasil perikanan, pemasaran produk, panen, dan kegiatan rutin kelompok. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan kebutuhan komunikasi pemimpin menyesuaikan dengan jenis persoalan yang dibicarakan dan tingkat organisasi tempat kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan fungsi kepemimpinan melibatkan beberapa *local champion* dengan peran yang saling melengkapi. IGP berperan dalam koordinasi pelaksanaan SFV dan hubungan antara kelompok dengan pihak eksternal, sedangkan HWY berperan dalam penyusunan arah pengembangan, dukungan awal, dan penguatan jejaring kemitraan. Penyuluh (ASB) berada pada posisi yang berbeda dari ketua kelompok karena menjalankan fungsi pendamping, fasilitator, dan penghubung masyarakat dengan pemerintah. Secara keseluruhan, komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali menunjukkan kombinasi tiga tipe komunikasi dengan penilaian tinggi, yang menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin di Desa Kawali memadukan pembangunan makna bersama, pemeliharaan hubungan interpersonal, dan koordinasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan kelompok.

5.1.5 Gejala *groupthink* kelompok anggota SFV desa Kawali

Groupthink dipahami sebagai dorongan untuk menjaga kesepakatan dan harmoni, namun mengabaikan evaluasi kritis (Janis 1972), meski di sisi lain dapat berfungsi sebagai katalis yang mempercepat konsensus serta stabilitas kelompok. Tabel 13 menunjukkan bahwa gejala *groupthink* di Desa Kawali didominasi oleh dimensi *overestimation of the group* sebesar 51,61 persen pada kategori tinggi, 46,77 persen pada kategori sedang, dan 1,61 persen pada kategori rendah. Sebaliknya, dimensi *close-mindedness* didominasi oleh kategori sedang (64,52 persen) dan rendah (27,42 persen), dengan kategori tinggi hanya 8,06 persen. Sementara itu, dimensi *pressures toward uniformity* terbagi seimbang antara kategori sedang (48,39 persen) dan rendah (48,39 persen), serta hanya 3,23 persen pada kategori tinggi. Temuan ini membuktikan bahwa dinamika kelompok di Desa Kawali lebih didorong oleh keyakinan yang kuat terhadap kapasitas kolektif dalam menyelesaikan masalah, bukan akibat tekanan konformitas ataupun penolakan terhadap pandangan luar, sehingga ruang bagi diskusi dan pertukaran gagasan secara terbuka tetap terjaga.

Tingginya penilaian pada dimensi *overestimation of the group* didorong oleh kuatnya keyakinan anggota akan keberhasilan program SFV dalam meningkatkan kesejahteraan, yang tercermin dari optimisme pengurus Gapokkan Kampung Nila bahwa desa akan tetap berlanjut dengan atau tanpa program SFV berkat kerja sama kelompok yang

solid. Optimisme tersebut dipicu oleh keberhasilan awal program seperti peningkatan hasil panen, pertumbuhan ekonomi, lahirnya produk inovasi, pembentukan kelompok perikanan baru, serta pengakuan eksternal. Menurut DiPierro *et al.* (2023), kepercayaan terhadap kohesivitas kelompok merupakan modal penting untuk memperkuat kerja sama selama tidak mengabaikan evaluasi kritis. Namun, di Desa Kawali, rasa percaya diri kolektif justru tidak diimbangi dengan mekanisme evaluasi partisipatif dan perencanaan risiko, sehingga memicu kelalaian manajemen serta masalah keuangan internal yang berujung pada gagal panen dan kerugian materi hingga puluhan juta rupiah. Temuan sebagaimana temuan Baptist (2015) bahwa *collective efficacy* dan keyakinan kelompok yang terlalu tinggi menimbulkan *overconfidence*, yang membuat kelompok kurang kritis dalam mengevaluasi setiap keputusan.

Tabel 13 Penilaian anggota kelompok terhadap gejala *groupthink* dalam pelaksanaan SFV di Desa Kawali (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
<i>Overestimation of the group</i>	51,61	46,77	1,61	100
<i>Close-minded</i>	8,06	64,52	27,42	100
<i>Pressures toward uniformity</i>	3,23	48,39	48,39	100

Di sisi lain, kelompok masyarakat Desa Kawali tidak menutup diri dari masukan luar, yang tercermin dari rendahnya persepsi terhadap praktik *closed-mindedness*. Masyarakat justru aktif mencari informasi dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi akademisi, pemerintah, dan swasta termasuk kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat oleh IPB University dan Politeknik AUP guna memperoleh solusi permasalahan, memperluas jejaring, dan meningkatkan reputasi desa. Keterbukaan ini sejalan dengan rendahnya persepsi terhadap *pressures toward uniformity*, sehingga warga tidak dituntut patuh berkebiasaan demi keseragaman, melainkan diwadahi dalam ruang dialog khusus bernama "Rumasa" untuk menyampaikan kritik, masalah, dan saran. Pada Rumasa setiap kelompok wajib menyampaikan aspirasi minimal melalui ketua kelompok sebagai representasi untuk menyamakan pemahaman hingga tercipta kesepakatan serta pengetahuan baru bersama.

Meskipun begitu, kelompok SFV di Desa Kawali tidak terpelas dari keberadaan pemimpin lokal yang melakukan *mindguard*. Menurut Janis (1972) agenda kelompok dapat dengan mudah diarahkan atau dikendalikan oleh seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap anggotanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketua Gapokkan Kampung Nila Desa Kawali, yang menyampaikan bahwa

"Iya, kadang informasi yang disampaikan itu hanya sebagian. Bahkan ada saatnya kami memilih untuk tidak langsung menyampaikan bahwa ada bantuan. Bantuannya kan tidak banyak, sementara ini juga untuk masyarakat. Misalnya ada bantuan yang hanya cukup untuk satu kolam, kami bingung harus diberikan kepada siapa. Kalau dibagi ke sepuluh orang, ya tidak akan cukup. Nah,

kondisi seperti itu yang sering membuat kami sebagai pengurus kebingungan” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

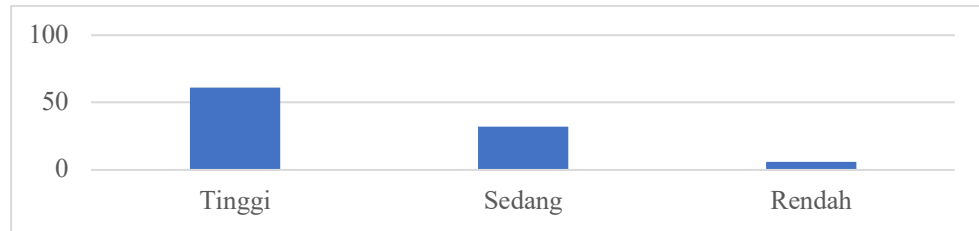
Artinya informasi program tidak disampaikan secara utuh melainkan reduksi saat disampaikan kepada seluruh anggota. Penyampaian pesan juga tidak dilakukan secara langsung karena menunggu waktu yang lebih kondusif untuk menyampaikan pesan tersebut. Alasan reduksi pesan dan penundaan tersebut adalah untuk mengurangi potensi konflik antar kelompok, namun justru menghambat pembelajaran kolektif.

5.2 Dialog Partisipatif Realisasi SFV Desa Kawali

Figueroa *et al.* (2002) mendefinisikan dialog sebagai proses komunikasi multiarah untuk saling memahami dan mengklarifikasi pandangan serta keyakinan antarpihak, yang menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kapasitas demi terciptanya pemahaman bersama sebagai dasar pengambilan keputusan kolektif. Di Desa Kawali, komunikasi partisipatif berkembang secara bertahap mulai dari penyadaran dan identifikasi masalah hingga penyusunan rencana kegiatan, dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang bervariasi pada setiap tahapan. Partisipasi warga tergolong kuat pada pengalaman, kebutuhan, kondisi usaha, dan pilihan tindakan lokal, namun cenderung terbatas pada tahapan bernilai strategis, seperti pelibatan pemangku kepentingan serta perumusan visi dan tujuan yang masih terkonsentrasi pada aktor-aktor inti. Meski demikian, dialog tidak selalu berujung pada konsensus semata. Proses ini juga mengeksplisitkan perbedaan nilai, kepentingan, cara pandang, dan konflik antaranggota, sehingga pencapaian kesepakatan akhir membutuhkan dinamika negosiasi serta pembelajaran bersama yang lebih mendalam.

5.2.1 Penyadaran dan identifikasi masalah kolektif

Dialog komunitas diawali oleh proses penyadaran dan identifikasi masalah sebagai landasan terbentuknya kesadaran kolektif, sehingga masyarakat dapat mengenali realitas persoalan, mendiskusikan dampaknya, serta membangun pemahaman bersama untuk mengubah masalah individual menjadi persoalan publik (Jacobson dan Altamirano dalam Servaes 2020). Di Desa Kawali, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini tergolong tinggi, yakni mencapai 61 persen pada kategori tinggi, 32 persen pada kategori sedang, dan 6 persen pada kategori rendah (Gambar 7). Distribusi data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar warga telah terlibat aktif mengenali dan mengulas persoalan pengembangan program SFV sejak awal. Sebagai catatan, variasi tingkat keterlibatan mengindikasikan akses ruang identifikasi masalah belum merata, terutama bagi kelompok perempuan dan pemuda yang akses artikulasinya masih relatif terbatas.

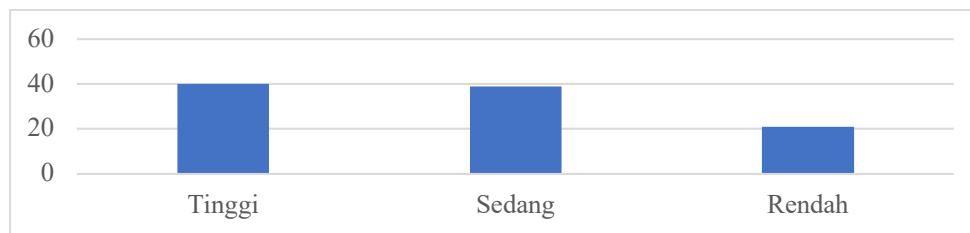


Gambar 7 Sebaran anggota kelompok pada tahap penyadaran dan identifikasi masalah di Desa Kawali

Proses dialog di Desa Kawali dipantik oleh informasi rencana pengurangan debit air Waduk Jatiluhur (sumber pengairan utama budidaya ikan Ciamis) yang disampaikan *local champion* melalui dialog informal. Informasi ini dipersepsikan sebagai ancaman bagi keberlanjutan usaha budidaya nila dan nilem, sekaligus membuka peluang ekonomi atas melonjaknya permintaan pasar nila. Menurut Bessette (Servaes 2020), komunikasi partisipatif berkembang ketika masyarakat menyadari ancaman terhadap kehidupannya, menjadikan dialog sarana membangun kesadaran kritis atas keterkaitan lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan hidup. Selaras dengan pendapat tersebut, pertemuan antara ancaman ekologis dan peluang ekonomi mendorong *local champion*, pembudidaya dan masyarakat Desa Kawali rutin berdiskusi. Mereka mengidentifikasi masalah, merumuskan alternatif solusi, serta menyusun rencana aksi atas permasalahan bersama. Proses ini membuktikan kesadaran masyarakat tidak tumbuh spontan, melainkan dimediasi *local champion* dalam membangun ruang dialog dan menumbuhkan kesadaran sosial (Kustiawan *et al.* 2023). Tahap tersebut menjadi titik awal terbentuknya kesadaran kritis sosial-lingkungan (Altamirano dalam Servaes 2020), yang mengubah pandangan warga dari penyelesaian individual menuju keterlibatan kolektif.

5.2.2 Pelibatan *stakeholders* potensial

Tahap berikutnya dalam dialog komunitas adalah mengidentifikasi dan melibatkan *stakeholders* untuk memperluas alternatif solusi melalui dukungan pengetahuan, sumber daya, jaringan, maupun kebijakan dari pemerintah, kelompok swadaya, dan swasta (Figueroa *et al.* 2002). Dialog pada tahap ini tidak sekadar menentukan pihak yang dilibatkan, melainkan juga merancang kolaborasi guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam pembangunan. Gambar 8 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kawali pada tahap ini merupakan yang terendah dibandingkan tahapan dialog lainnya. Hanya 40 persen anggota kelompok yang terlibat pada kategori tinggi, sementara 39 persen berada pada kategori sedang dan 21 persen pada kategori rendah. Tingkat partisipasi yang terbatas ini mengindikasikan bahwa mayoritas anggota kelompok lebih banyak berposisi sebagai penerima informasi hasil keputusan, daripada terlibat langsung dalam proses mengidentifikasi maupun menentukan mitra strategis yang diajak bekerja sama.



Gambar 8 Sebaran anggota kelompok pada tahap identifikasi dan pelibatan *stakeholders* di Desa Kawali

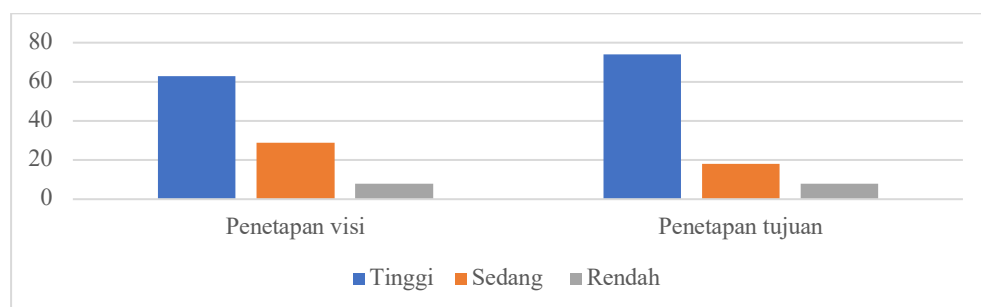
Proses identifikasi *stakeholders* di Desa Kawali didominasi oleh *local champion*, ketua kelompok, dan penyuluh perikanan yang memanfaatkan relasi personal mereka. Aktor-aktor ini berhasil membangun kemitraan lintas sektor untuk mendukung program SFV, meliputi KKP (dukungan SDM, pendanaan, teknologi, kemitraan), Bank Rakyat Indonesia (fasilitas pembayaran *online*, penerangan, *banner*), serta IPB University, Politeknik AUP, dan Universitas Siliwangi (pelatihan dan pendampingan). Di sisi lain, dominasi tersebut memicu konflik laten antar-tokoh akibat perebutan kontrol kekuasaan dan menciptakan ketimpangan informasi. Sebagaimana dijelaskan Chin (Servaes 2020), dialog berpotensi dipengaruhi relasi kekuasaan dan distribusi informasi, sehingga keterbatasan partisipasi masyarakat memperbesar peluang sentralisasi informasi pada aktor tertentu. Keterbatasan akses anggota membuat komunikasi eksternal hanya berpusat pada pemimpin dan penyuluh, melanggar prinsip penjaminan transparansi, kesetaraan, dan keberlanjutan pembangunan yang menekankan pentingnya pelibatan warga (Oseni 2024). Sehingga meskipun sukses memperluas jejaring, tahap ini belum optimal secara partisipatif. Selanjutnya keterlibatan anggota dalam mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan *stakeholders* perlu diperluas agar kolaborasi tidak lagi bergantung pada jaringan personal elit lokal, melainkan bertransformasi menjadi modal sosial kolektif seluruh anggota kelompok.

5.2.3 Penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV Desa Kawali

Tahapan dialog berikutnya adalah menetapkan visi dan tujuan pembangunan guna menyatukan berbagai kepentingan menjadi kesepakatan kolektif yang mengarahkan tindakan bersama menuju kondisi ideal (Figuerola *et al.* 2002). Di Desa Kawali, partisipasi masyarakat pada tahap ini tergolong relatif tinggi (Grafik 9), tercatat sebanyak 63 persen anggota kelompok menyatakan terlibat pada kategori tinggi dalam penetapan visi, dan persentase tersebut meningkat menjadi 74 persen pada penetapan tujuan. Tingginya angka partisipasi membuktikan bahwa sebagian besar anggota kelompok telah dilibatkan secara aktif dalam menyamakan persepsi, merancang visi dan tujuan sebagai komitmen bersama, serta membangun orientasi tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program SFV.

Dialog penyusunan visi berfokus pada cita-cita Desa Kawali sebagai kawasan perikanan produktif, berdaya saing, dan menyejahterakan berbasis budidaya nila, sedangkan tujuan mencakup sasaran operasional seperti peningkatan kapasitas, produksi, pendapatan, olahan perikanan, akses pasar, serta penguatan kelembagaan. Menurut Figuerola *et al.* (2002), keterlibatan

wakil masyarakat terdampak dalam dialog strategis sangat penting guna menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*).



Gambar 9 Sebaran anggota kelompok pada tahap penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV di Desa Kawali

Menariknya, meskipun sebagian besar masyarakat menyatakan partisipasinya tinggi dalam penentuan visi dan tujuan, secara empiris perumusan visi program SFV di Desa Kawali hanya didominasi oleh elit lokal dan perwakilan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penjelasan ketua Gapokkan Kampung Nila Desa Kawali

“ya saat penetapan visi, saya bersama SBR (penyuluh perikanan) didampingi oleh Bu RRO (perwakilan KKP) untuk menyusun visi kelompok. Cuma kami bertiga, supaya sesuai dengan rancangan utama SFV pusat” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

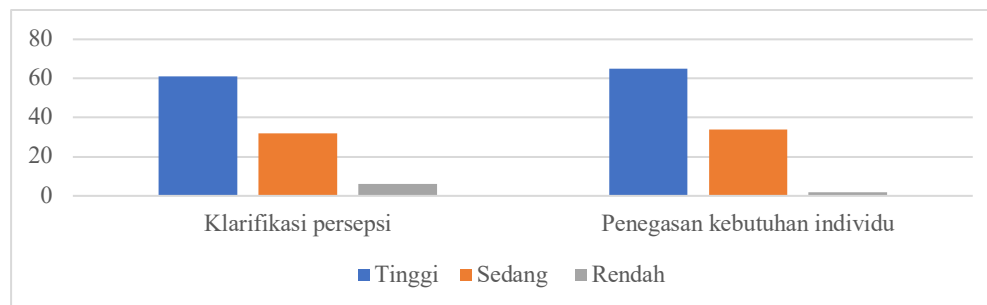
Kondisi ini menunjukkan bahwa perumusan visi belum sepenuhnya inklusif dan sarat kepentingan eksternal. Selain berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran, dominasi tersebut memperkuat relasi kekuasaan antarpelaku pembangunan (Chin dalam Servaes 2020). Kendati perumusan visi dan tujuan awal masih dipengaruhi aktor eksternal, dialog tahap ini secara berhasil membangun kesamaan arah pelaksanaan program SFV.

5.2.4 Klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu

Tahap berikutnya dalam dialog komunitas adalah klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu untuk menyamakan pemahaman (*shared understanding*) mengenai pelaksanaan program SFV, memperkecil perbedaan persepsi, serta memastikan kebutuhan seluruh pihak terdampak telah terakomodasi (Figueroa *et al.* 2002). Di Desa Kawali, partisipasi masyarakat pada tahap ini tergolong tinggi (Gambar 10), dengan 61 persen anggota kelompok terlibat aktif dalam proses penyamaan persepsi dan 65 persen terlibat dalam penyampaian kebutuhan individu maupun kelompok. Tingginya keterlibatan tersebut membuktikan bahwa sebagian besar anggota kelompok memperoleh ruang dialog yang memadai untuk mengonfirmasi pemahaman mereka mengenai program SFV, sekaligus mengelaborasi kebutuhan pribadi agar terintegrasi ke dalam agenda pembangunan kelompok.

Secara empiris, proses klarifikasi persepsi di Desa Kawali didominasi oleh penyuluh perikanan melalui komunikasi interpersonal yang dilakukan

secara bertahap. Penyuluh perlu menyesuaikan diri dengan sosial budaya setempat karena, menurut Rogers (2003), proses penyebaran inovasi akan lebih efektif apabila komunikasi berlangsung dalam kondisi *homophily*, yaitu ketika pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki kedekatan pengalaman, bahasa, maupun latar belakang sosial. Kondisi tersebut tampak pada proses dialog, penyuluh secara aktif menyesuaikan cara berkomunikasi dengan karakter masyarakat pembudidaya dan pengolah pemasar. Di antaranya menerima rokok saat diberikan meskipun beliau tidak merokok, atau makan bersama ibu-ibu di dapur walaupun beliau seorang laki-laki.



Gambar 10 Sebaran anggota kelompok pada tahap klarifikasi homogenitas persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Kawali

Penyuluh tidak langsung menjelaskan tujuan, mekanisme, serta manfaat program SFV, tetapi juga berupaya menyamakan cara pandang masyarakat terhadap perubahan yang akan terjadi dan cita-cita apa yang mereka ingin capai. Dialog tersebut lebih sering dilakukan secara informal melalui obrolan di pematang kolam budidaya, saung, hingga dapur tempat produksi sehingga anggota kelompok memiliki ruang yang lebih nyaman untuk bertanya, menyampaikan keraguan, maupun mengemukakan pendapatnya. Pendekatan tersebut dilakukan secara berulang hingga masyarakat memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai arah pengembangan program SFV.

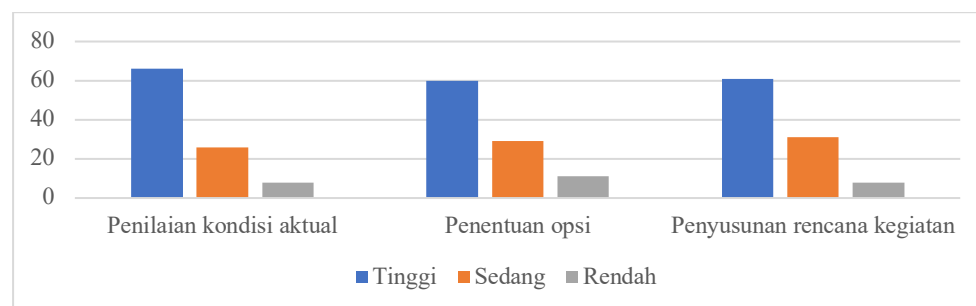
Setelah tercapai kesamaan persepsi, dialog berkembang pada penegasan kebutuhan individu maupun kelompok. Anggota kelompok diberikan kesempatan menyampaikan kebutuhan pribadinya untuk disesuaikan dengan bidang usaha yang mereka jalankan, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas, sarana produksi, bantuan teknologi, hingga dukungan pemasaran. Aspirasi tersebut kemudian didiskusikan bersama penyuluh, *local champion*, dan seluruh anggota pada rapat rutin Rumasa kelompok untuk menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Artinya kebutuhan yang diajukan bukan hanya mencerminkan kepentingan individu, tetapi telah melalui proses penyelarasan dengan kebutuhan kelompok secara keseluruhan. Praktik ini sebagaimana penjelasan Servaes (2020), bahwa komunikasi partisipatif yang efektif tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi harus mampu menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat mengartikulasikan kebutuhan, kepentingan, dan harapannya terhadap program pembangunan. Oleh karena itu, penegasan kebutuhan individu menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa

program yang dirancang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata dari kepentingan pemerintah ataupun pihak eksternal.

Secara umum, tahap klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Kawali menunjukkan bahwa dialog komunitas telah berkembang dari proses penyamaan pemahaman menuju proses penyelarasan kebutuhan pembangunan. Penyuluh berperan penting sebagai fasilitator dialog yang menjembatani perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan anggota kelompok memperoleh ruang untuk menyampaikan kebutuhan sesuai kondisi usahanya masing-masing. Tahap ini menjadi fondasi penting sebelum masyarakat bersama-sama mengevaluasi kondisi lapangan, menentukan berbagai alternatif tindakan, dan menyusun rencana pelaksanaan Program SFV secara kolektif.

5.2.5 Penilaian kondisi aktual, penentuan opsi dan rencana kegiatan

Tahap terakhir dalam dialog komunitas adalah menilai kondisi aktual, menentukan berbagai alternatif tindakan, serta menyusun rencana kegiatan bersama guna mentransformasi hasil diskusi menjadi keputusan kolektif yang siap diimplementasikan (Figueroa *et al.* 2002). Di Desa Kawali, partisipasi masyarakat pada tahap ini tergolong tinggi (Gambar 11), dengan 66 persen anggota kelompok terlibat aktif dalam penilaian kondisi aktual, 60 persen dalam penentuan alternatif tindakan, dan 61 persen dalam penyusunan rencana kegiatan. Tingginya angka keterlibatan masyarakat membuktikan bahwa sebagian besar anggota berpartisipasi aktif mengevaluasi kondisi lapangan, mempertimbangkan berbagai opsi solusi, hingga menyepakati rencana pelaksanaan program SFV secara kolektif.



Gambar 11 Sebaran anggota kelompok pada tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan di Desa Kawali

Secara empiris, proses dialog diawali dengan mengevaluasi kondisi aktual masing-masing kelompok pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan. Anggota kelompok mendiskusikan berbagai masalah di antaranya kondisi air kolam, kapasitas kolam, jumlah kepemilikan kolam dan kemampuan masing-masing pemilik kolam. Hasil penilaian kondisi kemudian menjadi dasar dalam menentukan berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan untuk dilaksanakan melalui forum rutin Rumasa yang menjadi ruang musyawarah masyarakat Desa Kawali. Sehingga keputusan yang dihasilkan tahap ini berangkat dari kondisi nyata masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi ataupun arahan dari pihak luar.

Pada forum tersebut anggota kelompok membandingkan kelebihan, keterbatasan, risiko, serta potensi manfaat dari setiap alternatif sebelum mencapai kesepakatan bersama. Bukan hanya dibandingkan lewat diskusi, mereka juga melakukan uji coba demplot. Hasilnya mereka implementasikan untuk menentukan siapa mengerjakan apa sesuai kemampuannya. Misalkan masyarakat dengan kolam dan modal kecil ditugaskan untuk melakukan pendederan atau pembenihan.

Setelah alternatif tindakan disepakati, masyarakat bersama penyuluh dan pengurus kelompok menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan rencana meliputi spesialisasi tugas antar kelompok, penetapan jadwal pelaksanaan kegiatan antar kelompok sehingga bisa saling bersinergi, hingga penyusunan prioritas program sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga bisa meminimalisir risiko kerugian.

Menurut Figueroa *et al.* (2002), proses dialog yang berkualitas tidak berhenti pada tercapainya kesepahaman, tetapi harus menghasilkan keputusan bersama yang realistis sehingga dapat diwujudkan melalui aksi kolektif. Hal tersebut sejalan dengan praktik di Desa Kawali, yakni proses penilaian kondisi, penentuan opsi, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap melalui musyawarah sehingga keputusan yang dihasilkan memperoleh legitimasi dari seluruh anggota kelompok. Hasilnya rencana kegiatan tidak dipandang sebagai instruksi dari pemerintah maupun penyuluh, melainkan sebagai hasil kesepakatan masyarakat yang lahir dari proses komunikasi partisipatif.

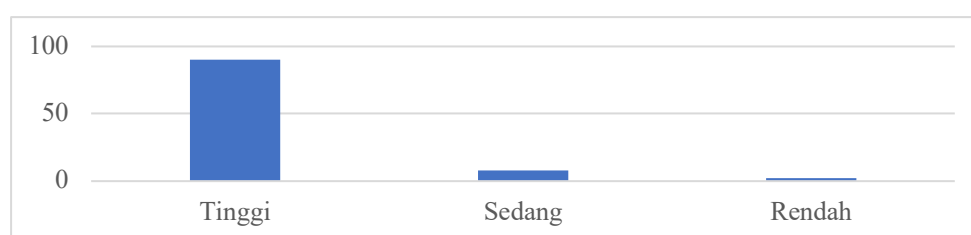
Secara umum, tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan menunjukkan bahwa dialog komunitas di Desa Kawali telah berkembang menjadi mekanisme pengambilan keputusan kolektif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi berperan sebagai aktor utama yang mengevaluasi kondisi, memilih alternatif tindakan, serta menyusun rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas kelompok. Tahap ini sekaligus menjadi jembatan antara proses dialog dengan pelaksanaan aksi kolektif, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki tingkat penerimaan, komitmen, dan keberlanjutan yang lebih tinggi.

5.3 Aksi Kolektif Pembangunan SFV Desa Kawali

Perubahan sosial tidak berhenti pada dialog komunitas, melainkan diwujudkan melalui aksi kolektif yang mencakup lima tahapan yakni penugasan tanggung jawab, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi partisipatif (Figueroa *et al.* 2002; Jordan 2023). Aksi kolektif merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan tertentu, baik secara sukarela maupun melalui paksaan (Jordan 2023). Kekuatan aksi kolektif di Desa Kawali terletak pada pelaksanaan teknis di lapangan, sementara akses sumber daya, pemerataan manfaat, serta keterlibatan aktif anggota dalam pengawasan kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Atas dasar dinamika tersebut, bab ini menyajikan deskripsi dan analisis komprehensif mengenai penerapan lima tahapan aksi kolektif dalam program SFV di Desa Kawali.

5.3.1 Penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan

Tahap pertama adalah pembagian tanggung jawab dan peran pembangunan kepada setiap anggota komunitas sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan tujuan bersama (Figueroa *et al.* 2002). Di Desa Kawali, penugasan tanggung jawab ini menjadi salah satu tahapan aksi kolektif dengan tingkat partisipasi tertinggi (Gambar 12), yakni sebanyak 90 persen anggota kelompok terlibat aktif dalam pembagian tugas, sementara 8 persen berada pada kategori sedang dan 2 persen pada kategori rendah. Tingginya partisipasi masyarakat membuktikan bahwa sebagian besar anggota kelompok berkontribusi secara langsung dalam spesialisasi, pembagian tugas, serta penjalanan peran yang telah disepakati bersama demi keberhasilan pelaksanaan program SFV.



Gambar 12 Sebaran anggota kelompok pada tahap penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan di Desa Kawali

Keberhasilan aksi kolektif dalam pengelolaan sumber daya bersama ditentukan oleh kejelasan pembagian hak, kewajiban, dan tanggung jawab antaranggota (Ostrom, 1990). Di Desa Kawali, pembagian tanggung jawab tersebut diimplementasikan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pembagian peran antarkelompok SFV berdasarkan spesialisasi usaha pada setiap mata rantai nilai perikanan:

- (a) Pembenihan dan Pendederan: Pokdakan Widuri Fish Farm (pembenihan nilam dan ikan hias), Pokdakan Paseh (pendederan nilam dan nila), serta Pokdakan Situhapa (pendederan nilam dan pembesaran nila).
- (b) Pembesaran: Pokdakan Pulaka Cikerta (pembenihan dan pembesaran nila), Pokdakan Sukamatuh (pembesaran nilam dan nila), serta Pokdakan Wira Sejahtera (pembenihan/pembesaran nilam dan pembesaran nila).
- (c) Pengolahan Hasil (Poklahsar): Poklahsar Bojongsari, Poklahsar Ertiga, dan Poklahsar Kubis (ketiganya berfokus pada pengolahan ikan nila).

Spesialisasi fungsi ini menciptakan pembagian tugas terstruktur dalam sistem produksi kelompok terintegrasi. Koordinasi antarkelompok dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui pengaturan jadwal pennebaran benih dan pemanenan guna mencegah penumpukan pasokan secara bersamaan serta menjaga stabilitas harga di tingkat pembudidaya. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Gapoktan:

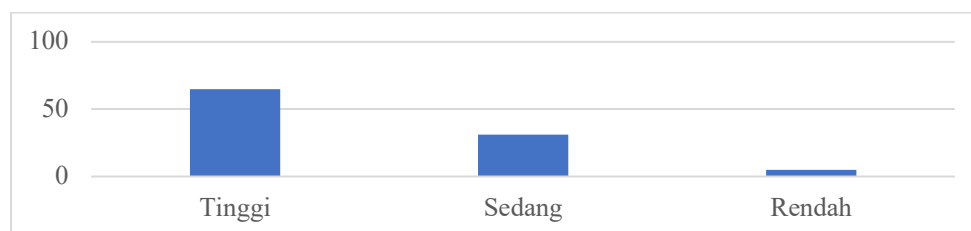
“Adanya kelompok ini membuat koordinasi jadi lebih mudah. Misalnya mau tebar 50 kilo, kita lihat kalender dulu. Jangan sampai panen bareng di bulan yang harga jatuh.” (ARD, Laki-laki, 36 Tahun)

Mekanisme kedua, pembagian tugas pada tingkat internal kelompok dilakukan melalui musyawarah informal yang bersifat egaliter dan deliberatif. Ketua dan anggota secara partisipatif menyusun pembagian kerja, jadwal pelaksanaan, hingga integrasi antarkelompok. Contohnya Poklahsar Bojongsari, melakukan pembagian tugas operasional secara spesifik, di antaranya berbelanja, melayani tamu, dan memasak melalui musyawarah mufakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pembagian kerja tidak bersifat struktural-kaku, melainkan bertumpu pada modal sosial (*social capital*) seperti gotong royong, hubungan kekerabatan, dan kepercayaan (*trust*). Sistem pembagian ini mampu memperkuat komitmen serta rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program.

Di sisi lain, dominasi pendekatan informal juga menimbulkan kerentanan tata kelola kelompok. Ketidadaan aturan tertulis menyebabkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas bergantung penuh pada kesadaran moral individu serta dinamika relasi personal, sehingga penurunan komitmen anggota sulit diintervensi. Menurut Olson (1965), lemahnya pengawasan dan legitimasi kelembagaan berpotensi memunculkan *free rider*, yaitu individu yang menikmati manfaat kerja kelompok tanpa turut berkontribusi pada pelaksanaan aksi kolektif. Sehingga modal sosial menjadi tantangan krusial dalam menjamin akuntabilitas, konsistensi, dan keberlanjutan aksi kolektif dalam jangka panjang.

5.3.2 Mobilisasi organisasi dan sumber daya

Tahap kedua adalah mobilisasi organisasi dan sumber daya, yakni distribusi potensi sumber daya manusia, modal, teknologi, jejaring kelembagaan, serta sumber daya alam untuk mentransformasi kesepakatan menjadi tindakan nyata dalam pelaksanaan program SFV (Figueroa *et al.* 2002). Di Desa Kawali, partisipasi masyarakat pada tahap ini tergolong tinggi, yakni mencapai 65 persen pada kategori tinggi, 31 persen pada kategori sedang, dan 5 persen pada kategori rendah (Gambar 13). Partisipasi pada mobilisasi organisasi dan sumber daya tergolong tinggi, tetapi capaiannya masih lebih rendah dibandingkan pada tahap penugasan tanggung jawab. Artinya kejelasan peran dalam organisasi tidak diikuti oleh akses dan kontrol yang setara dalam menggerakkan sumber daya kelompok.



Gambar 13 Sebaran anggota kelompok pada tahap mobilisasi organisasi dan sumber daya di Desa Kawali

Menurut Ostrom (1990), keberhasilan aksi kolektif ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan kapasitas institusi dalam mendistribusikan akses secara adil kepada anggotanya. Di Desa Kawali, mobilisasi kelembagaan dipusatkan pada Gapokkan selaku koordinator Pokdakan dan

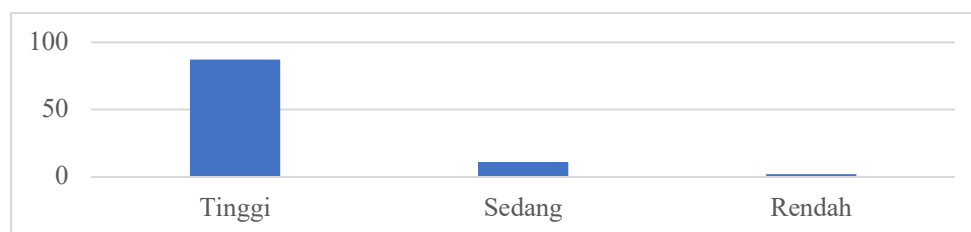
Poklhasar. Wadah ini berfungsi menjembatani kebutuhan kelompok dengan penyuluh, pemerintah, serta mitra pembangunan, sekaligus memfasilitasi pertukaran informasi, koordinasi jadwal produksi, hingga penyusunan usulan bantuan.

Namun, struktur ini menyebabkan mobilisasi sumber daya eksternal seperti program bantuan, pelatihan, dan kemitraan dengan pihak ketiga terpusat pada elit kelompok, khususnya Ketua Gapokkan dan penyuluh perikanan. Kendati demikian, mekanisme penentuan kebutuhan tetap berjalan secara partisipatif dari bawah (*bottom-up*) anggota menyampaikan aspirasi kepada ketua kelompok atau penyuluh untuk didiskusikan bersama sebelum diusulkan secara resmi ke instansi terkait. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota Pokdakan Paseh:

“kalau perlu bantuan apapun, kita biasanya tinggal minta aja, melakukan pengajuan ke Pak Ketua (Ketua Gapokkan) atau ke penyuluh. Nanti biasanya diajukan oleh mereka ke dinas atau KKP langsung.” (DDA, Laki-laki, 57 Tahun)

5.3.3 Aksi pembangunan kolektif

Tahap ketiga adalah realisasi seluruh hasil dialog, pembagian tanggung jawab, dan mobilisasi sumber daya menjadi aktivitas nyata dalam program SFV. Di Desa Kawali, keterlibatan masyarakat tergolong sangat dominan (Gambar 14), yakni 87 persen anggota kelompok terlibat aktif pada kategori tinggi, 11 persen pada kategori sedang, dan hanya 2 persen pada kategori rendah. Temuan tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi anggota kelompok untuk melakukan pembangunan.



Gambar 14 Sebaran anggota kelompok pada tahap aksi pembangunan kolektif di Desa Kawali

Menurut Medina (2007) aksi kolektif yang berkelanjutan sangat bergantung pada keberhasilan komunitas dalam membangun kepercayaan internal dan koordinasi sosial. Di Desa Kawali, koordinasi tersebut diimplementasikan secara terintegrasi sepanjang rantai nilai usaha perikanan. Setiap kelompok saling mendukung dan terintegrasi dalam membangun sistem usaha perikanan berbasis kawasan, sebagaimana disampaikan oleh penyuluh perikanan Desa Kawali

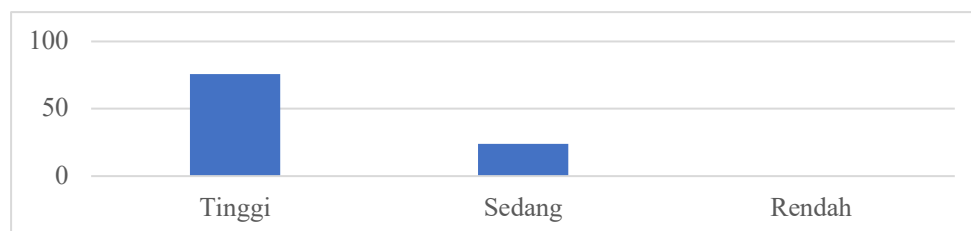
“disini semua ada mbak, nah satu sama lain saling terkoneksi, makanya harus saling bantu seperti prinsip “sapu lidi” tadi, Alhamdulillah disini sudah sadar untuk disiplin. Karena satu tidak disiplin semua kena” (ASB, Laki-laki, 43 Tahun)

Di hulu, Pokdakan berperan menyediakan bahan baku utama melalui kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan nila. Di saat yang sama, Gapokkan meregulasi siklus budidaya melalui pengaturan jadwal produksi dan panen secara bergiliran, untuk menjaga kontinuitas stok dan stabilitas harga. Gapokkan juga menyediakan tim panen khusus untuk memudahkan pekerjaan pokdakan. Strategi ini efektif mencegah penumpukan pasokan (*oversupply*) yang berpotensi menurunkan harga jual di tingkat pembudidaya.

Hasil panen selanjutnya didistribusikan melalui dua alur pemasaran utama, yaitu penjualan ikan segar melalui Pasar Pulaka Cikerta dan penyaluran bahan baku kepada Poklahsar. Pada tahapan ini, inklusivitas gender memainkan peran yang sangat strategis. Perempuan, yang merupakan mayoritas anggota Poklahsar, memegang tanggung jawab utama dalam mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah sekaligus mengelola rantai pemasarannya. Pola integrasi ini menunjukkan bahwa program pembangunan SFV di Desa Kawali berorientasi ganda, yakni pada peningkatan volume produksi sekaligus pengembangan rantai nilai (*value chain*) melalui diversifikasi produk perikanan. Pada akhirnya, keterlibatan aktif perempuan tersebut tidak hanya memperluas peluang ekonomi rumah tangga, tetapi juga secara signifikan meningkatkan daya saing komoditas perikanan lokal di pasar serta menaikkan nilai ekonomi dari hasil perikanan lokal tersebut.

5.3.4 Pemanfaatan hasil pembangunan desa

Tahap keempat adalah pemanfaatan hasil pembangunan, yakni ketika anggota kelompok merasakan dampak kegiatan bersama, utamanya pada peningkatan kualitas hidup dan memperkuat keberlanjutan pembangunan (Figueroa *et al.* 2002). Di Desa Kawali, masyarakat yang turut merasakan manfaat program cukup banyak (Gambar 15), dengan 76 persen anggota kelompok berada pada kategori tinggi dan 24 persen pada kategori sedang, tanpa ada satu pun anggota kelompok pada kategori rendah. Tingginya capaian tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat telah memperoleh manfaat konkret dari pelaksanaan program SFV, baik dalam peningkatan kapasitas produksi, pengembangan rantai usaha, maupun kenaikan pendapatan rumah tangga.



Gambar 15 Sebaran anggota kelompok pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Kawali

Manfaat pembangunan paling nyata terlihat pada peningkatan produktivitas usaha budidaya ikan nila. Sebelum program SFV dilaksanakan,

budidaya masih dilakukan secara tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah, yaitu sekitar satu hingga satu setengah ton per hari. Setelah masyarakat menerapkan budidaya intensif, penggunaan teknologi tepat guna, serta pengembangan varietas unggulan Nila Rangu, kapasitas produksi meningkat menjadi sekitar dua hingga tiga ton per hari. Peningkatan tersebut tidak hanya memperbesar volume produksi, tetapi juga meningkatkan kualitas ikan yang dihasilkan sehingga memiliki daya saing yang lebih baik di pasar.

Keberhasilan di sektor hulu mendorong berkembangnya berbagai usaha pada sektor hilir. Kelompok pengolah hasil perikanan tidak lagi hanya memasarkan ikan segar, tetapi berhasil menciptakan berbagai produk bernilai tambah seperti *cheese stick* ikan, brownies ikan, kerupuk tulang ikan, es krim berbahan dasar ikan nila, hingga pengembangan rumah makan yang dikelola secara berkelompok. Diversifikasi usaha tersebut memperluas sumber pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap penjualan ikan dalam bentuk bahan mentah.

Pemanfaatan hasil pembangunan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok, khususnya perempuan yang tergabung dalam Poklamsar. Melalui pengembangan usaha bersama, pendapatan anggota yang mengelola rumah makan kelompok meningkat dari sekitar Rp500.000,00 menjadi Rp2.000.000,00 per bulan atau meningkat sekitar 300 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hasil aksi kolektif tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang mampu memperkuat pendapatan keluarga.

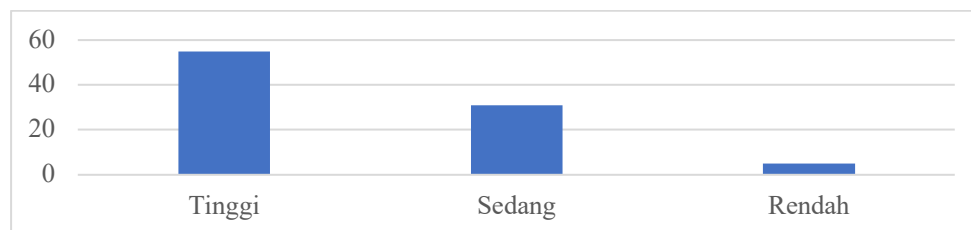
Temuan di Desa Kawali menunjukkan bahwa aksi kolektif berhasil menciptakan nilai tambah pada seluruh rantai usaha perikanan, mulai dari sektor produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Program SFV meningkatkan volume produksi, memicu lahirnya berbagai inovasi, memperluas lapangan kerja dan menaikkan kesejahteraan rumah tangga, sehingga bertransformasi menjadi instrumen pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.

Kendati demikian, pemanfaatan hasil pembangunan tersebut belum terdistribusi secara merata. Anggota yang memiliki modal, keterampilan, atau posisi strategis dalam organisasi cenderung menikmati peluang dan manfaat ekonomi yang lebih besar ketimbang anggota lain, meskipun seluruh pihak sama-sama terlibat dalam aksi kolektif. Kondisi ini menegaskan bahwa pemanfaatan hasil di Desa Kawali membuktikan bahwa aksi kolektif mampu meningkatkan produktivitas, mendorong diversifikasi usaha, serta memperkuat kesejahteraan, namun pemerataan manfaat tetap menjadi tantangan krusial agar keberhasilan program SFV tidak sekadar memacu pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperkuat prinsip keadilan sosial dan inklusivitas.

5.3.5 Partisipasi anggota SFV dalam evaluasi partisipatif

Tahap terakhir dalam aksi kolektif adalah evaluasi partisipatif, yaitu proses refleksi anggota kelompok untuk menilai keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan perbaikan agar memperkuat akuntabilitas serta keberlanjutan pembangunan sebagai ruang pembelajaran bersama (Figuerola *et al.* 2002). Keterlibatan masyarakat Desa Kawali dalam

proses ini terhitung paling rendah (Gambar 16). Hanya 55 persen anggota kelompok berada pada kategori tinggi, 34 persen pada kategori sedang, dan 11 persen pada kategori rendah. Capaian tersebut menggambarkan rendahnya keterlibatan mereka dalam refleksi dan penilaian program secara kritis.



Gambar 16 Sebaran anggota kelompok pada tahap evaluasi partisipatif di Desa Kawali

Menurut Ostrom (1990), keberlanjutan aksi kolektif membutuhkan mekanisme pengawasan (*monitoring*) yang memungkinkan seluruh anggota mengawasi pengelolaan sumber daya secara bersama-sama. Proses evaluasi program SFV di Desa Kawali justru terpusat pada elite organisasi, di antaranya Ketua Gapoktan, ketua kelompok, dan penyuluh perikanan. Anggota biasa cenderung bersikap pasif dan hanya menyampaikan masukan secara informal kepada ketua kelompoknya. Rendahnya partisipasi anggota disebabkan oleh budaya organisasi yang memposisikan kegiatan evaluasi sebagai kewenangan eksklusif elite kelompok, sehingga anggota tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) dalam pengambilan keputusan.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi keharmonisan serta hubungan kekeluargaan. Akibatnya, para anggota merasa segan untuk menyampaikan kritik terbuka dalam forum formal karena khawatir merusak relasi personal. Dampaknya, mekanisme pengawasan horizontal (*horizontal control*) tidak berjalan secara optimal, yang pada akhirnya memicu lemahnya tata kelola organisasi berbasis evaluasi partisipatif. Salah satu persoalan konkret yang muncul akibat kondisi tersebut adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Gapoktan.

Temuan evaluasi partisipatif di Desa Kawali memperlihatkan bahwa keberhasilan masyarakat dalam mengeksekusi program SFV belum sepenuhnya diimbangi oleh budaya refleksi bersama yang inklusif dan setara. Oleh karena itu, penguatan forum evaluasi yang terbuka dan transparan menjadi krusial guna membangun akuntabilitas serta kontrol horizontal di antara seluruh anggota kelompok.

5.4 Model Struktural Komunikasi Partisipatoris SFV di Desa Kawali

Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan SFV di Desa Kawali berkembang melalui dialog komunitas yang kemudian diterjemahkan ke dalam aksi kolektif. Partisipasi masyarakat relatif kuat pada proses yang berkaitan dengan kebutuhan, pembagian peran, dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan keterlibatan pada pengambilan keputusan strategis, akses terhadap sumber daya, serta evaluasi partisipatif masih terkonsentrasi pada aktor tertentu. Berdasarkan dinamika tersebut, bagian ini menganalisis hubungan struktural antarvariabel

untuk menjelaskan faktor-faktor yang membentuk dialog komunitas dan aksi kolektif dalam pelaksanaan SFV di Desa Kawali menggunakan SEM-PLS. Analisis dilakukan melalui uji *outer model* untuk mengetahui validitas dan reliabilitas model serta uji *inner model* untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Dasar analisis model struktural menggunakan pendekatan reflektif, yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya, ditandai dengan arah panah dari variabel laten menuju variabel manifes (Narimawati *et al.* 2020).

5.4.1 Evaluasi *outer model* komunikasi partisipatoris SFV Desa Kawali

Evaluasi *outer model* pengukuran CFSC pada program SFV di Desa Kawali dilakukan untuk memastikan validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk dalam merepresentasikan fenomena empiris. Validitas konvergen dinilai berdasarkan *outer loading* (OL) $\geq 0,70$ dan *average variance extracted* (AVE) $\geq 0,50$, sedangkan indikator yang tidak memenuhi kriteria dieliminasi untuk meningkatkan kualitas model. Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria *Fornell-Larcker*, yaitu akar kuadrat AVE setiap konstruk harus lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain. Reliabilitas konstruk dinilai menggunakan *Cronbach's alpha* (CA), ρ_A , dan *composite reliability* (CR/ ρ_C) dengan nilai $\geq 0,70$, sedangkan nilai 0,60-0,70 masih dapat diterima pada penelitian eksploratori dan nilai $> 0,90$ perlu dicermati karena dapat mengindikasikan redundansi indikator. CR digunakan sebagai acuan utama reliabilitas karena memperhitungkan perbedaan *outer loading* antarindikator sehingga memberikan estimasi konsistensi internal yang lebih representatif dibandingkan CA (Hair *et al.* 2017).

Tabel 14 menunjukkan hasil uji AVE dan *outer loading model* CFSC di Desa Kawali. Pada tahap awal, sebagian besar indikator menunjukkan nilai *outer loading* di atas 0,70 dan nilai AVE di atas 0,50, terutama pada konstruk peran penyuluh, dukungan pemerintah, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dialog komunitas, aksi kolektif, dan dampak sosial. Di samping itu, konstruk keputusan adopsi inovasi dan gejala *groupthink* memiliki nilai AVE yang sangat rendah (0,292 dan 0,397) serta terdapat beberapa indikator dengan nilai *outer loading* yang tidak memenuhi *threshold*, sehingga tidak memenuhi kriteria validitas konvergen. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan pemurnian model sebagaimana Hair *et al.* (2017), dengan mengeliminasi indikator *opsional* dan *otoritas* pada konstruk keputusan adopsi inovasi serta menghapus konstruk gejala *groupthink*.

Setelah proses eliminasi, model dianalisis kembali dan menunjukkan adanya peningkatan nilai AVE sehingga setiap indikator dalam konstruk memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk yang diwakilinya. Pemurnian model juga menghasilkan struktur hubungan antar konstruk yang lebih stabil, yakni dialog komunitas berperan sebagai konstruk mediasi utama dalam menjelaskan terbentuknya aksi kolektif.

Tabel 14 Nilai AVE dan *outer loading* pelaksanaan SFV di Desa Kawali

Konstruk	AVE		Indikator	Outer Loading	
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
Peran Penyuluh	0,674	0,674	Komunikator	0,753	0,754
			Motivator	0,806	0,901
			Fasilitator	0,817	0,817
			Edukator	0,901	0,805
Keputusan Inovasi	0,292	0,555	Opsional	0,162	-
			Kolektif	0,503	0,589
			Otoritas	0,266	-
			Kontingen	0,903	0,874
Dukungan Pemerintah	0,751	0,751	Pendanaan	0,730	0,731
			Penguatan SD	0,922	0,922
			Inovasi & Teknologi	0,926	0,926
			Sistem Informasi	0,873	0,872
Komunikasi Kepemimpinan	0,876	0,876	<i>Direction-giving</i>	0,930	0,930
			<i>Empathetic</i>	0,929	0,929
			<i>Meaning-making</i>	0,948	0,948
			<i>Overestimation</i>	0,483	-
Gejala <i>Groupthink</i>	0,327	-	<i>Closed-mindedness</i>	0,577	-
			<i>Pressure toward uniformity</i>	0,491	-
			<i>Norm</i>	0,752	0,889
			<i>Network</i>	0,889	0,777
Modal Sosial	0,678	0,678	<i>Trust</i>	0,777	0,801
			Identifikasi masalah	0,679	0,677
			Pelibatan <i>stakeholders</i>	0,531	0,816
			Klarifikasi persepsi	0,787	0,527
Dialog Komunitas	0,614	0,614	Penegasan kebutuhan	0,691	0,740
			Penetapan visi	0,657	0,796
			Penilaian kondisi	0,723	0,859
			Penetapan tujuan	0,686	0,843
			Penyusunan opsi	0,557	0,858
			Kesepakatan dan tindakan	0,757	0,845
			Penyusunan rencana	0,734	0,810
			Penugasan tanggung jawab	0,717	0,766
			Mobilisasi sumber daya	0,553	0,811
			Pelaksanaan kegiatan	0,762	0,864
Aksi Kolektif	0,669	0,669	Pemanfaatan hasil	0,682	0,816
			Evaluasi partisipatif	0,777	0,829

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas diskriminan untuk memastikan setiap konstruk memiliki perbedaan yang empiris. Kriteria ini terpenuhi apabila nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya dengan konstruk lain. Hasil uji *Fornell-Larcker criterion* sebagaimana tersaji pada Tabel 15 di bawah.

Tabel 15 Nilai *Fornell–Larcker criterion* pelaksanaan SFV di Desa Kawali

Variabel	Aksi Kolektif	Dialog Komunitas	Dukungan Pemerintah	Keputusan Inovasi	Komunikasi Kepemimpinan	Modal Sosial	Peran Penyuluh
Aksi Kolektif	0,818						
Dialog Komunitas	0,721	0,783					
Dukungan Pemerintah	0,768	0,644	0,866				
Keputusan Inovasi	0,482	0,451	0,572	0,745			
Komunikasi Kepemimpinan	0,684	0,512	0,619	0,386	0,936		
Modal Sosial	0,687	0,562	0,716	0,490	0,465	0,824	
Peran Penyuluh	0,449	0,259	0,599	0,538	0,467	0,459	0,821

Berdasarkan Tabel 15, seluruh konstruk menunjukkan nilai diagonal yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk pada baris dan kolom yang sama. Misalnya, konstruk aksi kolektif memiliki nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,818 yang lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain seperti dampak sosial (0,816), dialog komunitas (0,721), maupun dukungan pemerintah (0,768). Demikian pula konstruk dialog komunitas (0,783), dukungan pemerintah (0,866), keputusan adopsi inovasi (0,745), komunikasi kepemimpinan (0,936), modal sosial (0,824), dan peran penyuluh (0,821), yang seluruhnya memiliki nilai diagonal lebih besar daripada nilai korelasinya dengan konstruk lain dalam model. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan mampu menjelaskan variabel yang diukurnya secara lebih kuat dibandingkan hubungannya dengan konstruk lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode *fornell-larcker*, sehingga setiap konstruk dalam model penelitian dapat dianggap memiliki keunikan konsep yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap evaluasi reliabilitas konstruk.

Tabel 16 Nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* di Desa Kawali

Konstruk	CA	rho_A	rho_C
Peran penyuluh	0,843	0,940	0,892
Keputusan inovasi	0,218	0,249	0,707
Dukungan pemerintah	0,887	0,903	0,923
Komunikasi kepemimpinan	0,929	0,929	0,955
Modal sosial	0,762	0,775	0,863
Dialog komunitas	0,928	0,942	0,940
Aksi kolektif	0,877	0,884	0,910

Pengujian reliabilitas konstruk dievaluasi melalui *Cronbach's alpha* (CA), ρ_A , dan *composite reliability* (CR) dengan ambang batas umum $\geq 0,70$,

di mana CR dan ρA lebih direkomendasikan dalam PLS-SEM karena memperhitungkan bobot outer loading serta mengatasi keterbatasan asumsi *tau-equivalence* pada CA. Hasil pengujian pada Tabel 16 menunjukkan bahwa enam konstruk (peran penyuluh, dukungan pemerintah, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dialog komunitas, dan aksi kolektif) memiliki konsistensi internal yang tinggi dengan nilai CR berada pada rentang 0,863-0,955, meski variabel komunikasi kepemimpinan (CR 0,955) diinterpretasikan secara hati-hati karena mendekati batas potensi redundansi ($>0,95$). Sementara itu, konstruk keputusan adopsi inovasi tetap dinyatakan reliabel berdasarkan nilai CR (0,707), sekalipun nilai CA (0,218) dan ρA (0,249) tergolong rendah akibat kontribusi outer loading antarindikator yang tidak seimbang yang menyebabkan asumsi *tau-equivalence* tidak terpenuhi.

5.4.2 Evaluasi *inner model* komunikasi partisipatoris SFV Desa Kawali

Setelah *outer model* memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, evaluasi dilanjutkan pada *inner model* untuk menganalisis hubungan antarvariabel laten pada model yang telah dimurnikan. Evaluasi dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (*effect size*/ f^2), koefisien jalur (*path coefficient*), dan tingkat signifikansi hasil *bootstrapping* (Narimawati *et al.* 2020).

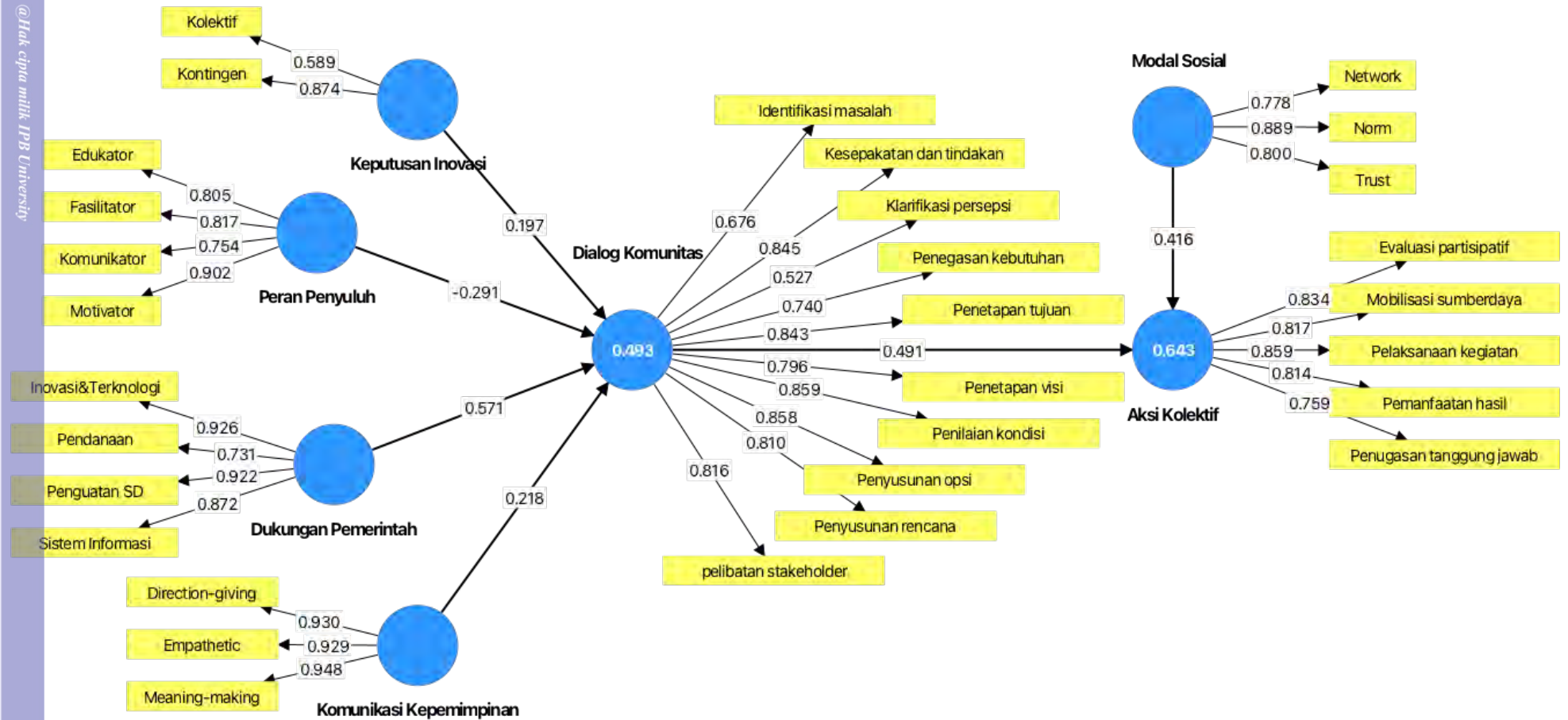
Tabel 17 Nilai *R square* (R^2) model CFSC di Desa Kawali

Variabel	R^2	Interpretasi
Dialog komunitas	0,665	Kuat
Aksi kolektif	0,636	Kuat

Berdasarkan Tabel 17, peran penyuluh, dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, dan komunikasi kepemimpinan secara bersama-sama mampu menjelaskan 63,6 persen variasi dialog komunitas ($R^2 = 0,636$), sedangkan dialog komunitas dan modal sosial mampu menjelaskan 66,5 persen variasi aksi kolektif ($R^2 = 0,665$). Nilai tersebut menunjukkan kuatnya kemampuan penjelasan model dalam merepresentasikan variasi dialog komunitas dan aksi kolektif pada pelaksanaan SFV di Desa Kawali (Hair *et al.* 2017). Hasil ini memberikan dukungan empiris awal terhadap penerapan kerangka CFSC dalam menjelaskan proses komunikasi partisipatif di Desa Kawali.

Tabel 18 Nilai *f square* (f^2) model CFSC SFV di Desa Kawali

Hubungan	f^2	Interpretasi
Dukungan pemerintah → Dialog komunitas	0,284	Sedang
Keputusan inovasi → Dialog komunitas	0,045	Kecil
Komunikasi kepemimpinan → Dialog komunitas	0,056	Kecil
Peran penyuluh → Dialog komunitas	0,094	Kecil
Dialog komunitas → Aksi kolektif	0,461	Besar
Modal sosial → Aksi kolektif	0,331	Sedang



Gambar 17 Model komunikasi pelaksanaan SFV di Desa Kawali

Tabel 18 menunjukkan *effect size* pembentukan dialog komunitas di Desa Kawali paling banyak dipengaruhi oleh dukungan pemerintah ($f^2 = 0,284$). Besarnya nilai *effect size* pada hubungan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berperan sebagai pemicu awal yang membuka ruang dialog, menyediakan dukungan, serta mendorong masyarakat mulai terlibat dalam proses dialog. Menurut Avena (2020), pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mensyaratkan perubahan posisi pemerintah dari aktor utama menjadi fasilitator yang secara bertahap mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah perlu menggeser orientasi dukungan bantuan menjadi fasilitasi partisipatif.

Pada tahap berikutnya, dialog komunitas memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan aksi kolektif ($f^2 = 0,461$). Besarnya *effect size* menunjukkan bahwa partisipasi dialog komunitas menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan masyarakat menerjemahkan berbagai gagasan, kebutuhan, dan kesepakatan menjadi tindakan bersama. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam dialog komunitas, semakin besar pula peluang masyarakat untuk melakukan aksi kolektif.

Selain dialog komunitas, modal sosial juga memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap aksi kolektif ($f^2 = 0,331$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan, norma, serta jaringan sosial yang berkembang di Desa Kawali berpengaruh terhadap pelaksanaan aksi kolektif di Desa Kawali. Menurut Yanti dan Prastiwi (2024) kepercayaan sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan gagasan kolektif dengan tindakan pembangunan. Sehingga modal sosial mampu membangun komitmen bersama sehingga hasil dialog dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata.

5.4.3 Pengujian hipotesis penelitian

Pembentukan dialog komunitas terutama dipicu oleh dukungan pemerintah sebagai katalis eksternal, sedangkan keberhasilan mengubah dialog menjadi aksi kolektif ditentukan oleh kualitas dialog komunitas yang diperkuat oleh modal sosial masyarakat. Pola hubungan tersebut selanjutnya diuji secara statistik untuk memastikan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antarvariabel dalam model struktural. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dugaan penelitian dengan kondisi empiris di Desa Kawali. Menurut Narimawati *et al.* (2020), pengujian hipotesis dalam SEM-PLS dapat dilakukan melalui nilai *p-value* dan *t-statistik*, oleh karena itu hipotesis akan didasarkan pada keduanya. Sedangkan arah dan kekuatan pengaruh antar variabel dilihat melalui koefisien jalur (β). Hipotesis akan ditolak jika hubungan antar variabel dinyatakan tidak signifikan ($p-value > 0,05$) dan koefisien jalur (β) negatif. Namun jika hubungan antar variabel signifikan ($p-value < 0,05$) dan koefisien jalur (β) positif maka hipotesis diterima. Hasil pengujian masing-masing hipotesis disajikan pada Tabel 19 sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel 19 Koefisien jalur dan hasil *bootstrapping* SFV di Desa Kawali

Variabel	<i>p-value</i>	<i>t-statistik</i>	β	Keterangan (jalur)
X1→ Y1	0,035	2,108	-0,291	Signifikan (-)
X2→ Y1	0,000	4,781	0,570	Signifikan (+)
X3→ Y1	0,136	1,490	0,197	Tidak signifikan (+)
X4→ Y1	0,116	1,572	0,219	Tidak signifikan (+)
X6→ Y2	0,000	3,984	0,412	Signifikan (+)
Y1→ Y2	0,000	4,655	0,490	Signifikan (+)

Keterangan: X1=peran penyuluh, X2=dukungan pemerintah, X3=keputusan adopsi inovasi, X4=komunikasi kepemimpinan, X6=modal sosial, Y1= dialog komunitas, Y2=aksi kolektif

(a) Pengaruh peran penyuluh terhadap dialog komunitas di Desa Kawali

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh peran penyuluh terhadap dialog komunitas di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peran penyuluh berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas ($p = 0,035$; $t = 2,108$). Namun demikian, arah pengaruh bernilai negatif ($\beta = -0,291$), oleh karena itu, hipotesis 1 ditolak. Arah hubungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan peran penyuluh dalam model berkaitan dengan penurunan dialog komunitas.

Peran penyuluh dalam proses dialog komunitas di Desa Kawali tercermin melalui fungsi komunikator, edukator, fasilitator, dan motivator yang saling melengkapi dalam mendukung proses komunikasi masyarakat. Peran komunikator terlihat dari penyampaian informasi program, pemberian respons terhadap pertanyaan anggota, serta penggunaan komunikasi interpersonal pada waktu luang masyarakat. Praktik tersebut berlangsung melalui percakapan langsung di sekitar lokasi budidaya dan forum Rumasa yang digunakan anggota untuk bertukar informasi serta membahas persoalan, gagasan, dan alternatif penyelesaian terkait pelaksanaan SFV. Peran edukator tercermin melalui penerapan pendidikan orang dewasa (POD), yaitu penyuluh menghubungkan informasi dan pengetahuan baru dengan pengalaman masyarakat yang telah lama menjalankan usaha perikanan. Oleh karena itu terbentuk dialog antar anggota selama proses pembelajaran berlangsung melalui pertukaran pengetahuan dan pembahasan berdasarkan kondisi yang mereka hadapi.

Peran fasilitator mencerminkan upaya penyuluh untuk menciptakan ruang dialog yang membuat anggota yang semula segan menjadi lebih berani menyampaikan kebutuhan, mengklarifikasi persoalan, serta mendiskusikan sarana, teknologi, pelatihan, dan pengembangan usaha. Melalui proses ini, penyuluh tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga mengarahkan percakapan agar berkembang menjadi dialog komunitas yang lebih terbuka, kemudian menghubungkannya dengan dukungan pemerintah dan pihak eksternal melalui program SFV. Peran motivator terlihat dari dorongan penyuluh kepada anggota untuk mencari alternatif penyelesaian masalah bersama melalui Rumasa, termasuk ketika anggota menghadapi keraguan dalam menerapkan kegiatan atau inovasi baru. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penyuluh menyediakan dukungan bagi pertukaran informasi, pembelajaran bersama, pengungkapan kebutuhan, pencarian alternatif, dan keterlibatan anggota dalam pembahasan masalah, yang merupakan bagian dari proses dialog komunitas. Besarnya peran penyuluh juga terlihat dari

keberlangsungan Rumasa yang masih bergantung pada kehadirannya; salah satu anggota menyatakan bahwa forum tersebut tidak berjalan ketika penyuluh tidak hadir. Fakta ini menunjukkan bahwa penyuluh memiliki posisi kuat dalam memfasilitasi dialog, tetapi kapasitas kelompok untuk mempertahankan ruang dialog secara mandiri masih memerlukan penguatan.

Menurut Figueroa *et al.* (2002), posisi penyuluh dalam CFSC adalah katalis yang memantik dialog, bukan sebagai pengendali keputusan komunitas. Artinya, penyuluh berfungsi mendorong anggota kelompok untuk berdialog, menyampaikan pendapat, ide, dan keresahan secara bersama. Di Desa Kawali, peran ini diwujudkan melalui kehadiran penyuluh yang menghadirkan ruang dialog dua arah dalam forum Rumasa setiap Sabtu malam. Menurut Kustiawan *et al.* (2023), ruang dialog dua arah seperti ini efektif dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Namun, efektivitas penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menciptakan ruang dialog, tetapi juga oleh sejauh mana kendali dialog dapat ditransformasikan dari ketergantungan pada penyuluh menuju kemandirian komunitas. Rogers (1983) menjelaskan bahwa seiring perkembangan masyarakat, peran penyuluh profesional dapat digantikan oleh *aides* atau pendamping lapangan/penyuluh swadaya yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran *aides* ini dinilai lebih mampu menjembatani perbedaan sosial, budaya, dan bahasa, sekaligus memperkuat partisipasi serta keberlanjutan program. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan dialog komunitas di Desa Kawali, peran penyuluh profesional perlu secara bertahap dikurangi dan dialihkan kepada *aides* atau penyuluh swadaya yang berasal dari komunitas setempat.

(b) Pengaruh dukungan pemerintah terhadap dialog komunitas di Desa Kawali

Bagian ini menjelaskan hipotesis pengaruh dukungan pemerintah terhadap dialog komunitas di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap dialog komunitas ($p = 0,000$; $t = 4,781$; $\beta = 0,570$). Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima.

Menurut Figueroa *et al.* (2002), dukungan pemerintah merupakan bagian dari katalis struktural eksternal yang mendorong terjadinya dialog di masyarakat. Dukungan pemerintah dapat membuka ataupun membatasi ruang dialog, tergantung bagaimana masyarakat memaknainya. Di Desa Kawali, dukungan pemerintah diposisikan sebagai pemantik utama pembangunan desa. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Gapokkan sebagai berikut.

“Jadi kami udah berjalan, emang pada dasarnya udah berjalan. Cuma kalau enggak ada SFV mungkin tidak secepat ini. Insya Allah, tapi menurut pemikiran saya akan berjalan. Tapi mungkin ya tidak akan se-booming ini.” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

Di Desa Kawali, dukungan pemerintah berpengaruh signifikan dalam menghidupkan dialog komunitas karena penentuan bentuk dukungan yang

diberikan tidak sepenuhnya bersifat *topdown*. Setiap kelompok terlebih dahulu menentukan kebutuhan yang akan diusulkan melalui dialog komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh salah satu anggota Pokdakan Paseh berikut

“Segala sesuatu yang dibutuhkan kelompok itu dirapatkan dulu. Biasanya rapat malam Sabtu. Misalnya ada kesulitan, seperti hama ikan, penyakit. Nah kita mau minta apa, dibicarakan dulu.” (DDA, Laki-laki, 57 Tahun)

Artinya, kelompok harus melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, hingga merancang strategi distribusi manfaat sebelum mengajukan dukungan kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan pemerintah justru mendorong berkembangnya dialog komunitas dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Masyarakat Desa Kawali menilai bahwa bentuk dukungan pemerintah yang paling berpengaruh terhadap dialog komunitas adalah pengembangan sumber daya manusia. Menurut Utami dan Mulyono (2025) pengembangan SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam pembangunan desa. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis. Berbagai pelatihan yang pernah dilaksanakan antara lain pembuatan pakan ikan berbahan organik, pemijahan ikan nilam, pengolahan ikan panggang, hingga pembuatan *ice cream* ikan nila. Setelah mengikuti pelatihan, anggota kelompok memperoleh pengetahuan baru yang kemudian memantik diskusi mengenai penerapan hasil pelatihan pada kegiatan usaha mereka. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu Ketua Poklamsar Kubis berikut

“Kita dapat pelatihan, mengenal produk, belajar soal legalitas, ikut pelatihan-pelatihan. Seperti sekarang ada produk Indonesia, jadi kita terinspirasi untuk bikin produk juga. Intinya sekarang ibu-ibu kalau ngobrol pun ada hasilnya.” (YMK, Perempuan, 42 Tahun)

Selain pengembangan sumber daya manusia, dukungan pendanaan, fasilitasi inovasi, serta sistem informasi yang diberikan oleh KKP juga meningkatkan intensitas dialog komunitas. Bantuan pendanaan diberikan dalam bentuk *in-kind* sesuai kebutuhan kelompok sehingga mendorong anggota bermusyawarah untuk menentukan prioritas usulan. Demikian pula pada dukungan inovasi dan teknologi, setiap kelompok memperoleh keleluasaan untuk menentukan apakah inovasi tersebut akan diadopsi atau tidak sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Proses tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya menyediakan sumber daya pembangunan, tetapi juga mendorong terjadinya komunikasi partisipatif dalam menentukan pilihan-pilihan pembangunan.

Meskipun demikian, dukungan pemerintah desa masih relatif terbatas. Padahal Yanti dan Prastiwi (2024) menjelaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan inklusif mampu memperkuat hubungan harmonis antara

pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kolaborasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Sejak tahap awal hingga pengembangan program, masyarakat lebih banyak membangun kegiatan SFV secara mandiri tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh ketua Gapokkan, wakil ketua Gapokkan, anggota kelompok, maupun penyuluh yang menjelaskan bahwa pemerintah desa belum memberikan perhatian yang optimal terhadap pengembangan SFV, salah satunya tercermin dari penolakan pengajuan kemitraan dalam pengembangan UMKM berbasis SFV.

(c) Pengaruh keputusan adopsi inovasi terhadap dialog komunitas di Desa Kawali

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh keputusan adopsi inovasi terhadap dialog komunitas di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa keputusan adopsi inovasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas ($p = 0,136$; $t = 1,490$; $\beta = 0,197$). Oleh karena itu, hipotesis 3 ditolak.

Menurut Figueroa *et al.* (2002), keputusan adopsi inovasi merupakan salah satu katalis internal yang memengaruhi dialog komunitas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan menerima, menolak, maupun memodifikasi inovasi bukan merupakan faktor utama yang memantik terbentuknya dialog komunitas di Desa Kawali. Sebaliknya, inovasi justru lahir sebagai hasil dari proses dialog yang telah berlangsung sebelumnya.

Di Desa Kawali, masyarakat terlebih dahulu berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian bersama-sama mencari alternatif solusi yang paling sesuai dengan kondisi lokal mereka. Fokus dialog bukan pada memilih menerima atau menolak inovasi yang ditawarkan dari luar, melainkan pada bagaimana mengembangkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi berlangsung lebih dahulu sebelum keputusan adopsi inovasi diambil.

Salah satu contoh nyata adalah pengembangan inovasi Nila Rangu. Inovasi tersebut tidak muncul sebagai hasil adopsi langsung terhadap teknologi tertentu, melainkan melalui proses pembelajaran, percobaan, serta modifikasi berbagai inovasi yang telah diperkenalkan sebelumnya, seperti pembuatan pakan organik, penggunaan kincir air, dan teknik pemijahan. Berbagai inovasi tersebut kemudian dipadukan, diuji kembali, dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan budidaya di Desa Kawali sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Gapokkan berikut.

“SOP itu dari pengalaman. Kan tadi ada riset, ada uji coba. Makanya kami sedang uji coba lagi, terutama di pembenihan sekarang. Di pembenihan itu kan dulu itu 50 kilo panen itu dapat untung. Sekarang 1 quintal, itu minim.” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa inovasi berkembang melalui proses pembelajaran kolektif (*collective learning*) yang berlangsung secara

terus-menerus. Dialog kelompok digunakan sebagai ruang untuk mengevaluasi pengalaman sebelumnya, menguji berbagai alternatif, kemudian menyusun bentuk inovasi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, keputusan adopsi inovasi merupakan konsekuensi dari dialog yang telah berlangsung, bukan faktor yang mendorong lahirnya dialog itu sendiri.

(d) Pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas di Desa Kawali

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas ($p = 0,116$; $t = 1,572$; $\beta = 0,219$). Oleh karena itu, hipotesis 4 ditolak di Desa Kawali.

Stogdill (1950) dan Maxwell (1930) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sementara itu, Figueroa *et al.* (2002) memandang kepemimpinan sebagai kemampuan menciptakan ruang dialog bersama. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan bukan merupakan faktor utama yang membentuk dialog komunitas di Desa Kawali.

Di Desa Kawali posisi pemimpin dalam proses pengambilan keputusan lebih banyak berfungsi sebagai koordinator dan mediator daripada sebagai pengendali diskusi. Dialog komunitas di Desa Kawali lebih banyak dimediasi oleh penyuluh dibandingkan oleh figur ketua kelompok. Anggota Poklaksar Ertiga, Kubis dan Bojongsari menyatakan bahwa sebagian besar informasi mengenai kegiatan SFV disampaikan oleh penyuluh, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi komunikasi tidak terpusat pada ketua kelompok, melainkan tersebar melalui hubungan interpersonal antaranggota dan penyuluh. Pemimpin lebih berperan sebagai koordinator administratif dan mediator antaranggota dibandingkan sebagai penggerak utama komunikasi partisipatif.

Saran dan masukan dari pemimpin saat proses diskusi memiliki bobot yang relatif sama dengan anggota lainnya sehingga keputusan tetap dibangun melalui musyawarah bersama. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat Desa Kawali yang berhati-hati terhadap dominasi individu dalam kelompok. Ketua Gapokkan berulang kali menekankan pentingnya membangun kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan konflik baru, yakni

“Nantilah dulu saya mau ngobrol sama masyarakat, karena kalau bikin kelompok itu kadang-kadang bukan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah, kalau tidak paham.” (IGP, Laki-laki, 55 Tahun)

Prinsip tersebut selaras dengan dominasi komunikasi *meaning-making* yang dianalogikan melalui filosofi “sapu lidi”, yaitu gotong royong sebagai semangat utama pelaksanaan program SFV. Filosofi tersebut menggambarkan kerukunan, kerja sama, kesetaraan, solidaritas horizontal, serta menghindari dominasi individu. Artinya masyarakat Desa Kawali lebih

mengedepankan keseimbangan hubungan sosial dibandingkan kepemimpinan yang bersifat dominatif.

(e) Pengaruh dialog komunitas terhadap aksi kolektif di Desa Kawali

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh dialog komunitas terhadap aksi kolektif di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dialog komunitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap aksi kolektif ($p = 0,000$; $t = 3,984$; $\beta = 0,412$). Oleh karena itu, hipotesis 5 diterima di Desa Kawali. Sejalan dengan temuan tersebut, Obiakor *et al.* (2025) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif mampu memperkuat aksi kolektif, meningkatkan transparansi, dan membangun kapasitas masyarakat dalam pembangunan. Menurut Figueroa *et al.* (2002), dialog komunitas merupakan mekanisme utama yang menghubungkan komunikasi dengan perubahan sosial melalui aksi kolektif. Melalui dialog, masyarakat dapat mengenali permasalahan bersama, membangun kesepahaman, menyusun aturan, hingga mengorganisasikan aksi kolektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dialog komunitas di Desa Kawali berkembang secara bertahap sejak masyarakat menyadari potensi pengembangan perikanan budidaya yang disampaikan oleh *local champion*. Kesadaran tersebut kemudian berkembang menjadi dialog untuk mengidentifikasi permasalahan, menilai kondisi aktual, menetapkan visi dan tujuan bersama, menyusun rencana kegiatan, membagi tanggung jawab, hingga mengelola sumber daya secara kolektif. Proses tersebut menunjukkan bahwa dialog tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi menjadi mekanisme utama dalam mengorganisasikan tindakan bersama.

Pengaruh dialog terhadap aksi kolektif terlihat pada spesialisasi dan pembagian peran produksi, serta pengelolaan sumber daya di antara kelompok-kelompok SFV. Melalui dialog, setiap pokdakan dan poklahsar menyepakati spesialisasi fungsi, mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran ikan, hingga pengolahan hasil panen. Pembagian kerja tersebut memungkinkan anggota dengan kapasitas ekonomi yang berbeda tetap dapat berpartisipasi dalam sistem produksi bersama tanpa harus menanggung seluruh risiko usaha secara individual. Selain menghasilkan spesialisasi peran, dialog juga menjadi dasar koordinasi operasional, seperti pengaturan saluran air, penyusunan jadwal penebaran benih, panen, hingga pengendalian kualitas produksi ikan nila agar pasokan tetap stabil. Artinya, dialog berfungsi sebagai mekanisme koordinasi sosial yang menjaga keberlangsungan aktivitas kolektif sehari-hari.

Meskipun demikian, kuatnya dialog belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya sistem kontrol kolektif yang kuat. Karakter dialog yang relatif cair, mengedepankan toleransi sosial, dan cenderung menghindari konflik terbuka menyebabkan evaluasi partisipatif belum berjalan secara konsisten. Salah satu dampaknya terlihat ketika kelalaian anggota yang bertanggung jawab pada proses panen mengakibatkan keterlambatan panen sehingga beberapa pemilik kolam memutuskan keluar dari program SFV. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan organisasi sehingga pusat kontrol keputusan strategis masih banyak bertumpu pada ketua Gapokkan dan penyuluh. Akibatnya, berbagi

persoalan manajerial, termasuk pengelolaan keuangan kelompok, belum dapat dikendalikan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog komunitas di Desa Kawali telah berhasil membangun koordinasi, pembagian kerja, serta pelaksanaan aksi kolektif, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi mekanisme pengendalian organisasi yang mampu memperkuat komitmen kolektif, evaluasi partisipatif, dan distribusi kontrol yang lebih merata di antara anggota kelompok.

(f) Pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Kawali

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Kawali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh signifikan dan positif terhadap aksi kolektif ($p = 0,000$; $t = 4,655$; $\beta = 0,490$). Oleh karena itu, hipotesis 6 diterima di Desa Kawali.

Di Desa Kawali modal sosial tumbuh dari hubungan kekerabatan, kesamaan suku, serta nilai-nilai bersama yang telah lama berkembang di masyarakat. Menurut Dale dan Newman (2008) modal sosial yang tumbuh melalui hubungan horizontal cenderung memperkuat kohesi sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan. Kondisi tersebut tercermin dalam interaksi antaranggota masyarakat yang dilandasi oleh rasa saling percaya, norma gotong royong, dan kedekatan sosial sehingga mempermudah proses koordinasi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan SFV.

Norma sosial menjadi unsur modal sosial yang paling berpengaruh dalam mendorong pelaksanaan aksi kolektif. Sebagian besar anggota merasa tidak enak apabila tidak ikut melaksanakan kegiatan SFV yang telah disepakati bersama. Menurut Nugraha *et al.* (2021) norma yang berkembang di masyarakat mampu menjaga keberlanjutan kerja sama masyarakat meskipun tidak selalu disertai insentif ekonomi secara langsung. Namun demikian, apabila terdapat anggota yang tidak dapat berpartisipasi, kelompok cenderung memaklumi keadaan tersebut untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial dan menghindari konflik terbuka. Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Poklhasar berikut.

“Kalau ada yang dulu anggota tapi sekarang tidak bisa ikut, ya tidak apa-apa. Kalau ada yang lain ingin bergabung, silakan. Itu sering kami sampaikan. Tapi ya mungkin kalau mereka tidak enak atau belum waktunya, ya ada yang tadinya tidak ikut jadi ikut, ada yang tadinya ikut jadi tidak ikut. Itu mungkin manusiawi saja.” (ECK, Perempuan, 52 Tahun)

Pola tersebut menunjukkan bahwa aksi kolektif di Desa Kawali lebih bertumpu pada fleksibilitas hubungan sosial dibandingkan pada disiplin organisasi yang bersifat formal. Di satu sisi, norma tersebut mampu menjaga kenyamanan hubungan interpersonal dan mempertahankan partisipasi masyarakat tanpa bergantung pada mekanisme pengawasan yang ketat. Namun di sisi lain, toleransi yang tinggi berdampak pada menurunnya komitmen sebagian anggota sehingga jumlah anggota yang aktif

melaksanakan kegiatan SFV saat ini hanya sekitar 50 persen dari keseluruhan anggota.

Dominasi hubungan sosial juga terlihat dalam penyelesaian konflik internal kelompok. Kesalahpahaman antar tokoh lokal maupun persaingan usaha tidak diselesaikan melalui konfrontasi atau dialog terbuka, tetapi lebih banyak direspons melalui sikap mengalah, memaklumi, dan menghindari eskalasi konflik. Kondisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Gapokkan berikut.

“Sementara ini belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas. Kita saja yang selalu mengalah dulu.” (MLK, Laki-laki, 44 Tahun)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa norma sosial berhasil menjaga solidaritas kelompok, tetapi pada saat yang sama membatasi munculnya evaluasi kritis dan penyelesaian konflik secara terbuka. Akibatnya, berbagi persoalan organisasi lebih sering diredam daripada diselesaikan secara bersama melalui mekanisme evaluasi partisipatif.

Selain norma sosial, kepercayaan juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan aksi kolektif di Desa Kawali. Kepercayaan tumbuh melalui hubungan kekerabatan dan pengalaman bekerja sama selama bertahun-tahun. Menurut Zhou dan de Vries (2022) kepercayaan berperan dalam meningkatkan komitmen, memperkuat koordinasi, serta menurunkan biaya transaksi dalam proses kerja sama kolektif. Terbukti di Kawali, bentuk hubungan saling percaya terlihat dari penerapan sistem konsinyasi pada pembayaran hasil panen tanpa perjanjian tertulis, pelaksanaan pembagian tugas tanpa pengawasan yang ketat, serta kesediaan anggota tetap bertahan dalam kelompok meskipun hasil program belum sepenuhnya dirasakan.

VI KOMUNIKASI PARTISIPATIF DAN AKSI KOLEKTIF DI DESA BANGSRING

Komunikasi pembangunan merupakan pertukaran informasi secara partisipatif untuk membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan, dan menciptakan ruang belajar yang mendorong aksi bersama (Servaes 2020). Pendekatan ini tercermin dalam model CFSC oleh Figueroa *et al.* (2002), yang menjelaskan bahwa dialog komunitas sebagai bentuk komunikasi partisipatif merupakan jembatan menuju aksi kolektif, kecuali apabila terhambat oleh faktor seperti konflik. Di Desa Bangsring, proses dialog komunitas berkembang dari kesadaran masyarakat terhadap kerusakan ekosistem pesisir, kemudian mendorong lahirnya gerakan konservasi berbasis masyarakat. Proses tersebut diperkuat oleh kepemimpinan *local champion*, dukungan pemerintah desa, serta jejaring kemitraan yang mampu menghubungkan upaya konservasi dengan pengembangan perikanan dan wisata bahari. Perbedaan distribusi peran dalam dialog menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi di Desa Bangsring memiliki karakter yang berbeda dari Desa Kawali. Keputusan strategis lebih banyak dipengaruhi oleh elit kelompok yang memiliki legitimasi sosial tinggi, sedangkan masyarakat hanya memperoleh ruang partisipasi pada keputusan operasional dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan dinamika tersebut, bab ini meninjau, mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan peran katalis, dinamika dialog komunitas, realisasi aksi kolektif, serta hubungan antarvariabel dalam pelaksanaan program SFV di Desa Bangsring.

6.1 Katalis Dialog Pembangunan SFV Desa Bangsring

Katalis didefinisikan sebagai stimulus yang menginisiasi dialog komunitas dan mendorong masyarakat mengenali masalah, mengklarifikasi persepsi, merencanakan aksi, hingga melaksanakan kerja kolektif (Figueroa *et al.* 2002). Stimulus ini dapat bersumber dari internal kelompok seperti keputusan adopsi inovasi dan kepemimpinan, maupun eksternal kelompok seperti peran penyuluh dan dukungan pemerintah. Di samping variabel pendorong tersebut, terdapat pula faktor penghambat komunikasi partisipatif berupa *groupthink*, yang menurut Rhayua *et al.* (2024) dapat menghalangi terciptanya dialog komunitas yang efektif.

6.1.1 Peran penyuluh perikanan Bangsring dalam membangun dialog

Penyuluh merupakan katalis eksternal dalam memperkuat dialog komunitas melalui penciptaan kondisi yang mendukung masyarakat untuk berdialog, menyepakati tindakan bersama, dan melakukan aksi kolektif secara mandiri (Figueroa *et al.* 2002). Efektivitas peran tersebut didukung oleh fungsi sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan edukator (Prestiana *et al.* 2023; Nurida *et al.* 2024; Safira *et al.* 2022; Latif *et al.* 2022; Abdullah *et al.* 2021; Sundari *et al.* 2021; Khairunnisa *et al.* 2021). Temuan Tabel 20 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangsring mayoritas menilai peran penyuluh berada pada kategori sedang (55 persen) dan tinggi (38,1 persen). Dialog komunitas telah berkembang melalui pengalaman kolektif dalam menghadapi *destructive fishing*, penguatan konservasi berbasis masyarakat, dan peran *local champion*, sehingga penyuluh lebih dipandang

sebagai pendamping, dengan fungsi dominan sebagai fasilitator (42,2 persen), diikuti edukator (38,9 persen), serta komunikator dan motivator (masing-masing 35,6 persen).

Tabel 20 Persentase jumlah anggota kelompok berdasarkan peran penyuluh perikanan di Desa Bangsring

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Komunikator	35,6	61,1	3,3	100
Motivator	35,6	57,8	6,7	100
Fasilitator	42,2	48,9	8,9	100
Edukator	38,9	53,3	7,8	100

Peran penyuluh sebagai fasilitator diwujudkan dengan menghubungkan kebutuhan kelompok SFV kepada pemerintah maupun mitra pembangunan. Penyuluh memfasilitasi akses bantuan, membangun ruang musyawarah melalui pembahasan kebutuhan kelompok, membuka jejaring kemitraan, serta memperkuat pengembangan usaha masyarakat. Anggota kelompok didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyampaikan usulan, menentukan prioritas, kemudian menghubungkannya dengan berbagai bentuk dukungan seperti rumah tukik, keramba jaring apung, *coral dome*, benih terumbu karang, serta sarana produksi UMKM. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang anggota Pokmaswas Mutiara Tabuhan

“ya kalau apa-apa kita mintanya ya ke nak YGP, misalkan bantuan rumah tukik itu kita ajukan ke nak YGP.” (RKN, Perempuan, 49 Tahun)

Dialog komunitas juga dipantik melalui fungsi penyuluh sebagai edukator. Menurut Faisal (2020), fungsi edukator mampu meningkatkan keterampilan teknis, membentuk cara berpikir yang lebih rasional, adaptif, dan inovatif melalui proses pembelajaran partisipatif. Di Bangsring penyuluh menyampaikan informasi dan membangun proses belajar bersama yang memungkinkan anggota kelompok untuk bertanya, berbagi pengalaman, mengklarifikasi pemahaman, dan mencoba inovasi secara langsung. Salah satunya tercermin pada pelatihan penggunaan alat las listrik bagi Pokmaswas GWD yang dilaksanakan di lokasi kerja kelompok. Proses edukasi menggabungkan penjelasan teknis, demonstrasi lapangan, praktik langsung, dan diskusi sesuai pengalaman sehingga materi lebih mudah dipahami. Ketua Pokmaswas GWD menjelaskan:

“pelatihan yang sangat berkesan dan bermanfaat bagi anak-anak justru yang dilakukan bersama penyuluh secara langsung disini (pinggir pantai tempat mereka bekerja), karena lebih mudah dipahami oleh anggota saya” (ABZ, laki-laki, 55 Tahun)

Peran penyuluh sebagai motivator terlihat pada upaya penguatan komitmen masyarakat untuk melanjutkan praktik konservasi. Kesadaran kolektif yang telah terbentuk melalui kegiatan penanaman terumbu karang menjadi dasar pengembangan inovasi baru, sehingga dialog bersama anggota

kelompok diarahkan pada alternatif teknologi yang lebih ramah lingkungan yakni *coral dome* berbahan bambu. Proses ini membuka ruang dialog untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, termasuk manfaat dan keterbatasan inovasi, sehingga keputusan dapat diambil melalui kesepakatan bersama. Pendekatan tersebut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus menjaga kesinambungan komitmen untuk mengembangkan praktik konservasi dan menerima pembaruan teknologi secara bertahap.

Peran komunikator melengkapi proses tersebut melalui komunikasi informal yakni nongkrong di lokasi kegiatan konservasi, warung kopi, maupun kawasan wisata yang dikelola kelompok (Gambar 18). Menurut Sofia *et al.* (2022), Latif *et al.* (2022), dan Prestiana *et al.* (2023), kemampuan membangun komunikasi interpersonal yang efektif merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyuluhan karena mampu meningkatkan kepercayaan, memperkuat interaksi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagaimana yang dilakukan oleh penyuluh Desa Bangsring bahwa pendekatan tersebut memudahkan penyuluh mendengarkan aspirasi anggota, memberikan penjelasan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, serta memastikan informasi dipahami sebelum diterapkan.



Gambar 18 ‘Nongkrong’ penyuluh bersama anggota

Secara keseluruhan, keempat fungsi penyuluh saling melengkapi dalam memperkuat dialog komunitas di Desa Bangsring. Masyarakat Desa Bangsring cenderung mandiri, namun penyuluh tetap berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak ketiga, sekaligus melaksanakan fungsi fasilitasi melalui pemberian dukungan edukasi, akses permodalan, dan akses pasar sebagaimana dijelaskan oleh Sofia *et al.* (2022). Penyuluh memantik dialog melalui penyampaian informasi, mendengarkan aspirasi masyarakat, membangun pembelajaran partisipatif, menghubungkan kelompok dengan sumber daya dan jejaring kemitraan, serta memperkuat motivasi masyarakat untuk mengembangkan inovasi tanpa menimbulkan ketergantungan atau merubah kebiasaan yang sudah terbangun di Desa Bangsring.

6.1.2 Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan SFV Bangsring

Dukungan pemerintah dalam penelitian ini diposisikan sebagai katalis eksternal yang memperkuat dialog komunitas pada pelaksanaan SFV melalui penyediaan sumber daya, legitimasi kebijakan, penguatan kapasitas, serta fasilitasi kelembagaan. Tabel 21 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangsring menilai dukungan pemerintah berada pada kategori tinggi (79,7 persen), terutama pada aspek pendanaan (85,6 persen), sistem informasi (84,4 persen), penguatan sumber daya manusia (80 persen), serta fasilitasi teknologi dan inovasi (68,9 persen). Menurut Aminah (2016), dukungan pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sedangkan Li *et al.* (2023) menjelaskan bahwa pengaruh tersebut bersumber dari kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya, menetapkan kebijakan, dan memperkuat institusi lokal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai penguat kapasitas dan sistem kelembagaan lokal melalui penyediaan sumber daya yang mendukung keberlangsungan dialog komunitas, pembelajaran bersama, serta pelaksanaan aksi kolektif dalam program SFV.

Tabel 21 Penilaian anggota kelompok terhadap dukungan pemerintah di Desa Bangsring (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Pendanaan	85,6	11,1	3,3	100
Penguatan SDM	80,0	14,4	5,6	100
Fasilitasi teknologi dan inovasi	68,9	22,2	8,9	100
Sistem informasi	84,4	8,9	6,7	100

Masyarakat menilai bahwa bentuk dukungan pemerintah yang paling berdampak adalah pendanaan melalui penyediaan sarana dan prasarana (*in-kind*) yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Dukungan tersebut mencakup keramba jaring apung untuk mendukung kawasan konservasi laut, rumah tukik bagi konservasi penyu, *coral dome* untuk rehabilitasi terumbu karang, serta berbagai peralatan produksi bagi kelompok pengolah hasil perikanan. Menurut Abramova (2019), alokasi pendanaan pembangunan pedesaan mampu mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Skema pengadaan dukungan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan oleh masyarakat melalui dialog komunitas untuk menginventarisasi permasalahan, menetapkan prioritas bantuan, dan menyepakati usulan yang akan diajukan kepada pemerintah melalui pendampingan penyuluh maupun pengurus kelompok. Mekanisme tersebut menjadikan dukungan pendanaan berfungsi sebagai penyedia sumber daya pembangunan sekaligus katalis yang memperkuat komunikasi partisipatif, musyawarah, serta pengambilan keputusan kolektif, karena setiap usulan bantuan lahir dari kesepakatan anggota kelompok.

Selain pendanaan, masyarakat menilai bahwa dukungan sistem informasi desa berperan penting dalam pelaksanaan SFV di Desa Bangsring. Dukungan ini mencakup pengelolaan data desa, promosi wisata konservasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan media digital. Sistem informasi tersebut menjadi instrumen strategis yang mendorong

dialog komunitas melalui proses pembelajaran bersama tentang digitalisasi, promosi wisata, dan pengelolaan informasi. Hal ini memicu diskusi, pertukaran pengetahuan, penyusunan strategi promosi, serta perluasan jejaring kemitraan yang memperkuat kapasitas masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Pemerintah desa berperan sejak tahap inisiasi hingga pengembangan program melalui promosi wisata, pendampingan mahasiswa KKN, serta pengembangan media informasi seperti Instagram, Facebook, laman desa, dan sistem e-ticketing bersama Dinas Pariwisata Banyuwangi. Kolaborasi ini turut memperluas jangkauan promosi wisata Bangsring hingga tingkat internasional, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Desa Bangsring.

“untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi data dan promosi terutama, kami menugaskan mahasiswa yang KKN di sini ke setiap tempat wisata yang dikelola kelompok. Alhamdulillah sekarang pengunjungnya sudah dari China, Korea, Jepang dan lain lain” (SBH, Laki-laki, 44 Tahun)

Perkembangan sistem informasi yang sudah baik perlu didukung dengan kapasitas SDM yang mumpuni. Sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM, pemerintah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan sesuai kebutuhan kelompok (Gambar 19). Pelatihan tersebut meliputi penanaman terumbu karang, pembuatan *coral dome*, konservasi tukik, perawatan usaha perikanan, perbaikan kapal serta jaring, pengolahan produk berbahan dasar ikan, hingga pembuatan *ecoprint*. Menurut Utami dan Mulyono (2025), pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas merupakan tahapan awal yang menentukan keberhasilan pembangunan desa. Sumber daya yang berkualitas mampu memproduksi pengetahuan dan pemahaman kolektif yang mendukung upaya konservasi dan pelaksanaan SFV di Desa Bangsring.



Gambar 19 Kegiatan pelatihan kelompok SFV di Desa Bangsring

Selain dukungan peningkatan kualitas SDM, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai inovasi dan teknologi sebagai bagian dari pengembangan Program SFV. Namun demikian, tidak seluruh inovasi yang diperkenalkan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Salah

satu contohnya adalah penggunaan *coral dome* yang dihentikan oleh kelompok karena biaya pembuatannya dinilai tidak sebanding dengan tingkat ketahanannya di lapangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang diperkenalkan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan pemanfaatannya. Oleh karena itu, proses evaluasi terhadap inovasi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa teknologi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara umum, dukungan pemerintah di Desa Bangsring lebih berfungsi sebagai penguatan dialog dibandingkan sebagai pemantik awal. Begitu pula karakter dukungan pemerintah di Desa Bangsring yang lebih dominan pada upaya memperkuat sistem kelembagaan dan jejaring yang telah berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah berperan sebagai akselerator yang memperkuat kapasitas lokal sehingga masyarakat mampu mengembangkan program secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

6.1.3 Pola komunikasi keputusan adopsi inovasi masyarakat Bangsring

Keputusan inovasi dalam penelitian ini diposisikan sebagai katalis internal yang memperkuat dialog komunitas dalam pelaksanaan Program SFV melalui proses musyawarah untuk menerima, memodifikasi, atau menyesuaikan inovasi dengan kebutuhan kelompok. Rogers (2003) menjelaskan bahwa keputusan adopsi inovasi pada tingkat individu umumnya didahului oleh keputusan organisasi, sedangkan Salem (2002), Sáenz-Royo *et al.* (2015), dan Fu JS *et al.* (2020) menegaskan bahwa keputusan adopsi inovasi merupakan hasil interaksi antara otoritas formal, pengaruh sosial, dan strategi kelembagaan. Tabel 22 menunjukkan bahwa masyarakat paling banyak menilai keputusan adopsi inovasi dilakukan melalui keputusan kolektif (85,6 persen), diikuti keputusan kontingen (50 persen), keputusan opsional (38,9 persen), dan keputusan otoritas (31,1 persen). Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog komunitas menjadi mekanisme utama dalam mengevaluasi, menyepakati, dan mengimplementasikan inovasi pada Program SFV, sementara pengalaman keberhasilan inovasi sebelumnya serta legitimasi ketua kelompok turut memperkuat arah pengambilan keputusan dan pengembangan program.

Tabel 22 Penilaian anggota kelompok terhadap keputusan adopsi inovasi di Desa Bangsring (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Opsional	38,9	54,4	6,7	100
Kolektif	85,6	11,1	3,3	100
Otoritas	31,1	48,9	20,0	100
Kontingen	50,0	44,4	5,6	100

Keputusan kolektif menjadi mekanisme pengambilan keputusan utama di Desa Bangsring karena setiap inovasi dibahas melalui forum kelompok sebelum diimplementasikan. Rogers (2003) menjelaskan bahwa keputusan kolektif memperkuat dukungan sosial terhadap inovasi karena lahir dari kesepahaman anggota. Mekanisme ini terlihat dalam forum rutin setiap Jumat

di minggu ketiga setiap bulan (Gambar 20) yang menjadi ruang untuk menyampaikan informasi, membahas program, mengevaluasi kegiatan, dan menyepakati tindak lanjut. Informasi awal disampaikan melalui *WhatsApp Group*, namun keputusan utama tetap diambil melalui pertemuan tatap muka karena sebagian besar anggota bekerja sebagai nelayan dan pelaku wisata dengan keterbatasan waktu serta variasi kemampuan digital. Pertemuan rutin memungkinkan klarifikasi informasi, pertukaran pendapat, dan penguatan komitmen bersama. Kim dan Chung (2017) menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada komitmen kolektif, sejalan dengan Fishbein dan Ajzen (1975) bahwa perilaku dipengaruhi norma sosial, sehingga penerimaan inovasi lebih berbasis kesepakatan kelompok daripada preferensi individu.



Gambar 20 Pertemuan rutin kelompok perikanan di Desa Bangsring

Meski bersifat kolektif, keputusan strategis tetap diawali oleh ketua kelompok dan tokoh inti yang memiliki legitimasi sosial. Mereka menilai peluang, risiko, dan kesesuaian program sebelum dibawa ke forum. Ketua Koperasi SFV menyatakan:

“Kalau ada program, saya pertimbangkan sendiri lalu saya share ke teman-teman dalam rapat. Mereka sudah pasti menerima dan masing-masing tahu harus melakukan apa.” (SKR, Laki-laki, 52 Tahun)

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan kolektif dominan (Tabel 22), peran kepemimpinan tetap kuat dalam menentukan arah organisasi. Pola ini mencerminkan kombinasi kepemimpinan dan musyawarah, di mana keputusan dirumuskan oleh aktor berpengalaman lalu diperkuat melalui forum kelompok. Mekanisme ini mempercepat respons organisasi sekaligus menjaga komitmen anggota. Namun, terdapat tantangan pada penetapan anggota tetap Koperasi SFV yang masih didominasi aktor tertentu sehingga partisipasi sebagian anggota belum optimal. Rogers (2003) menyebutkan bahwa keputusan otoritas mempercepat adopsi, tetapi keberlanjutan lebih kuat jika didukung deliberasi kelompok.

Rendahnya kontrol terhadap keputusan bersama berkaitan dengan rendahnya keputusan opsional masing-masing anggota SFV. Keputusan opsional adalah keputusan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan

pribadi. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa keputusan yang bisa mereka putuskan secara pribadi berada pada kategori sedang (54,4 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggota kelompok tidak sepenuhnya menentukan keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi lebih mempertimbangkan keputusan kelompok dan arah pengembangan organisasi. Rendahnya keputusan opsional juga dipengaruhi oleh kepemilikan berbagai sumber daya yang dikelola secara bersama, sehingga keputusan individu sangat berkaitan dengan kepentingan kelompok secara keseluruhan.

Selain kepentingan kelompok, pengambilan keputusan adopsi inovasi juga didasarkan pada keberhasilan program sebelumnya. Terlihat bahwa keputusan kontingen juga memperoleh penilaian yang relatif tinggi. Menurut Rogers (2003), kelompok yang memiliki pengalaman keberhasilan inovasi akan lebih percaya diri dalam menerima inovasi berikutnya karena telah terbentuk rasa aman dan keyakinan kolektif terhadap manfaat inovasi tersebut. Pengalaman panjang masyarakat dalam mengembangkan konservasi terumbu karang menjadi fondasi utama bagi penerimaan berbagai inovasi berikutnya. Potensi pengembangan wisata bahari, diversifikasi produk olahan hasil perikanan, hingga budidaya lobster yang ditawarkan oleh SFV dipandang sebagai kelanjutan dari keberhasilan konservasi yang telah dicapai sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi menjadi dasar legitimasi bagi penerimaan inovasi berikutnya. Pola tersebut memperlihatkan adanya proses pembelajaran kolektif yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap pengembangan Program SFV.

Secara umum, pola pengambilan keputusan adopsi inovasi di Desa Bangsring menunjukkan karakter yang kolaboratif namun masih sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat. Keputusan kolektif tetap menjadi mekanisme utama dalam pelaksanaan program SFV, tetapi arah strategis program banyak ditentukan oleh ketua kelompok yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Di sisi lain, pengalaman keberhasilan konservasi menjadi modal penting yang memperkuat keyakinan masyarakat untuk menerima inovasi baru. Oleh karena itu, penguatan ruang partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan perlu terus dilakukan agar keberhasilan inovasi tidak hanya bergantung pada figur pemimpin, tetapi juga tumbuh dari kapasitas kolektif masyarakat.

6.1.4 Tipe komunikasi kepemimpinan dalam SFV Desa Bangsring

Komunikasi kepemimpinan dalam penelitian ini berperan sebagai penguat dialog komunitas melalui kemampuan ketua kelompok dalam menyampaikan informasi, membangun makna bersama, memberi arahan, dan menjaga hubungan antaranggota dalam Program SFV. Stogdill (1950) menyebut kepemimpinan sebagai proses memengaruhi individu untuk mencapai tujuan bersama, sementara Herjan dan Muksin (2025) menekankan bahwa efektivitasnya bergantung pada kemampuan komunikasi yang mendorong partisipasi anggota. Tabel 23 menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring didominasi *meaning-making language* (91,1 persen), diikuti *directive language* (90 persen), dan *emphatic language* (55,6 persen). Temuan ini menunjukkan bahwa dialog komunitas

dibangun melalui penanaman makna bersama tentang pentingnya konservasi dan pembangunan desa, sehingga anggota memiliki tujuan dan komitmen yang selaras. Makna tersebut diperkuat dengan arahan dan pembagian peran yang jelas melalui *directive language*, serta dipertahankan melalui *emphatic language* yang menjaga kepercayaan dan solidaritas antaranggota. Bentuk komunikasi ini membentuk dialog yang menghasilkan kesepakatan kolektif, memperkuat legitimasi kepemimpinan, meningkatkan koordinasi, serta mendorong konsistensi aksi kolektif dalam Program SFV.

Tabel 23 Penilaian anggota kelompok terhadap komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
<i>Directive</i>	90,0	6,7	3,3	100
<i>Emphatic</i>	55,6	41,1	3,3	100
<i>Meaning-Making</i>	91,1	4,4	4,4	100

Meaning-making language menjadi bentuk komunikasi kepemimpinan yang paling dominan dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Bangsring. Ketua kelompok secara konsisten membangun makna kolektif bahwa konservasi merupakan fondasi keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir melalui narasi, “jika konservasi bagus, pariwisata berjalan; jika konservasi rusak, kita mati.” Narasi tersebut menempatkan konservasi sebagai strategi menjaga sumber daya pesisir, keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan, dan masa depan generasi berikutnya sehingga seluruh kegiatan SFV dipahami sebagai kepentingan bersama. Proses pemaknaan yang disampaikan secara berulang berhasil membentuk perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi. Seorang anggota Pokmaswas Mutiara Tabuhan menjelaskan

“Bapak (ketua) dan saya sering pelan-pelan bilangin manfaatnya kebersihan untuk mendatangkan wisatawan. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya, tanpa kami minta pun anak-anak (anggota pokmaswas) sudah mulai punya inisiatif sendiri, saling gilir, saling atur, dan itu terasa sekali perubahannya. Dulu kegiatan bersih-bersih hanya seminggu sekali setiap hari Jumat, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dilakukan setiap hari secara sukarela tanpa diminta.” (RKN, Perempuan, 49 Tahun)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan mampu mengubah pemahaman bersama menjadi norma sosial yang mendorong inisiatif kolektif tanpa bergantung pada instruksi langsung. Kondisi ini sejalan dengan Rachmani *et al.* (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin membangun makna kolektif sehingga masyarakat memahami tujuan dan nilai dari setiap tindakan yang dilakukan.

Selain membangun makna bersama, keberhasilan konservasi mandiri dan pelaksanaan program SFV di Desa Bangsring sangat dipengaruhi oleh komunikasi kepemimpinan yang bersifat *directive language*. Menurut

Soraya *et al.* (2024), *directive language* merupakan bentuk komunikasi kepemimpinan yang memberikan arahan, penjelasan target, serta kejelasan pembagian tugas kepada anggota organisasi. Oleh karena itu, ketua kelompok tidak hanya memberikan arahan secara lisan, tetapi juga membangun berbagai perangkat kelembagaan seperti SOP keselamatan *snorkeling*, sistem *rolling* kapal wisata, hingga AD/ART kelompok dan koperasi SFV. Pola komunikasi tersebut memungkinkan setiap anggota memahami tanggung jawabnya sehingga kegiatan konservasi maupun wisata dapat berjalan secara lebih tertib dan terkoordinasi.

Stogdill (1950) menjelaskan bahwa komunikasi yang lebih direktif umumnya berkembang pada organisasi yang menghadapi tuntutan koordinasi tinggi dan membutuhkan kepastian aksi kolektif dalam waktu singkat. Kondisi tersebut sesuai dengan karakter masyarakat pesisir Desa Bangsring yang setiap hari berhadapan dengan aktivitas perikanan, konservasi, dan pariwisata yang memerlukan disiplin serta koordinasi yang konsisten karena menghadapi risiko alam yang cukup tinggi. Praktik komunikasi direktif bukan semata-mata berfungsi mengendalikan anggota, tetapi menjadi mekanisme untuk menjaga efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

Meskipun begitu, *emphatic language* tetap menjadi bagian penting dalam kepemimpinan kelompok di Desa Bangsring. Komunikasi empatik terlihat ketika pemimpin memahami keraguan anggota pada awal pengembangan wisata bahari. Sebagian besar anggota saat itu merasa tidak percaya diri menjadi pemandu wisata karena memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tidak menguasai bahasa asing. Melalui motivasi yang terus-menerus, dukungan moral, serta kesempatan belajar secara langsung di lapangan, ketua kelompok berhasil meningkatkan rasa percaya diri anggota sehingga mereka berani mengambil peran baru dalam pengelolaan wisata konservasi. Temuan ini selaras dengan pendapat Mayfield dan Mayfield (2017), bahwa komunikasi empatik dapat membangun keyakinan diri, meningkatkan kepercayaan antara pemimpin dan anggota, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perubahan perilaku.

Secara umum, komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring bersifat visioner, terstruktur, dan koordinatif melalui kemampuan ketua kelompok membangun makna kolektif, memberikan arahan yang jelas, serta memelihara kepercayaan anggota sehingga memperkuat partisipasi, disiplin organisasi, dan keberlanjutan Program SFV. Pola komunikasi tersebut berkembang melalui struktur kepemimpinan yang bertumpu pada beberapa tokoh masyarakat dengan peran yang saling melengkapi. SKR merupakan ketua Pokmaswas tertua sekaligus pelopor konservasi di Desa Bangsring yang berhasil mempertahankan kawasan konservasi bahkan sebelum Program SFV dilaksanakan. Keberhasilan tersebut membangun kepercayaan anggota sehingga keputusan yang diambil memperoleh dukungan yang kuat. ABZ memimpin Pokmaswas lain yang berhasil mengembangkan kawasan konservasi menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat. Keberhasilan tersebut memperkuat legitimasi kepemimpinannya sehingga arahan yang diberikan juga dipatuhi oleh anggota kelompok. SBH sebagai Sekretaris Desa berperan mendukung proses pembangunan melalui fasilitasi kebijakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

koordinasi dengan pemerintah desa, serta penguatan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pembagian peran kepemimpinan juga terlihat dari pemisahan antara urusan strategis dan operasional. Urusan strategis meliputi penyusunan visi dan tujuan kelompok, penetapan arah pengembangan konservasi, pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak program maupun inovasi, serta berbagai keputusan yang berkaitan dengan kepentingan seluruh anggota dan hubungan dengan pemerintah maupun mitra pembangunan. Pembahasan tersebut didominasi oleh ketua kelompok bersama jajaran pengurus inti. Sebaliknya, urusan operasional dilaksanakan oleh anggota melalui kegiatan konservasi, pelayanan wisata, *staging* atau transplantasi terumbu karang, pengelolaan sarana wisata, serta berbagai aktivitas teknis lainnya sesuai pembagian tugas kelompok.

Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh mekanisme komunikasi yang menempatkan ketua kelompok sebagai pengambil keputusan utama. Gagasan mengenai arah pengembangan kelompok umumnya berasal dari ketua atau jajaran pengurus, sedangkan aspirasi anggota disampaikan secara langsung kepada ketua maupun pengurus untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum keputusan ditetapkan. Keputusan strategis kemudian diterima dan dilaksanakan oleh anggota berdasarkan kepercayaan terhadap kapasitas pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas perikanan dan konservasi, serta menghadirkan dukungan sosial ketika anggota menghadapi kesulitan. Penyelesaian konflik dilakukan melalui forum terbuka untuk persoalan yang bersifat umum, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan kohesi kelompok diselesaikan melalui forum khusus bersama pihak yang terlibat.

6.1.5 Gejala *groupthink* kelompok anggota SFV Desa Bangsring

Kerangka CFSC menempatkan dinamika kelompok sebagai ruang dialog yang membentuk konsensus, pembelajaran, dan relasi kekuasaan dalam proses pembangunan. Salah satu dinamika tersebut adalah *groupthink*, yaitu mekanisme psikologis sosial yang memengaruhi proses pembentukan kesepakatan dan pengambilan keputusan kelompok. Tabel 24 menunjukkan bahwa gejala *groupthink* di Desa Bangsring didominasi oleh dimensi *pressures toward uniformity*, dengan 51,11 persen anggota kelompok berada pada kategori tinggi, sedangkan dimensi *overestimation of the group* dan *close-minded didominasi* kategori rendah, masing-masing sebesar 90,00 persen dan 93,33 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dinamika kelompok di Desa Bangsring berkembang melalui komitmen menjaga kesepakatan dan kesatuan sikap dalam pelaksanaan Program SFV, sementara keterbukaan terhadap informasi baru dan evaluasi bersama tetap menjadi bagian dari proses dialog komunitas.

Dominasi dimensi *pressures toward uniformity* menunjukkan bahwa proses dialog dan pengambilan keputusan di Desa Bangsring berkembang melalui norma sosial yang menekankan harmoni, solidaritas, dan kesatuan sikap. Anggota kelompok memiliki kebiasaan bahwa perbedaan pendapat maupun persoalan internal disampaikan terlebih dahulu kepada ketua atau pengurus inti melalui komunikasi personal sebelum dibahas dalam forum

kelompok. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai mediasi untuk menyelesaikan persoalan secara bijaksana, menjaga hubungan antaranggota, serta menciptakan suasana dialog yang kondusif. Sekretaris Pokmaswas Abadi Laut menjelaskan

“Setiap masalah yang sekiranya akan mengganggu kestabilan kelompok, yang akan membuat orang ngga enak lah istilahnya, harus disampaikan dulu kepada kami (pengurus inti) sebelum disampaikan langsung kepada yang bersangkutan. Biasanya anggota akan datang untuk menceritakan semua, kami tunggu sampai habis ceritanya, baru kami berikan masukan. Orang-orang yang bermasalah biasanya kami panggil secara pribadi untuk kami selesaikan bersama. Karena kalau diselesaikan sendiri bisa menyebabkan caro (bentuk konflik manifest khas Suku Madura)” (RZA, Perempuan, 27 Tahun)

Tabel 24 Penilaian anggota kelompok terhadap gejala *groupthink* dalam pelaksanaan SFV di Desa Bangsring (dalam persen)

Kategori	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
<i>Overestimation of the group</i>	0,00	10,00	90,00	100
<i>Close-minded</i>	0,00	6,67	93,33	100
<i>Pressures toward uniformity</i>	51,11	36,67	12,22	100

Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi personal menjadi mekanisme penting dalam mengelola perbedaan pendapat sebelum memasuki ruang dialog komunitas sehingga forum musyawarah berlangsung lebih terarah dan berorientasi pada pencapaian kesepakatan bersama. Pola ini mencerminkan karakteristik *pressures toward uniformity* sebagaimana dijelaskan Janis (1972), yaitu kecenderungan anggota menjaga harmoni kelompok melalui dukungan terhadap keputusan bersama. Di Desa Bangsring, kecenderungan tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi, memperlancar koordinasi, dan menjaga stabilitas organisasi selama pelaksanaan program SFV.

Di sisi lain, rendahnya dimensi *overestimation of the group* dan *close-minded* menunjukkan bahwa kelompok memiliki kesadaran yang realistis sekaligus bersikap terbuka terhadap kapasitas dan keterbatasannya. Tercermin dari pengalaman transformasi masyarakat Bangsring dari pelaku *destructive fishing* menjadi penggerak konservasi yang menyadari bahwa keberhasilan program bergantung pada keberlanjutan ekosistem pesisir, kolaborasi multipihak, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan sehingga mendorong perluasan jejaring kemitraan. Pada saat yang sama, keterbukaan terhadap pengetahuan dan inovasi dari aktor eksternal menunjukkan bahwa kohesi kelompok tidak bersifat tertutup, karena dialog komunitas berlangsung tidak hanya secara internal tetapi juga melalui interaksi luas dengan berbagai pihak yang memperkuat kapasitas masyarakat. Temuan ini sejalan dengan DiPierro *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa kohesi dapat mempercepat koordinasi tanpa memicu *groupthink* disfungsi selama tetap terbuka pada informasi dan evaluasi baru. Secara keseluruhan, *groupthink* di Desa Bangsring bersifat

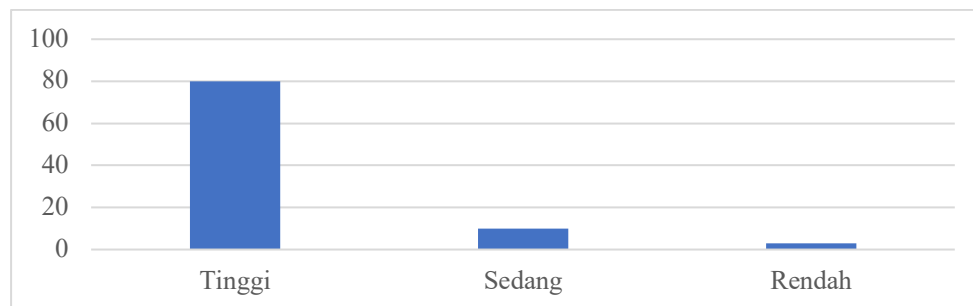
parsial dengan dominasi *pressures toward uniformity*, sementara rendahnya *overestimation of the group* dan *close-minded* menunjukkan keseimbangan antara kesepakatan internal dan keterbukaan terhadap pembelajaran serta kolaborasi dalam mendukung Program SFV.

6.2 Dialog Partisipatif Realisasi SFV Desa Bangsring

Figueroa *et al.* (2002) mendefinisikan dialog sebagai proses komunikasi multiarah yang memungkinkan masyarakat membangun pemahaman bersama, menyepakati arah perubahan, serta merumuskan aksi kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Di Desa Bangsring, komunikasi partisipatif berkembang secara bertahap mulai dari penyadaran terhadap kerusakan ekosistem pesisir, pelibatan *stakeholders*, penetapan visi dan tujuan, klarifikasi persepsi dan kebutuhan, hingga penyusunan rencana kegiatan. Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi pada hampir seluruh tahapan dialog, terutama pada proses penyadaran, klarifikasi persepsi, dan penyusunan rencana kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengalaman serta kebutuhan operasional masyarakat. Proses dialog memperlihatkan pembagian peran yang khas, yaitu keputusan strategis lebih banyak dipimpin oleh *local champion* dan aktor-aktor inti kelompok, sedangkan masyarakat berpartisipasi secara luas dalam penyelarasan persepsi, penyampaian kebutuhan, evaluasi kondisi, serta penyusunan kegiatan operasional. Pola tersebut memungkinkan arah pembangunan tetap konsisten melalui kepemimpinan yang kuat sekaligus mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program SFV melalui dialog yang inklusif dan kolaboratif.

6.2.1 Penyadaran dan identifikasi masalah kolektif

Model CFSC menempatkan penyadaran dan identifikasi masalah sebagai tahapan awal dialog komunitas untuk membangun kesadaran kolektif terhadap persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Jacobson dan Altamirano dalam Servaes (2020) menjelaskan bahwa dialog pada tahap ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami realitas sosial, merumuskan kepentingan bersama, dan menyepakati arah perubahan sosial. Gambar 21 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bangsring pada tahap penyadaran dan identifikasi masalah berada pada kategori sangat tinggi, dengan 87 persen anggota kelompok terlibat aktif, 10 persen berada pada kategori sedang, dan 3 persen pada kategori rendah. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh tahapan dialog lainnya, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam mengenali, memahami, dan menyepakati permasalahan yang mengancam kepentingan bersama sebagai dasar penyusunan keputusan kolektif dan pelaksanaan Program SFV.



Gambar 21 Sebaran anggota kelompok pada tahap penyadaran dan identifikasi masalah kolektif di Desa Bangsring

Dialog penyadaran di Desa Bangsring diawali oleh kerusakan ekosistem pesisir akibat praktik *destructive fishing*, terutama penggunaan bom ikan dan potasium, yang merusak terumbu karang, menurunkan hasil tangkapan ikan hias, serta mengurangi pendapatan masyarakat pesisir. Kondisi tersebut membangun kesadaran kolektif bahwa pemulihan lingkungan menjadi prasyarat keberlanjutan mata pencaharian sehingga mendorong *local champion* memelopori gerakan konservasi berbasis masyarakat. Kustiawan *et al.* (2023) menjelaskan bahwa *local champion* memiliki kapasitas tinggi dalam membangun kesadaran dan memimpin perubahan sosial karena memperoleh legitimasi dari komunitas. Proses ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah berkembang dari pengalaman nyata masyarakat sehingga menjadi landasan terbentuknya dialog komunitas dalam Program SFV.

Perubahan tersebut berlangsung melalui dialog yang intensif antara *local champion*, tokoh masyarakat, dan nelayan. Penolakan awal yang dipicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian direspons melalui diskusi langsung, pemberian contoh nyata, serta penjelasan mengenai manfaat konservasi bagi peningkatan hasil perikanan dan pengembangan wisata bahari. Abdullah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa reaksi tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko perubahan. Pemerintah desa turut memperkuat proses dialog dengan memfasilitasi mediasi antara kelompok konservasi dan penolak konservasi bersama BPP3 Banyuwangi, Koramil Banyuwangi, dan Polisi Laut. Rangkaian dialog tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan Zona Pemanfaatan Bersama (ZPB) yang disahkan melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 sebagai fondasi pengelolaan konservasi berbasis masyarakat.

“Orang tidak boleh menangkap ikan ataupun mengambil terumbu karang di ZPB. Bagi mereka yang tidak sengaja merusak terumbu karang di ZPB, maka dia harus mengganti 10 kali lipat. Namun bagi mereka yang sengaja, maka jika dia adalah anggota SFV maka akan dikeluarkan dari kelompok dan tidak akan mendapatkan pertolongan keringanan saat bermasalah dengan polisi laut.” (SKR, Laki-laki, 52 Tahun)

Dampaknya, lambat tapi pasti, para nelayan perusak terumbu karang akhirnya sepenuhnya sadar mendukung konservasi setelah dilakukan

pendekatan, negosiasi, persuasi dan pembuktian selama 15 tahun. Akhirnya konservasi tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lingkungan semata, tetapi sebagai kebutuhan bersama untuk mempertahankan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bahkan mereka kini menjadi garda terdepan pelaku konservasi di Desa Bangsring. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pokmaswas Bunder

“Dulu mereka yang paling kencang menolak, tapi setelah tau dan merasakan sendiri manfaatnya, sekarang justru mereka yang paling keras juga melakukan konservasi. Bahkan kalau ada yang melanggar, mereka yang paling galak, karena sudah tau manfaatnya” (SKR, Laki-laki, 52 Tahun)

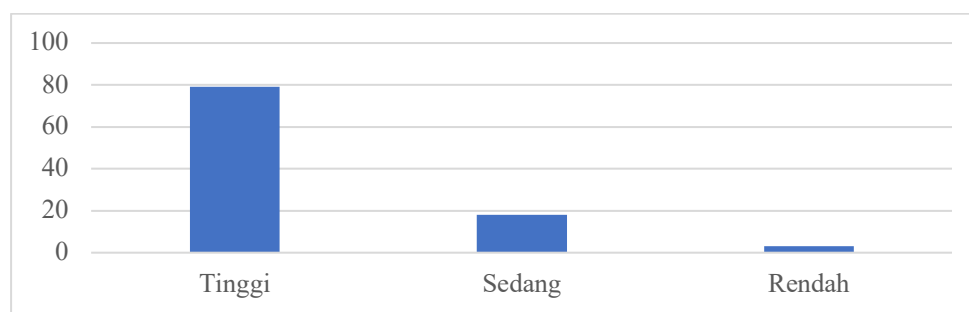
Sekretaris desa juga menambahkan bahwa

“Proses penyadaran sangat luar biasa lama dan panjang, kalau ibarat kita sudah menyerah ya menyerah sudah, karena namanya manusia mendapatkan tekanan dari sana sini pasti menyerah juga. Tapi Alhamdulillah pemuda kompak. Setelah 15 tahun, ya 15 tahun semua (para nelayan yang menolak konservasi) bisa sadar dan sekarang malah yang paling semangat” (SBH, Laki-laki, 44 Tahun)

Dukungan pemerintah desa semakin memperkuat pembentukan kesadaran kolektif karena masyarakat melihat adanya kesamaan komitmen antara *local champion*, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat dalam mengatasi kerusakan ekosistem pesisir. Servaes (2020) menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif berkembang lebih efektif ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam mendefinisikan persoalan yang mereka hadapi. Kondisi tersebut tercermin di Desa Bangsring, tempat kesadaran kolektif tumbuh dari pengalaman masyarakat menghadapi degradasi sumber daya pesisir sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap persoalan bersama dan mendorong partisipasi aktif dalam dialog maupun aksi konservasi. Kolaborasi antara *local champion* sebagai penggerak perubahan dan pemerintah desa sebagai penguat kelembagaan berhasil menjadikan persoalan lingkungan sebagai agenda bersama yang menjadi dasar berkembangnya dialog komunitas dan pelaksanaan program SFV.

6.2.2 Pelibatan *stakeholders* potensial

Tahap pelibatan *stakeholders* dalam model CFSC berfokus pada identifikasi aktor yang mampu mendukung penyelesaian masalah melalui kebijakan, pendanaan, pengetahuan, teknologi, dan jejaring kelembagaan. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa pelibatan *stakeholders* memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan sosial. Gambar 22 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Bangsring pada tahap ini berada pada kategori tinggi, dengan 79 persen anggota kelompok terlibat aktif, 18 persen berada pada kategori sedang, dan 3 persen pada kategori rendah.



Gambar 22 Sebaran anggota kelompok pada tahap pelibatan *stakeholders* potensial di Desa Bangsring

Meskipun sebagian besar mengaku terlibat dalam menentukan siapa saja jejaring yang berpotensi mendukung mereka, namun secara empiris, proses pelibatan *stakeholders* dominan dilakukan oleh ketua kelompok. Pemerintah desa turut berpartisipasi memperkuat proses tersebut dengan memberikan dukungan kelembagaan serta membuka akses komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun mitra pembangunan lainnya. Di antaranya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan beberapa universitas yang melakukan kegiatan KKN, penelitian ataupun pengabdian masyarakat.

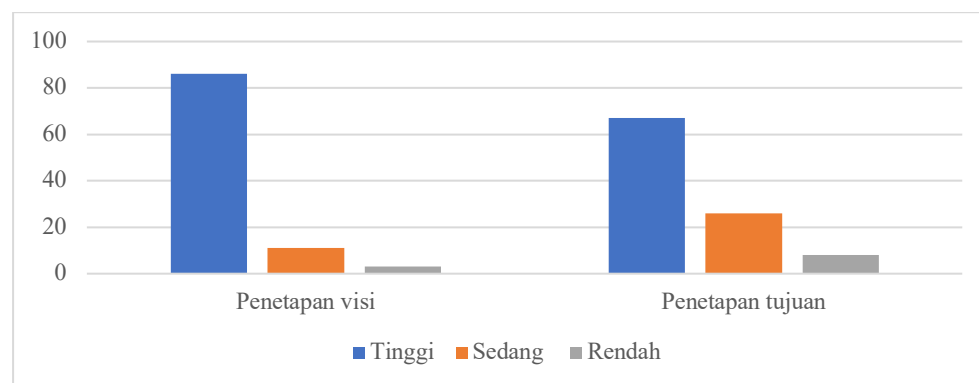
Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Bangsring untuk menentukan alternatif solusi atas permasalahan mereka masih terbatas. Padahal pelibatan seluruh anggota kelompok dalam tahapan ini penting untuk memastikan transparansi, partisipasi setara dan keberlanjutan program (Oseni 2024). Ketimpangan partisipasi, informasi, akses dan kontrol memosisikan masyarakat sebagai anggota SFV yang tidak berdaya. Menurut Servaes (2020), komunikasi partisipatif akan menghasilkan perubahan yang lebih berkelanjutan apabila masyarakat mampu membangun jaringan kolaborasi yang didasarkan pada kebutuhan bersama, bukan sekadar hubungan formal antarlembaga. Sehingga diperlukan upaya penyebaran akses dan kontrol kepada seluruh anggota untuk menjamin keberlanjutan.

Meskipun begitu, perlu diakui bahwa keberhasilan membangun jejaring kemitraan tidak terlepas dari kemampuan *local champion* dan pemerintah desa membangun kepercayaan dengan berbagai pihak sekaligus mempertahankan komitmen masyarakat terhadap tujuan konservasi. Melalui upaya tersebut, program SFV di Desa Bangsring berhasil membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai *stakeholders*, di antaranya KKP, BP3 Banyuwangi, Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dinas Koperasi dan UMKM, Pertamina, berbagai sektor perbankan, perguruan tinggi, hingga berbagai badan usaha milik negara maupun swasta. Masing-masing *stakeholders* memberikan dukungan sesuai kapasitas dan kepentingannya. Mulai dari penguatan kelembagaan kelompok, pendampingan konservasi, pengembangan wisata bahari, pengolahan hasil perikanan, promosi destinasi wisata, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Secara umum, tahap pelibatan *stakeholders* potensial di Desa Bangsring menunjukkan bahwa dialog komunitas telah berkembang dari kesadaran terhadap persoalan lingkungan menjadi upaya membangun kolaborasi multipihak. *Local champion* dan pemerintah desa berperan sebagai penghubung utama yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan berbagai lembaga pendukung, sehingga terbentuk jejaring kemitraan yang memperkuat pelaksanaan program SFV. Jejaring tersebut tidak hanya menyediakan sumber daya pembangunan, tetapi juga menjadi modal sosial yang memperluas kapasitas masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

6.2.3 Penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV Desa Bangsring

Tahap penetapan visi dan tujuan dalam model CFSC berfokus pada penyusunan arah perubahan yang menjadi pedoman pelaksanaan Program SFV. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa tahapan ini menghasilkan visi bersama sebagai dasar penyusunan aksi kolektif. Gambar 23 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap penetapan visi berada pada kategori sangat tinggi (86 persen), sedangkan partisipasi pada penetapan tujuan mencapai 67 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hadir, mengikuti proses dialog, serta memahami arah pembangunan yang disepakati. Hasil observasi dan wawancara memperlihatkan bahwa perumusan substansi visi dan keputusan strategis tetap dipimpin oleh aktor-aktor inti kelompok, sedangkan masyarakat berperan memperkuat legitimasi keputusan melalui keterlibatan aktif dalam forum dialog dan pelaksanaan Program SFV.



Gambar 23 Sebaran anggota kelompok pada tahap penetapan visi dan tujuan pembangunan SFV di Desa Bangsring

Secara empiris, proses penetapan visi didominasi oleh *local champion*, ketua kelompok, serta pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintah maupun lembaga pemberi program. Melalui dialog elitis tersebut lahirlah visi bersama untuk menjadikan Bangsring sebagai “Surga Bahari di Ujung Pulau Jawa”. Visi tersebut tidak sekadar menjadi slogan pembangunan, tetapi berfungsi sebagai jangkar normatif yang menyatukan tujuan konservasi ekosistem laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wisata bahari dan usaha perikanan yang berkelanjutan. Seluruh program SFV ataupun program pendukung dari

eksternal kemudian diarahkan agar tetap sejalan dengan visi besar tersebut sehingga setiap kegiatan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir.

Meskipun beberapa anggota kelompok hadir dalam forum penetapan visi, keterlibatan mereka lebih banyak bersifat informatif daripada deliberatif. Anggota mengetahui arah pembangunan yang akan ditempuh, namun tidak memiliki ruang yang setara untuk memengaruhi rumusan visi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa forum dialog lebih berfungsi membangun legitimasi terhadap keputusan yang telah dirumuskan oleh aktor inti dibandingkan menjadi ruang perundingan yang benar-benar setara. Oleh karena itu tingginya angka partisipasi pada tahap penetapan visi tidak serta-merta menunjukkan tingginya distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Pola yang sama terlihat pada tahap penetapan tujuan. Ketua kelompok berperan sebagai penghubung utama (*gatekeeper*) kelompok dengan pemerintah maupun lembaga pemberi program. Setiap program yang ditawarkan terlebih dahulu diseleksi oleh ketua kelompok, kemudian tujuan dan targetnya disesuaikan dengan kapasitas kelompok serta kemampuan masyarakat untuk mencapainya sebelum disampaikan kepada anggota dalam forum bulanan. Sebagaimana disampaikan Ketua Koperasi SFV

“Kalau ada CSR yang masuk, biasanya mereka langsung menghubungi saya lewat telepon ... Ujung keputusannya memang tetap ke saya sebagai kontak utama. Namun setelah program masuk, biasanya tetap disampaikan dalam rapat bulanan kelompok.” (SKR, Laki-laki, 52 Tahun)

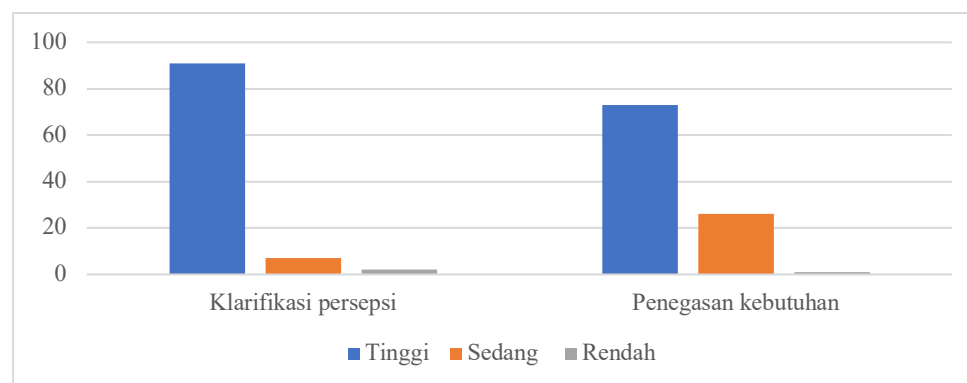
Anggota kelompok lebih banyak terlibat dalam menentukan tujuan operasional atau harian bukan tujuan strategis yang lebih besar. Misalkan dalam sehari mereka menargetkan berapa kali trip. Berapa jumlah wisatawan yang hanya datang, snorkling atau mengikuti trip ke Pulau Menjangan. Bagi UMKM, mereka menentukan jumlah target produk mereka yang terjual. Bagi pelaku konservasi, berapa jumlah stek terumbu karang yang bisa dihasilkan dan ditanam dalam sehari.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog pada tahap penetapan tujuan lebih berfungsi sebagai mekanisme penyalarsan antara kebutuhan kelompok dengan peluang program yang tersedia. Anggota memperoleh kesempatan untuk memahami serta melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi keputusan strategis mengenai arah program tetap berada pada ketua kelompok bersama pemberi program. Menurut Servaes (2020) dan Figueroa *et al.* (2002), partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran masyarakat dalam forum dialog, melainkan dari sejauh mana mereka memiliki akses untuk memengaruhi keputusan, mengendalikan sumber daya, serta menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Oleh karena itu, pola dialog di Desa Bangsring memperlihatkan adanya paradoks partisipasi, yaitu tingkat keterlibatan yang tinggi secara administratif belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi kewenangan yang setara dalam pengambilan keputusan strategis.

Secara umum, tahap penetapan visi dan tujuan pembangunan di Desa Bangsring menunjukkan bahwa dialog komunitas berhasil membangun arah pembangunan yang jelas dan konsisten melalui visi bersama konservasi berbasis kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, proses tersebut masih didominasi oleh aktor-aktor inti sehingga fungsi dialog lebih kuat sebagai mekanisme membangun legitimasi terhadap keputusan strategis daripada sebagai ruang deliberasi yang sepenuhnya setara. Pola tersebut berkontribusi dalam menjaga konsistensi arah pengembangan kelompok serta memastikan berbagai program eksternal tetap selaras dengan kebutuhan pengembangan SFV di Desa Bangsring.

6.2.4 Klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan individu

Tahap klarifikasi persepsi dan penegasan kebutuhan dalam model CFSC bertujuan menyamakan pemahaman masyarakat terhadap keputusan yang telah disepakati sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang mendukung pelaksanaan program SFV. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa tahapan ini memastikan setiap anggota memiliki pemahaman yang selaras mengenai tujuan perubahan serta kesempatan menyampaikan kebutuhan yang relevan. Gambar 24 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap klarifikasi persepsi mencapai kategori sangat tinggi, dengan 91 persen anggota kelompok terlibat aktif, sedangkan partisipasi pada tahap penegasan kebutuhan mencapai 73 persen pada kategori tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog berkembang sebagai ruang komunikasi untuk memperkuat kesamaan persepsi terhadap arah program sekaligus mengakomodasi kebutuhan anggota, meskipun keputusan strategis tetap dipimpin oleh aktor-aktor inti kelompok.



Gambar 24 Sebaran anggota kelompok pada tahap klarifikasi homogenitas persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Bangsring

Berbeda dengan tahapan pelibatan *stakeholders* maupun penetapan visi dan tujuan yang lebih banyak dikendalikan oleh ketua kelompok, pada tahap klarifikasi persepsi penyuluh berperan sebagai mediator komunikasi yang menjembatani berbagai perbedaan pemahaman di antara anggota kelompok. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu penyuluh lapang

“kami senantiasa bergerilya untuk mendatangi satu persatu anggota SFV untuk menjelaskan program, bahkan kami sampai ikut arisan mereka supaya lebih dekat” (APY, Laki-laki, 29 Tahun)

Anggota SFV dari Pokmaswas Mutiara Tabuhan juga menambahkan bahwa

“kalau ada apa-apa yang rajin ngasih tau kami ya nak APY, dia sudah yang kesini terus bilangan ada pelatihan ini ada program ini, sampai itu ada rumah tukik juga berkat nak APY. Saya apa-apa kalau ngga ngerti juga tanya Nak APY” (RKN, Perempuan, 49 Tahun)

Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa penyuluh secara aktif membangun komunikasi interpersonal, baik melalui pertemuan formal maupun komunikasi informal di sela-sela aktivitas masyarakat, seperti berdiskusi di kawasan pantai, mengikuti kegiatan kelompok, hingga berpartisipasi dalam kegiatan arisan masyarakat. Pendekatan tersebut memperpendek jarak sosial antara penyuluh dan masyarakat sehingga proses penyampaian informasi berlangsung lebih terbuka dan mudah dipahami. Menurut Freire (1970), dialog yang dibangun melalui kedekatan dengan kehidupan sehari-hari memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih egaliter karena setiap individu memiliki kesempatan menyampaikan pengalaman dan merefleksikan persoalan yang dihadapinya.

Pendekatan komunikasi tersebut memperlihatkan upaya penyuluh membangun hubungan yang lebih homofili dengan masyarakat. Menurut Rogers (1983), komunikasi yang berlangsung di antara individu yang memiliki kedekatan sosial dan pengalaman relatif serupa akan lebih efektif dalam membangun kepercayaan, memperlancar pertukaran informasi, serta meningkatkan penerimaan terhadap inovasi. Melalui pendekatan tersebut, dialog tidak hanya berfungsi menjelaskan isi program SFV, tetapi juga menjadi ruang refleksi bersama untuk menyamakan pemahaman anggota terhadap berbagai aturan, mekanisme kerja, maupun tujuan pelaksanaan konservasi.

Setelah tercapai kesamaan persepsi, dialog berkembang pada tahap penegasan kebutuhan individu dan kelompok. Pada tahap ini ruang partisipasi anggota menjadi lebih nyata dibandingkan tahapan-tahapan strategis sebelumnya. Anggota secara aktif mengemukakan berbagai kebutuhan yang mereka hadapi dalam pengelolaan kawasan konservasi maupun usaha wisata sesuai dengan keadaan aktual di lapang. Misalkan seperti kebutuhan perbaikan sarana, peningkatan kebersihan kawasan, dukungan operasional, hingga penyediaan fasilitas pendukung wisata. Salah seorang anggota poklhasar Bhakti Anugerah Laut menjelaskan

“jadi anak-anak itu suka usul apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar usaha (wisata) yang ada di sini bisa berkembang terus, misalkan kemarin itu kebersihan dan perahu.” (NFD, Perempuan, 44 Tahun)

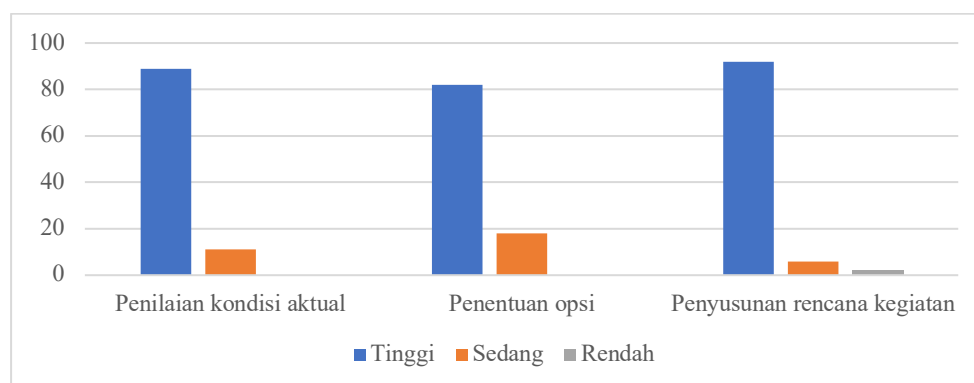
Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi dialog pada tahap ini telah bergeser dari sekadar membangun legitimasi terhadap keputusan strategis menjadi mekanisme untuk menghimpun pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan nyata masyarakat. Berbagai usulan yang muncul kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan operasional kelompok, misalkan piket kebersihan atau gotong royong perbaikan kapal. Sehingga, meskipun masyarakat memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan arah strategis pembangunan, mereka memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar dalam memengaruhi implementasi program melalui penyampaian kebutuhan dan pengalaman lapangan.

Secara umum, tahap klarifikasi homogenitas persepsi dan penegasan kebutuhan individu di Desa Bangsring menunjukkan terjadinya pergeseran karakter dialog. Apabila pada tahap penetapan visi dan tujuan dialog lebih berfungsi membangun legitimasi terhadap keputusan strategis yang didominasi aktor inti, maka pada tahap ini dialog berkembang menjadi ruang komunikasi yang lebih partisipatif. Penyuluh berperan memperkuat kesamaan persepsi antaranggota, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan kebutuhan aktual yang kemudian menjadi dasar penyusunan kegiatan operasional Program SFV pada tahapan berikutnya.

6.2.5 Penilaian kondisi aktual, penentuan opsi dan rencana kegiatan

Tahap evaluasi kondisi, penentuan alternatif, dan penyusunan rencana kegiatan dalam model CFSC berfungsi menerjemahkan hasil dialog menjadi aksi kolektif yang operasional. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa tahapan ini menghasilkan berbagai alternatif solusi dan rencana kerja yang disepakati bersama sesuai dengan kondisi masyarakat. Gambar 25 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada kategori sangat tinggi, dengan 89 persen anggota kelompok terlibat dalam evaluasi kondisi aktual, 82 persen berpartisipasi dalam penentuan alternatif penyelesaian masalah, dan 92 persen terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog operasional berkembang sebagai ruang deliberasi yang inklusif, memungkinkan sebagian besar anggota berkontribusi dalam penyusunan solusi dan rencana pelaksanaan Program SFV sesuai kebutuhan lapangan.

Tahap penilaian kondisi dilakukan melalui evaluasi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan konservasi, wisata bahari, maupun usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut sebagian besar ketua kelompok, para anggota kelompok secara aktif menyampaikan kondisi aktual yang mereka hadapi di lapangan, mulai dari kondisi sarana dan prasarana, kebersihan kawasan wisata, kebutuhan operasional kelompok, terutama berbagai kendala teknis yang menghambat pelaksanaan kegiatan misalkan kebocoran kapal. Dialog tersebut memungkinkan pengalaman setiap anggota menjadi sumber informasi dalam menentukan langkah perbaikan berikutnya. Pada pelaksanaan program SFV, penilaian kondisi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran bersama yang memperkuat kemampuan kelompok dalam merespons perubahan lingkungan.



Gambar 25 Sebaran anggota kelompok pada tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan di Desa Bangsring

Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Berbeda dengan tahap penetapan visi dan tujuan yang lebih banyak dikendalikan oleh ketua kelompok, pada tahap penyusunan opsi anggota memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengemukakan usulan berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Misalkan, sebelum melakukan snorkling, kondisi kesehatan pengunjung (utamanya wisatawan manca negara) harus benar-benar dipastikan melalui bukti medis, supaya tidak terjadi kecelakaan. Hal ini dipicu oleh pengalaman mereka mendapatkan pengunjung dengan gangguan jantung. Berbagai alternatif yang muncul kemudian didiskusikan bersama dengan mempertimbangkan manfaat, kemampuan kelompok, serta sumber daya yang tersedia sebelum diputuskan sebagai kegiatan bersama. Pola tersebut menunjukkan bahwa dialog tidak lagi sekadar menjadi media penyampaian informasi, tetapi berkembang menjadi proses musyawarah yang memungkinkan berbagai pengalaman lapangan diterjemahkan menjadi solusi operasional.

Puncak dialog komunitas terjadi pada tahap penyusunan rencana kegiatan. Pada tahap ini pembahasan tidak hanya berfokus pada penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi juga menyusun mekanisme pelaksanaan agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Dialog menghasilkan berbagai kesepakatan mengenai pembagian tugas, jadwal kerja, penyusunan SOP keselamatan wisata snorkeling, sistem *rolling* kapal wisata, penguatan AD/ART kelompok, hingga penerapan sanksi sosial terhadap anggota yang melanggar kesepakatan. Ketua kelompok menjelaskan bahwa setiap anggota telah memiliki pembagian peran sesuai kapasitasnya, sedangkan pelanggaran terhadap aturan bersama dikenai sanksi sebagai bentuk penguatan komitmen kelompok.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dialog pada tahap penyusunan rencana telah berkembang menjadi ruang deliberasi yang relatif egaliter. Setiap anggota memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, usulan, maupun pertimbangan operasional sebelum kesepakatan ditetapkan bersama. Menurut Bordenave (2004) dan Alakwe dan Okpara (2022), partisipasi yang efektif tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran

masyarakat dalam forum, tetapi juga melalui kesempatan yang setara untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan. Di Desa Bangsring, dialog berhasil mengubah berbagai kesepakatan menjadi sistem kerja yang dipahami, dijalankan, sekaligus diawasi secara kolektif oleh seluruh anggota kelompok.

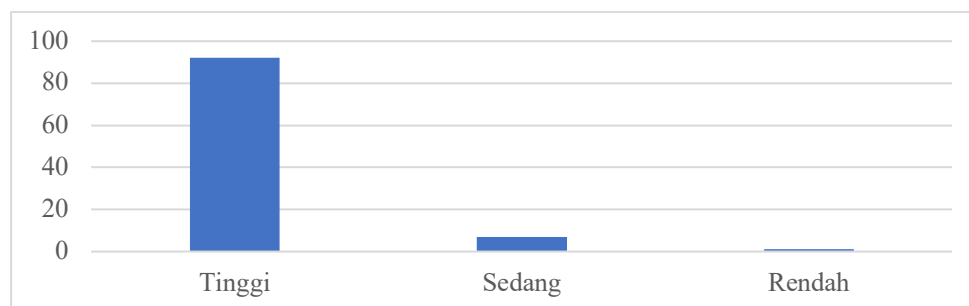
Secara umum, tahap penilaian kondisi aktual, penentuan opsi, dan penyusunan rencana kegiatan juga memperlihatkan perubahan karakter dialog komunitas di Desa Bangsring. Apabila pada tahap-tahap strategis pengambilan keputusan masih didominasi oleh *local champion* dan aktor inti kelompok, maka pada tahap operasional partisipasi anggota berkembang jauh lebih luas. Masyarakat memperoleh ruang yang setara untuk mengevaluasi kondisi lapangan, menyusun alternatif penyelesaian masalah, serta merancang mekanisme pelaksanaan kegiatan secara bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa pola dialog di Desa Bangsring membangun pembagian peran yang khas, yaitu keputusan strategis cenderung tersentralisasi, sedangkan implementasi operasional dijalankan melalui dialog yang lebih partisipatif. Pola tersebut memungkinkan kelompok menjaga konsistensi arah pembangunan sekaligus mempertahankan keterlibatan anggota dalam pelaksanaan Program SFV secara berkelanjutan.

6.3 Aksi Kolektif Pembangunan SFV Desa Bangsring

Perubahan sosial tidak berhenti pada dialog komunitas, melainkan diwujudkan melalui aksi kolektif yang mencakup lima tahapan yakni penugasan tanggung jawab, mobilisasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi partisipatif (Figueroa et al. 2002; Jordan 2023). Aksi kolektif merupakan tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi, pembagian peran, dan pemanfaatan sumber daya secara terorganisasi (Jordan 2023). Di Desa Bangsring, aksi kolektif berkembang melalui sistem kelembagaan yang formal dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang terstruktur, serta pelaksanaan kegiatan yang melibatkan sebagian besar anggota SFV. Kekuatan tersebut memungkinkan program konservasi, wisata bahari, dan usaha perikanan berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Distribusi akses terhadap sumber daya strategis, pemerataan manfaat pembangunan, serta ruang evaluasi partisipatif masih terkonsentrasi pada aktor-aktor inti kelompok. Atas dasar dinamika tersebut, bab ini menyajikan deskripsi dan analisis mengenai penerapan lima tahapan aksi kolektif dalam Program SFV di Desa Bangsring.

6.3.1 Penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan

Tahap pembagian tanggung jawab dalam model CFSC merupakan awal implementasi aksi kolektif melalui distribusi peran sesuai kapasitas setiap anggota untuk mewujudkan tujuan bersama. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa pembagian tanggung jawab menentukan kontribusi setiap individu dalam pelaksanaan pembangunan.



Gambar 26 Sebaran anggota kelompok pada tahap penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan di Desa Bangsring

Gambar 26 menunjukkan bahwa tahap ini memiliki tingkat partisipasi tertinggi dalam aksi kolektif di Desa Bangsring, dengan 92 persen anggota kelompok terlibat aktif, 7 persen berada pada kategori sedang, dan 1 persen pada kategori rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota SFV memahami struktur organisasi, menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, serta berkontribusi secara aktif dalam pelaksanaan program SFV melalui pembagian peran yang jelas dan terkoordinasi.

Menurut Ostrom (1990), keberhasilan aksi kolektif dipengaruhi oleh kejelasan hak, kewajiban, serta pembagian tanggung jawab dalam mengelola sumber daya bersama. Di Desa Bangsring, pembagian tanggung jawab dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pembagian tugas antar kelompok SFV berdasarkan spesialisasi fungsi masing-masing kelompok. Pokmaswas bertanggung jawab melaksanakan konservasi terumbu karang sekaligus mengelola wisata bahari, Pokdakan menjalankan kegiatan produksi ikan hias, sedangkan Poklahsar bertugas mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk UMKM. Spesialisasi tugas meliputi

- Kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) terdiri atas Pesona Bahari, Samudra Bakti, Bakti Abadi Laut, Mutiara Tabuhan, Bangsring Under Water, Anugerah Bahari, dan Tanjungan Beach yang bertugas melaksanakan konservasi terumbu karang serta pengelolaan wisata bahari.
- Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) terdiri atas King Arwana yang berfokus pada produksi ikan hias arwana serta Marline dan Remora yang bertugas melakukan pemburuan ikan hias secara aman.
- Kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) terdiri atas Mutiara Family, Mawar, dan Bunda Bangsring yang bertugas mengolah hasil perikanan menjadi berbagai produk UMKM.

Kedua, pembagian tugas dilakukan pada tingkat internal kelompok. Pembagian tugas strategis di Desa Bangsring lebih banyak ditentukan oleh ketua kelompok berdasarkan rangkaian kegiatan. Ketua kelompok mengatur pembagian jadwal kerja, penggunaan kapal wisata, hingga personel yang bertanggung jawab pada kegiatan konservasi. Sebagaimana disampaikan salah satu anggota Poklahsar Anugerah Laut

“Tapi kalau ada proyek, itu dibagi oleh ketua, Mbak NUR sekian, teman-teman sekian, tetap dibagi rata sesuai kesepakatan. Bu Ketua

yang mengatur semuanya. Jadi kita itu tinggal matangnya aja. Pembagiannya rata dan sesuai, karena yang benar-benar mengatur semuanya itu Bu Ketua.” (NFD, Perempuan, 44 Tahun)

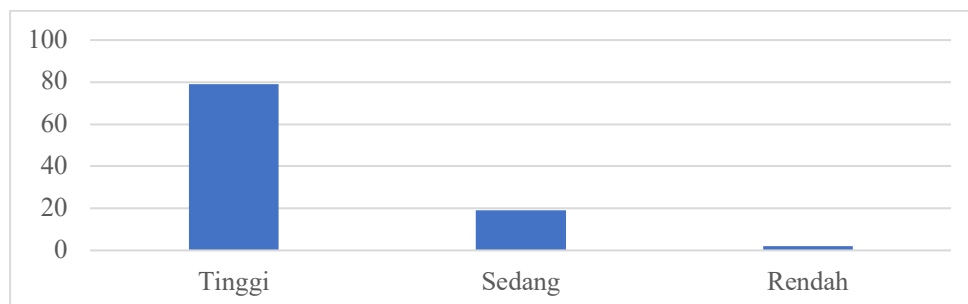
Meskipun pembagian tanggung jawab (strategis) ditetapkan oleh ketua kelompok, anggota berperan dalam memutuskan dan mengatur pelaksanaan tugas teknis (operasional) sehari-hari, seperti penugasan *tour guide*, petugas loket, dan petugas kebersihan kawasan wisata. Mekanisme penugasan kelompok diperkuat melalui SOP operasional wisata, mekanisme kerja konservasi, serta AD/ART kelompok sehingga pembagian tanggung jawab menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme kerja anggota. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab di Desa Bangsring dibangun melalui tata kelola organisasi yang terstruktur. Struktur organisasi, aturan kerja, dan mekanisme pengawasan mendukung koordinasi yang cepat dan efektif, terutama dalam kegiatan konservasi dan wisata bahari yang memerlukan pembagian tugas yang jelas, disiplin waktu, dan kepastian penanggung jawab pada setiap kegiatan. Sebagaimana dijelaskan Medina (2007) menjelaskan bahwa mekanisme koordinasi yang kuat mampu meningkatkan efektivitas aksi kolektif sekaligus memperkuat peran aktor yang mengendalikan sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Kendati demikian, ketua kelompok tetap memegang kewenangan utama dalam menetapkan distribusi pekerjaan dan personel sehingga koordinasi berjalan lebih efisien, namun menurunkan akses dan kontrol partisipatif. Kendati demikian, ketua kelompok tetap memegang kewenangan utama dalam menetapkan distribusi pekerjaan dan personel sehingga koordinasi berjalan lebih efisien, namun menurunkan akses dan kontrol partisipatif.

Temuan di Desa Bangsring menunjukkan bahwa partisipasi dalam pembagian tugas lebih banyak dipengaruhi oleh legitimasi kelembagaan daripada hubungan personal antaranggota. Kejelasan aturan, sistem monitoring, serta mekanisme pembagian kerja yang terstruktur mampu menjaga disiplin organisasi, sehingga setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan program SFV. Secara umum, penugasan tanggung jawab dan peran pembangunan di Desa Bangsring memperlihatkan bahwa aksi kolektif dibangun melalui mekanisme organisasi yang formal, sistematis, dan disertai pengawasan yang jelas. Pola ini berhasil memperkuat koordinasi serta akuntabilitas pelaksanaan program, meskipun masih terdapat tantangan berupa dominasi aktor inti dalam menentukan distribusi tanggung jawab strategis di dalam organisasi.

6.3.2 Mobilisasi organisasi dan sumber daya

Tahap mobilisasi organisasi dan sumber daya dalam model CFSC berfokus pada penggerakan sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, teknologi, dan jejaring kemitraan untuk mendukung pelaksanaan program SFV setelah pembagian tugas ditetapkan. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa mobilisasi sumber daya menentukan kemampuan masyarakat mengubah hasil dialog menjadi aksi kolektif melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Gambar 27 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat

pada tahap ini berada pada kategori tinggi, dengan 79 persen anggota kelompok terlibat aktif, 19 persen berada pada kategori sedang, dan 2 persen pada kategori rendah. Partisipasi anggota kelompok pada tahap ini menunjukkan tingkat yang tinggi, tetapi distribusi akses terhadap mobilisasi sumber daya masih terkonsentrasi pada elit kelompok.



Gambar 27 Sebaran anggota kelompok pada tahap mobilisasi organisasi dan sumber daya di Desa Bangsring

Secara empiris, kemampuan mobilisasi sumber daya di Desa Bangsring tidak muncul setelah program SFV dilaksanakan, tetapi telah berkembang sejak masyarakat membangun gerakan konservasi pesisir. Pengalaman panjang tersebut membentuk kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas jejaring kemitraan dengan berbagai pihak. Melalui jejaring tersebut, kelompok berhasil memperoleh berbagai bentuk dukungan, mulai dari pembangunan rumah tukik, pengadaan *coral dome*, sarana wisata bahari, pelatihan konservasi, pelatihan pengolahan hasil perikanan, hingga berbagai bantuan peralatan usaha. Dukungan tersebut berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, perusahaan, maupun berbagai lembaga lainnya yang selama ini menjadi mitra pengembangan kawasan Bangsring.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama mobilisasi sumber daya di Desa Bangsring bukan terletak pada besarnya bantuan yang diterima, tetapi pada kemampuan organisasi membangun dan mempertahankan jejaring kolaborasi dalam jangka panjang. Desa Bangsring memanfaatkan kapasitas kelembagaan sebagai instrumen untuk membuka akses terhadap berbagai peluang pembangunan. Jejaring tersebut memungkinkan kelompok memperoleh sumber daya yang lebih beragam, sekaligus meningkatkan keberlanjutan pengembangan kawasan konservasi dan wisata bahari.

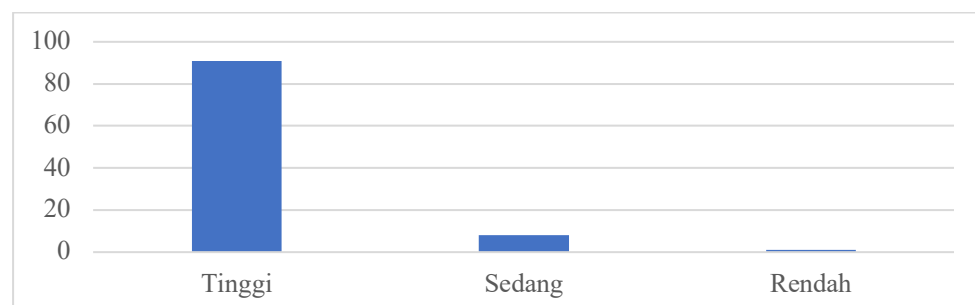
Namun demikian, proses mobilisasi sumber daya masih memperlihatkan adanya konsentrasi akses pada aktor-aktor tertentu. Sebagian besar komunikasi dengan pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, maupun lembaga mitra masih dimediasi oleh ketua kelompok dan *local champion* yang telah memiliki jaringan sosial lebih luas. Akibatnya, kemampuan membangun kemitraan maupun mengakses sumber daya strategis belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh anggota kelompok. Sebagian besar anggota lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dari sumber daya yang berhasil dimobilisasi organisasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingginya kapasitas mobilisasi sumber daya belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kontrol terhadap sumber daya tersebut. Sementara itu, Ostrom (1990) menjelaskan bahwa keberhasilan aksi kolektif tidak hanya bergantung pada kemampuan memperoleh sumber daya, tetapi juga pada distribusi akses yang adil di antara anggota organisasi. Dalam konteks Desa Bangsring, kelembagaan yang kuat berhasil memperbesar kapasitas mobilisasi sumber daya, namun distribusi akses terhadap jejaring strategis masih cenderung terkonsentrasi pada elite organisasi.

Secara umum, mobilisasi organisasi dan sumber daya di Desa Bangsring menunjukkan bahwa keberhasilan Program SFV ditopang oleh kemampuan kelompok membangun jejaring kelembagaan yang luas dan berkelanjutan. Kapasitas tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai dukungan yang memperkuat konservasi, pengembangan wisata, maupun usaha ekonomi lokal. Penguatan kapasitas anggota dalam membangun jejaring dan mengakses sumber daya strategis tetap diperlukan untuk memperluas kemampuan mobilisasi sumber daya sebagai kapasitas kolektif yang dimiliki seluruh anggota SFV, bukan hanya aktor-aktor inti kelompok.

6.3.3 Aksi pembangunan kolektif

Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam model CFSC merupakan implementasi aksi kolektif melalui pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah disepakati dalam proses dialog, pembagian tanggung jawab, dan mobilisasi sumber daya. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa tahapan ini menunjukkan kemampuan masyarakat menerjemahkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata. Gambar 28 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan berada pada kategori sangat tinggi, dengan 91 persen anggota kelompok terlibat aktif, 8 persen berada pada kategori sedang, dan 1 persen pada kategori rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota SFV berpartisipasi langsung dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan sehingga hasil dialog berkembang menjadi aksi kolektif yang terlaksana secara nyata dalam pelaksanaan program SFV.



Gambar 28 Sebaran anggota kelompok pada tahap aksi pembangunan kolektif di Desa Bangsring

Menurut Medina (2007), aksi kolektif dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila komunitas mampu membangun koordinasi organisasi

yang kuat sehingga setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya. Di Desa Bangsring, aksi pembangunan kolektif diwujudkan melalui berbagai kegiatan konservasi pesisir, pengelolaan wisata bahari, budidaya ikan hias, serta pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Setiap kelompok melaksanakan fungsi yang berbeda sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pokmaswas menjadi aktor utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dan wisata bahari, sedangkan Poklahsar mengembangkan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan secara mandiri. Pembagian tersebut membentuk sistem usaha yang memberikan keleluasaan kepada setiap kelompok untuk mengembangkan unit usahanya sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing.

Pokmaswas menjalankan kegiatan konservasi sumber daya pesisir sekaligus mengelola berbagai aktivitas wisata bahari, seperti jasa pemandu wisata, penyediaan kapal, serta pengelolaan kawasan snorkeling. Masing-masing Pokmaswas mengelola wilayah kerjanya sendiri, tetapi menjalankan jenis usaha yang relatif serupa. Perbedaan di antara kelompok lebih banyak terletak pada wilayah pengelolaan dan pembagian tanggung jawab operasional, sehingga setiap kelompok memiliki ruang untuk mengembangkan usahanya tanpa menimbulkan persaingan dalam kawasan yang sama.

Poklahsar menjalankan fungsi yang berbeda dengan Pokmaswas. Kelompok ini mengembangkan berbagai inovasi produk hasil kelautan dan perikanan secara mandiri tanpa terintegrasi secara langsung dengan sistem usaha wisata maupun konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha di Desa Bangsring berlangsung melalui beberapa unit usaha yang berjalan secara paralel sesuai karakteristik masing-masing kelompok.

Setiap kelompok memiliki bidang usaha yang berbeda, namun mekanisme pengelolaan internal menunjukkan pola yang relatif seragam. Pembagian jadwal kerja, pelaksanaan kegiatan, serta sistem bagi hasil ditetapkan oleh ketua kelompok berdasarkan pembagian tugas dan kontribusi setiap anggota. Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing anggota sekaligus menjaga pemerataan manfaat ekonomi yang diperoleh kelompok. Pola pengelolaan tersebut memperkuat disiplin organisasi, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, serta mendukung keberlanjutan usaha pada setiap kelompok masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh sistem organisasi yang relatif tertata. Setiap kegiatan memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari petugas konservasi, pemandu wisata (*tour guide*), operator kapal, petugas loket, hingga petugas kebersihan kawasan wisata. Ketika jumlah wisatawan meningkat ataupun terdapat kegiatan konservasi berskala besar, anggota kelompok secara otomatis menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan mekanisme kerja yang telah disepakati. Sebagaimana disampaikan Ketua Pokmaswas *Bangsring Under Water*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

“Kalau ada tamu, anak-anak sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Kalau ada program baru, mereka sudah bisa membagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.” (ABZ, Laki-laki, 55 Tahun)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aksi kolektif di Desa Bangsring tidak lagi bergantung pada instruksi yang diberikan setiap saat oleh ketua kelompok. Pembagian kerja yang telah terinstitusionalisasi melalui SOP, AD/ART, maupun pengalaman organisasi membuat anggota mampu menjalankan tugasnya secara mandiri sesuai fungsi masing-masing. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi organisasi telah berkembang menjadi budaya kerja kolektif yang dipahami oleh seluruh anggota.

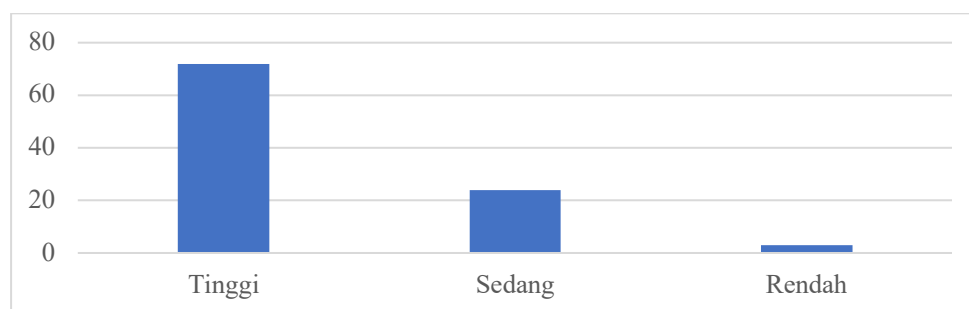
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh kuatnya kapasitas kelembagaan yang dimiliki organisasi SFV berupa kejelasan aturan, disiplin organisasi, serta mekanisme koordinasi yang telah berjalan secara konsisten. Namun demikian, tingginya efektivitas organisasi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor inti kelompok. Sebagian besar kegiatan strategis tetap dikendalikan melalui koordinasi ketua kelompok maupun *local champion* sehingga keberlangsungan aksi kolektif masih bergantung pada kemampuan mereka menjaga konsistensi organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aksi kolektif telah berjalan secara sistematis, distribusi kepemimpinan dalam pelaksanaan kegiatan masih perlu diperluas agar kapasitas organisasi tidak terpusat pada individu tertentu.

Secara umum, aksi pembangunan kolektif di Desa Bangsring menunjukkan bahwa masyarakat berhasil menerjemahkan hasil dialog menjadi tindakan nyata melalui sistem organisasi yang terstruktur dan disiplin kerja yang tinggi. Kejelasan pembagian tugas, penguatan aturan organisasi, serta pengalaman panjang dalam mengelola konservasi menjadikan aksi kolektif mampu berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas anggota dalam menjalankan kepemimpinan operasional tetap diperlukan untuk memperluas distribusi peran kepemimpinan sehingga keberlanjutan program menjadi kapasitas kolektif seluruh anggota SFV, bukan bergantung pada aktor inti kelompok.

6.3.4 Pemanfaatan hasil pembangunan desa

Tahap pemanfaatan hasil dalam model CFSC berfokus pada pemanfaatan perubahan yang dihasilkan melalui aksi kolektif dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa tahapan ini menunjukkan kemampuan aksi kolektif menghasilkan manfaat nyata yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Gambar 29 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil berada pada kategori tinggi, dengan 72 persen anggota kelompok terlibat aktif, 24 persen berada pada kategori sedang, dan 3 persen pada kategori rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggota SFV telah merasakan manfaat program SFV, meskipun tingkat pemanfaatan hasil lebih rendah dibandingkan partisipasi

pada tahap pelaksanaan kegiatan sehingga distribusi manfaat antaranggota belum berlangsung secara merata.



Gambar 29 Sebaran anggota kelompok pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Bangsring

Secara empiris, manfaat pembangunan di Desa Bangsring diawali oleh keberhasilan masyarakat memulihkan ekosistem pesisir melalui kegiatan konservasi yang telah berlangsung secara berkelanjutan. Aksi kolektif tersebut berhasil mendorong terbentuknya Zona Perlindungan Bersama (ZPB), penguatan kawasan Kawasan Konservasi Perairan dan Ruang Laut (KKPRL), serta penanaman 25.269 fragmen terumbu karang pada tahun 2025. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berhasil menjaga sumber daya pesisir, tetapi juga membangun fondasi ekologis yang menjadi penopang pembangunan desa dalam jangka panjang.

Keberhasilan konservasi tersebut kemudian menghasilkan berbagai manfaat ekonomi. Pulihnya ekosistem laut mendorong berkembangnya wisata bahari *Bangsring Underwater* sebagai salah satu destinasi wisata berbasis konservasi yang mampu menarik wisatawan dari berbagai daerah dan manca negara. Pertumbuhan sektor wisata membuka berbagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat, mulai dari jasa pemandu wisata, operator kapal, penyewaan peralatan snorkeling dan selam, konservasi penyu, hingga berkembangnya usaha kuliner, *homestay*, serta berbagai produk olahan hasil laut yang dikelola poklhasar. Artinya manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok konservasi, tetapi juga menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian desa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa program SFV di Desa Bangsring berhasil mengintegrasikan konservasi sumber daya alam dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang menempatkan konservasi sebagai penghambat aktivitas ekonomi, masyarakat Bangsring justru menjadikan keberhasilan konservasi sebagai modal utama untuk menciptakan berbagai peluang usaha baru. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan bukan dua tujuan yang saling bertentangan, tetapi dapat tumbuh secara bersamaan melalui aksi kolektif yang terorganisasi dengan baik.

Namun demikian, manfaat pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara setara oleh seluruh anggota kelompok. Sebagian besar peluang usaha, akses terhadap wisata, maupun kesempatan mengembangkan bisnis masih lebih banyak dinikmati oleh anggota yang memiliki modal,

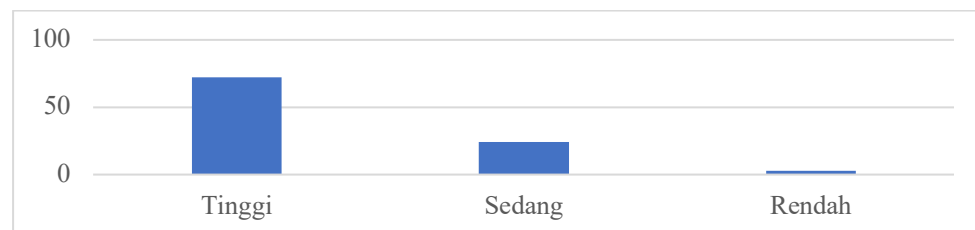
pengalaman, atau posisi strategis dalam organisasi. Anggota yang berperan pada kegiatan operasional sering kali memperoleh manfaat ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan aktor yang memiliki akses terhadap pengelolaan usaha maupun jejaring kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi masih dipengaruhi oleh distribusi akses terhadap sumber daya strategis di dalam organisasi.

Menurut Ostrom (1990), keberlanjutan aksi kolektif tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menghasilkan manfaat bersama, tetapi juga oleh kesesuaian antara kontribusi anggota dan manfaat yang mereka terima. Sementara itu, Olson (1965) menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi manfaat berpotensi menurunkan motivasi anggota untuk terus berpartisipasi dalam aksi kolektif. Di Desa Bangsring, tantangan pembangunan tidak lagi terletak pada kemampuan menghasilkan manfaat, tetapi pada bagaimana memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh seluruh anggota SFV.

Secara umum, pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Bangsring menunjukkan bahwa aksi kolektif berhasil menghasilkan perubahan nyata melalui keberhasilan konservasi pesisir yang kemudian berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Integrasi antara konservasi, wisata bahari, dan pengembangan usaha lokal menjadikan program SFV mampu menciptakan manfaat ekologis sekaligus ekonomi secara berkelanjutan. Penguatan mekanisme distribusi manfaat tetap diperlukan agar hasil pembangunan tidak hanya tercermin pada pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga pada meningkatnya keadilan dan inklusivitas bagi seluruh anggota kelompok.

6.3.5 Partisipasi anggota SFV dalam evaluasi partisipatif

Tahap evaluasi partisipatif dalam model CFSC berfungsi sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, dan menyusun perbaikan pelaksanaan program SFV. Figueroa *et al.* (2002) menjelaskan bahwa evaluasi partisipatif memperkuat kapasitas reflektif masyarakat, akuntabilitas, dan keberlanjutan aksi kolektif. Gambar 30 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap ini berada pada kategori tinggi, dengan 68 persen anggota kelompok terlibat aktif, 16 persen berada pada kategori sedang, dan 17 persen pada kategori rendah. Persentase tersebut merupakan yang terendah dibandingkan seluruh tahapan aksi kolektif, menunjukkan bahwa keterlibatan anggota dalam proses refleksi dan evaluasi program masih lebih rendah dibandingkan partisipasi mereka pada tahap pelaksanaan kegiatan.



Gambar 30 Sebaran anggota kelompok pada tahap evaluasi partisipatif di Desa Bangsring

Secara empiris, evaluasi program SFV di Desa Bangsring dilakukan secara lebih terstruktur melalui rapat organisasi yang melibatkan pengurus kelompok, penyuluh, pemerintah desa, serta berbagai mitra yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Forum evaluasi digunakan untuk membahas perkembangan kegiatan konservasi, pengelolaan wisata bahari, kondisi kelembagaan, maupun berbagi persoalan operasional yang muncul selama pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan perbaikan kegiatan pada periode berikutnya.

Meskipun mekanisme evaluasi telah berlangsung secara rutin dan dihadiri oleh seluruh anggota, kehadiran mereka sebatas fisik sedangkan ruang akses dan kontrol anggota biasa masih relatif terbatas. Sebagian besar proses evaluasi substantif dilakukan oleh ketua kelompok dan aktor-aktor inti yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan organisasi. Anggota kelompok lebih banyak menerima hasil evaluasi ataupun menyampaikan masukan melalui ketua kelompok dibandingkan terlibat secara langsung dalam proses perumusan keputusan evaluatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa forum evaluasi berfungsi sebagai mekanisme koordinasi organisasi dibandingkan sebagai ruang deliberasi bertukar pendapat dan pengalaman yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh anggota.

Kondisi tersebut berimplikasi pada reproduksi struktur kekuasaan yang telah terbentuk sejak awal pelaksanaan program SFV. Dominasi *local champion* dan elite kelompok dalam proses evaluasi membuat sebagian anggota merasa kurang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik maupun pandangan yang berbeda secara terbuka. Akibatnya, evaluasi lebih banyak menghasilkan penyempurnaan aspek teknis dan operasional dibandingkan menjadi media refleksi kritis terhadap tata kelola organisasi maupun distribusi manfaat pembangunan.

Menurut Ostrom (1990), mekanisme *monitoring* merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan aksi kolektif karena memungkinkan organisasi menjaga kepatuhan dan efektivitas pengelolaan sumber daya bersama. Namun, Figueroa *et al.* (2002) menekankan bahwa evaluasi partisipatif tidak hanya bertujuan menilai keberhasilan program, tetapi juga memberikan ruang bagi seluruh anggota masyarakat untuk belajar, menyampaikan pengalaman, serta memengaruhi arah perbaikan pembangunan. Mekanisme monitoring di Desa Bangsring telah berkembang dengan baik, tetapi dimensi partisipatif dalam evaluasi masih perlu diperkuat agar proses refleksi tidak hanya menjadi kewenangan elite organisasi.

Secara umum, evaluasi partisipatif di Desa Bangsring menunjukkan bahwa keberhasilan Program SFV didukung oleh sistem evaluasi yang relatif terstruktur, disiplin, dan berkelanjutan. Evaluasi tersebut masih berfokus pada fungsi pengendalian organisasi, sedangkan penguatan fungsi pembelajaran kolektif belum menjadi orientasi utama. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ruang evaluasi yang lebih inklusif sehingga seluruh anggota tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk mengevaluasi, mengkritisi, dan memengaruhi arah pengembangan program SFV di masa mendatang.

6.4 Model Struktural Komunikasi Partisipatoris di Desa Bangsring.

Komunikasi partisipatif dalam pelaksanaan program SFV di Desa Bangsring berkembang melalui dialog komunitas yang diwujudkan dalam aksi kolektif berbasis kelembagaan. Partisipasi masyarakat menunjukkan capaian tinggi pada proses dialog, pembagian tanggung jawab, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan hasil, sedangkan akses terhadap sumber daya strategis, distribusi manfaat pembangunan, serta evaluasi partisipatif masih lebih banyak dipengaruhi oleh aktor-aktor inti kelompok. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program SFV didukung oleh kepemimpinan, koordinasi organisasi, dan kapasitas kelembagaan yang mampu menggerakkan aksi kolektif secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, bagian ini menganalisis hubungan struktural antarvariabel untuk menjelaskan faktor-faktor yang membentuk dialog komunitas dan aksi kolektif dalam pelaksanaan program SFV di Desa Bangsring menggunakan SEM-PLS. Analisis dilakukan melalui uji *outer model* untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk serta uji *inner model* untuk menganalisis hubungan antarvariabel. Model struktural disusun menggunakan pendekatan reflektif yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya melalui arah panah dari variabel laten menuju variabel manifes (Narimawati *et al.* 2020).

6.4.1 Evaluasi *outer model* komunikasi SFV di Desa Bangsring

Evaluasi *outer model* pada model CFSC dalam program SFV di Desa Bangsring bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk mampu merepresentasikan fenomena empiris secara valid dan reliabel sebelum dilakukan analisis hubungan struktural. Pengujian diawali dengan validitas konvergen untuk menilai kemampuan indikator dalam mengukur konstruk yang sama melalui nilai *outer loading* (OL) $\geq 0,70$ dan *average variance extracted* (AVE) $\geq 0,50$, sedangkan indikator yang berada di bawah kriteria dieliminasi agar model lebih stabil dan representatif (Hair *et al.* 2017). Validitas diskriminan selanjutnya dievaluasi menggunakan kriteria Fornell-Larcker dengan membandingkan akar kuadrat AVE setiap konstruk terhadap korelasinya dengan konstruk lain untuk memastikan setiap variabel memiliki karakteristik empiris yang berbeda. Reliabilitas konstruk dinilai melalui *Cronbach's alpha* (CA), ρ_A , dan *composite reliability* (CR) dengan nilai minimal 0,70, sementara rentang 0,60-0,70 masih dapat diterima pada penelitian eksploratori dan nilai di atas 0,90 memerlukan interpretasi yang cermat karena berpotensi menunjukkan redundansi indikator. Hair *et al.* (2017) merekomendasikan CR sebagai dasar utama penilaian reliabilitas karena memperhitungkan variasi *outer loading* antarindikator sehingga memberikan estimasi konsistensi internal yang lebih akurat dibandingkan CA.

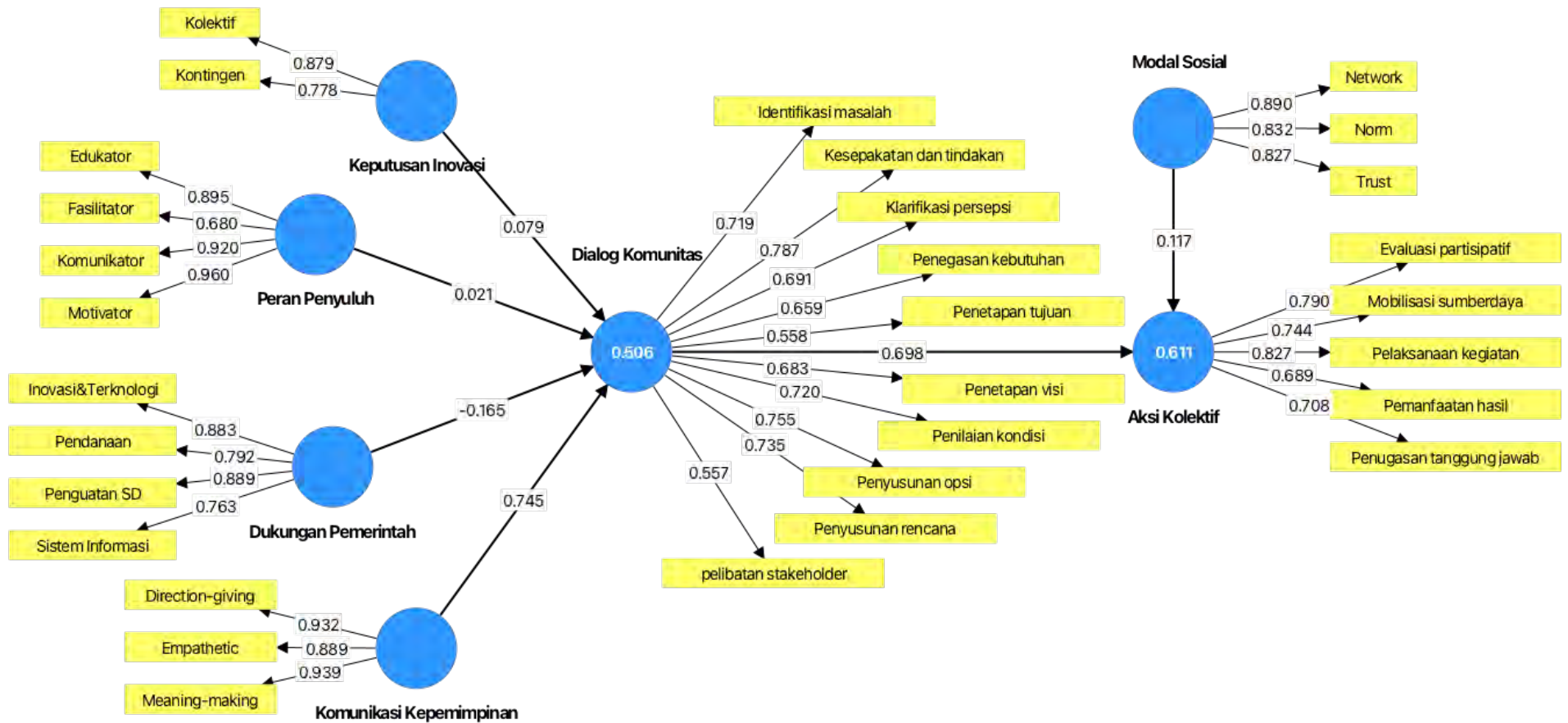
Tabel 25 Nilai AVE dan *outer loading* pelaksanaan SFV di Desa Bangsring

Variabel	AVE		Indikator	Outer Loading	
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
Peran penyuluh	0,758	0,758	Komunikator	0,920	0,920
			Motivator	0,895	0,895
			Fasilitator	0,680	0,680
			Edukator	0,960	0,960
Keputusan inovasi	0,576	0,576	Opsional	0,834	0,834
			Kolektif	0,685	0,685
			Otoritas	0,752	0,752
			Kontingen	0,758	0,758
Dukungan pemerintah	0,695	0,695	Pendanaan	0,792	0,792
			Penguatan sd	0,889	0,889
			Inovasi & teknologi	0,883	0,883
			Sistem informasi	0,764	0,764
Komunikasi kepemimpinan	0,847	0,847	<i>Direction-giving</i>	0,932	0,932
			<i>Empathetic</i>	0,888	0,888
			<i>Meaning-making</i>	0,939	0,939
Gejala <i>Groupthink</i>	0,536	0,781	<i>Overestimation</i>	0,985	0,969
			<i>Closed-mindedness</i>	0,733	0,776
			<i>Pressures toward uniformity</i>	0,314	-
Modal sosial	0,723	0,723	<i>Norm</i>	0,833	0,833
			<i>Network</i>	0,828	0,828
			<i>Trust</i>	0,889	0,889
Dialog komunitas	0,476	0,577	Identifikasi masalah	0,719	0,718
			Pelibatan <i>stakeholders</i>	0,555	0,816
			Klarifikasi persepsi	0,691	0,787
			Penegasan kebutuhan	0,657	0,691
			Penetapan visi	0,684	0,657
			Penilaian kondisi	0,720	0,723
			Penetapan tujuan	0,557	0,686
			Penyusunan opsi	0,765	0,557
			Kesepakatan dan tindakan	0,788	0,757
			Penyusunan rencana	0,735	0,734
Aksi kolektif	0,568	0,566	Penugasan tanggung jawab	0,708	0,717
			Mobilisasi sumber daya	0,744	0,553
			Pelaksanaan kegiatan	0,827	0,762
			Pemanfaatan hasil	0,689	0,682
			Evaluasi partisipatif	0,789	0,777

Tabel 25 menyajikan nilai *outer loading* dan AVE setiap konstruk pada model CFSC di Desa Bangsring. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas konvergen setelah dilakukan modifikasi model. Sebelum modifikasi, sebagian besar konstruk telah memiliki nilai AVE di atas batas minimum 0,50, kecuali dialog komunitas (AVE = 0,476) yang meningkat menjadi 0,577 dan gejala *groupthink* (AVE = 0,536) yang meningkat menjadi 0,781 setelah indikator dengan *outer loading* yang rendah (di bawah 0,55) dieliminasi. Indikator yang dieliminasi tersebut adalah indikator pada konstruk *groupthink*, yaitu *pressures toward uniformity* yang memiliki nilai *outer loading* di bawah 0,55 pada pengukuran awal. Peningkatan validitas konstruk dialog komunitas terutama didorong oleh meningkatnya kontribusi indikator pelibatan *stakeholders* (0,555 menjadi 0,816), klarifikasi persepsi (0,691 menjadi 0,787), dan penetapan tujuan (0,557 menjadi 0,686). Konstruk peran penyuluh, keputusan adopsi inovasi, dukungan pemerintah, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dan aksi kolektif tetap memenuhi validitas konvergen sejak evaluasi awal dengan nilai AVE berkisar 0,566-0,847 serta seluruh indikator memiliki *outer loading* di atas 0,55. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model pengukuran CFSC di Desa Bangsring telah memenuhi kriteria validitas konvergen dan layak digunakan pada analisis model struktural berikutnya.

Khusus konstruk *groupthink* dan indikator opsional serta otoritas pada konstruk keputusan adopsi inovasi, meskipun mengalami kenaikan nilai AVE dan nilai *outer loading*, peneliti tetap memutuskan untuk melakukan eliminasi. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kesetaraan (*comparability*) model pengukuran antara Desa Kawali dan Desa Bangsring dalam analisis *Partial Least Squares Multi-Group Analysis* (PLS-MGA). Penyamaan konstruk yang dianalisis pada kedua kelompok diperlukan agar perbandingan hubungan antarvariabel dilakukan pada model yang memiliki spesifikasi yang sama, sehingga hasil perbandingan antar kelompok dapat diinterpretasikan secara lebih konsisten dan valid. Artinya variabel yang akan digunakan untuk analisis lanjut adalah peran penyuluh, dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dialog komunitas dan aksi kolektif sebagaimana Gambar 31.

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas diskriminan untuk memastikan setiap konstruk memiliki perbedaan yang empiris. Kriteria ini terpenuhi apabila nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasinya dengan konstruk lain. Hasil uji *Fornell-Larcker criterion* sebagaimana tersaji pada Tabel 26 di bawah.



Gambar 31 Model struktural komunikasi partisipatif Desa Kawali

Tabel 26 Nilai *Fornell–Larcker criterion* pelaksanaan SFV di Desa Bangsring

Variabel	Aksi Kolektif	Dialog Komunitas	Dukungan Pemerintah	Keputusan Inovasi	Komunikasi Kepemimpinan	Modal Sosial	Peran Penyuluh
Aksi Kolektif	0,752						
Dialog Komunitas	0,707	0,690					
Dukungan Pemerintah	0,327	0,393	0,834				
Keputusan Inovasi	0,476	0,545	0,498	0,759			
Komunikasi Kepemimpinan	0,626	0,669	0,671	0,697	0,920		
Modal Sosial	0,592	0,675	0,564	0,630	0,641	0,850	
Peran Penyuluh	0,459	0,451	0,556	0,656	0,622	0,463	0,871

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria validitas diskriminan. Konstruk aksi kolektif memiliki nilai akar kuadrat AVE sebesar 0,752, lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan dialog komunitas (0,707), komunikasi kepemimpinan (0,626), modal sosial (0,592), keputusan adopsi inovasi (0,476), peran penyuluh (0,459), dan dukungan pemerintah (0,327). Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh konstruk dialog komunitas (0,690), dukungan pemerintah (0,834), keputusan adopsi inovasi (0,759), komunikasi kepemimpinan (0,920), modal sosial (0,850), dan peran penyuluh (0,871), yang seluruhnya memiliki nilai diagonal lebih besar daripada korelasinya dengan konstruk lain dalam model.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat diskriminasi yang baik dan mampu merepresentasikan konsep yang diukur secara lebih kuat dibandingkan hubungannya dengan konstruk lain. Hasil ini menegaskan bahwa model pengukuran CFSC di Desa Bangsring telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode *fornell-larcker* sehingga seluruh konstruk memiliki keunikan konseptual yang memadai untuk dianalisis pada tahap evaluasi reliabilitas konstruk.

Tabel 27 Nilai *Cronbach's alpha* dan *composite reliability* di Desa Bangsring

Konstruk	CA	rho_A	rho_C
Peran penyuluh	0,893	0,957	0,925
Keputusan inovasi	0,556	0,584	0,815
Dukungan pemerintah	0,856	0,900	0,901
Komunikasi kepemimpinan	0,909	0,915	0,943
Modal sosial	0,811	0,832	0,887
Dialog komunitas	0,876	0,880	0,900
Aksi kolektif	0,809	0,820	0,867

Pengujian reliabilitas konstruk dilakukan menggunakan CA, rho_A, dan CR dengan nilai acuan $\geq 0,70$, sedangkan CR dan rho_A lebih

direkomendasikan dalam PLS-SEM karena memperhitungkan variasi *outer loading* antarindikator sehingga menghasilkan estimasi konsistensi internal yang lebih akurat (Hair *et al.* 2017). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai CR di atas 0,80, yaitu berkisar antara 0,815–0,943, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliabel. Konstruk peran penyuluh (CR = 0,925), dukungan pemerintah (CR = 0,901), komunikasi kepemimpinan (CR = 0,943), modal sosial (CR = 0,887), dialog komunitas (CR = 0,900), dan aksi kolektif (CR = 0,867) juga didukung oleh nilai CA dan rho_A di atas 0,70 yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi. Konstruk keputusan adopsi inovasi memiliki nilai CA (0,556) dan rho_A (0,584) yang berada di bawah ambang umum, namun tetap dinyatakan reliabel berdasarkan nilai CR sebesar 0,815. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variasi kontribusi *outer loading* antarindikator menyebabkan asumsi *tau-equivalence* pada CA tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga CR menjadi ukuran reliabilitas yang lebih tepat dalam model PLS-SEM (Hair *et al.* 2017). Secara keseluruhan, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk pada model CFSC di Desa Bangsring memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan pada analisis *inner model*.

6.4.2 Evaluasi *inner model* komunikasi partisipatoris di Desa Bangsring

Setelah model pengukuran (*outer model*) memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, evaluasi dilanjutkan pada model struktural (*inner model*) untuk menganalisis hubungan antarvariabel laten eksogen dan endogen dalam model CFSC (Narimawati *et al.* 2020). Analisis dilakukan menggunakan model hasil pemurnian sehingga estimasi hubungan dapat diinterpretasikan secara akurat. Evaluasi *inner model* mencakup koefisien determinasi (R^2), *effect size* (f^2), koefisien jalur (*path coefficient*), dan signifikansi *bootstrapping*.

Tabel 28 Nilai *R Square* (R^2) SFV di Desa Bangsring

Variabel Endogen	R^2	Interpretasi
Aksi kolektif	0,510	Moderat
Dialog komunitas	0,612	Kuat

Tabel 28 menunjukkan bahwa konstruk dialog komunitas memiliki R^2 sebesar 0,612 (kuat), sehingga peran penyuluh, dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, dan komunikasi kepemimpinan menjelaskan 61,2 persen variasi dialog komunitas pada program SFV di Desa Bangsring. Konstruk aksi kolektif memiliki R^2 sebesar 0,510 (moderat), menunjukkan dialog komunitas menjelaskan 51,0 persen variasi aksi kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa model CFSC memiliki daya jelas yang baik dalam menjelaskan mekanisme pembentukan dialog komunitas dan aksi kolektif.

Selain melihat nilai R^2 , uji *inner model* juga ditinjau melalui ukuran efek (*effect size* / f^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing hubungan variabel dalam model. Nilai f^2 menunjukkan sejauh mana perubahan pada variabel eksogen memengaruhi variabel endogen ketika variabel tersebut dimasukkan atau dikeluarkan dari model (Tabel 29). Analisis *effect size* menunjukkan bahwa pembentukan dialog komunitas di

Desa Bangsring sangat didominasi oleh komunikasi kepemimpinan ($f^2 = 0,402$). Nilai tersebut berada pada kategori besar, sedangkan variabel lain seperti dukungan pemerintah ($f^2 = 0,029$) dan keputusan adopsi inovasi ($f^2 = 0,019$) hanya memberikan kontribusi yang kecil. Bahkan, peran penyuluh tidak menunjukkan pengaruh terhadap pembentukan dialog komunitas ($f^2 = 0,000$). Temuan ini menunjukkan bahwa berkembangnya dialog masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin lokal dalam membangun arah, makna, dan koordinasi bersama dibandingkan oleh intervensi aktor eksternal.

Tabel 29 Nilai f^2 square (f^2) SFV di Desa Bangsring

Hubungan	f^2	Interpretasi
Dukungan pemerintah → Dialog komunitas	0,029	Kecil
Keputusan inovasi → Dialog komunitas	0,019	Sangat kecil
Komunikasi kepemimpinan → Dialog komunitas	0,402	Besar
Peran penyuluh → Dialog komunitas	0,000	Tidak ada efek
Dialog komunitas → Aksi kolektif	0,682	Besar
Modal sosial → Aksi kolektif	0,019	Sangat kecil

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian kualitatif yang menunjukkan bahwa *local champion* menjadi aktor sentral dalam pembangunan SFV di Desa Bangsring. Kepemimpinan tidak hanya berfungsi mengoordinasikan kegiatan, tetapi juga membangun makna kolektif mengenai pentingnya konservasi sebagai fondasi keberlanjutan ekonomi masyarakat. Sehingga komunikasi kepemimpinan berperan sebagai katalis internal yang menggerakkan masyarakat untuk berdialog, membangun kesepahaman, dan menyepakati berbagai aksi kolektif.

Pada tahap berikutnya, dialog komunitas memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan aksi kolektif ($f^2 = 0,682$). Nilai tersebut merupakan *effect size* terbesar dalam keseluruhan model sehingga menunjukkan bahwa kualitas dialog menjadi faktor utama transformasi berbagai gagasan, aspirasi, dan kesepakatan menjadi tindakan bersama. Temuan tersebut mengonfirmasi proposisi utama Figueroa *et al.* (2002) bahwa dialog merupakan mekanisme inti dalam proses perubahan sosial karena mampu membangun rasa memiliki (*sense of belonging*), meningkatkan komitmen bersama, serta mendorong masyarakat melaksanakan hasil kesepakatan secara sukarela.

Sebaliknya, modal sosial hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pembentukan aksi kolektif ($f^2 = 0,019$). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi kolektif di Desa Bangsring tidak terutama digerakkan oleh hubungan sosial horizontal, melainkan lebih banyak ditopang oleh sistem organisasi yang telah terinstitusionalisasi. Berbagai mekanisme formal, seperti SOP, AD/ART, pembagian tugas, sistem monitoring, serta kepemimpinan yang kuat, berfungsi menggantikan sebagian peran modal sosial dalam mengoordinasikan tindakan bersama. Dengan demikian, keberhasilan aksi kolektif di Desa Bangsring lebih banyak bertumpu pada kapasitas kelembagaan dibandingkan kekuatan relasi sosial antarmasyarakat.

Secara keseluruhan, evaluasi model struktural menunjukkan bahwa model CFSC mampu menjelaskan proses pembentukan dialog komunitas dengan baik di Desa Bangsring. Komunikasi kepemimpinan menjadi faktor utama yang mendorong terbentuknya dialog, sedangkan dialog komunitas berperan sebagai mekanisme sentral yang menggerakkan aksi kolektif masyarakat. Namun demikian, moderatnya kemampuan model dalam menjelaskan aksi kolektif serta sangat kecilnya kontribusi modal sosial menunjukkan bahwa keberhasilan program SFV di Desa Bangsring tidak hanya dipengaruhi oleh proses komunikasi partisipatif, tetapi juga oleh kekuatan kelembagaan, kepemimpinan lokal, dan tata kelola organisasi yang telah berkembang secara mapan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan model CFSC pada konteks masyarakat yang telah memiliki kelembagaan kuat perlu mempertimbangkan peran institusi lokal sebagai faktor penting dalam mendorong perubahan sosial.

6.4.3 Pengujian hipotesis penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dugaan penelitian dengan kondisi empiris di Desa Bangsring. Menurut Narimawati *et al.* (2020), pengujian hipotesis dalam SEM-PLS dapat dilakukan melalui nilai *p-value* dan *t-statistik*, oleh karena itu hipotesis akan didasarkan pada keduanya. Sedangkan arah dan kekuatan pengaruh antar variabel dilihat melalui koefisien jalur (β). Hipotesis akan ditolak jika hubungan antar variabel dinyatakan tidak signifikan ($p\text{-value} > 0,05$) dan koefisien jalur (β) negatif. Namun jika hubungan antar variabel signifikan ($p\text{-value} < 0,05$) dan koefisien jalur (β) positif maka hipotesis diterima. Hasil pengujian masing-masing hipotesis disajikan pada Tabel 30 sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.

Tabel 30 Koefisien jalur dan hasil *bootstrapping* SFV di Desa Bangsring

Variabel	<i>p-value</i>	<i>t-statistik</i>	β	Keterangan (jalur)
X1 → Y1	0,907	0,117	0,014	Tidak signifikan (+)
X2 → Y1	0,243	1,168	-0,156	Tidak signifikan (-)
X3 → Y1	0,467	0,728	0,103	Tidak signifikan (+)
X4 → Y1	0,000	4,370	0,695	Signifikan (+)
X6 → Y2	0,231	1,198	0,125	Tidak signifikan (+)
Y1 → Y2	0,000	8,865	0,692	Signifikan (+)

Keterangan: X1=peran penyuluh, X2=dukungan pemerintah, X3=keputusan adopsi inovasi, X4=kommunikasi kepemimpinan, X6=modal sosial, Y1= dialog komunitas, Y2=aksi kolektif

- (a) Pengaruh peran penyuluh terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring
- Bagian ini menjawab hipotesis mengenai pengaruh peran penyuluh terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring. Hasil pengujian SEM-PLS menunjukkan bahwa peran penyuluh tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap dialog komunitas ($\beta = 0,014$; $t = 0,117$; $p = 0,907$), sehingga hipotesis pertama ditolak. Nilai koefisien jalur yang sangat kecil menunjukkan bahwa variasi peran penyuluh tidak menjadi faktor yang menjelaskan terbentuknya dialog komunitas pada pelaksanaan program SFV di Desa Bangsring. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dialog komunitas berkembang terutama melalui kapasitas internal masyarakat yang

terbentuk dari pengalaman panjang mengelola konservasi pesisir, kepemimpinan *local champion*, serta kelembagaan kelompok yang telah mengakar. Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena kesadaran terhadap kerusakan ekosistem, pembentukan Zona Pemanfaatan Bersama (ZPB), penyusunan visi konservasi, hingga pelaksanaan forum rutin kelompok yang telah berlangsung sebelum implementasi program SFV sehingga legitimasi untuk berdialog melekat pada struktur sosial dan kepemimpinan lokal, bukan pada keberadaan penyuluh sebagai penggerak utama.

Di Desa Bangsring, penyuluh tetap menjalankan fungsi sebagai komunikator, edukator, motivator, dan terutama fasilitator yang menghubungkan kelompok dengan pemerintah maupun berbagai mitra pembangunan. Masyarakat memanfaatkan penyuluh untuk memperoleh akses pendanaan, pelatihan, teknologi, jejaring, serta informasi program, sementara proses dialog identifikasi masalah, penetapan prioritas kebutuhan, dan pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui dialog internal kelompok. Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan Ketua Pokmaswas GWD yang menyebutkan bahwa penyuluh dipandang sebagai mitra pelaksanaan Program SFV, bukan penggerak lahirnya gerakan konservasi.

Fungsi penyuluh lebih diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelompok daripada membangun dialog itu sendiri. Mekanisme ini menjelaskan mengapa masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan kebutuhan prioritas sebelum mengajukan usulan kepada pemerintah ketika terdapat keterbatasan anggaran atau program. Proses tersebut justru memperkuat dialog internal sekaligus menunjukkan bahwa keberlangsungan dialog tidak bergantung pada intensitas fasilitasi penyuluh.

Temuan ini sejalan dengan Rogers (1983) yang menjelaskan bahwa berkembangnya kapasitas masyarakat menyebabkan peran penyuluh profesional bergeser dari penggerak utama menjadi pendamping yang memperkuat kemampuan komunitas. Fungsi tersebut secara bertahap diambil alih oleh *aides* atau aktor lokal yang memiliki legitimasi sosial, kedekatan budaya, dan kepercayaan masyarakat. Perspektif CFSC (Figueroa *et al.* 2002) juga menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi partisipatif ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat membangun dialog secara mandiri melalui kapasitas lokal yang berkelanjutan. Dalam konteks Desa Bangsring, fungsi katalis eksternal yang semula melekat pada penyuluh telah banyak dijalankan oleh *local champion* beserta kelembagaan kelompok yang berkembang dari pengalaman konservasi selama bertahun-tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penolakan hipotesis pertama bukan menggambarkan rendahnya peran penyuluh, melainkan mencerminkan kematangan kelembagaan masyarakat yang telah mampu mempertahankan dialog komunitas secara mandiri. Penguatan kapasitas penyuluh selanjutnya perlu diarahkan pada perluasan akses jejaring, inovasi, dan sumber daya strategis sehingga mampu melengkapi kapasitas lokal tanpa mengurangi kemandirian dialog yang telah berkembang di Desa Bangsring.

(b) Pengaruh dukungan pemerintah terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring

Bagian ini menjelaskan hipotesis pengaruh dukungan pemerintah terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap dialog komunitas ($p = 0,243$; $t = 1,168$; $\beta = -0,156$). Oleh karena itu, hipotesis 2 ditolak.

Di sisi lain, pemerintah tetap berperan penting dalam memperkuat pelaksanaan program SFV melalui pendanaan, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi teknologi, dan sistem informasi desa. Dukungan ini diwujudkan dalam berbagai sarana konservasi dan ekonomi seperti keramba jaring apung, rumah tukik, *coral dome*, peralatan UMKM, serta pelatihan, promosi wisata digital, dan pendampingan kelembagaan. Seluruh bentuk dukungan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap intensitas dialog komunitas. Hal ini karena dialog di Desa Bangsring telah terbentuk secara mandiri sebelum program SFV, terutama dalam merespons *destructive fishing* dan pengelolaan konservasi. Akibatnya, bantuan pemerintah hanya masuk ke dalam sistem yang sudah mapan, bukan memicu dialog baru.

Selain itu, penyaluran bantuan yang bersifat topdown melalui ketua kelompok dan *local champion* lebih berfokus pada aspek teknis dan material, bukan fasilitasi komunikasi. Sehingga meskipun kapasitas meningkat, pola dan intensitas dialog tidak berubah signifikan. Temuan ini sejalan dengan Abramova (2019) dan Li *et al.* (2023) yang menekankan peran pemerintah sebagai penguat kapasitas melalui sumber daya dan kebijakan. Di Bangsring, pemerintah mempercepat implementasi program tanpa membentuk ulang proses dialog yang sudah mandiri, sehingga dukungan lebih berperan sebagai akselerator pembangunan daripada pembentuk komunikasi partisipatif.

(c) Pengaruh keputusan adopsi inovasi terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring

Bagian ini menjawab hipotesis mengenai pengaruh keputusan adopsi inovasi terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring. Hasil pengujian SEM-PLS menunjukkan bahwa keputusan adopsi inovasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap dialog komunitas ($\beta = 0,103$; $t = 0,728$; $p = 0,467$), sehingga hipotesis ketiga ditolak. Nilai koefisien jalur yang positif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa keputusan adopsi inovasi mendukung dialog komunitas, namun kontribusinya belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi dialog secara struktural. Menurut Figueroa *et al.* (2002), keputusan adopsi inovasi merupakan salah satu katalis internal yang memengaruhi dialog komunitas. Namun, temuan tersebut mengindikasikan bahwa keputusan adopsi inovasi bukan faktor utama pembentuk dialog komunitas karena proses komunikasi partisipatif telah berkembang lebih dahulu sebagai bagian dari kehidupan organisasi masyarakat. Sehingga dialog di Desa Bangsring tidak muncul sebagai konsekuensi dari keputusan menerima inovasi, tetapi justru menjadi mekanisme yang melahirkan berbagai inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Inovasi di Desa Bangsring berkembang dari pengalaman kolektif masyarakat dalam mengatasi *destructive fishing* dan memulihkan ekosistem pesisir. Berbagai inovasi teknis, seperti transplantasi terumbu karang, pengembangan *coral dome*, rumah tukik, hingga pengelolaan wisata

konservasi, lahir sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pada tingkat kelembagaan, masyarakat juga membangun Zona Pemanfaatan Bersama (ZPB) sebagai inovasi sosial dalam pengelolaan kawasan konservasi. Proses tersebut memperlihatkan bahwa keputusan adopsi inovasi lebih banyak diarahkan untuk menyempurnakan praktik konservasi yang telah berjalan daripada menentukan penerimaan terhadap inovasi baru. Kondisi tersebut tercermin dari pernyataan Sekretaris Pokmaswas Bhakti Abadi Laut yang menyatakan bahwa kegiatan konservasi terus dilakukan pada sistem dan kawasan yang sama dengan penyesuaian lokasi sesuai kebutuhan lapangan.

Temuan ini juga didukung oleh karakteristik pengambilan keputusan adopsi inovasi di Desa Bangsring yang didominasi oleh keputusan kolektif serta diperkuat oleh pengalaman keberhasilan konservasi sebelumnya. Forum kelompok tetap menjadi ruang utama untuk membahas berbagai inovasi, namun diskusi yang berlangsung lebih diarahkan pada penyesuaian implementasi dibandingkan menentukan apakah inovasi akan diterima atau ditolak. Keputusan strategis juga diawali oleh ketua kelompok dan *local champion* yang menyeleksi kesesuaian inovasi dengan visi konservasi sebelum dibawa ke forum kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan dialog berlangsung secara kontinu tanpa bergantung pada munculnya inovasi baru. Rogers (2003) menjelaskan bahwa keputusan adopsi inovasi merupakan proses yang dipengaruhi pengalaman adopsi sebelumnya, sedangkan CFSC (Figueroa *et al.* 2002) menempatkan keputusan adopsi inovasi sebagai salah satu katalis internal dialog komunitas. Di Desa Bangsring, pengalaman panjang masyarakat dalam mengembangkan konservasi telah mengubah fungsi keputusan adopsi inovasi dari pemantik dialog menjadi hasil dari proses dialog yang telah berlangsung secara berkelanjutan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa penolakan hipotesis ketiga bukan berarti inovasi tidak penting bagi Program SFV, melainkan mencerminkan bahwa budaya berdialog telah terinstitusionalisasi sehingga inovasi berkembang sebagai produk pembelajaran kolektif yang terus disempurnakan melalui pengalaman lapangan.

(d) Pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas di Desa Bangsring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap dialog komunitas ($p = 0,000$; $t = 4,370$; $\beta = 0,695$). Oleh karena itu, hipotesis 4 diterima di Desa Bangsring. Temua ini menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan merupakan faktor utama yang membentuk dialog komunitas di Desa Bangsring. Sebagaimana Figueroa *et al.* (2002) memandang kepemimpinan sebagai kemampuan menciptakan ruang dialog bersama.

Nilai koefisien jalur yang tinggi menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan merupakan faktor yang paling kuat dalam membentuk dialog komunitas dibandingkan variabel lainnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan dialog komunitas di Desa Bangsring lebih banyak

ditentukan oleh kemampuan pemimpin membangun makna bersama, mengarahkan aksi kolektif, serta menjaga kohesi organisasi daripada oleh faktor-faktor eksternal seperti penyuluh, dukungan pemerintah, maupun keputusan adopsi inovasi. Hasil tersebut sejalan dengan CFSC yang menempatkan kepemimpinan sebagai salah satu katalis utama yang menciptakan ruang dialog dan menggerakkan masyarakat menuju aksi kolektif (Figueroa *et al.* 2002).

Stogdill (1950) dan Maxwell (1930) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Di Desa Bangsring pengaruh komunikasi kepemimpinan tidak terlepas dari kemampuan *local champion* mentransformasikan pengalaman menghadapi *destructive fishing* menjadi visi bersama mengenai konservasi pesisir. Komunikasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi membangun *meaning-making* yang menghubungkan keberlanjutan ekosistem dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Narasi "*jika konservasi bagus, pariwisata jalan, jika konservasi rusak, kita mati*" menjadi kerangka berpikir bersama yang membentuk kesadaran bahwa konservasi merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Kesamaan makna tersebut kemudian mempermudah anggota kelompok menyepakati tujuan organisasi, menerima aturan bersama, serta berpartisipasi dalam dialog untuk menentukan berbagai keputusan strategis. Mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa komunikasi kepemimpinan menjadi faktor yang paling kuat memengaruhi dialog komunitas di Desa Bangsring.

Komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme utama kontrol sosial. Ketua kelompok berperan sebagai *gatekeeper* karena berbagai keputusan strategis, seperti pemilihan program, penentuan mitra, penyusunan visi organisasi, aturan kelompok, sistem sanksi, pembagian jadwal kerja, hingga sistem *rolling* kapal wisata ditentukan oleh ketua kelompok. Seluruh keputusan tersebut kemudian dilegitimasi melalui AD/ART maupun SOP organisasi.

Meskipun ruang kontrol keputusan lebih banyak berada pada pemimpin, sebagian besar anggota tetap menilai kepemimpinan tersebut efektif. Sekitar 90 persen anggota SFV menyatakan bahwa ketua kelompok mampu memberikan arahan yang jelas, dukungan moral maupun material, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan konservasi. Selain itu, pemimpin juga dipandang mampu menyelesaikan konflik internal kelompok melalui mekanisme musyawarah sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris Pokmaswas.

"Kalau ada masalah, biasanya kami bertiga (pimpinan kelompok) yang duduk bersama. Kalau perlu, bisa diskusi berempat, maksudnya ditambah dengan anggota yang sedang bermasalah. Tapi kalau mereka ingin semuanya dijelaskan ke seluruh anggota, tidak masalah juga." (RZA, Perempuan, 27 Tahun)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Kepemimpinan di Desa Bangsring, mencerminkan kepemimpinan efektif yang dijelaskan oleh Mikkola (2019) bahwa kepemimpinan yang berhasil adalah pemimpin mampu menetapkan agenda, meringkai tujuan kerja, serta mendorong perubahan sosial yang lebih berkelanjutan, khususnya dalam konteks pembangunan pedesaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan tidak hanya membangun koordinasi organisasi, tetapi juga menjadi sumber legitimasi sosial yang menjaga keberlangsungan dialog komunitas.

(e) Pengaruh dialog komunitas terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh dialog komunitas terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dialog komunitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap aksi kolektif ($p = 0,000$; $t = 8,865$; $\beta = 0,692$). Oleh karena itu, hipotesis 5 diterima di Desa Bangsring. Sejalan dengan temuan tersebut, Obiakor *et al.* (2025) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif mampu memperkuat aksi kolektif, meningkatkan transparansi, dan membangun kapasitas masyarakat dalam pembangunan. Menurut Figueroa *et al.* (2002), dialog komunitas merupakan mekanisme utama yang menghubungkan komunikasi dengan perubahan sosial melalui aksi kolektif. Melalui dialog, masyarakat dapat mengenali permasalahan bersama, membangun kesepahaman, menyusun aturan, hingga mengorganisasikan aksi kolektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dialog komunitas di Desa Bangsring diawali oleh kesadaran masyarakat terhadap ancaman *destructive fishing* yang disampaikan oleh *local champion*. Kesadaran tersebut berkembang menjadi proses identifikasi masalah, penyusunan visi konservasi, penetapan tujuan bersama, pembagian tanggung jawab, hingga pelembagaan berbagai aturan konservasi. Dialog tidak hanya menghasilkan kesepakatan bersama, tetapi juga membentuk sistem organisasi yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan SFV.

Pengaruh dialog terhadap aksi kolektif terlihat pada perubahan perilaku masyarakat, pembentukan aturan kelembagaan, serta spesialisasi peran antarorganisasi. Dialog berhasil mengubah pelaku *destructive fishing* menjadi pelaku konservasi melalui proses penyadaran ekologis dan konsolidasi nilai bersama. Selain itu, dialog menghasilkan berbagai aturan formal, seperti Zona Perlindungan Bersama (ZPB), AD/ART organisasi, dan SOP kelompok yang mengatur hak, kewajiban, pembagian tugas, serta mekanisme pengelolaan konservasi. Aturan tersebut dilengkapi dengan sistem *reward*, *punishment*, dan *charity* yang menjadi dasar pengendalian perilaku anggota. Dialog juga menghasilkan pembagian fungsi yang jelas antara pokmaswas, pokdakan, dan poklahsar sehingga setiap kelompok memiliki peran yang spesifik dalam mendukung pelaksanaan program SFV. Sejalan dengan itu, Oseni (2024) menjelaskan bahwa dialog memungkinkan masyarakat menyusun solusi lokal melalui proses negosiasi bersama.

Meskipun demikian, akses dan kontrol terhadap proses dialog maupun pelaksanaan aksi kolektif masih relatif terpusat pada pimpinan kelompok. Evaluasi partisipatif lebih banyak dilakukan secara terbatas antara ketua kelompok, penyuluh, dan tokoh inti komunitas. Struktur kepemimpinan

organisasi juga cenderung berputar pada aktor yang sama di berbagai kelembagaan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Koperasi SFV berikut.

“Banyak kelompok dan (ketuanya) diputar-putar saja...saya ketua BUMDES. Saya ketua Pokdarwis, saya Ketua Lembaga Desa Wisata, dan saya Ketua Koperasi, bukan Merah Putih, Koperasi SFV.” (SKR, Laki-laki, 52 Tahun)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dialog komunitas di Desa Bangsring berhasil membangun aksi kolektif yang terorganisasi, disiplin, dan memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat. Namun, efektivitas tersebut masih diikuti oleh konsentrasi akses dan kontrol pada elite inti komunitas sehingga distribusi pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung secara setara di antara seluruh anggota kelompok.

(f) Pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring

Bagian ini menjawab hipotesis pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring. Hasil pengujian menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap aksi kolektif ($p = 0,231$; $t = 1,198$; $\beta = 0,125$). Oleh karena itu, hipotesis 6 ditolak di Desa Bangsring.

Di Desa Kawali, modal sosial lebih bersifat sentralis pada pemimpin. Dale dan Newman (2008) menjelaskan bahwa modal sosial yang bertumpu pada hubungan vertikal dan akses kelembagaan cenderung menghasilkan pola kolektivitas yang lebih terorganisasi, tetapi juga lebih tersentralisasi. Menurut Zhao *et al.* (2025) efektivitas modal sosial semakin meningkat apabila didukung oleh kepemimpinan lokal yang memperoleh kepercayaan masyarakat, karena mampu memobilisasi partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi antarpihak, serta memfasilitasi penyelesaian konflik sehingga aksi kolektif dapat berlangsung secara lebih efektif.

Norma sosial di Desa Bangsring berkembang menjadi aturan tertulis dan berbagai tidak tertulis misalkan prinsip “ambil satu ganti sepuluh” dan budaya “manut” terhadap keputusan organisasi. Norma membentuk disiplin kolektif dalam menjalankan kegiatan konservasi, tetapi sekaligus memperkuat konsentrasi pengambilan keputusan pada pimpinan kelompok. Selain itu, masyarakat Desa Bangsring juga memiliki system kepercayaan yang sangat kuat kepada ketua kelompok. Menurut Zhou dan de Vries (2022) kepercayaan dipandang sebagai fondasi utama terbentuknya aksi kolektif karena mampu mengurangi ketidakpastian dan risiko. Masyarakat Desa Bangsring percaya bahwa pemimpin mereka mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, mengurangi ketidakpastian ekonomi dan menekan risiko ekologi.

Temuan di atas menunjukkan bahwa modal sosial telah terintegrasi ke dalam sistem kepemimpinan, aturan organisasi, dan mekanisme kelembagaan sehingga tidak lagi menjadi faktor yang secara langsung menentukan pelaksanaan aksi kolektif. Aktivitas kolektif lebih banyak berjalan karena adanya struktur organisasi, pembagian tugas, serta kepatuhan terhadap aturan yang telah dilembagakan.

VII PERBANDINGAN KOMUNIKASI PARTISIPATORIS DUA DESA BERDASARKAN *MULTI-GROUP ANALYSIS*

Model CFSC mampu menjelaskan proses komunikasi partisipatif dalam program SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring, dengan kekuatan hubungan antarvariabel yang berbeda pada masing-masing desa berdasarkan hasil SEM-PLS. Perbedaan koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel dalam model CFSC dapat bekerja secara berbeda sesuai dengan kondisi sosial masing-masing desa sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan signifikansi statistik perbedaannya. *Multi-group analysis* (MGA) digunakan sebagai analisis lanjutan SEM-PLS untuk menguji perbedaan hubungan antarvariabel model CFSC antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. MGA mengidentifikasi perbedaan model penelitian berdasarkan kelompok melalui perbandingan estimasi *bootstrapping* pada parameter yang sama antarkelompok (Matthews 2017; Hair *et al.* 2022). Analisis SEM-PLS menguji signifikansi dan arah hubungan antarvariabel pada masing-masing kelompok, sedangkan MGA menguji signifikansi statistik perbedaan koefisien jalur antarkelompok. Pengujian ini berfokus pada perbedaan hubungan antarvariabel dalam model CFSC yang bekerja pada kondisi sosial masing-masing desa, sehingga hasilnya dapat menjelaskan variasi mekanisme komunikasi partisipatif antara Desa Kawali dan Desa Bangsring.

7.1 Uji *Measurement Invariance of Composite Models* (MICOM)

Perbandingan antarkelompok melalui MGA memerlukan pengujian kesetaraan pengukuran untuk memastikan bahwa seluruh konstruk memiliki makna pengukuran yang setara di Desa Kawali dan Desa Bangsring. Kesetaraan tersebut diperlukan agar perbedaan koefisien jalur merepresentasikan perbedaan hubungan antarvariabel pada masing-masing desa secara tepat. Pengujian dilakukan menggunakan *measurement invariance of composite models* (MICOM) yang dikembangkan oleh Henseler *et al.* (2016) untuk menilai kesetaraan pengukuran konstruk antarkelompok. MICOM mencakup tiga tahapan pengujian, yaitu *compositional invariance* (Step 2), *equality of composite means* (Step 3a), dan *equality of composite variances* (Step 3b). Ketiga tahapan tersebut masing-masing menguji kesetaraan pembentukan konstruk, nilai rata-rata, dan varians antarkelompok sehingga konstruk yang digunakan memiliki dasar pengukuran yang dapat diperbandingkan dan hasil MGA dapat diinterpretasikan secara valid.

a) *Compositional Invariance* (Step 2)

Tahap *compositional invariance* bertujuan menguji apakah komposit konstruk pada kedua kelompok dibentuk oleh indikator-indikator yang memiliki komposisi yang sama. Pengujian ini memastikan bahwa setiap variabel laten, seperti dialog komunitas, modal sosial, maupun komunikasi kepemimpinan, merepresentasikan konsep yang sama di Desa Kawali dan Desa Bangsring. Kesetaraan komposisi menjadi syarat utama agar perbedaan hasil MGA benar-benar mencerminkan perbedaan hubungan antarvariabel, bukan akibat perbedaan cara konstruk dibentuk (Henseler *et al.* 2016; Hair *et al.* 2022).

Tabel 31 *Compositional invariance (step 2)* Desa Kawali dan Desa Bangsring

Variabel	<i>Original correlation</i>	<i>Correlation permutation mean</i>	<i>5.0 persen</i>	<i>Permutation p value</i>
Aksi kolektif	0,993	0,993	0,982	0,403
Dialog komunitas	0,992	0,994	0,985	0,254
Dukungan pemerintah	0,995	0,984	0,952	0,740
Keputusan inovasi	0,960	0,972	0,889	0,234
Komunikasi kepemimpinan	1,000	0,999	0,996	0,738
Modal sosial	0,995	0,995	0,984	0,363
Peran penyuluh	0,985	0,970	0,932	0,360

Hipotesis pada tahap ini menyatakan bahwa komposisi konstruk antar kelompok adalah sama. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi *compositional invariance* apabila nilai korelasi asli (*original correlation*) lebih besar atau sama dengan batas bawah interval kepercayaan hasil permutation (5 persen), atau secara ekuivalen nilai *permutation p-value* lebih besar dari 0,05 (Henseler *et al.* 2016; Winton dan Sabol 2021). Hasil pengujian Tabel 31 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi kriteria tersebut. Nilai *original correlation* seluruh variabel berada pada kisaran 0,960-1,000 dan seluruhnya lebih besar daripada batas bawah interval kepercayaan permutation. Selain itu, seluruh *permutation p-value* juga lebih besar dari 0,05, yaitu berkisar antara 0,234 hingga 0,740. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komposit konstruk pada Desa Kawali dan Desa Bangsring dibentuk dengan cara yang setara. Oleh karena itu, tahap *compositional invariance* berhasil dipenuhi. Dengan terpenuhinya *compositional invariance* pada seluruh konstruk, penelitian ini telah memenuhi syarat partial measurement invariance sehingga analisis MGA dapat dilanjutkan secara sah (Henseler *et al.* 2016).

b) *Equality of composite means (step 3a)*

Tahap berikutnya bertujuan menguji apakah rata-rata (*composite means*) setiap konstruk berbeda secara signifikan antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. Pengujian ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui desa mana yang memiliki nilai lebih tinggi, melainkan memastikan bahwa perbedaan rata-rata konstruk tidak menyebabkan bias ketika koefisien jalur dibandingkan melalui MGA. Interpretasi dilakukan dengan melihat apakah nilai *original difference* berada di dalam interval kepercayaan permutation (2,5 persen-97,5 persen). Apabila nilai tersebut berada di dalam interval atau *permutation p-value* lebih besar dari 0,05, maka rata-rata konstruk dianggap tidak berbeda secara signifikan antar kelompok (Henseler *et al.* 2016).

Hasil pengujian pada Tabel 32 menunjukkan bahwa hampir seluruh konstruk memenuhi asumsi kesetaraan rata-rata, meliputi aksi kolektif, dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dan peran penyuluh, yang ditunjukkan oleh nilai *original difference* dalam interval kepercayaan dan *permutation p-value* di atas 0,05. Konstruk dialog komunitas memiliki *original difference* sebesar -0,844 yang berada di luar interval kepercayaan (-0,314 hingga 0,318) dengan *permutation*

p-value sebesar 0,000, sehingga menunjukkan perbedaan rata-rata yang signifikan antara Desa Kawali dan Desa Bangsring.

Tabel 32 *Equality of composite means* (step 3a) Desa Kawali dan Desa Bangsring

Variabel	<i>Original difference</i>	<i>Permutation mean difference</i>	<i>2,5 persen</i>	<i>97,5 persen</i>	<i>Permutation p value</i>
Aksi kolektif	-0,073	0,001	-0,330	0,340	0,675
Dialog komunitas	-0,844	-0,002	-0,314	0,318	0,000
Dukungan pemerintah	0,038	-0,005	-0,345	0,332	0,831
Keputusan inovasi	-0,240	-0,005	-0,353	0,333	0,169
Komunikasi kepemimpinan	0,197	-0,003	-0,349	0,327	0,266
Modal sosial	0,193	-0,004	-0,349	0,330	0,275
Peran penyuluh	0,323	-0,003	-0,356	0,342	0,071

Hasil MICOM yang memenuhi *partial measurement invariance* menunjukkan bahwa konstruk dialog komunitas tetap memiliki kesetaraan pengukuran yang memadai untuk dibandingkan melalui MGA (Henseler *et al.* 2016), sedangkan perbedaan rata-ratanya mencerminkan variasi empiris tingkat dialog komunitas pada kedua desa. Temuan ini menjadi dasar penting dalam interpretasi MGA karena perbedaan hubungan antarvariabel perlu dibaca bersama dengan karakteristik empiris dan kondisi sosial masing-masing desa agar variasi mekanisme komunikasi partisipatif dapat dijelaskan secara tepat.

c) *Equality of composite variances* (step 3b)

Tahap terakhir bertujuan menguji apakah penyebaran data (*composite variances*) setiap konstruk relatif sama pada kedua kelompok. Kesetaraan varians menunjukkan bahwa tingkat keragaman jawaban anggota kelompok terhadap suatu konstruk tidak berbeda secara signifikan sehingga hasil perbandingan antar kelompok menjadi lebih dapat dipercaya. Interpretasi dilakukan dengan prinsip yang sama seperti tahap sebelumnya, yaitu membandingkan nilai *original difference* terhadap interval kepercayaan permutasi (2,5 persen-97,5 persen) serta memperhatikan nilai *permutation p-value*. Varians dinyatakan setara apabila nilai *original difference* berada di dalam interval kepercayaan atau *permutation p-value* lebih besar dari 0,05 (Henseler *et al.* 2016).

Hasil pengujian pada Tabel 33 menunjukkan bahwa sebagian besar konstruk memenuhi asumsi kesetaraan varians, meliputi aksi kolektif, dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, komunikasi kepemimpinan, modal sosial, dan peran penyuluh, yang ditunjukkan oleh *permutation p-value* di atas 0,05. Hasil tersebut menunjukkan tingkat keragaman jawaban anggota kelompok yang relatif setara antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. Konstruk dialog komunitas memiliki *original difference* sebesar 0,734 yang berada di luar

interval kepercayaan (-0,577 hingga 0,534) dengan *permutation p-value* sebesar 0,010, sehingga menunjukkan perbedaan varians yang signifikan antara kedua desa.

Tabel 33 *Equality of composite variances* (step 3b) Desa Kawali dan Desa Bangsring

Variabel	<i>Original difference</i>	<i>Permutation mean difference</i>	2,5 persen	97,5 persen	<i>Permutation p value</i>
Aksi kolektif	0,174	-0,010	-0,654	0,663	0,640
Dialog komunitas	0,734	-0,007	-0,577	0,534	0,010
Dukungan pemerintah	-0,099	-0,014	-0,712	0,663	0,772
Keputusan inovasi	0,169	-0,015	-0,652	0,630	0,641
Komunikasi kepemimpinan	-0,034	-0,027	-0,978	0,993	0,948
Modal sosial	-0,539	-0,024	-0,913	0,926	0,438
Peran penyuluh	-0,539	-0,020	-0,756	0,666	0,140

Perbedaan varians tersebut menggambarkan variasi tingkat keragaman pengalaman dan persepsi anggota kelompok terhadap proses dialog komunitas yang dapat berkaitan dengan dinamika sosial, intensitas interaksi, dan pola komunikasi dalam pelaksanaan program SFV di masing-masing desa. Secara keseluruhan, hasil MICOM menunjukkan bahwa seluruh konstruk memenuhi *compositional invariance*, sedangkan kesetaraan rata-rata dan varians terpenuhi pada seluruh konstruk kecuali dialog komunitas. Terpenuhinya *compositional invariance* menunjukkan tercapainya *partial measurement invariance* sebagai syarat untuk melanjutkan MGA (Henseler *et al.* 2016), sehingga perbedaan koefisien jalur antarkelompok dapat diinterpretasikan sebagai perbedaan hubungan antarvariabel dalam model CFSC pada Desa Kawali dan Desa Bangsring.

7.2 Hasil *Permutation Multi-Group Analysis* Dua Desa

Terpenuhinya *partial measurement invariance* melalui prosedur MICOM menjadi dasar untuk melanjutkan analisis menggunakan *permutation multi-group analysis* (MGA). Metode *permutation MGA* dipilih karena mampu membangun distribusi empiris melalui proses permutasi untuk membandingkan dua kelompok tanpa mensyaratkan distribusi normal data. Karakteristik tersebut memungkinkan pengujian perbedaan koefisien jalur antara Desa Kawali dan Desa Bangsring secara tepat berdasarkan struktur data penelitian (Henseler *et al.* 2016; Hair *et al.* 2022; Cheah *et al.* 2023).

Pengujian *permutation MGA* dilakukan dengan 5.000 permutasi untuk membandingkan koefisien jalur setiap hubungan dalam model CFSC antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. Perbedaan hubungan antarvariabel dinyatakan signifikan apabila *permutation p-value* < 0,05, sedangkan nilai *permutation p-value* > 0,05 menunjukkan kesetaraan statistik koefisien

jalur antarkelompok (Henseler *et al.* 2016). Kriteria tersebut memungkinkan interpretasi MGA berfokus pada signifikansi perbedaan kekuatan hubungan antarvariabel antara kedua desa.

Tabel 34 Hasil *permutation multi-group analysis* (MGA) koefisien jalur program SFV di Desa Kawali dan Desa Bangsring

Hubungan Antar Variabel	Kawali (β)	Bangsring (β)	Selisih Koefisien	<i>Permutation p-value</i>	Keputusan
Peran penyuluh → dialog komunitas	-0,291	0,021	-0,312	0,119	Tidak berbeda
Dukungan pemerintah → dialog komunitas	0,571	-0,165	0,735	0,005	Berbeda
Keputusan inovasi → dialog komunitas	0,197	0,079	0,118	0,586	Tidak berbeda
Komunikasi kepemimpinan → dialog komunitas	0,218	0,745	-0,527	0,007	Berbeda
Dialog komunitas → aksi kolektif	0,491	0,698	-0,208	0,128	Tidak berbeda
Modal sosial → aksi kolektif	0,416	0,117	0,299	0,075	Tidak berbeda

Hasil *permutation* MGA pada Tabel 34 menunjukkan bahwa tidak seluruh hubungan dalam model CFSC mengalami perbedaan antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. Enam hubungan struktural yang diuji, hanya dua hubungan yang memiliki perbedaan koefisien jalur secara signifikan. Sedangkan empat hubungan lainnya menunjukkan pola hubungan yang secara statistik relatif sama pada kedua desa.

Hubungan pertama yang berbeda secara signifikan adalah pengaruh dukungan pemerintah terhadap dialog komunitas (*permutation p-value* = 0,005), dengan koefisien jalur positif di Desa Kawali (β = 0,570) dan negatif di Desa Bangsring (β = -0,165). Hasil model struktural masing-masing desa memperjelas perbedaan tersebut. Dukungan pemerintah di Desa Kawali berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas (p = 0,000; t = 4,781; β = 0,570), sedangkan di Desa Bangsring menunjukkan arah hubungan negatif dengan kekuatan pengaruh yang lemah (p = 0,243; t = 1,168; β = -0,156).

Hasil MGA mengonfirmasi bahwa perbedaan koefisien jalur tersebut signifikan secara statistik dan menunjukkan mekanisme pembentukan dialog komunitas yang berbeda pada kedua desa. Dukungan pemerintah di Desa Kawali berperan sebagai penggerak proses dialog melalui fasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, dan merencanakan kegiatan melalui forum kelompok. Dialog komunitas di Desa Bangsring berkembang melalui komunikasi kepemimpinan dalam pengelolaan konservasi pesisir.

Hubungan kedua yang menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan MGA adalah pengaruh komunikasi kepemimpinan terhadap dialog komunitas (*permutation p-value* = 0,007). Hasil model struktural masing-masing desa memperjelas perbedaan tersebut. Komunikasi kepemimpinan di Desa Kawali

menunjukkan pengaruh yang lemah terhadap dialog komunitas ($p = 0,116$; $t = 1,572$; $\beta = 0,219$), sedangkan di Desa Bangsring berpengaruh positif dan signifikan ($p = 0,000$; $t = 4,370$; $\beta = 0,695$).

Hasil MGA mengonfirmasi bahwa perbedaan koefisien jalur tersebut signifikan secara statistik dan menunjukkan perbedaan mekanisme pembentukan dialog komunitas pada kedua desa. Komunikasi kepemimpinan di Desa Bangsring berperan kuat dalam membangun dan menjaga keberlangsungan dialog melalui penyampaian visi dan tujuan konservasi, koordinasi organisasi, serta pengambilan keputusan. Dialog komunitas di Desa Kawali lebih banyak berkembang melalui komunikasi horizontal antaranggota dan proses pendampingan, sehingga kontribusi komunikasi kepemimpinan terhadap pembentukan dialog relatif terbatas.

Empat hubungan lainnya menunjukkan kesetaraan statistik antara Desa Kawali dan Desa Bangsring berdasarkan hasil MGA. Hubungan dialog komunitas terhadap aksi kolektif memiliki *permutation p-value* sebesar 0,128, dengan koefisien jalur Desa Bangsring ($\beta = 0,698$) lebih tinggi dibandingkan Desa Kawali ($\beta = 0,491$). Hubungan modal sosial terhadap aksi kolektif memiliki *permutation p-value* sebesar 0,075, dengan koefisien jalur Desa Kawali ($\beta = 0,416$) lebih tinggi dibandingkan Desa Bangsring ($\beta = 0,117$). Kesetaraan statistik juga ditemukan pada pengaruh peran penyuluh terhadap dialog komunitas (*permutation p-value* = 0,119) dan keputusan adopsi inovasi terhadap dialog komunitas (*permutation p-value* = 0,586).

7.3 Implikasi Substantif Perbedaan Hasil MGA pada Dua Desa

Hasil *permutation MGA* menunjukkan bahwa hubungan dialog komunitas dan aksi kolektif tidak berbeda secara statistik antara Desa Kawali dan Desa Bangsring. Ini berarti mekanisme utama model CFSC bekerja konsisten di kedua desa. Perbedaannya hanya terletak pada faktor yang membentuk dialog, bukan pada hasil akhirnya. Di Desa Kawali, dialog lebih kuat melalui dukungan pemerintah dan penyuluh, sedangkan di Desa Bangsring lebih kuat melalui kepemimpinan lokal yang dipercaya masyarakat. Menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi partisipatif ditentukan oleh kualitas dialog dan dukungan kelembagaan yang memungkinkan partisipasi masyarakat berjalan.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas partisipasi bergantung pada kekuatan kelembagaan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang inklusif. Variasi kapasitas kelembagaan dan tata kelola lokal menghasilkan mekanisme pembentukan dialog yang berbeda di Desa Kawali dan Desa Bangsring. Perbedaan tersebut tidak mengubah peran dialog komunitas sebagai mekanisme utama yang menghubungkan komunikasi partisipatif dengan terbentuknya aksi kolektif. Implikasinya, strategi komunikasi pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik tiap desa. Desa dengan kelembagaan yang masih berkembang membutuhkan dukungan pemerintah dan penyuluh untuk memperkuat dialog dan partisipasi. Sementara itu, desa dengan kelembagaan yang lebih mapan perlu memperkuat peran kepemimpinan lokal dan memperluas ruang partisipasi warga. Pendekatan ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif harus adaptif agar mampu mendorong aksi kolektif dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

VIII STRATEGI PENINGKATAN DIALOG DAN AKSI KOLEKTIF

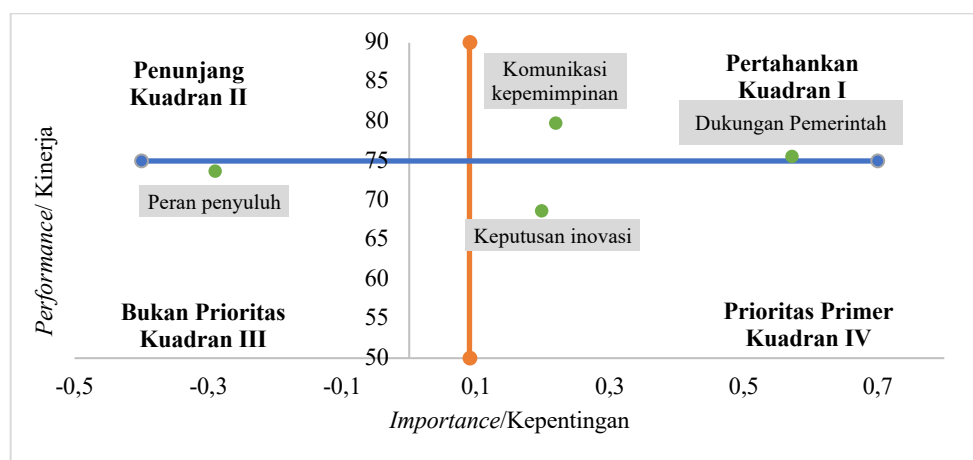
Dialog komunitas dan aksi kolektif di Desa Kawali dan Desa Bangsring terbentuk melalui mekanisme yang berbeda. Di Desa Kawali, dukungan pemerintah berperan kuat dalam membentuk dialog komunitas, sedangkan aksi kolektif didorong oleh dialog komunitas dan modal sosial. Di Desa Bangsring, komunikasi kepemimpinan menjadi faktor utama yang membentuk dialog komunitas, yang selanjutnya mendorong terbentuknya aksi kolektif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penguatan komunikasi partisipatif memerlukan strategi yang sesuai dengan mekanisme yang bekerja pada masing-masing desa. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penguatan dialog komunitas dan aksi kolektif disusun melalui *Importance-Performance Map Analysis* (IPMA) pada tingkat variabel untuk mengidentifikasi aspek dengan tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang memerlukan penguatan. Indikator prioritas selanjutnya ditentukan berdasarkan peluang intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, penyuluh perikanan, pemimpin komunitas, dan kelompok masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan strategi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing desa.

8.1 Strategi Peningkatan Dialog Komunitas Desa Kawali

Gambar 32 memperlihatkan nilai *importance* dan *performance* variabel serta indikator pembentuk dialog komunitas dalam model CFSC di Desa Kawali. Posisi setiap variabel dan indikator dipetakan ke dalam empat kuadran menggunakan nilai rata-rata *importance* sebesar 0,174 dan *performance* sebesar 74,456 sebagai garis pembatas (*crosshair*) untuk mengidentifikasi faktor prioritas dalam penguatan dialog komunitas. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dan efektivitas komunikasi kepemimpinan berada pada kuadran I dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi, sehingga keduanya perlu dipertahankan sebagai faktor pendukung dialog komunitas. Intensitas peran penyuluh berada pada kuadran III dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang relatif rendah sehingga memiliki prioritas penguatan yang lebih rendah dibandingkan faktor pada kuadran lainnya. Preferensi keputusan adopsi inovasi berada pada kuadran IV dengan tingkat kepentingan relatif rendah dan kinerja tinggi, yang menunjukkan bahwa capaian pada aspek tersebut telah memadai dibandingkan kontribusinya terhadap pembentukan dialog komunitas. Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi dan merumuskan strategi penguatan dialog komunitas berdasarkan posisi serta karakteristik setiap variabel dan indikator.

Kuadran I terdiri dari variabel yang harus dipertahankan untuk memantik dialog komunitas, yakni dukungan pemerintah (X2) dan komunikasi kepemimpinan (X4). Kedua variabel tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dialog di Desa Kawali sekaligus menunjukkan tingkat implementasi yang baik. Temuan ini selaras dengan hasil uji *inner model* dan MGA bahwa dukungan pemerintah menjadi variabel yang signifikan dan positif memengaruhi dialog komunitas. Sehingga strategi yang diperlukan bukan berupa perubahan mendasar, melainkan mempertahankan kualitas pelaksanaan

sambil mengoptimalkan aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan (Ringle dan Sarstedt 2016).



Gambar 32 Kuadran IPMA dialog komunitas di Desa Kawali

Analisis dukungan pemerintah pada tingkat indikator menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia memiliki *importance* dan *performance* yang tinggi (0,171; 79,839). Temuan tersebut selaras dengan persepsi anggota kelompok bahwa penguatan kapasitas SDM yang difasilitasi pemerintah mendorong proses dialog penyusunan alternatif penyelesaian masalah dan penentuan cara kerja bersama. Mekanisme dukungan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan oleh kelompok juga menjadikan proses pengajuan dan pemanfaatan bantuan sebagai ruang diskusi serta pengambilan keputusan secara partisipatif. Strategi penguatan dialog komunitas dengan demikian perlu mempertahankan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dan mekanisme identifikasi kebutuhan berbasis kelompok. Pola tersebut sejalan dengan CFSC yang menempatkan institusi eksternal sebagai katalis dalam memperkuat kapasitas komunikasi masyarakat dan mendorong berlangsungnya proses perubahan berbasis partisipasi.

Komunikasi kepemimpinan juga berada pada Kuadran I dengan nilai *importance* sebesar 0,218 dan *performance* sebesar 79,828. Capaian tersebut terutama ditopang oleh *meaning-making language* dan *empathetic language*, yang menggambarkan praktik komunikasi pemimpin melalui pembentukan makna bersama, perhatian personal, penguatan harapan bersama, dan pengakuan terhadap kontribusi anggota. Praktik tersebut tercermin dalam keterangan Ketua Gapokkan (MLK) yang menekankan keharmonisan masyarakat sebagai dasar untuk memelihara kepercayaan antaranggota dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kawali. Pola komunikasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan berperan dalam memelihara kualitas hubungan sosial dan ruang dialog yang telah berkembang di dalam kelompok. Temuan ini sejalan dengan Mayfield dan Mayfield (2017) yang menjelaskan bahwa komunikasi kepemimpinan melalui pembentukan makna dan empati dapat memperkuat kepercayaan, komitmen, serta keterlibatan anggota dalam proses perubahan organisasi.

Pada kuadran III terdapat intensitas peran penyuluh (X1) dengan nilai *importance* negatif (-0,291) dan *performance* sebesar 73,734, sehingga

peningkatan intensitas pendampingan bukan menjadi prioritas utama dalam memperkuat komunikasi partisipatif di Desa Kawali. Temuan ini sejalan dengan hasil PLS-SEM yang menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara intensitas peran penyuluh dan komunikasi partisipatif. Menunjukkan bahwa sosialisasi, contoh dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh justru menurunkan intensitas dialog partisipatif komunitas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses dialog telah berkembang menuju mekanisme yang semakin mandiri, sehingga penyuluh hanya berperan sebagai fasilitator dibandingkan sebagai aktor utama pembangunan. Temuan ini selaras dengan pendekatan CFSC yang menempatkan fasilitator sebagai penguat kapasitas masyarakat agar mampu mempertahankan proses komunikasi secara mandiri.

Kuadran IV ditempati oleh preferensi keputusan adopsi inovasi (X3) dengan nilai *importance* sebesar 0,197 dan *performance* sebesar 68,682, yang menunjukkan tingkat kepentingan tinggi dengan capaian kinerja yang masih memerlukan penguatan sehingga menjadi prioritas utama dalam pengembangan dialog komunitas di Desa Kawali. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas dialog komunitas berkaitan dengan kemampuan kelompok membangun mekanisme pengambilan keputusan adopsi inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan, permasalahan, dan dinamika masyarakat.

Rogers (2003) menjelaskan bahwa keputusan adopsi inovasi dapat berlangsung secara individual, kolektif, otoritatif, maupun kontingen sesuai dengan karakteristik organisasi dan lingkungan sosial, sehingga kemampuan kelompok menyesuaikan mekanisme pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam proses adopsi inovasi. Analisis pada tingkat indikator menunjukkan bahwa keputusan kolektif memiliki *performance* relatif tinggi sebesar 78,024, yang tercermin dari keterlibatan anggota melalui musyawarah dalam menentukan penerimaan program awal hingga mencapai kesepakatan bersama, sedangkan keputusan kontingen memiliki *performance* paling rendah sebesar 58,669 dengan *importance* sebesar 0,160. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa proses musyawarah telah berkembang dengan baik, sementara pemanfaatan pengalaman program terdahulu sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi masih memiliki ruang penguatan. Pengalaman keberhasilan dan pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya dapat menjadi sumber pengetahuan kolektif untuk memperkaya dialog, membangun keyakinan anggota, dan menilai kesesuaian inovasi dengan kondisi lokal. Strategi penguatan preferensi keputusan adopsi inovasi perlu diarahkan pada pengembangan mekanisme refleksi dan evaluasi pengalaman program sebagai bagian dari dialog komunitas, sehingga pengambilan keputusan mengintegrasikan musyawarah dengan pembelajaran kolektif secara berkelanjutan.

Data kuadran I, III, dan IV menunjukkan bahwa dialog komunitas Desa Kawali dapat ditingkatkan melalui penguatan preferensi keputusan adopsi inovasi sebagai fokus utama. Meski begitu, arah strategi peningkatan kualitas dialog ditentukan melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan posisi indikator dalam peta IPMA untuk melihat tingkat kepentingan dan kinerjanya. Tahap kedua menyeleksi indikator berdasarkan kemungkinan perubahannya melalui kegiatan penyuluhan. Indikator yang dapat diubah secara langsung menjadi sasaran strategi, sedangkan indikator yang hanya dapat dipengaruhi

secara tidak langsung ditempatkan sebagai faktor pendukung dan bahan koordinasi. Indikator yang tidak dapat diubah melalui penyuluhan digunakan sebagai dasar segmentasi sasaran dan penyesuaian pendekatan.

Tabel 35 Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog

Indikator	Posisi IPMA	Keterjangkauan Intervensi
X1. Peran penyuluh	Bukan prioritas	Intervensi langsung
X2. Dukungan pemerintah	Pertahankan	Intervensi langsung
X3. Keputusan adopsi inovasi	Prioritas utama	Intervensi langsung
X4. Komunikasi kepemimpinan	Pertahankan	Intervensi tidak langsung

Hasil seleksi menunjukkan bahwa strategi penguatan dialog komunitas tidak diarahkan pada seluruh variabel hasil IPMA. Sasaran utama dipusatkan pada preferensi keputusan adopsi inovasi karena berada pada kuadran prioritas utama dan memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi kinerjanya masih memerlukan penguatan. Strategi pada kuadran ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan adopsi inovasi berdasarkan pembelajaran dari pengalaman program sebelumnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori difusi inovasi Rogers (2003) yang menjelaskan bahwa keputusan adopsi inovasi berkembang melalui pengalaman yang memberikan keyakinan terhadap manfaat suatu inovasi.

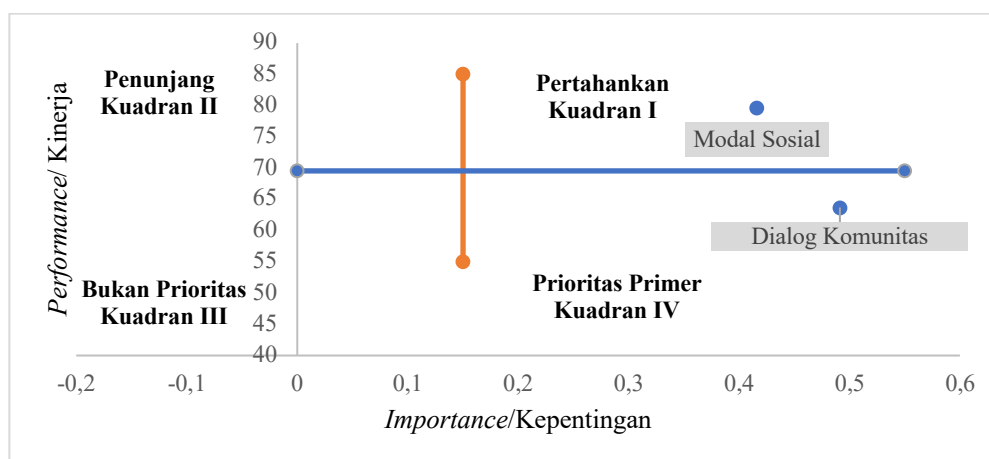
Kegiatan utama dilakukan adalah kunjungan belajar antarkelompok (*peer learning exchange*) atau studi banding ke kelompok masyarakat yang telah berhasil mengembangkan inovasi pembangunan desa. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program, manfaat yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta strategi penyelesaiannya. Pengalaman tersebut selanjutnya didiskusikan bersama dalam forum kelompok untuk menilai kesesuaian inovasi dengan kondisi sumber daya, kebutuhan, dan potensi Desa Kawali sebelum ditetapkan sebagai keputusan bersama.

Peningkatan preferensi keputusan adopsi inovasi juga perlu didukung oleh fasilitasi pemerintah dan efektivitas komunikasi kepemimpinan sebagai faktor katalis yang telah menunjukkan tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi. Dukungan pemerintah berperan menyediakan pendanaan, penguatan kapasitas masyarakat, fasilitasi inovasi, serta akses informasi yang menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Efektivitas komunikasi kepemimpinan berperan membangun makna bersama, menumbuhkan kepercayaan, serta menciptakan ruang dialog yang mendorong keterlibatan seluruh anggota kelompok, serta memfasilitasi proses pembelajaran, membantu mengidentifikasi alternatif inovasi yang relevan, dan mendampingi kelompok dalam menyusun rencana tindak lanjut.

8.2 Strategi Peningkatan Aksi Kolektif Komunitas Desa Kawali

Gambar 33 memperlihatkan nilai *importance* dan *performance* variabel serta indikator pembentuk aksi kolektif di Desa Kawali yang dipetakan ke dalam empat kuadran menggunakan nilai rata-rata *importance* sebesar 0,454 dan *performance* sebesar 71,663 sebagai garis pembatas (*crosshair*). Pemetaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor prioritas dan menentukan arah strategi penguatan aksi kolektif berdasarkan tingkat kepentingan dan capaian

kinerja setiap variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa modal sosial berada pada kuadran I dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi, sehingga perlu dipertahankan sebagai faktor penting dalam pembentukan aksi kolektif. Dialog komunitas berada pada kuadran IV dengan tingkat kepentingan tinggi dan kinerja yang masih memiliki ruang penguatan, sehingga menjadi prioritas utama dalam strategi peningkatan aksi kolektif. Posisi kedua variabel tersebut selaras dengan hasil *inner model* PLS-SEM yang menunjukkan bahwa modal sosial dan dialog komunitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksi kolektif, sehingga strategi diarahkan pada pemeliharaan kekuatan modal sosial sekaligus peningkatan kualitas dialog komunitas untuk memperkuat aksi kolektif di Desa Kawali.



Gambar 33 Kuadran IPMA aksi kolektif di Desa Bangsring

Kuadran I ditempati oleh modal sosial (X6) yang perlu dipertahankan sebagai faktor pengungkit pembentukan aksi kolektif di Desa Kawali. Posisi tersebut selaras dengan hasil *inner model* yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan modal sosial terhadap aksi kolektif ($\beta = 0,412$; $p < 0,001$), sehingga norma, jaringan sosial, dan kepercayaan menjadi sumber daya penting dalam mendorong kerja sama. Analisis indikator menunjukkan norma memiliki nilai *importance* dan *performance* tertinggi (0,184; 81,653), diikuti kepercayaan (0,175; 79,435) dan jaringan sosial (0,145; 77,218). Temuan ini menegaskan bahwa aksi kolektif ditopang oleh kesepakatan, hubungan sosial kuat, dan kepercayaan berbasis kekerabatan. Namun, kedekatan sosial juga menimbulkan rasa segan yang membatasi keterbukaan kritik dalam evaluasi partisipatif. Karena itu, penguatan modal sosial perlu menjaga norma, jaringan, dan kepercayaan sekaligus menciptakan ruang evaluasi yang lebih terbuka tanpa mengganggu keharmonisan sosial (Ringle dan Sarstedt 2016).

Kuadran IV ditempati oleh dialog komunitas (Y1) dengan nilai *importance* sebesar 0,491 dan *performance* sebesar 63,686, yang menunjukkan tingkat kepentingan tinggi dengan kinerja yang masih memiliki ruang penguatan sehingga menjadi prioritas utama dalam peningkatan aksi kolektif di Desa Kawali. Posisi tersebut selaras dengan hasil *inner model* yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dialog komunitas terhadap aksi kolektif ($\beta = 0,490$; $p < 0,001$), sekaligus menegaskan peran dialog sebagai mekanisme utama dalam membangun pemahaman masalah, merumuskan tujuan

bersama, dan menyepakati tindakan secara partisipatif sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan CFSC. Analisis indikator menunjukkan bahwa keterlibatan aktor memiliki *performance* terendah (47,177), diikuti klarifikasi persepsi (60,887), penilaian kondisi (61,694), pemahaman masalah (62,097), dan penyusunan rencana kegiatan (62,903), sedangkan penetapan tujuan (68,145) dan penyesuaian kebutuhan (69,758) memiliki capaian relatif lebih tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam merumuskan tujuan dan menyesuaikan kebutuhan, sementara penguatan dialog perlu diprioritaskan pada perluasan keterlibatan pemangku kepentingan, penyelarasan persepsi, penilaian kondisi, pemahaman masalah, dan penyusunan rencana kegiatan. Strategi tersebut memperkuat kualitas proses dialog sejak tahap identifikasi masalah hingga perencanaan sebagai landasan bagi terbentuknya aksi kolektif yang partisipatif.

Data pada kuadran I dan kuadran IV menunjukkan bahwa aksi kolektif di Desa Kawali dapat ditingkatkan melalui penguatan dialog komunitas sebagai fokus utama. Modal sosial berfungsi sebagai faktor pengungkit yang memperkuat efektivitas dialog sehingga mampu menghasilkan aksi kolektif yang lebih terorganisasi. Arah strategi ditentukan melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan posisi indikator dalam peta IPMA untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan kinerja setiap indikator. Tahap kedua menyeleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Indikator yang dapat diperkuat secara langsung menjadi sasaran strategi, sedangkan indikator yang telah menunjukkan kinerja tinggi dimanfaatkan sebagai faktor pengungkit dalam mendukung pelaksanaan strategi.

Tabel 36 Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif

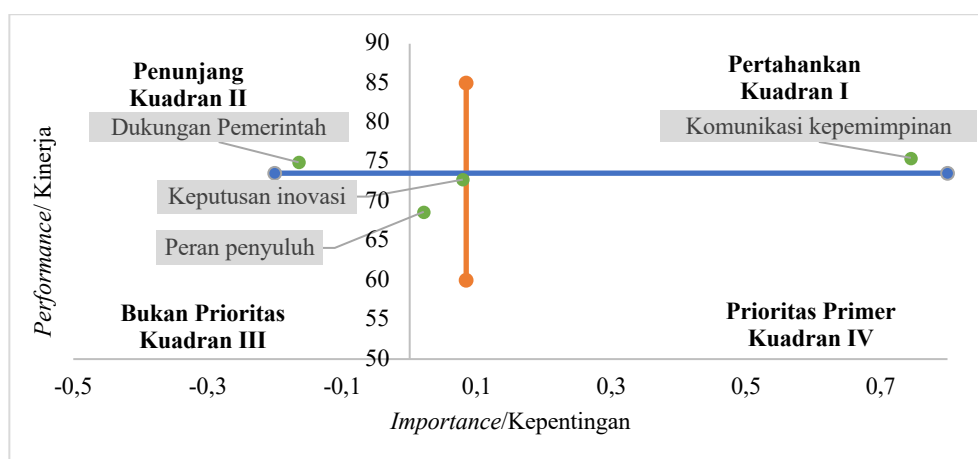
Indikator	Posisi IPMA	Keterjangkauan Intervensi
Y1. Dialog komunitas	Prioritas utama	Intervensi langsung
X6. Modal sosial	Pertahankan	Intervensi tidak langsung

Hasil seleksi menunjukkan bahwa strategi peningkatan aksi kolektif dipusatkan pada penguatan dialog komunitas sebagai variabel prioritas utama. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi partisipatif sejak tahap identifikasi masalah, pelibatan aktor, penyamaan persepsi, penilaian kondisi, hingga penyusunan rencana kegiatan. Penguatan dialog dilakukan melalui revitalisasi dan optimalisasi forum Rumasa sebagai ruang belajar dan musyawarah masyarakat yang telah berkembang di Desa Kawali. Forum tersebut harus dimanfaatkan secara lebih sistematis untuk membahas permasalahan kelompok, dikelola secara mandiri oleh anggota kelompok atau masyarakat Desa Kawali, melibatkan seluruh pemangku kepentingan terdampak, menyusun alternatif penyelesaian bersama, menetapkan tujuan bersama, membagi peran anggota sesuai dengan kemmapuan sumber dayanya, serta menyusun rencana kerja yang disepakati bersama. Pemerintah berperan memfasilitasi penyelenggaraan Forum Rumasa, menyediakan dukungan sumber daya produksi *on-farm* dan *off-farm*, serta menghubungkan kelompok dengan berbagai pihak yang diperlukan. Ketua kelompok berperan mengarahkan jalannya dialog agar seluruh anggota memperoleh kesempatan yang setara untuk

menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam penyusunan rencana kegiatan. Penyuluh berperan sebagai fasilitator bukan dominator. Pendekatan tersebut sejalan dengan CFSC yang menempatkan dialog sebagai proses pembelajaran sosial yang menghasilkan kesadaran kolektif dan mendorong masyarakat bertindak bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas dialog komunitas, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta menghasilkan aksi kolektif yang lebih terencana, partisipatif, dan berkelanjutan.

8.3 Strategi Peningkatan Dialog Komunitas Desa Bangsring

Gambar 34 memperlihatkan nilai *importance* dan *performance* variabel serta indikator pembentuk dialog komunitas dalam model CFSC di Desa Bangsring yang dipetakan ke dalam empat kuadran menggunakan nilai rata-rata *importance* sebesar 0,170 dan *performance* sebesar 72,974 sebagai garis pembatas (*crosshair*). Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor yang perlu dipertahankan dan diperkuat dalam perumusan strategi peningkatan dialog komunitas. Hasil IPMA menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi kepemimpinan menjadi satu-satunya variabel pada Kuadran I dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi, sehingga perlu dipertahankan sebagai faktor utama pembentuk dialog komunitas. Dukungan pemerintah berada pada Kuadran II dengan tingkat kepentingan relatif rendah dan kinerja tinggi, yang menunjukkan capaian dukungan yang baik dengan kontribusi yang lebih terbatas terhadap pembentukan dialog. Intensitas peran penyuluh dan preferensi keputusan adopsi inovasi berada pada Kuadran III dengan tingkat kepentingan dan kinerja relatif rendah, sehingga memiliki prioritas penguatan yang lebih rendah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan dialog komunitas di Desa Bangsring terutama bertumpu pada kapasitas komunikasi kepemimpinan lokal, sedangkan dukungan pemerintah, peran penyuluh, dan keputusan adopsi inovasi berfungsi sebagai faktor penunjang dalam proses komunikasi partisipatif.



Gambar 34 Kuadran IPMA dialog komunitas di Desa Bangsring

Efektivitas komunikasi kepemimpinan (X4) merupakan variabel dengan nilai *importance* tertinggi (0,745) dan *performance* sebesar 75,509 sehingga menjadi faktor utama yang perlu dipertahankan. Temuan tersebut sejalan dengan

hasil *inner model* PLS-SEM yang menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap dialog komunitas. Hasil MGA juga memperlihatkan bahwa komunikasi kepemimpinan menjadi faktor yang membedakan pembentukan dialog komunitas antara Desa Kawali dan Desa Bangsring.

Hasil tersebut diperkuat oleh tabulasi deskriptif yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai komunikasi kepemimpinan berada pada kategori tinggi, terutama pada dimensi *meaning-making language* (91,1 persen) dan *directive language* (90,0 persen). Ketua kelompok di Desa Bangsring cenderung menumbuhkan harapan bersama dan penyamaan makna mengenai pentingnya konservasi sebagai fondasi keberlanjutan pembangunan masyarakat pesisir, kemudian memperkuatnya melalui arahan tugas yang jelas dan koordinasi organisasi yang terstruktur melalui SOP dan ZPB. Pemimpin secara konsisten membangun narasi bersama bahwa keberhasilan konservasi menentukan keberlanjutan pariwisata dan mata pencaharian masyarakat. Narasi tersebut mendorong anggota memahami bahwa setiap kegiatan konservasi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Menurut Mayfield dan Mayfield (2017) temuan tersebut merupakan bentuk komunikasi kepemimpinan yang mampu membangun makna bersama akan meningkatkan komitmen, keterlibatan, dan koordinasi anggota dalam mencapai tujuan organisasi.

Tingkat dukungan pemerintah (X2) berada pada kuadran II dengan nilai *performance* sebesar 74,952 dan *importance* sebesar -0,165. Posisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah telah terlaksana dengan baik namun tidak berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penguatan dialog komunitas. Meski begitu, hasil tabulasi memperlihatkan bahwa 79,7 persen masyarakat menilai dukungan pemerintah berada pada kategori tinggi. Dukungan tersebut paling banyak dirasakan dalam bentuk pendanaan, sistem informasi desa, penguatan sumber daya manusia, serta fasilitasi teknologi dan inovasi. Bantuan berupa rumah tukik, keramba jaring apung, *coral dome*, sarana produksi kelompok, pelatihan, serta pengembangan sistem informasi wisata menunjukkan bahwa pemerintah berperan memperkuat kapasitas kelembagaan yang telah berkembang di masyarakat.

Intensitas peran penyuluh (X1) berada pada kuadran III dengan nilai *importance* sebesar 0,021 dan *performance* sebesar 68,678. Posisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh berperan sebagai faktor pendukung dalam membangun dialog komunitas bukan penentu utama dialog. Hal ini juga tercermin dari penjelasan ketua pokmaswas (ABZ) bahwa dibandingkan fasilitator, penyuluh merupakan mitra mereka dalam pembangunan desa. Selain itu, preferensi keputusan adopsi inovasi (X3) juga berada pada kuadran III dengan nilai *importance* sebesar 0,079 dan *performance* sebesar 72,758. Posisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan adopsi inovasi tidak berfungsi sebagai faktor utama dalam memperkuat dialog komunitas.

Data kuadran I, II, dan III menunjukkan bahwa dialog komunitas Desa Bangsring dapat ditingkatkan melalui penguatan secara tidak langsung terhadap kemampuan komunikasi kepemimpinan lokal di desa. Meski begitu, arah strategi peningkatan kualitas dialog komunitas ditentukan melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan posisi indikator dalam peta IPMA untuk melihat

tingkat kepentingan dan kinerjanya. Tahap kedua menyeleksi indikator berdasarkan kemungkinan perubahannya melalui kegiatan penyuluhan. Indikator yang dapat diubah secara langsung menjadi sasaran strategi, sedangkan indikator yang hanya dapat dipengaruhi secara tidak langsung ditempatkan sebagai faktor pendukung dan bahan koordinasi. Indikator yang tidak dapat diubah melalui penyuluhan digunakan sebagai dasar segmentasi sasaran dan penyesuaian pendekatan.

Tabel 37 Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi dialog di Desa Bangsring

Indikator	Posisi IPMA	Keterjangkauan Intervensi
X1. Peran penyuluh	Bukan prioritas	Intervensi langsung
X2. Dukungan pemerintah	Penunjang	Intervensi langsung
X3. Keputusan adopsi inovasi	Bukan prioritas	Intervensi langsung
X4. Komunikasi kepemimpinan	Pertahankan	Intervensi tidak langsung

Penguatan komunikasi kepemimpinan diprioritaskan pada dimensi *meaning-making language* dan *directive language*. *Meaning-making language* memiliki nilai *importance* tertinggi karena mampu membangun pemahaman bersama mengenai keterkaitan antara konservasi, keberlanjutan sumber daya pesisir, dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin secara konsisten menanamkan nilai bahwa keberhasilan konservasi menjadi fondasi bagi keberlanjutan pariwisata dan mata pencaharian masyarakat. Proses komunikasi tersebut mendorong masyarakat memandang setiap kegiatan konservasi sebagai kepentingan bersama sehingga partisipasi tumbuh dari kesadaran kolektif. *Directive language* juga perlu dipertahankan karena mendukung koordinasi pelaksanaan program melalui arahan yang jelas, pembagian tugas, serta penguatan aturan kelembagaan. Kejelasan komunikasi tersebut memungkinkan setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan konservasi maupun pengembangan desa.

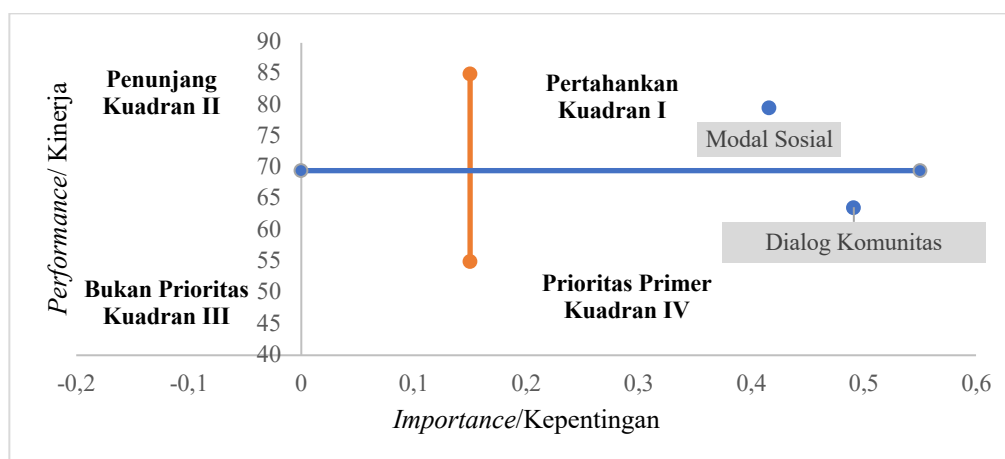
Keberlanjutan dialog komunitas memerlukan regenerasi kepemimpinan yang mampu meneruskan pola komunikasi tersebut kepada generasi berikutnya. Kaderisasi kepemimpinan perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan calon pemimpin dalam membangun makna bersama, mengomunikasikan visi kelompok, memfasilitasi musyawarah, serta mengoordinasikan aksi kolektif. Proses kaderisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang dapat memantik, memelihara, dan memperkuat dialog komunitas secara berkelanjutan tanpa bergantung pada figur tertentu. Strategi tersebut juga mendukung keberlanjutan kelembagaan lokal melalui transfer nilai, pengalaman, dan kapasitas komunikasi kepada anggota yang memiliki potensi menjadi ketua kelompok pada masa mendatang.

Dukungan pemerintah yang berada pada posisi penunjang tetap perlu dipertahankan melalui intervensi langsung karena berperan memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kelompok, penguatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi inovasi yang adaptif terhadap kondisi masyarakat, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan promosi wisata. Mekanisme dukungan yang diawali dengan identifikasi kebutuhan bersama perlu terus

dilestarikan karena mampu mendorong diskusi, memperkuat komunikasi partisipatif, dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara komunikasi kepemimpinan yang kuat dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kualitas dialog komunitas sebagai fondasi pembangunan desa berbasis CFSC.

8.4 Strategi Peningkatan Aksi Kolektif Komunitas Desa Bangsring

Gambar 35 memperlihatkan nilai *importance* dan *performance* variabel serta indikator pembentuk aksi kolektif dalam model CFSC di Desa Bangsring yang dipetakan ke dalam empat kuadran menggunakan nilai rata-rata *importance* sebesar 0,408 dan *performance* sebesar 77,516 sebagai garis pembatas (*crosshair*). Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan faktor yang perlu dipertahankan dan diperkuat dalam strategi peningkatan aksi kolektif. Hasil IPMA menunjukkan bahwa dialog komunitas berada pada Kuadran I dengan nilai *importance* sebesar 0,698 dan *performance* sebesar 78,386, sehingga menjadi faktor utama yang perlu dipertahankan dalam pembentukan aksi kolektif. Modal sosial berada pada Kuadran III dengan nilai *importance* sebesar 0,117 dan *performance* sebesar 76,645, yang menunjukkan kontribusi dan capaian relatif lebih rendah sehingga berperan sebagai faktor penunjang dalam mendukung tindakan bersama. Posisi tersebut selaras dengan hasil *inner model* PLS-SEM yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dialog komunitas terhadap aksi kolektif, sekaligus menegaskan bahwa proses komunikasi partisipatif melalui dialog menjadi mekanisme utama dalam membangun tindakan bersama di Desa Bangsring.



Gambar 35 Kuadran IPMA aksi kolektif di Desa Bangsring

Dialog komunitas menempati kuadran I yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang sama-sama tinggi sehingga perlu dipertahankan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa proses identifikasi masalah, penyamaan persepsi, penyusunan tujuan, hingga perencanaan kegiatan telah berkembang secara partisipatif dan menjadi fondasi terbentuknya aksi kolektif masyarakat. Dialog di Desa Bangsring berlangsung secara terstruktur melalui forum pertemuan kelompok yang dilaksanakan secara berkala. Forum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang untuk membahas

permasalahan kelompok, mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana kerja, serta menyepakati pembagian tanggung jawab sebelum program dilaksanakan.

Analisis pada tingkat indikator menunjukkan bahwa penyusunan rencana (0,118) memiliki nilai *importance* tertinggi, diikuti identifikasi masalah (0,113), penyusunan opsi kegiatan (0,103), dan klarifikasi persepsi (0,102). Seluruh indikator tersebut juga memiliki nilai *performance* yang tinggi, terutama penyusunan rencana (81,389), identifikasi masalah (80,278), dan penyusunan opsi kegiatan (80,000). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan utama dialog komunitas di Desa Bangsring terletak pada kemampuan kelompok membangun proses deliberasi yang menghasilkan rencana kerja yang jelas dan disepakati bersama. Menurut ketua koperasi SFV (ABZ) setiap inovasi dan program baru dibahas terlebih dahulu dalam forum kelompok sebelum dilaksanakan. Ketua kelompok memanfaatkan forum tersebut untuk menjelaskan tujuan program, mendiskusikan berbagai alternatif pelaksanaan, kemudian menyusun rencana operasional kegiatan bersama anggota. Proses tersebut menghasilkan kesamaan pemahaman mengenai tujuan, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan sehingga anggota memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati. Di samping itu, proses tersebut juga mengakibatkan sentralisasi dominasi pada ketua, karena seluruh informasi (strategis) diketahui dan disampaikan oleh ketua.

Modal sosial berada pada kuadran III dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang relatif lebih rendah dibandingkan dialog komunitas. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh modal sosial terhadap aksi kolektif di Desa Bangsring relatif kecil. Meski begitu kelompok masyarakat yang melakukan pembangunan desa di Bangsring memiliki jaringan pendukung yang stabil dan berdampak pada pembangunan. Selain itu, mereka juga memiliki norma baku berupa Perdes, ZPB dan SOP yang efektif mengatur segala kegiatan konservasi dan pembangunan desa di sana.

Tabel 38 Seleksi indikator berdasarkan keterjangkauan intervensi aksi kolektif di Desa Bangsring

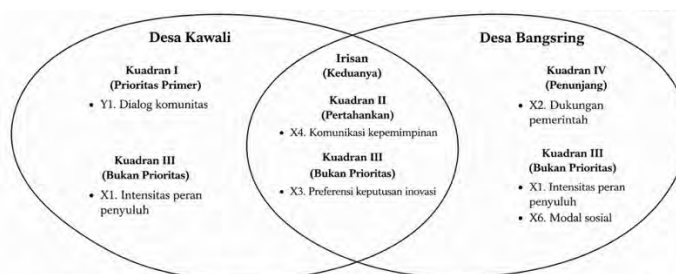
Indikator	Posisi IPMA	Keterjangkauan Intervensi
Y1. Dialog komunitas	Pertahankan	Intervensi langsung
X6. Modal sosial	Buka prioritas	Intervensi tidak langsung

Hasil pada kedua kuadran menunjukkan bahwa aksi kolektif di Desa Bangsring dibangun melalui dialog komunitas yang telah berkembang secara kuat, kemudian diperkuat oleh modal sosial yang menjaga kohesi dan keberlanjutan kerja sama antaranggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aksi kolektif di Desa Bangsring tidak lagi diarahkan pada pembentukan ruang dialog baru, melainkan pada perluasan akses dan kontrol dialog yang telah berkembang agar tetap mampu menghasilkan kesepakatan, koordinasi, dan aksi kolektif secara berkelanjutan. Modal sosial berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat efektivitas dialog melalui norma bersama, jejaring kolaborasi, dan hubungan saling percaya yang telah terbentuk dalam masyarakat.

8.5 Sintesis Hasil IPMA pada Desa Kawali dan Desa Bangsring

Hasil IPMA menunjukkan bahwa Desa Kawali dan Desa Bangsring memiliki beberapa kesamaan sekaligus perbedaan dalam posisi variabel pembentuk dialog komunitas dan aksi kolektif (Gambar 36). Kesamaan tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang secara konsisten berperan dalam membangun komunikasi partisipatif pada kedua desa, sedangkan perbedaan posisi variabel mencerminkan karakteristik dan tingkat perkembangan kelembagaan masyarakat yang berbeda sehingga memerlukan strategi penguatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.

Hasil komparasi IPMA menunjukkan persamaan dan perbedaan faktor strategis dalam penguatan dialog komunitas dan aksi kolektif di Desa Kawali dan Desa Bangsring. Komunikasi kepemimpinan menjadi irisan utama karena berada pada kuadran pertahanan di kedua desa, yang menunjukkan tingkat kepentingan dan kinerja tinggi dalam membangun dialog komunitas. Kemampuan pemimpin dalam membangun makna bersama (*meaning-making language*), memberikan arahan (*directive language*), menjaga hubungan interpersonal, dan memelihara keterlibatan anggota menjadi kekuatan yang perlu dipertahankan. Strategi pada kedua desa diarahkan pada regenerasi kepemimpinan, penguatan kapasitas komunikasi partisipatif, dan pelembagaan forum dialog untuk menjaga keberlanjutan proses komunikasi dan aksi kolektif. Peran penyuluh juga menempati posisi yang sama sebagai faktor dengan prioritas relatif rendah, sehingga fungsinya lebih diarahkan pada fasilitasi, pendampingan teknis, penguatan kapasitas, dan penghubung jejaring sesuai kebutuhan kelompok.



Gambar 36 Perbandingan faktor strategis penguatan dialog komunitas dan aksi kolektif berdasarkan IPMA di Desa Kawali dan Desa Bangsring

Strategi penguatan komunikasi partisipatif perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Di Desa Kawali, dialog komunitas menjadi prioritas utama sehingga strategi difokuskan pada peningkatan kualitas identifikasi masalah, pelibatan aktor, penyamaan persepsi, penilaian kondisi, dan penyusunan rencana kegiatan melalui revitalisasi Rumasa sebagai ruang dialog kelompok. Di Desa Bangsring, dialog komunitas telah menjadi kekuatan utama sehingga strategi diarahkan pada pemeliharaan kualitas dialog melalui regenerasi kepemimpinan, keberlanjutan forum musyawarah, serta penguatan komunikasi kepemimpinan. Perbedaan posisi dukungan pemerintah, keputusan adopsi inovasi, dan modal sosial menunjukkan bahwa strategi komunikasi partisipatif perlu disusun secara adaptif sesuai dengan karakteristik sosial, kapasitas kelembagaan, dan tingkat perkembangan masyarakat agar mampu memperkuat keberlanjutan aksi kolektif.



IX PENUTUP

9.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi partisipatif dalam membangun aksi kolektif membentuk pola yang serupa pada dua pendekatan pembangunan yang berbeda, yaitu *government driven* di Desa Kawali dan *community driven* di Desa Bangsring. Dialog komunitas pada kedua desa berkembang melalui proses partisipatif dan deliberatif ketika membahas urusan operasional, meliputi identifikasi permasalahan, pertukaran pengalaman, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan budidaya dan konservasi, pengelolaan usaha bersama, kegiatan produksi, pemasaran, serta aktivitas ekonomi berbasis kelompok. Tingkat partisipasi masyarakat pada pembahasan urusan strategis menunjukkan pola yang berbeda. Pembahasan mengenai penetapan visi dan arah organisasi, pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan jejaring eksternal, pengambilan keputusan strategis, koordinasi lintas lembaga, serta penetapan kebijakan organisasi lebih banyak dijalankan oleh pemimpin kelompok, *local champion*, dan aktor inti yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi, sumber daya, serta proses pengambilan keputusan.

Pola yang serupa juga terlihat pada pelaksanaan aksi kolektif. Partisipasi masyarakat berkembang secara aktif pada tahapan operasional, seperti penerapan inovasi, pengelolaan usaha bersama, konservasi pesisir, rehabilitasi terumbu karang, pelayanan wisata bahari, kegiatan produksi, pemasaran, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Partisipasi pada tahapan evaluasi partisipatif, pengawasan kelembagaan, pengembangan jejaring, serta pengambilan keputusan strategis lebih banyak berlangsung melalui keterlibatan pengurus dan aktor inti. Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi akses dan kontrol terhadap tata kelola kelembagaan masih berpusat pada elit kelompok sehingga ruang partisipasi masyarakat berkembang lebih kuat pada pelaksanaan kegiatan operasional dibandingkan pada pengambilan keputusan strategis.

Perbedaan utama antara kedua desa terletak pada katalis yang membentuk dialog komunitas. Desa Kawali mengembangkan dialog melalui dukungan pemerintah yang menyediakan legitimasi, sumber daya, dan arah kebijakan sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi. Desa Bangsring mengembangkan dialog melalui komunikasi kepemimpinan yang membangun makna bersama, menyatukan visi konservasi, serta memperkuat koordinasi melalui norma dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *government driven* maupun *community driven* menghasilkan pola dialog komunitas dan aksi kolektif yang relatif serupa. Perbedaan kedua desa terletak pada aktor yang menginisiasi dan menggerakkan dialog, sedangkan mekanisme komunikasi partisipatif yang terbentuk menunjukkan pola yang konvergen dalam mendukung terbentuknya aksi kolektif.

9.2 Saran

Berdasarkan hasil IPMA, peningkatan kualitas dialog komunitas dan aksi kolektif di Desa Kawali dan Desa Bangsring perlu diarahkan pada penguatan faktor-faktor yang memiliki kontribusi tinggi terhadap keberhasilan

pembangunan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik pembentukan dialog dan aksi kolektif di Desa Kawali dan Desa Bangsring tidak memengaruhi peran dialog komunitas sebagai mekanisme utama yang menghubungkan berbagai faktor pembangunan dengan terbentuknya aksi kolektif masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan perlu difokuskan pada penguatan kualitas dialog komunitas, kepemimpinan partisipatif, modal sosial, dan kemandirian komunitas.

Pertama, peningkatan kualitas dialog komunitas perlu menjadi prioritas utama. Hasil IPMA menunjukkan bahwa beberapa tahapan dialog, seperti identifikasi masalah, klarifikasi persepsi, penilaian kondisi, penegasan kebutuhan, penyusunan alternatif solusi, serta penetapan tujuan dan rencana bersama masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, forum-forum dialog masyarakat perlu diarahkan tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolektif yang memungkinkan seluruh anggota berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap forum dialog perlu menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai rencana tindakan, pembagian peran, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme evaluasi sehingga proses dialog dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, pengembangan kepemimpinan partisipatif dan kaderisasi komunitas perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung dialog komunitas. Oleh karena itu, kapasitas ketua kelompok, pengurus organisasi masyarakat, dan tokoh lokal perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam kemampuan memfasilitasi musyawarah, membangun empati, mengelola perbedaan pendapat, dan menciptakan visi bersama. Selain itu, kaderisasi perlu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan pemuda, perempuan, dan anggota kelompok potensial agar keberlangsungan dialog dan aksi kolektif tidak bergantung pada satu atau beberapa tokoh tertentu.

Ketiga, penguatan modal sosial perlu terus dilakukan sebagai fondasi kerja sama masyarakat. Modal sosial yang terdiri atas norma, jaringan sosial, dan kepercayaan berperan penting dalam membangun komitmen kolektif dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Upaya penguatan modal sosial dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi pengelolaan organisasi, penyusunan aturan kelompok secara partisipatif, penguatan budaya gotong royong, serta pengembangan forum komunikasi lintas kelompok. Selain itu, perluasan jaringan kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perikanan lainnya penting dilakukan untuk memperluas akses terhadap informasi, teknologi, pasar, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha masyarakat.

Keempat, dukungan pemerintah dan kegiatan penyuluhan perlu diarahkan pada penguatan kemandirian komunitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri. Oleh karena itu, program pemerintah dan kegiatan penyuluhan perlu difokuskan pada

pengembangan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kemampuan kewirausahaan, serta pengembangan fasilitator lokal dan penyuluh swadaya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktor eksternal sekaligus memperkuat keberlanjutan pembangunan desa perikanan.

9.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena merupakan studi kasus, yakni kedua lokasi penelitian merupakan penerima program SF. Dalam hal ini, Desa Kawali merepresentasikan pendekatan *government driven* dan Desa Bangsring merepresentasikan pendekatan *community driven*. Temuan penelitian menggambarkan mekanisme komunikasi partisipatif pada masyarakat kelautan dan perikanan dalam dua konteks pembangunan tersebut sehingga generalisasinya perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik sosial, budaya, kelembagaan, kepemimpinan, dan lingkungan pembangunan di wilayah lain. Desain *cross-sectional* menggambarkan hubungan antarvariabel pada satu periode waktu sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika perkembangan dialog komunitas dan aksi kolektif dalam jangka panjang. Analisis penelitian berfokus pada konstruk dalam model CFSC, sedangkan faktor lain, seperti kepemimpinan adaptif, budaya organisasi, kapasitas kelembagaan, dinamika konflik, jejaring kemitraan, dan perubahan kebijakan pembangunan juga berpotensi memengaruhi mekanisme komunikasi partisipatif. Pengukuran variabel menggunakan persepsi anggota kelompok melalui kuesioner yang diperkuat melalui triangulasi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan analisis SEM-PLS untuk meningkatkan kelengkapan data dan ketepatan interpretasi.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah AA, Rahmawati D, Panigoro MA, Syukur RR, Khali J. 2021. Peran penyuluh pertanian terhadap meningkatkan partisipasi petani di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo. *Jurnal Agribisnis Universitas Negeri Gorontalo*. 5(2).
- Abdullah S, Sarwoprasodjo S, Hapsari DR. 2023. Participatory Communication to Strengthen Farmers' Empowerment and Adaptation in Facing the Impacts of Climate Change. *Habitat*. 34(3).
- Abramova I. 2019. Financial support for rural development: European experience. *Scientific Horizons*. 77(4):21-26. doi:10.33249/2663-2144-2019-77-4-21-26.
- Alakwe KO, Okpara N. 2022. Analysis of stakeholders' perception of the role of development communication: Disturbing tales from the Niger Delta. *Journal of Creative Communications*. 17(2):199-215. <https://doi.org/10.1177/09732586221084378>
- Alexander KA, Kelling I. 2024. Social sustainability in seafood systems: a rapid review. *Cambridge Prisms: Coastal Futures*. 2:e1. <https://doi.org/10.1017/cft.2023.31>
- Aminah S. 2016. The application of participatory communication in the implementation of small farmers empowerment program. *Jurnal Bina Praja*. 8(1):135-148.
- Anggraini O, Agus M. 2018. Penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal masyarakat pesisir perspektif gender di Kabupaten Bantul. *JSEP*. 11(2).
- Aniche AA, Bundy H, McKee KE. 2024. Agents for change: Developing transformative and adaptive leadership capacities among early-career extension professionals. *Journal of Leadership Education*. 21(1).
- Arnstein SR. 1969. A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*. 35:216-224. doi:10.1080/01944366908977225.
- Asia N, Sarwoprasodjo S, Gandasari D. 2018. Dialog dan aksi kolektif kelompok tani dalam program sertifikasi kakao di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 16(1):15-20.
- Asra A, Irawan P, Purwoto A. 2016. *Metode penelitian survei*. Bogor (ID): IN MEDIA.
- Auliah A, Prayitno G, Rini DA, Ismu, Adrianto D, Subagiyo A, Biloshkurska N, Ismaili H. 2024. The Role of Community Social Capital and Collective Action in the Development of Sustainable Tourism. *International Social Science Journal*.
- Azad MJ, Pritchard B. 2023. Bonding, bridging, linking social capital as mutually reinforcing elements in adaptive capacity development to flood hazard: Insights from rural Bangladesh. *Climate Risk Management*. 40:100498. doi:10.1016/j.crm.2023.100498.
- Bao DC, Eva. 2018. Catalysing social change in Ho Chi Minh City, Vietnam: Evaluating the LIN model of participatory community development. *Community Development Journal*. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsx058>
- Baptist RW. 2015. Measuring Predictors of Groupthink: Instrumen Development and Validation [tesis]. Illinois (US): Illinois State University, School of Communication.
- Bernados S, Ocampo L. 2024. Exploring the role of social capital in advancing climate change mitigation and disaster risk reduction. *Community Development*. 55(4):470-490. doi:10.1080/15575330.2023.2253316.

@ink cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Bordenave JD. 1976. Communication of Agricultural Innovations in Latin America: The Need for New Models. *Communication Research*. 3(2):135-154. <https://doi.org/10.1177/009365027600300203>
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2018. *Kecamatan Wonosari dalam Angka 2018*. Banyuwangi (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. 2018. *Kecamatan Kawali dalam Angka 2018*. Ciamis (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa). [diakses 14 April 2025]. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgzIzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2025. Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen. [diakses 14 April 2025].
- Chambon M, Wambiji N, Wandiga JN, Reyes-Gracia V, Ziveri P. 2024. "Men don't feel comfortable with successful female leaders": exploring participatory exclusion in community-based fisheries management, South Coast of Kenya. *Maritime Studies*. 24(3):1-15. <https://doi.org/10.1007/s40152-024-00390-0>
- Coogan D. 2022. Community-engaged rhetoric. *Review of Communication*. 20(2):128-134.
- Creswell JW, Creswell DJ. 2023. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Amerika Serikat: Sage Publication.
- Dale A, Newman L. 2010. Social capital: A necessary and sufficient condition for sustainable community development? *Community Development Journal*. 45(1):5-21. doi:10.1093/cdj/bsn028.
- Damayanti RA, Syarifuddin S. 2020, The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*. 30(5):1-11. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- DiPierro K, Lee H, Pain KJ, Durning SJ, Choi JJ. 2022. Groupthink among health professional teams in patient care: A scoping review. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. 28(5):762-770
- Djarmiko A. 2023. Komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 21(1):45-59.
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Figuerola ME, Kincaid DL, Rani M, Lewis G. 2002. *Communication for Social Change: An Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes*. New York: The Rockefeller Foundation & Johns Hopkins University Center for Communication Programs.
- Fishbein M, Ajzen I. 1975. *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*. Reading (US): Addison-Wesley Publishing Company.
- Freire P. 1970, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Fu JS, Zhang Y, Kwon O. 2020, Organizational and individual innovation decisions in an interorganizational system: social influence and decision-making authority. *Journal of Communication*. 70(5):651-676. <https://doi.org/10.1093/joc/jqaa023>.
- Gumilar I, et al. 2024. *Sustainability Analysis of Inland Fisheries under the Smart Fisheries Village Model in Kampung Nila, Kawali, Indonesia*. *Akuatika Indonesia*.

- Gustavsson M, Frangoudes K, Lindstrom L, Burgos MCA, Marcelia. 2021. Gender and blue justice in small-scale fisheries governance. *Marine Policy*. 123:104277. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104743>
- Handayani E, Garad A, Suyadi A, Tubastuvi N. 2023. Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*. 3:100089. doi:10.1016/j.wds.2023.100089.
- Hair JF, Hult GTM, Ringle CM, Sarstedt M. 2017. *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. 2nd ed. Thousand Oaks (US): Sage.
- Hariane R, Noer M, Ridwan E, Hasnah H. 2021. Build a strong agribusiness institution through collective action. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 741.
- Herjan D, Muksin NN. 2025. The effectiveness of village leadership communication in shaping community perception of local development. *International Journal of Research and Review*. 12(12). <https://doi.org/10.52403/ijrr.20251210>
- Ibba L, Larisu Z, Irwanto I, Joko J. 2024. The Role of Communication in Social Change: Promoting Societal Transformation. *MSJ: Majority Science Journal*. 2(4):47-57. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i4.244>
- Jalil A, Yesi Y, Sugiyanto S, Puspitaloka D, Purnomo H. 2021. The Role of Social Capital of Riau Women Farmer Groups in Building Collective Action for Tropical Peatland Restoration. *Forest and Society*. 5(2):341-355.
- Janis IL. 1972. *Victims of Groupthink Political Psychology*. Boston (US): Houghton Mifflin.
- Janis IL. 1982. *Groupthink: Psychology Studies of Policy Decisions and Fiascoes*. Edisi kedua. New York (US): Houghton Mifflin.
- Jason LA, Glenwick DS. 2016. *Handbook of Methodological Approaches To Community-Based Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. New York: Oxford University Press.
- Johnson NL, Kovarik C, Meinzen-Dick R, Njuki J, Quisumbing A. 2016. Gender, assets, and agricultural development: Lessons from eight projects. *World Development*. 83:295-311.
- Jones VN, Woolcock M. 2007. *Using Mixed Methods to Assess Social Capital in Low Income Countries: A Practical Guide*. United Kingdom: University of Manchester Press.
- Jordan B. 2023. *Collective Action: Tribes, Empires, Nation and Protest Movement*. New York: Routledge.
- Kim JS, Chung GH. 2017. Implementing innovations within organizations: A systematic review and research agenda. *Innovation: Organization & Management*. 19(3):372-399. doi:10.1080/14479338.2017.1335943.
- Khairunnisa NF, Saidah Z, Hapsari H, Wulandari E. 2021. Peran penyuluh pertanian terhadap tingkat produksi usahatani jagung. *Jurnal Penyuluhan*. 17(2):113-125. <https://doi.org/10.25015/17202133656>
- Khan S, Khan S. 2021. *Social Capital and Collective Action in Pakistani Rural Development*. London: Palgrave Macmillan.
- Khomsan A, Dharmawan AH, Saharuddin, Alfiasari, Syarief H, Sukandar D. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Obor.
- Kogen L. 2022. *Communicating for social change: A model of communicative power*. *International Communication Gazette*. 84(7-8):591-612. <https://doi.org/10.1177/17480485221104003>

- Kouzes JM, Posner BZ. 2002. *The leadership challenge*. Ed ke-3. San Francisco (US): Jossey-Bass.
- Kunarti S, Lestari S, Setyorini CT, Permadi I. 2024. Tourism development in Panembangan Village: commercialization of smart fisheries village (SFV) into a smart village that is worth selling. Dalam: Proceeding ICMA-SURE 2024: The 6th International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development; Purwokerto, Indonesia, 19-20 Nov 2024. Jenderal Soedirman University.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2014 tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2024. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 186 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desa Perikanan Cerdas/Smart Fisheries Village. Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kustiawan W, Fauziah NA, Br Sinaga HA, Oktavia I, Hafizah F, Shaliha F, Habib F. 2023. Konsep Komunikasi Partisipatif dalam Komunikasi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(2):4082-4086. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.6780>
- Latif A, Ilsan M, Rosada I. 2022. Hubungan peran penyuluh pertanian terhadap produktivitas petani padi (Studi Kasus Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru). *WIRATANI: Jurnal Ilmiah Agribisnis*. 5(1).
- Lewis D, Biggs S, Justice SE. 2022. Rural Mechanization for Equitable Development: Disarray, Disjuncture, and Disruption. *Development Policy Review*. 40(5). <https://doi.org/10.1111/dpr.12612>
- Li Y, Qin X, Sullivan A, Chi G, Lu Z, Pan W, Liu Y. 2023. Collective action improves elite-driven governance in rural development within China. *Humanities and Social Sciences Communications*. 10:600, <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02089-9>
- Lionberger HF, Gwin PH. 1982. *Communication Strategies: A Guide for Agricultural Change Agents*. Denville, Illinois: The Interstate Printers & Publisher, Inc.
- Mayfield J, Mayfield M. 2017. Leader talk and the creative spark: A motivating language model of creativity. *Journal of Creative Behavior*. 51(3):287-304.
- Martínez-Martínez PR, Ramos-Soto AL, Cruz-Domínguez E, Palacios-Pineda F, Valadez-Solana BD. 2025. Social capital and sustainable development in community contexts: Evidence from beekeepers in Southern Mexico. *Sustainability*. 17(24):11102. doi:10.3390/su172411102.
- Maxwell JC. 1930, *Developing The Leader Within You*. United States: Thomas Nelson Book.
- Medina LF. 2007. *A Unified Theory of Collective Action and Social Change*. Ann Arbor (US): The University of Michigan Press.
- Mikkola L. 2019. Leadership in the workplace. In: Workplace Communication. New York (US): Routledge. p 123-138. doi:10.4324/9780429196881-10.
- and Social Sciences*. 6(12):788-798. doi:10.6007/IJARBSS/v6-i12/2555.
- Muljono P. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bogor: IPB Press.
- Muslim A. 2017. Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*. 13(1).

- Narimawati U, Sarwono J, Affandi A, Priadana S. 2020. *Ragam Analisis dalam Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta (ID): Andi.
- Nasihuddin AA, Pamuji K, Supriyanto, Rosyadi S, Ahmad AA. 2020. The role of social capital in promoting sustainable rural development area in Banyumas Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 448(1):012067. doi:10.1088/1755-1315/448/1/012067.
- Nasution Z. 2009. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nikijuluw, VPH. (2022). *Blue economy dan masa depan ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Nuraini, Satria A, Wahyuni ES, Bengen DG. 2021. Strengthening marine ecotourism management's institutional performance in Raja Ampat, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*. 29(3):1809-1829.
- Nugraha AT, Prayitno G, Hasyim AW, Roziqin F. 2021. Social Capital, Collective Action, and the Development of Agritourism for Sustainable Agriculture in Rural Indonesia. *Evergreen*. 8(1):1-12.
- Nugraheni, IL, Pargito, P. 2025. Kebijakan berbasis partisipasi masyarakat untuk mitigasi bencana banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 15(1), 59-74. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp/v15i2.15020>
- Nugroho PC, Suherman A, Jayanto BB, Hernuryadin Y, Suroso W, Kurohman F. 2025. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, Pacitan, Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 17(2):91-104. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.17.2.2025>
- Nurcahyono O. 2017. *Pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Yogyakarta (ID): Deepublish.
- Nurida N, Evahelda, Sitorus R. 2024. Peran penyuluh pertanian dalam pendampingan petani milenial. *Jurnal Penyuluhan*. 20(1):84-95. <https://doi.org/10.25015/20202444448>
- Obiakor CC, Nyekwere O, Enyindah S. 2025. Participatory communication for sustainable community transformation in Abia State: A paradigm shift in development practice. *International Journal of English Language and Communication Studies*. 10(6):64-82. doi:10.56201/ijelcs.vol.10.no6.2025.pg64.82.
- Olson M. 1965. *The logic of collective action: Public goods and the theory of groups*. Cambridge (US): Harvard University Press.
- Oseni AL. 2024. Assessing the effectiveness of participatory communication and community development in Mpape community of Abuja, Nigeria. *Journal of Information Science Research*. 2(1):55-65.
- Ostrom E. 1990. Collective action and the evolution of social norms. *Journal of Economic Perspectives*. 14(3):137-158.
- Partelow S, Schlüter A, Manlosa AO, Nagel B, Paramita AO. 2022. Governing aquaculture commons. *Reviews in Aquaculture*. 14(2):729-750. <https://doi.org/10.1111/raq.12622>
- Poerwanto, W. 2025. Reorientasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir kelautan dan perikanan berkelanjutan. *Jurnal*

Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 15(2): 167-186. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp/v15i2.1915>

- Prestiana SM, Padmaningrum D, Sugihardjo S. 2023. Peran Penyuluh sebagai Agent of Change dalam Adopsi Inovasi Padi Rojolele Srinuk. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis)*. 8(3):176-185. <https://doi.org/10.37149/jia.v8i3.621>
- Puspita IJ, Suharjito D, Supriyanto B. 2023. Social Capital in Collective Action on Water Resources Management in Buleleng, Bali, Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*. 14(1).
- Puteri DH, Ismail K, Amrifo V, Yulikasari TE. 2023. Peran perempuan dalam industri perikanan dan peningkatan ekonomi rumah tangga (studi kasus: Kijang dan Pulau Dompok Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Pertanian dan Peternakan*. 1(1). doi:10.55080/agronimal.v1i1.180.
- Putnam RD, Leonardi R, Nanetti RY. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. United States: Princeton University Press.
- Rachmani ID, Sarwoprasodjo S, Muljono P, Pertamasari RB. 2025. Research trends in leadership communication using motivating language theory: A systematic literature review. *Jurnal Studi Komunikasi*. 9(2):449-464. doi:10.25139/jsk.v9i2.9676.
- Radiarta N. 2024. *Smart Fisheries Village (SFV) Book 2024*. Cetak Mei 2025. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. ISBN 978-623-6464-90-8.
- Rahadi DR. 2023. *Pengantar Partial Least Squares Structural Equation Model (PLS-SEM) 2023*. Tasikmalaya: Lentera Ilmu Madani.
- Ramirez R, Quarry W. 2019. *Communication for another development: Listening before telling*. Penang (MY): Southbound
- Rhayu S, Yakin N, Udin U. 2024. *Bibliometric analysis of groupthink in organization: Cases study in the world*. Multidisciplinary Reviews. 7(1):2024018. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024018>
- Ridhani M, Priyadharma D. 2023. Pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*. 8(2):115-128.
- Ringle CM, Sarstedt M. 2016. *Gain More Insight from Your PLS-SEM Results: The Importance-Performance Map Analysis*. Industrial Management & Data Systems. 116(9):1865–1886. <https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2015-0449>
- Rogers E, Kincaid DL. 1981. *Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Rogers EM. 1983. *Diffusion of Innovation*. 3rd ed. New York: Free Press.
- Rogers EM. 2003. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Free Press.
- Rhayu S, Yakin N, Udin U. 2024. *Bibliometric analysis of groupthink in organization: Cases study in the world*. Multidisciplinary Reviews. 7(1):2024018. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024018>
- Safira ME, Aliyah ND, Rodiyah SK, Nuraini R, Halizah SN. 2022. Fostering Pro-Environmental Learning through Family-Centered Education. *Journal of Social Science Studies*. 2(2):243-248.
- Sáenz-Royo C, Gracia-Lázaro C, Moreno Y. 2015. The role of the organization structure in the diffusion of innovations. *PLoS ONE*. 10(5):e0126076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126076>

- Salem DA, Foster-Fishman PG, Goodkind JR. 2002. The adoption of innovation in collective action organizations. *American Journal of Community Psychology*. 30(5):681-710, <https://doi.org/10.1023/A:1020267324084>
- Sarstedt M, Henseler J, Ringle CM. 2011. Multigroup analysis in partial least squares (PLS) path modeling: Alternative methods and empirical results. In: Sarstedt M, Schwaiger M, Taylor CR, editor. *Advances in International Marketing*. Vol. 22. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited. p. 195–218.
- Saveski M, Kooti F, Morelli Vitousek S, Diuk C, Bartlett B, Adamic LA. 2021. Social Catalysts: Characterizing People Who Spark Conversations Among Others. *Massachusetts Institute of Technology*. 5:1-20,
- Servaes J. 2008. *Communication for Development and Social Change*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Servaes J. 2020. *Handbook of Communication for Development and Social Change*. Singapore: Springer.
- Setyawan AA, Desembrianita E, Santoso MH, Syahril, Kalalo RR. 2025. Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. 4(1):1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Shehu A, Adebayo BD, Ahmed AA, Omidiji OQ. 2025. Participatory communication as a catalyst for community empowerment and sustainable development in selected rural areas in Nigeria. *International Journal of Dental Science and Clinical Research*. 1(2)
- Sofia F, Suryaningrum FL, Subekti S. 2022. Peran penyuluh pada proses adopsi inovasi petani dalam menunjang pembangunan pertanian. *AGRIBIOS: Jurnal Ilmiah*. 20(1):151-160,
- Sopian A, Krettiawan H, Haryadi J, Effendi I. 2024. Sistem pengelolaan akuakultur berkelanjutan berbasis Smart Fisheries Village (SFV). *Jurnal Salamata*. 6(1):30-37. <https://doi.org/10.15578/salamata.v6i1.13651>
- Soraya NN, Sarwoprasodjo S, Hermadi I. 2024. Leadership communication and implications for acceptance of the Go-Biz application by MSMEs employees (case study: Bogor District). *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*. 10(2):423-438. <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.10.2.423>
- Stogdill RM. 1950, Leadership, membership and organization. *Psychological Bulletin*. 47(1):1-14. <https://doi.org/10.1037/h0053857>
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suh NN, Nyiawung RA. 2023. Climate change dynamics and youth participation decisions in aquatic food systems: The case of the oyster sector in The Gambia, West Africa. *Marine Policy*. 156:105804. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105804>
- Sulaiman AI, Rosyadi S, Handoko W, Masrukin M, Putri DD, Wijayanti IKE, Faozanudin M. 2024. The importance of participatory communication in development planning deliberations for agritourism village enhancement. *Journal of Intercultural Communication*. 24(1):144–160. doi:10.36923/jicc.v24i1.246.
- Sumardjo MS, Hubeis AVS, Bintarti A, Sedyaningsih S, Rahman AS, Rusli Y. 2019. *Komunikasi Inovasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sundari RS, Umbara DS, Hiidayati R, Fitriadi BW. 2021. Peran penyuluh pertanian terhadap produksi padi sawah di Kabupaten

Tasikmalaya. *AGRIEKONOMIKA*. 10(1):1-

10, <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v10i1.9962>

Suyoto RS, Anggraini O. 2016. Partisipasi wanita nelayan dalam pengelolaan lingkungan wilayah pesisir Kabupaten Bantul. *Jurnal Media Wisata*. 14(2):470-482.

Taurista H, Choiriyah IU. 2024. Community participation in development planning is driven by leadership, communication, and education: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan didorong oleh kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*. 15(3). doi:10.21070/ijccd.v15i3.1080.

Triguna R, Suharno, Adhi AK. 2020, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Petani Pada Program Upaya Khusus Jagung Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*. 10(1):142-151.

Tufte T, Mefalopulos P. 2009. *A Practical Guide Participatory Communication*. Washington (US): The World Bank.

Turner NJ, Pullen E, Magalasi M, Haslett D, Tacchi J. 2022. Paralympic broadcasting in Sub-Saharan Africa: Sport, media and communication for social change. *Communication & Sport*. 10(5):1001-1015.

Olson M. 1965. *The Logic of Collective Action: Public Good and the Theory of Group*. Cambridge: Harvard University Press.

Utami AN, Mulyono SE. 2025. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*. 5(3):83-99. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.7594>

Utami GF, Pandjiatan NK. 2023. Peran pemimpin pada aksi kolektif kelompok miskin perkotaan selama pandemi Covid-19. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*. 7(1):136-148. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v7i1.1083>

[UU] Undang-Undang. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

[UU] Undang-Undang. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Violando WA, Hadi MI, Sawiji A, Ma'arif MC, Safitri NM, Maryono P, Robayanto R, Taufiq DTW, Azis A, Muhid A. 2023. Strengthening the Existence of Pesona Bahari Coastal Community Through Lobster Cultivation in the Pandemic Era. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 7(1):73-88. <https://doi.org/10.29062/engagement.v7i1.1374>

Wilkin KG, Tufte T, Obregon R. 2014. *The Handbook of Development Communication and Social Change*. Hoboken (US): John Wiley & Sons, Inc.

Wiyati EK, Damayanti N, Meliala YH. 2022. Communication activities and community participation in the development of the community action plan. *International Conference on Community Development (ICCD)*. 4(1):114-118.

Yuniarti N, Mulyasari G, Windirah N, Irnad, Trisusilo A. 2024. Keberlanjutan perikanan tangkap skala kecil di Kota Bengkulu. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. 16(2):171-187. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024>

Yanti F, Prastiwi H. 2024. Optimizing participatory communication in integrated village development. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*. 10(2):257-268.

- Yuanjaya P, Fajri P. 2020, The Collective Action of Urban Communities in Disaster Risk Reduction: A Case Study in Yogyakarta City. *IOP Conference Series: Earth Environ.* 488.
- Yusnita T, Agung S S, Saleh A. 2015. Peranan opinion leader dalam kelompok nelayan pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan.* 14(1).
<https://doi.org/10.46937/14201613557>
- Zhao G, Hui X, Zhao F, Feng L, Lu Y, Zhang Y. 2025. How does social capital facilitate community disaster resilience? A systematic review. *Frontiers in Environmental Science.* 12:1496813. doi:10.3389/fenvs.2024.1496813.
- Zhou L, de Vries WT. 2022. Collective action for the market-based reform of land element in China: The role of trust. *Land.* 11(6):926. doi:10.3390/land11060926.